

BUNGA RAMPAI

**NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING
PRODUK PERTANIAN**



REKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

2012

[Handwritten signature]

**BUNGA RAMPAI:
NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING
PRODUK PERTANIAN**

Team editor : Zulfiandri, Edwin Aldrianto, Zakiyan Anshori
Desain sampul : Ari Suryanto



BUNGA RAMPAI NTDS

© 2012 Zulfiandri - Edwin, Bogor, Jawa Barat

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from the author.



Bunga Rampai NTDS

Daftar Isi

PART I: PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN

PAB I	Kondisi Pertanian Indonesia	1
	1.1 Kondisi Umum Pembangunan Pertanian	1
PAB II	Kondisi Umum Pembangunan PPHP	8
	2.1 Pasca Panen	10
	2.2 Pengolahan Hasil Pertanian	12
	2.3 Mutu Standardisasi	14
	2.4. Pemasaran Domestik	16
	2.5. Pemasaran Internasional	22
PAB III	Potensi, Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	25
	3.1 Potensi	25
	3.2 Permasalahan	26
	3.3 Tantangan	33
PAB IV	Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian	37
	4.1 Pengertian	37
	4.2 Peningkatan Nilai Tambah melalui Agribisnis Hilir	38
	4.3 Inovasi Teknologi Pengolahan Masih Terkendala	43
	4.4 Kemitraan	44
	4.5 Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah	46

	4.6 Alih Teknologi dan Permodalan	47
BAB V	Peningkatan Daya Saing Pertanian	49
	5.1 Pengertian	49
	5.2 Pendekatan Kluster Pengembangan Agroindustri	52
BAB VI	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	57
	6.1 Latar Belakang	57
	6.2 Acuan Normatif	59
	6.3 Istilah dan Definisi	60
	6.4 Mutu dan Standardisasi	63
 BAHAGIAN II : KILAS PERJALANAN, PERAN DAN FUNGSI STRATEGIS PPHP		
BAB VII.	Arah Pembangunan Pertanian Ke Depan	69
	7.1. Pergeseran Pradigma Pembangunan Pertanian	69
	7.2. Arah Pembangunan Pertanian Jangka Panjang 2005-2025	71
BAB VIII.	Sekilas Perjalanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian	75
	8.1. Perjalanan Organisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	75
	8.2. Peraturan Yang Terkait	78
BAB IX.	Peranan Pengolahan Hasil Pertanian (Industri Primer)	83
	9.1. Kondisi Saat Ini	83
	9.2. Pembelajaran Dari Negara Lain	86
	9.2..Struktur Organisasi dan Tupoksi	88
BAB X.	Peran di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	91
	10.1. Penanganan Pasca Panen	91

10.2. Pengolahan Hasil Pertanian	92
10.3. Mutu dan Standardisasi	93
10.4. Pemasaran Domestik	94
10.5. Pemasaran Internasional	95

BAB XI. Analisa SWOT Peran Strategis PPHP	99
11.1. Kekuatan	99
11.2. Kelemahan	100
11.3. Peluang	101
11.4. Ancaman	103
10.5. Kesimpulan dan Saran	104

BAHAGIAN III : RAGAM KEGIATAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN

BAB XII. Strategi Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian	107
12.1. Konsep Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing	107
12.2. Skala Teknis dan Ekonomis	109
12.3. Strategi, Kebijakan, dan Program	110
12.4. Program Aksi	112

BAB XIII Program Two In One: Kegiatan Akselerasi Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing	115
13.1. Pendahuluan	115
13.2. Pola dan Konsep Pengembangan	116

BAB XIV Konsep Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Pada Agribisnis Persusuan Indonesia	123
14.1 Kondisi Persusuan di Indonesia	123
14.2 Kebijakan Pengembangan Persusuan Perspektif PPHP	128
14.3 Program Peningkatan Produksi dan Konsumsi Susu	130



BAB XV	Pengembangan Agroindustri Aneka Tepung	133
	15.1. Potensi Pengembangan Agroindustri Aneka Tepung	133
	15.2. Strategi Pengembangan	136
BAB XVI	Profil Pemetaan Investasi Tanaman Pangan	141
	16.1. Pendahuluan	141
	16.2. Profil Pemetaan Investasi Padi	146
	16.3. Profil Pemetaan Investasi Jagung	177
	16.4. Kelembagaan Penanaman Modal dan Pembiayaan	185
	16.5. Peluang Pengembangan	186
	16.6. Fasilitas (Insentif) dan Harmonisasi Kebijakan	193
	16.7. Rencana Aksi	195
	16.8. Profil Pemetaan Invetasi Ubi Kayu	202
	16.9. Kelembagaan Penanaman Modal dan Pembiayaan	214
	16.10. Peluang Pengembangan	216
	16.11. Fasilitas (Insentif) dan Harmonisasi Kebijakan	224
	16.12. Rencana Aksi	226
	Daftar Pustaka	233



Kata Pengantar

Pertanian bukan hanya dipandang sebagai proses budidaya semata, namun lebih jauh dari itu, juga pemberian nilai tambah pada agar mampu berdaya saing pada produk hasil pertanian tersebut. Artinya, pertanian dipandang sebagai proses pemberian nilai tambah yang dimulai dari *on-farm* sampai ke *off-farm*.

Buku Bunga Rampai: Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian merupakan kumpulan tulisan dari berbagai sumber, baik penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen PPHP) maupun tulisan-tulisan lain yang dipublikasikan oleh Ditjen PPHP, seperti sambutan oleh Direktur Jenderal PPHP maupun tulisan-tulisan lepas lainnya. Memang menggambarkan secara lengkap proses pemberian nilai tambah dan daya saing serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ditjen PPHP tidaklah mudah dan bisa dilakukan pada sebuah buku kecil ini.

Namun harapan kami, masyarakat umum serta seluruh penggiat pertanian yang berkepentingan dalam pembangunan pertanian dapat memperoleh gambaran, proses yang dilakukan oleh Ditjen PPHP dalam memberikan nilai tambah produk pertanian agar berdaya saing di pasar, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani sebagai pelaku utama proses pertanian.

Buku ini berisikan tentang pentingnya peranan Ditjen PPHP dan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PPHP dalam pemberian nilai tambah dan daya saing produk pertanian baik yang menjadi tupoksi langsung Ditjen PPHP maupun kegiatan untuk mendukung Direktorat Jenderal lainnya di lingkup Kementerian Pertanian.

Akhir kata kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan mampu memberikan sumbangan positif dalam pembangunan pertanian secara umum dan pembangunan industri pertanian perdesaan secara lebih positif dan lebih cepat lagi.

Jakarta, September 2012



BAHAGIAN I: PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN



1

Kondisi Pertanian Indonesia

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu peran strategis pertanian merupakan tugas yang tidak ringan, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar yaitu 230.632.700 orang (tahun 2009) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25 persen per tahun (tahun 2009) dan tingkat konsumsi beras 102,2 kg/kapita/tahun (tahun 2009). Berdasarkan kondisi tersebut, selama lima tahun ke depan, Kementerian Pertanian menempatkan beras,

jagung, kedelai, daging sapi dan gula sebagai lima komoditas pangan utama.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan utama tersebut, target Kementerian Pertanian selama 2010-2014 adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Pencapaian swasembada ditujukan untuk kedelai, daging sapi dan gula dengan target sasaran produksi adalah kedelai 2,70 juta ton, daging sapi 0,55 juta ton, dan gula 5,7 juta ton pada tahun 2014. Karena padi dan jagung sudah pada posisi swasembada, maka target pencapaian selama 2010-2014 adalah swasembada berkelanjutan dengan sasaran produksi padi sebesar 75,7 juta ton GKG dan jagung 29 juta ton jagung pipilan kering pada tahun 2014. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk keperluan peningkatan ekspor, dikembangkan juga komoditas pertanian lain yang mencakup telur, susu, buah-buahan, sayuran, minyak goreng, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, tanaman hias dan biofarmaka. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan terhadap jenis dan kualitas produk juga semakin meningkat dan beragam. Oleh karena itu, selain upaya untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan menjadi sangat penting, terutama untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu. Selama 2010-2014, konsumsi beras ditargetkan turun 1,5 persen/tahun yang diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani



Gambar 1.1 Area Persawahan

buah-buahan dan sayuran. Dengan penurunan konsumsi beras 1,5 persen/tahun tersebut maka tingkat konsumsi beras Indonesia yang saat ini cukup tinggi yaitu 102,2 kg/kapita/tahun (tahun 2009) diupayakan turun menjadi 95 kg/kapita/tahun pada tahun 2014. Dalam rangka diversifikasi pangan, sekaligus juga diupayakan tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dicerminkan oleh meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari 86,4 pada tahun 2010 menjadi 93,3 pada tahun 2014. Pembangunan pertanian lima tahun ke depan juga dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Indonesia, maka dibutuhkan efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk. Dengan peningkatan daya saing, disertai upaya promosi dan pemasaran, maka ditargetkan surplus neraca perdagangan meningkat dari US\$ 24,33 milyar pada tahun 2010 menjadi US\$ 54,51 milyar pada tahun 2014.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya



Gambar 1.2 Sayuran Organik



Gambar 1.3 Petani Kakao

ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, belum optimalnya system perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian.

Di samping itu, pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil, mengupayakan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan, menciptakan kebijakan harga (*pricing policies*) yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus, memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatas

pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global, memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus, memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan, menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif, dan memenuhi kebutuhan pangan, serta mengembangkan komoditas unggulan hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

Dalam upaya mencapai target dan sasaran seperti diuraikan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi selama ini serta menjawab tantangan di masa depan, maka strategi yang akan dilakukan Kementerian Pertanian untuk 5 tahun mendatang adalah Revitalisasi Pertanian yang dibingkai dalam 7 GEMA Revitalisasi, yaitu (1) Revitalisasi Lahan, (2) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan, (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana, (4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia, (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani; (6) Revitalisasi Kelembagaan Petani dan (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.

Begitu kompleksnya permasalahan, tantangan, dan besarnya lingkup pekerjaan yang harus dilakukan dalam pembangunan pertanian, maka jelas bahwa pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan hanya oleh Kementerian Pertanian. Pembangunan pertanian memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan yang mencakup sektor atau kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota, dunia usaha, perbankan, lembaga-lembaga pembiayaan bukan bank, organisasi profesi dan masyarakat, serta peran aktif dari semua petani, pekebun dan peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

1.1 Kondisi Umum Pembangunan Pertanian

Selama periode 2005-2009, pembangunan pertanian terus mencatat berbagai keberhasilan. Salah satu yang patut disyukuri dan membanggakan adalah Indonesia berhasil mencapai swasembada beras sejak tahun 2007, serta swasembada jagung dan gula konsumsi rumah tangga di tahun 2008. Mantapnya produksi beras yang merupakan pangan utama dalam negerisangat membantu menstabilkan harga pangan, sehingga Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan yang melanda banyak negara pada periode tersebut. Pada saat terjadinya krisis keuangan global, harga pangan internasional meningkat terutama di negara-negara produsen, sedangkan harga komoditas pangan dalam negeri lebih stabil

jikadibandingkan dengan harga internasional.

Selain produksi padi yang meningkat, bahkan telah mencapai swasembada selama periode pembangunan lima tahun terakhir pembangunan pertanian juga mencatat sejumlah keberhasilan seperti: peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian, ketersediaan energi dan protein, membaiknya skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan semakin banyaknya hasil penelitian dan pengembang pertanian. Selama tahun 2005-2008, rata-rata pertumbuhan produksi yang cukup tinggi setiap tahunnya ditunjukkan oleh gula (3,82 persen), kelapa sawi (18,92 persen), kakao (2,47 persen), jambu mete (5,30 persen), tembakau (3,42 persen), daging sapi (3,95 persen), daging ayam buras (4,01 persen), susu segar (8,30 persen), mangga (14,22 persen), durian (8,77 persen), bawang merah (5,22 persen) dan anggrek (28,79 persen). Ketersediaan energi dan protein per tatur meningkat sebesar 2,6 persen untuk energi dan 2,3 persen untuk protein. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) meningkat dari 74 pada tahun 2006 menjadi 81,5 pada tahun 2008. Di bidang penelitian dan pengembangan, telah dihasilkan 191 varietas unggul padi, 46 varietas unggul jagung, dan 64 varietas unggul kedelai, serta inovasi pola tanam, pemupukan, bioteknologi, Pengendalian Hama Terpadu (PHT), alat mesin pertanian, dan lain sebagainya. Pada tataran makro pembangunan pertanian juga memperlihatkan kinerja yang menggembirakan PDB sektor pertanian terus tumbuh dan mencapai 5,16 persen di tahun 2008. Pada tahun 2008, neraca perdagangan pertanian mencatatkan surplus sebesar US\$ 17,97 milyar yang telah melampaui target yang ditetapkan sebesar US\$ 13,1 milyar.

Pertanian masih merupakan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja terbesar. Menurut Laporan BPS (Berita Resmi Statistik No. 33/05/Th.XIV, 5 Mei 2011) menyerap 42,47 juta orang atau 38,16% dari total angkatan kerja nasional sebesar 111,28 juta orang. Dibandingkan sektor perdagangan sebesar 23,71 juta orang atau 20,88% disusul sektor industri 13,71 juta orang atau 12,32%. Sebagai sektor yang terbanyak menyerap tenaga kerja maka tentu saja membutuhkan perhatian yang sangat serius.

Dalam kaitannya dengan penyedia lapangan usaha maka diperlukan investasi yang memadai di sektor pertanian. Namun, investasi di sektor pertanian selama ini dianggap kurang memberikan keuntungan baik bagi target pendapatan pemerintah maupun swasta domestik dan asing, sehingga investasi untuk sekto

ertanian setiap tahun mengalami penurunan. Padahal investasi atau penanaman modal sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maupun perluasan tenaga kerja.

Jika dilihat dari posisi kredit pada posisi Januari 2012, terlihat investasi perbankan di sektor pertanian (digabung peternakan, perikanan dan kehutanan) masih pada posisi tiga besar yakni 13,76%, setelah Industri Pengolahan (17%), dan Perdagangan, Hotel dan Restoran (16,75%).

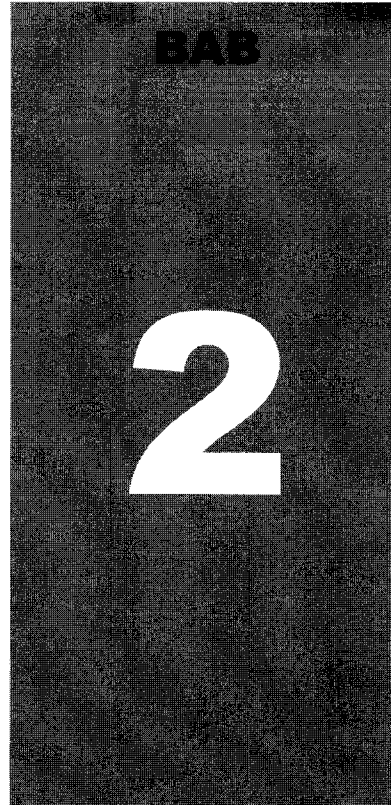
Tabel 1.1 Posisi Kredit Investasi Perbankan Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2010-2012 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2010		2011		2012 *)	
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	52,269	15.0%	64,445	13.9%	64,870	13.76%
Pertambangan dan Penggalian	20,403	5.9%	32,025	6.9%	32,958	6.99%
Industri Pengolahan	58,193	16.7%	77,723	16.8%	80,197	17.01%
Elektrik, Gas dan Air Bersih	24,995	7.2%	35,458	7.7%	35,454	7.52%
Konstruksi	17,395	5.0%	17,989	3.9%	18,330	3.89%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	56,245	16.2%	75,289	16.3%	78,981	16.75%
Pengangkutan dan Komunikasi	44,286	12.7%	57,009	12.3%	58,831	12.48%
Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	35,446	10.2%	51,828	11.2%	56,552	11.99%
Jasa-jasa	38,394	11.0%	51,525	11.1%	45,300	9.61%
Tidak Lapangan Usaha		0.0%	14	0.0%	14	0.00%
Jumlah	347,626	100.0%	463,307	100.0%	471,473	100.0%

Sumber : BPS (2011)

Bila sektor pertanian dapat dianggap memiliki peran yang cukup besar sebagai penyelamat perekonomian Indonesia ketika terjadi krisis, sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar untuk pengembangan sektor pertanian ke arah yang lebih maju.





Kondisi Umum Pembangunan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pada era Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2005-2009, pertanian telah memperlihatkan berbagai capaian pembangunan yang cukup mengembirakan. Dalam kurun waktu tersebut, krisis pangan menjadi salah satu dampak yang sangat dikhawatirkan oleh banyak negara selama krisis ekonomi unia. Indonesia mampu terhindar dari krisis pangan tersebut bahkan berhasil erswasembada beras. Ini semua merupakan hasil kerja keras para petani,

penyuluh dan pelaku usaha di bidang pertanian bersama dengan pemerintah pusat dan daerah. Sumbangan Ditjen PPHP dalam capaian pembangunan pertanian khususnya ketahanan pangan adalah menurunnya tingkat kehilangan hasil (losse yang cukup signifikan khususnya dalam penanganan pasca panen padi dari 20,5 % pada tahun 1998 menjadi 10,82 % pada tahun 2008 (BPS, 2008). Hasil tersebut diyakini merupakan dampak dari fasilitasi peralatan pasca panen hasil pertanian terutama padi yang diberikan dalam kurun waktu tahun 2006 - 2008. Untuk komoditas non padi (jagung, kedelai, hasil perkebunan, hortikultura) diyakini juga terjadi penurunan kehilangan hasil yang cukup signifikan meskipun tidak diukur sebagaimana halnya padi mengingat fasilitasi peralatan penanganan pasca panen dan pengolahan juga diberikan untuk komoditas-komoditas tersebut.

Secara keseluruhan kondisi pembangunan PPHP tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

2.1. Pasca Panen

Pasca panen hasil pertanian adalah semua kegiatan yang dilakukan sejak proses pemanenan hasil pertanian sampai dengan proses yang menghasilkan produk setengah jadi (produk antara/ *intermediate*). Kegiatan pasca panen meliputi panen, pengumpulan, perontokan/ pemipilan/ pengupasan, pencucian, penyortiran, pengkelasan (*grading*), pengangkutan, pengeringan (*drying*), penggilingan dan atur penepungan, pengemasan dan penyimpanan.

Kondisi penanganan pasca panen komoditas pertanian sampai tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tanaman Pangan; untuk komoditas tanaman pangan telah terjadi penurunan kehilangan hasil padi yang cukup signifikan sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Untuk komoditi jagung selain penurunan losses juga terjadi peningkatan kualitas (penurunan kadar aflatoxin) dengan tersedianya fasilitas sarana pemipilan, pengeringan dan penyimpanan (corn sheller, lantai jemur, drum dan silo) khususnya di kabupaten sentra jagung. Untuk kedelai dan ubikayu juga telah difasilitasi dengan peralatan pasca panen.

Fasilitasi pengembangan kelembagaan petani (tanaman pangan) telah dilakukan dengan Pengembangan Kecamatan Pasca Panen. Pengembangan Kecamatan Pasca Panen merupakan upaya strategis dalam rangka rekayasa sosial dan teknologi penanganan pasca panen di daerah. Dalam periode 2005-2009 telah dibentuk

Kecamatan Pasca Panen di kabupaten-kabupaten sentra padi.

Hortikultura; untuk komoditas hortikultura diperkirakan juga terjadi penurunan losses dan perbaikan mutu karena adanya fasilitasi sarana penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura. Sarana dan peralatan yang diberikan untuk itu seperti gudang penyimpanan bawang merah, *grading dan packaging* unit untuk buah dan sayuran serta peralatan pengolahan seperti *vacuum drying, vacuum sealer, vacuum frying, juicer*, mesin pembungkus, alat press tutup gelas plastik dll.

Perkebunan; tingkat kehilangan pasca panen produk perkebunan belum diukur sebagaimana pada komoditas padi. Namun demikian dapat diperkirakan terjadi penurunan kehilangan hasil dan perbaikan mutu hasil perkebunan karena adanya fasilitasi/bantuan sarana penanganan pasca panen yang telah diberikan. Pada kegiatan perbaikan mutu hasil perkebunan, permasalahan yang dihadapi adalah bahwa petani masih melakukan usahanya secara individu, belum dalam skala usaha yang lebih besar misalnya dalam suatu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sehingga jumlah (volume) produk berkualitas baik yang dihasilkan petani relatif masih sedikit atau belum memenuhi skala ekonomi. Akibat dari hal tersebut pembeli sulit memberikan harga yang pantas untuk produk berkualitas yang jumlahnya sedikit. Permasalahan tersebut terjadi pada komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, karet dan lada.

Fasilitasi peralatan pasca panen hasil perkebunan yang pernah diberikan pada periode 2005-2009 antara lain adalah alat pasca panen kakao, kopi, karet, mete, minyak atsiri, gambir, dan alat pengolahan kelapa terpadu, kacang mete, gula kelapa dan tebu. Bantuan peralatan yang diberikan kepada petani (kelompok tani) tersebut masih banyak belum dimanfaatkan yang disebabkan berbagai hal antara lain ketersediaan listrik yang tidak mencukupi, spesifikasi alat yang kurang sesuai dengan kebutuhan setempat, kurangnya kemampuan petani mengoperasikan dan merawat alat, serta kurangnya modal usaha petani/kelompok tani untuk membeli bahan baku.

Peternakan; tingkat kehilangan pascapanen produk peternakan belum diukur sebagaimana pada padi, namun diperkirakan terjadi penurunan kehilangan hasil dan perbaikan mutu hasil peternakan karena adanya fasilitasi sarana penanganan pasca panen yang telah diberikan. Dari tahun 2006 hingga tahun 2008, Ditjen PPHP Deptan telah melaksanakan kegiatan fasilitasi perbaikan/ penyempurnaan sarana RPH/TPH di 70 Kabupaten/Kota di 41 Provinsi dan sarana RPU di 66

Kabupaten/Kota di 33 Provinsi (lihat tabel berikut). Selanjutnya mulai tahun 2009 kegiatan pengembangan dan pembangunan RPH dan RPU diserahkan ke Ditjen Peternakan. Kegiatan Pengembangan Pengolahan Pakan Skala Kecil (P3SK) yang bertujuan meningkatkan kemampuan kemandirian peternak dalam penyediaan pakan bagi ternaknya baru dimulai pada tahun 2007. Kegiatan yang telah dilakukan adalah fasilitasi pengadaan Sarana P3SK di 14 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi. Sedangkan pada TA 2008 telah disebarkan Sarana P3SK di 40 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi.

2.2. Pengolahan Hasil Pertanian

Pada masa awal pembangunan pertanian, masalah utama yang dihadapi adalah kesulitan dan kekurangan produksi serta penawaran komoditas-komoditas pertanian. Dalam kondisi tersebut, prioritas pembangunan pertanian diarahkan kepada peningkatan produksi dan pemenuhan serta pencapaian kecukupan bahan pangan terutama beras. Namun, peningkatan produksi saja ternyata sulit untuk meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Oleh karena itu, sejak tahun 1994 paradigma pembangunan pertanian mengalami perubahan dari pendekatan produksi menjadi pembangunan pertanian berorientasi agribisnis.

Permasalahan mendasar bangsa ternyata sebagian besar berada pada petani dan masyarakat pedesaan yaitu kemiskinan, keterbelakangan, ketidakberdayaan dan pengangguran. Karenanya, tawaran untuk pemecahan masalah mendasar bangsa tersebut yaitu dengan mengupayakan *profit center* berada pada petani. Prinsip tersebut seyogyanya merupakan paradigma pembangunan pertanian pada saat ini dan di masa depan yang harus dicermati dan menjadi acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pembangunan agribisnis selama ini belum sepenuhnya menempatkan *profit center* pada petani. Petani hanya menerima bagian terkecil dari suatu sistem usaha agribisnis. Karena itu, salah satu implementasi sistem tersebut adalah mengembangkan Agroindustri Pedesaan dengan pendekatan paradigma baru seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Bidang-bidang agroindustri meliputi industri yang terintegrasi dengan usaha budidaya pertanian termasuk pemanfaatan limbah/produk sampingan pertanian, industri primer, dan industri yang dilakukan oleh petani di pedesaan.

Sampai saat ini komoditas ekspor hasil pertanian masih didominasi produk



Gambar 2.1 Peternakan Sapi

primer, walaupun ekspor komoditi olahan hasil pertanian sudah semakin besar. Dengan mengekspor produk primer, maka nilai tambah yang terbesar akan berada di luar negeri. Apabila Indonesia mampu mengekspor produk olahannya maka nilai tambah terbesarnya akan berada di dalam negeri.

Dalam kerangka pengembangan agroindustri, maka pengembangan agroindustri perdesaan merupakan pilihan strategis dalam meningkatkan pendapatan dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Selama ini masyarakat perdesaan cenderung menjual produk dalam bentuk mentah (primer), karena lokasi industri umumnya berada di daerah urban (semi-urban). Akibatnya, nilai tambah produk pertanian lebih banyak mengalir ke daerah urban, hal mana termasuk sebagai penyebab terjadinya urbanisasi.

Faktor-faktor internal yang dominan mempengaruhi kemampuan petani dalam meningkatkan kesejahteraannya antara lain adalah masalah penguasaan sumberdaya, terutama: (1). Sumberdaya alam, (2). Teknologi, khususnya teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, (3). Modal dan (4). Informasi, khususnya informasi pasar, akses kepada teknologi dan modal. Sedangkan faktor eksternal antara lain menyangkut: (1). System pembinaan, (2). Kebijakan ekonomi makro, (3). Kebijakan khusus, seperti kebijakan perdagangan menyangkut komoditas

tertentu, dan (4). Perubahan lingkungan strategis yang potensial menjadi tantangan dan menimbulkan permasalahan bagi petani.

Dari permasalahan yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa peluang petani di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraannya adalah melalui peningkatan nilai tambah hasil pertaniannya. Hal ini dapat terlaksana apabila petani di perdesaan dapat menguasai proses pengolahan dan pemasaran komoditas yang diusahakan, atau penerapan sistem agribisnis secara utuh.

Untuk mengembangkan kegiatan pengolahan hasil pertanian yang terfokus dan terintegrasi, maka pada tahun 2005 telah dibangun suatu model program terpadu yang dinamakan Pengembangan Komoditas Strategis Nasional (PKSN) antara lain pengembangan susu sapi, jeruk dan ubi kayu. Dalam pelaksanaannya dilakukan kerjasama dengan institusi yang kompeten diantaranya dengan perguruan tinggi dan dinas terkait.

Unit Pengolahan Hasil (UPH) adalah industri pengolahan hasil pertanian skala kecil dan rumah tangga yang berbasis di perdesaan. Unit Pengolahan Hasil (UPH) Pertanian merupakan program terobosan dalam mempercepat penumbuhan pendapatan masyarakat petani dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sebagai program terobosan, UPH dikembangkan dengan mengacu pada skala usaha yang ekonomis, sehingga fungsi pelayanan dapat berkembang ke arah peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi untuk memasok permintaan pasar.

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 telah berhasil dikembangkan UPH Tanaman Pangan sebanyak 51 UPH di 51 kabupaten, UPH Hortikultura sebanyak 67 UPH, UPH Perkebunan sebanyak 40 UPH, dan UPH peternakan sebanyak 90 UPH Pakan Ternak dan pengelolaan lingkungan (pengolahan kompos dan biogas) sebanyak 2598 unit dengan komoditi unggulan kelapa sawit (768 UPH), kelapa (kopra 7.188 UPH, minyak kelapa 1.200 UPH), karet (crumb rubber 567 UPH, sheet 1.479 UPH, lateks pekat 69 UPH), kakao (841 UPH), kopi (2.604 UPH), mete (82 UPH), tebu (207 UPH), dan teh (teh hijau 1.002 UPH, teh hitam 291 UPH).

2.3. Mutu dan Standarisasi

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi pengembangan mutu melalui penerapan jaminan mutu dalam sistem standarisasi pertanian yang telah dilakukan

ampai saat ini masih belum optimal. Pengembangan dan penerapan sistem jaminan mutu serta sistem standarisasi di sektor pertanian mengakibatkan kondisi usaha pertanian kurang tangguh sehingga kurang dapat berkompetisi untuk menangkal tekanan yang terjadi baik dalam perdagangan domestik maupun di rancah internasional. Hal ini diperkuat oleh system perdagangan dalam negeri yang memberikan penghargaan produk bermutu dan

Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang pertanian hingga tahun 2009 berjumlah 452 SNI terdiri dari standar produk segar dan olahan primer, standar metoda pengujian benih, bibit, alat mesin pertanian dan sistem. Banyaknya standar bidang pertanian tersebut merupakan modal dasar yang kuat untuk mengembangkan sistem jaminan mutu kearah sistem jaminan mutu terpadu. Standar tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman dalam penentuan batas kritis (*critical point*). Sistem jaminan mutu terpadu untuk pangan yang diakui secara internasional adalah system HACCP (*Hazzard Analysis Critical Control Points*). Sedangkan untuk non pangan adalah system mutu ISO 9000-2000 serta system manajemen lainnya (ISO 7025, ISO 17020, ISO 17011, Pangan Organik). Sistem Jaminan Mutu Terpadu menuntut penerapan *Good Practices* yang meliputi *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Good Distribution Practices* (GDP).

Jabatan fungsional pengawas mutu telah ditetapkan dan telah dilakukan sosialisasi serta rekrutmen aparat fungsional pengawas mutu mulai tahun 2006. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang diberi tugas sebagai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) jabatan fungsional mutu di tingkat pusat sampai tahun 2009 telah melatih dan meluluskan pengawas mutu sebanyak 217 orang terdiri dari tenaga pengawas mutu trampil 68 orang dan tenaga pengawas mutu ahli 149 orang. Idealnya jumlah pengawas mutu diseluruh Indonesia adalah sebanyak 5.000 orang. Pengawas mutu mempunyai tugas yang sangat strategis dalam mengamankan produk pertanian agar aman dikonsumsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan telah memberi kewenangan kepada Menteri Pertanian untuk mengatur, membina dan/atau mengawasi kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan segar. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsinya maka Ditjen PPHP telah ditetapkan sebagai otoritas yang berwenang menangani keamanan pangan produk segar pertanian

di Indonesia atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) Sedangkan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut di atas (mengatur, membina dan/atau mengawasi kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan segar) yang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah (Gubernur). Selama ini, Ketua OKKPD yang ditunjuk oleh Gubernur sebagian adalah Kepala Dinas Pertanian dan sebagian Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi. Sampai tahun 2009, perkembangan dalam pembentukan dan aktivitas OKKPD di seluruh Indonesia (sampai dengan bulan Juni 2009) adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukan Sosialisasi OKKPD di 33 propinsi.
- 2) Telah dibentuk 27 OKKPD dengan Keputusan Peraturan Gubernur.
- 3) Sudah diverifikasi 6 (Jateng, DIY, Jatim, Kalsel, Sulsel, dan Bangka Belitung) OKKPD oleh OKKP –Pusat
- 4) Sudah ada 1 OKKPD yang melakukan sertifikasi (DIY).

Agar PP No. 28 tahun 2004 dapat dilaksanakan, maka OKKPD di semua propinsi harus sudah terbentuk, diverifikasi dan melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.4. Pemasaran Domestik

2.4.1. Prasarana/Sarana Pasar dan Pengembangan Kawasan Hortikultura

Saat ini beberapa prasarana/sarana pasar seperti Terminal Sub terminal Agribisnis (TA/STA), Pasar Tani, Pasar Lelang, dan Pasar Ternak/Hewan telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik atas inisiatif masyarakat maupun atas fasilitasi pemerintah (Kementerian Pertanian). Namun hanya sebagian kecil (umumnya yang dibangun atas inisiatif masyarakat) yang sudah berfungsi dalam mendukung kelancaran pemasaran komoditi pertanian. Prasarana/sarana pasar, sistem/jaringan informasi yang dibangun, dan kebijakan stabilisasi pemasaran yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Sub Terminal dan Terminal Agribisnis (STA dan TA)

Pada akhir tahun 2009 sudah dibangun 58 STA dan

TA, tersebar di beberapa kabupaten di hampir seluruh propinsi Indonesia, namun demikian yang sudah berfungsi sebagai agen pasar (umumnya masih terbatas transaksi jual-beli) komoditas pertanian baru sebanyak 25 STA (41,66 %). Beberapa permasalahan mendasar yang mengakibatkan belum berfungsinya prasaranan/sarana tersebut antara lain adalah lokasi prasarana/sarana yang kurang strategis, SDM pengelola, kelembagaan diantara pelaku usaha yang belum tumbuh/diberdayakan dalam mendukung beroperasinya suatu sarana pasar secara efektif.

2) Pasar Tani

Pasar tani muncul atas prakarsa Ditjen PPHP yang melihat bahwa pemasaran hasil pertanian yang ada saat ini belum menemukan sistem pemasaran yang terbaik khususnya yang menguntungkan bagi petani. Dalam sistem pemasaran yang ada, petani memiliki peluang yang rendah dalam meraih pangsa pasar serta terdapat selisih harga yang besar antara harga di tingkat petani dan yang dibayar konsumen. Pasar tani merupakan sarana untuk mendekatkan petani (produsen) kepada pembeli (konsumen). Dengan demikian keberadaan pasar tani diharapkan dapat memperpendek rantai pemasaran dan menekan biaya-biaya transaksi sehingga margin keuntungan petani bisa ditingkatkan. Pasar tani telah diuji coba pertama kali di Kantor Pusat Kementerian Pertanian pada tahun 2007 dan telah berjalan dengan baik hingga saat ini. Pada tahun 2007 juga telah dilakukan ujicoba pasar tani di kawasan Monas Jakarta Pusat dan telah berjalan beberapa saat, namun kemudian berhenti karena terhalang oleh masalah perijinan. Untuk tahun-tahun selanjutnya diharapkan kegiatan ini dapat dikembangkan di daerah. Sampai dengan tahun 2009 telah difasilitasi pembangunan pasar tani di 16 propinsi di 32 lokasi.

3) Pasar Ternak dan Pasar Lelang

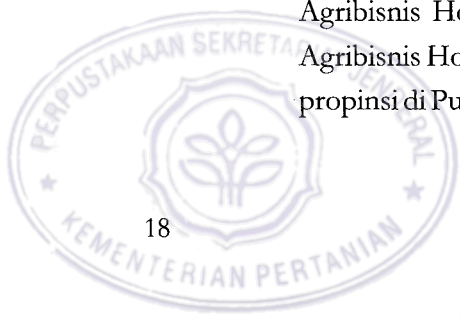
Keberadaan pasar ternak yang umumnya tumbuh dan berkembang atas inisiatif masyarakat, kondisinya masih tradisional.

Fasilitasi pemerintah untuk perbaikannya masih sangat terbatas karena sumber dana yang terbatas. Sementara itu pasar lelang komoditi pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan akses pasar petani juga belum tumbuh dan berperan secara optimal seperti yang diharapkan karena pada umumnya yang mendapat manfaat langsung hanyalah para pedagang pengumpul dan pedagang besar sedangkan petani produsen karena lemahnya kelembagaan petar belum mampu memanfaatkannya. Sampai dengan tahun 2009 telah difasilitasi sarana dan rehabilitasi pasar ternak di kabupaten dan pasar lelang di kabupaten.

4) Kawasan Pengembangan Hortikultura

Di tengah kekhawatiran munculnya disinkronisasi pembangunan ekonomi antar daerah akibat pelaksanaan undang-undang otonomi daerah maka pembangunan agribisnis hortikultura yang dilakukan dengan pendekatan kawasan yang melibatkan sentra produksi dan sentra pemasaran sebagai basis kegiatan merupakan langkah strategis. Pendekatan kawasan agribisnis sangat diperlukan untuk menghindari fluktuasi harga akibat disinkronisasi produksi antar daerah sentra produksi yang selanjutnya dapat memberikan dampak luas bagi perkembangan agribisnis daerah yang bersangkutan.

Forum Kerjasama Kawasan Hortikultura adalah salah satu model pengembangan agribisnis di bidang hortikultura yang berbasis kawasan yang mencakup beberapa propinsi di Indonesia. Forum Kerjasama Kawasan Hortikultura dibentuk berdasarkan potensi di masing-masing kawasan, yaitu potensi sebagai kawasan sentra produsen maupun sebagai sentra konsumen. Pendekatan kawasan agribisnis sangat diperlukan untuk menghindari fluktuasi harga akibat disinkronisasi produksi antara daerah sentra produksi yang selanjutnya dapat memberikan dampak luas bagi perkembangan agribisnis daerah yang bersangkutan. Forum Kerjasama Kawasan Agribisnis Hortikultura yang telah terbentuk adalah: (1) Kawasan Agribisnis Hortikultura Sumatera (KAHS) yang mencakup propinsi propinsi di Pulau Sumatera kecuali Lampung; (2) Kawasan Agribisnis



Hortikultura Krakatau yang mencakup daerah/Propinsi DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Barat; serta (3) Kawasan Agribisnis Hortikultura Jabalsukanusa yang mencakup daerah/Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Propinsi di pulau Kalimantan kecuali Kalimantan Barat, Propinsi-Propinsi di Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Untuk meningkatkan peran Forsama Kahorti, kawasan sentra dan pelaku pemasaran perlu dibina secara terpadu dengan melibatkan semua pelaku usaha agribisnis, sehingga mampu meningkatkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif wilayah. Sampai dengan tahun 2009 telah difasilitasi forum kerjasama Kahorti di 8 provinsi untuk 10 komoditas.

2.4.2. Jaringan Informasi Pasar dan Kebijakan Stabilisasi Harga

1) Jaringan dan Informasi Pasar

Informasi pasar sangat diperlukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam pergeseran paradigma dari orientasi produksi ke orientasi pasar. Informasi pasar merupakan sarana penunjang agar signal pasar menjadi dasar bagi penentuan jenis produk yang akan dihasilkan oleh petani. Tersedianya sistem informasi pasar akan menjembatani *supply* di sentra produksi dan *demand* di sentra pasar (konsumen). Oleh karena itu pola pengembangan informasi pasar secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan.

Pengembangan Sistem Informasi Pasar Agribisnis (Singosari) melalui jaringan internet memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terkait. Singosari merupakan salah satu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi internet berbasis Web yang telah dikembangkan oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang menyajikan informasi secara lengkap berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran beberapa rumpun komoditas pilihan. Sistem informasi yang berjalan saat ini, masih menghadapi hambatan dalam mendapatkan input/informasi terkini (up to date) khususnya di tingkat produsen sebagai akibat dari keterbatasan

kemampuan SDM Pelayanan Informasi Pasar (PIP) di daerah.

Hingga tahun 2009, telah dibangun jaringan PIP di 10 kabupaten dengan 16 komoditi pertanian yang dimonitor harganya: yakni: gabah/beras, ubukayu, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, jeruk siam, kakao, karet, kopi, kelapa, daging ayam broiler telur ayam ras, susu, pakan ternak dan daging sapi. Pembinaan yang telah dilakukan terhadap SDM pengelola PIP adalah berupa pelatihan PIP dan Analisa Pasar bagi 150 orang petugas. Juga telah dilakukan fasilitasi *hardware* dan *software* (komputer dan programnya) untuk input data harga melalui SMS.

2) Stabilisasi Harga

Dalam hal stabilisasi harga, kebijakan yang telah diterapkan antara lain adalah:

a. Kebijakan Harga Pokok Pemerintah (HPP)

Kebijakan HPP untuk gabah/beras telah diberlakukan secara nasional. Sasaran kebijakan HPP gabah/beras ini adalah untuk mempertahankan harga gabah/beras di atas biaya produksi gabah/beras oleh petani; apabila harga di bawah HPP maka pemerintah melalui Bulog akan membeli gabah petani dengan harga sama dengan HPP. Namun demikian karena keterbatasan dana maka kemampuan Bulog membeli gabah petani juga terbatas, sehingga kebijakan ini kurang efektif.

Untuk jagung tidak berlaku Harga Minimum Regional (HMR) secara nasional. Propinsi Gorontalo adalah propinsi yang menetapkan HMR untuk jagung melalui SK Gubernur. Pemerintah Propinsi Gorontalo akan membeli jagung petani apabila harganya jatuh di bawah HMR -nya. Kebijakan propinsi Gorontalo ini efektif mempertahankan harga jagung di tingkat yang menguntungkan petani. Itu terbukti karena hingga saat ini harga jagung setempat tidak pernah berada di bawah HMR nya.

b. Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Dengan Peraturan Menteri Pertanian

Kebijakan Penetapan harga TBS ini telah berlaku sejak tahun 1998 (SK Menhutbun) dan terakhir telah direvisi dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 395 tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Kebun. Tujuan penetapan harga TBS Kelapa sawit ini adalah untuk memberikan jaminan harga TBS kelapa sawit produksi kebun yang wajar serta menghindari adanya persaingan tidak sehat di antara Pabrik Kelapa Sawit. Kebijakan ini telah membantu pekebun dalam memperoleh harga yang layak bagi TBS yang dihasilkannya. Namun mengingat banyaknya dinamika di daerah khususnya permasalahan rendemen sehingga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395 tahun 2005 ini telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 tahun 2010.

3) Kebijakan Fiskal

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Kebijakan PPN untuk komoditi pertanian sebaiknya diterapkan hanya untuk barang jadi hasil olahan pertanian. Untuk produk primer pertanian sebaiknya PPN ditiadakan guna merangsang berkembangnya agribisnis dan agroindustri dalam negeri.

b. Pajak Ekspor;

Mengenai pajak ekspor (PE) hasil pertanian diupayakan seminimal mungkin tanpa mengganggu proses penyediaan bahan baku industri dalam negeri. Besarnya pajak ekspor hasil pertanian mengikuti peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan besarnya pajak ekspor atas dasar harga komoditas tertentu di pasar internasional. Sebagai contoh pajak ekspor untuk CPO pernah turun dari 3 % menjadi 1,5 % pada waktu yang lalu (pada harga CPO di pasar internasional sekitar 600 US dollar per metric ton). Tetapi akhir-akhir ini meningkat menjadi sekitar 20 % dikarenakan meningkatnya harga CPO di pasaran dunia hingga 1200

dolar AS per metric ton. Namun kondisi paling akhir (akhir tahun 2008) harga CPO di pasar internasional jatuh kembali pada tingkat yang sangat rendah sehingga perlu dilakukan penyesuaian pajak eksportnya.

5.2. Pemasaran Internasional

Hal yang menggembirakan dari data empat tahun terakhir (2005-2008) devisa perdagangan dari produk pertanian semakin membaik, hal ini menggambarkan dari segi nilai, mutu dan kuantitas produk ekspor Indonesia di pasar dunia semakin membaik. Jika dilihat per subsektor, ternyata subsektor perkebunan merupakan penyumbang 94 persen terhadap total devisa yang diperoleh dari kegiatan ekspor produk pertanian di tahun 2007 yang mencapai US\$ 19.964,870 juta. Sementara pada tahun 2008 devisa dari sub sector perkebunan meningkat menjadi US \$ 24.461,145 juta dan pada tahun 2009 menurun menjadi US \$. 18.498,093 juta hal itu kemungkinan dikarenakan melemahnya perdagangan internasional sebagai dampak krisis ekonomi global. Sedangkan sub sektor lainnya yaitu hortikultura tanaman pangan dan peternakan jauh ketinggalan dibanding perkebunan. Komposisi ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa hingga saat ini produk perkebunan masih menjadi primadona ekspor produk pertanian Indonesia. Produk utama yang menjadi andalan ekspor ini antara lain minyak sawit, karet, kakao, dan kopi.

Perkembangan Ekspor Impor; berdasarkan analisa ekspor-impor produk pertanian (segar dan olahan) tahun 2003-2008, diketahui bahwa secara umum nilai ekspor tersebut mengalami peningkatan sebesar 28,5 persen per tahun. Sementara itu nilai impornya juga meningkat lebih besar yakni 49,95 persen per tahun. Ekspor produk pertanian tahun 2003 bernilai US\$ 7,536 milyar, dan terus meningkat hingga pada tahun 2007 mencapai US\$ 21,257 milyar. Sedangkan nilai impor tahun 2003 US \$ 4.54 milyar meningkat hingga US \$ 8,597 milyar pada tahun 2007, US \$ 9,594 milyar tahun 2008 dan sedikit menurun pada tahun 2009 yakni US \$ 8,4957 milyar.

Kebijakan yang telah dilaksanakan; untuk mencapai target-target tersebut maka kebijakan utama yang telah dilakukan adalah membuka akses pasar seluas-luasnya melalui negosiasi, promosi dan kerjasama pemasaran baik di tingkat global regional maupun bilateral. Di tingkat regional dilaksanakan kesepakatan ASEAN-KOREA, sedangkan di tingkat bilateral akan tercapai penerapan IJEPA secara

kondusif. Beberapa kesepakatan yang sedang intensif dibahas adalah ASEAN-ANZ serta bilateral Indonesia-India yang diharapkan disepakati pada akhir tahun 2009. Untuk beberapa komoditi yang sangat potensial untuk diekspor namun kinerja ekspornya belum maksimal akan dilakukan kegiatan fasilitasi percepatan ekspor seperti untuk mangga, manggis dan tanaman hias.



3

Potensi, Permasalahan Dan Tantangan Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian

3.1 Potensi

1) Keragaman Budaya

Indonesia negara kepulauan memiliki ragam budaya, citarasa, dan komoditi unggulan dengan berbagai jenis olahan yang akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat.

2) Nilai tambah dan Pangsa Pasar

Produk agroindustri memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang sangat besar sehingga kemajuan di bidang agroindustri dapat membuka peluang investasi serta mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional secara keseluruhan.

3) Sebagai Penarik Kemajuan Sektor Lain

Memiliki keterkaitan yang besar ke hulu, on-farm maupun ke hili (*forward and backward linkages*), sehingga mampu menarik kemajuan sektor-sektor lainnya.

4) Kesadaran Konsumen Domestik

Meningkatnya kesadaran masyarakat (prevalensi konsumen) terhadap kualitas dan keamanan pangan.

5) Produsen Utama

Indonesia merupakan produsen utama dunia beberapa komoditas pertanian antara lain: sawit, karet, kakao, kopi, teh, kelapa, lada dan beras.

6) Tenaga Kerja

Tenaga kerja di sektor pertanian yang sangat besar (40 juta) yang bisa menopang agroindustri.

7) Daya Beli Masyarakat Dunia

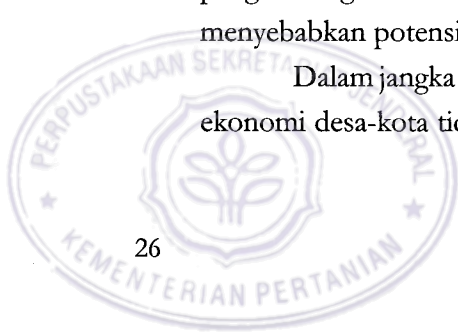
Permintaan produk agroindustri meningkat sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dunia (*Income Elastic Demand*).

3.2 Permasalahan

1) Lambatnya Proses Industrialisasi Perdesaan

Proses industrialisasi perdesaan sangat lambat. Hal ini terlihat antara lain dari semakin senjangnya ekonomi desa-kota. Dualisme ekonomi desa-kota telah mengakibatkan kota menjadi pusat segala-galanya dan ekonomi perdesaan hanyalah pendukung ekonomi perkotaan. Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan kebijakan di masa lalu yang lebih mendorong pengembangan industri yang kurang berbasis pada bahan baku lokal menyebabkan potensi yang ada kurang dapat dioptimalkan.

Dalam jangka panjang apabila industrialisasi perdesaan dan dualisme ekonomi desa-kota tidak dapat diatasi maka dapat dipastikan akan muncul



masalah lain yang lebih rumit. Urbanisasi besar-besaran, rusaknya kultur asli bangsa seperti gotong royong dan kekeluargaan, kriminalitas yang meningkat serta yang tidak kalah pentingnya semakin senjangnya pendapatan dalam masyarakat. Masyarakat kaya pemilik modal akan semakin kaya sementara penduduk miskin semakin bertambah besar.

2) Keterbatasan Informasi dan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil

Ke depan daya saing suatu komoditas akan ditentukan oleh muatan teknologi dalam komoditas tertentu dan kemampuan dalam merespon preferensi konsumen. Untuk itu perlu dikembangkan produk-produk pertanian yang sesuai dengan preferensi konsumen. Saat ini, pelaku usaha khususnya petani pengolah masih belum optimal dalam penguasaan teknologi pengolahan hasil pertanian, karena selama ini konsentrasi lebih pada teknologi budidaya. Pada akhir tahun 2014 diharapkan penguasaan teknologi pengolahan hasil pertanian para pelaku usaha sudah cukup optimal untuk mendukung kemampuan produksi dalam merespon preferensi konsumen.

Penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian saat ini masih belum merata di masyarakat pertanian, hal ini disebabkan antara lain karena penyebaran informasi tentang teknologi pengolahan tersebut masih belum dilakukan secara intensif. Perhatian pemerintah terhadap peningkatan nilai tambah produk pertanian di perdesaan selama ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan upaya peningkatan produksi hasil pertanian. Sehingga perkembangan penanganan pengolahan hasil hingga dewasa ini masih berjalan lambat dan masih belum sesuai dengan harapan.

Perkecualian terjadi pada komoditi tanaman pangan. Teknologi pasca panen dan pengolahan untuk tanaman pangan khususnya padi dan jagung telah cukup banyak diintrodusir. Bantuan sarana dan peralatan pasca panen baik yang mekanis ataupun semi mekanis cukup banyak diberikan kepada Gapoktan/Poktan dan pengolah. Sabit bergerigi, terpal, thresher (pedal dan power thresher) adalah sarana pasca panen yang telah diberikan kepada Gapoktan/ Poktan disentra-sentra padi dan jagung yang dapat memberikan dampak bagi penurunan kehilangan pasca panen padi dan

jagung yang sangat signifikan serta peningkatan kualitas jagung.

Selain itu juga diberikan bantuan penggilingan padi (RMU) kepada Gapoktan untuk memperbaiki serta meningkatkan rendemen penggilingan padi. Sedangkan untuk komoditas perkebunan dan hortikultura sarana dan peralatan pasca panen dan pengolahan yang diberikan masih belum tepat sasaran baik dari segi jenis yang dibutuhkan maupun jumlahnya. Dampak yang terlihat antara lain mutu hasil olahan yang masih rendah tingkat efisiensi hasil yang masih rendah, nilai jual yang kurang kompetitif dan penampakan hasil (keragaan hasil) yang belum memuaskan (terutama masalah pengemasan, pewarnaan, pengawetan dan pelabelan) serta lemahnya pencitraan “*brand image*”.

Lambatnya penyerapan maupun penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil tersebut berimplikasi pada industri perdesaan yang kurang berkembang antara lain disebabkan oleh faktor teknis, sosial maupun ekonomi sebagai berikut:

a. Permasalahan Teknis

Dari segi teknis beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain :

- Tingkat pengetahuan dan kesadaran petani akan pentingnya penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan serta penerapan sistem jaminan mutu hasil masih sangat terbatas.
- Kurangnya tenaga yang terampil (*Technical Skill*) dalam mengoperasikan alat dan mesin pasca panen dan pengolahan.
- Dukungan perbengkelan dalam perbaikan, perawatan dan penyediaan suku cadang alat mesin masih rendah karena kemampuan permodalan bengkel alsintan masih lemah dan kesulitan dalam memperoleh permodalan.
- Introduksi beberapa teknologi belum sesuai dengan kebutuhan petani dan belum bersifat lokal spesifik.
- Belum cukup memadainya infrastruktur seperti jalan yang memadai sehingga menyulitkan petani/kelompok dalam memasarkan produk olahannya.
- Penyebaran alsin pasca panen dan pengolahan masih terbatas.
- Belum cukup tersedianya rumah kemas “*packing house*”.
- Kurangnya tenaga pembina yang terampil dalam bidang pasca panen dan pengolahan.



panen dan pengolahan dibanding tenaga pembina pada kegiatan-kegiatan pra panen.

b. Permasalahan Sosial

Dari segi sosial beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain:

- Introduksi teknologi pasca panen dan pengolahan pada daerah-daerah yang padat penduduknya ada kecenderungan menimbulkan gesekan/friksi sosial.
- Kebiasaan petani dalam melakukan kegiatan pasca panen dan pengolahan secara tradisional menyulitkan dalam penerapan teknologi yang baik dan benar dalam skala luas.
- Daerah-daerah tertentu yang mempunyai budaya pasca panen dan pengolahan hasil yang teknologinya diterima secara turun temurun, sehingga mereka sering mempunyai sifat tertutup terhadap introduksi teknologi.
- Terbatasnya kemampuan akses informasi masyarakat tentang teknologi pasca panen dan pengolahan.
- Masih rendahnya pendidikan/pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian dan pelaku usaha pada umumnya.

c. Permasalahan Ekonomi

Dari segi ekonomi beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain:

- Daya beli petani terhadap teknologi pasca panen dan pengolahan rendah, sehingga permintaan alsin juga relatif rendah.
- Harga alsin pasca panen dan pengolahan relatif tinggi sehingga kurang mampu dimiliki.
- Belum tersedianya skim kredit khusus atau skim pembiayaan alternatif untuk pengadaan alsin untuk usaha pasca panen dan pengolahan hasil.

3) Kurangnya Pembiayaan Usaha Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Tani

Sebagian besar usaha pertanian bergerak dengan memanfaatkan dana masyarakat sendiri yang sangat terbatas dan relatif kecil. Hal ini tentu disebabkan karena sebagian besar petani yang menggerakkan usaha pertanian adalah golongan penduduk yang miskin. Implikasinya karena

investasi yang sangat minim, output dan pertumbuhan yang dihasilkan juga rendah, akibatnya peningkatan pendapatan yang diharapkan juga tidak akan signifikan. Kondisi ini sungguh ironis bila dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang sebagian besar sumber pendanaan usaha dibiayai oleh perbankan yang dananya bersumber dari masyarakat luas. Masalah aksesibilitas petani dan pelaku agribisnis pada sumber-sumber permodalan adalah masalah klasik yang di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya terpecahkan.

Masalah aksesibilitas ini seringkali terkendala oleh masalah ketiadaan jaminan/agunan, banyak dan luasnya nasabah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan perbankan dan tidak adanya bantuan dan bimbingan teknis yang diberikan. Oleh karena itu diperlukan upaya terobosan untuk mengatasi masalah tersebut. Terbukanya akses petani kepada sumber permodalan dan kemampuannya memanfaatkan permodalan tersebut dengan dukungan dari perbankan sendiri, pemerintah dan LSM adalah bagian strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat tani.

4) Iklim investasi di sektor agroindustri yang tidak menarik

Investasi di sektor pertanian selama ini dianggap kurang memberikan keuntungan baik bagi swasta domestik dan asing, sehingga investasi untuk sektor pertanian setiap tahunnya mengalami penurunan. Padahal investasi atau penanaman modal sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maupun perluasan tenaga kerja. Demikian halnya dengan fasilitas pendukung seperti infrastruktur pendukung pertanian yang termasuk dalam sektor jasa-jasa lainnya, padahal seperti yang diketahui, sektor pertanian sangat berperan sebagai katup penyelamat perekonomian Indonesia ketika terjadi krisis.

5) Permasalahan Harga, Inefisiensi Pemasaran dan Sistem Pemasaran yang Belum Adil

Fluktuasi permintaan dan penawaran produk pertanian dunia juga berakibat pada fluktuasi harga produk pertanian yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekurangan pasokan pada musim tertentu atau kelebihan pasokan pada musim panen raya. Untuk beberapa produk

pertanian tertentu menurunnya daya saing di pasar internasional karena faktor harga. Hal ini disebabkan tingginya inefisiensi di semua subsistem dalam rangkaian sub-sistem agribisnis. Inefisiensi tersebut terjadi mulai dari pengadaan sarana produksi, budidaya, pengolahan panen dan pasca panen serta biaya transportasi. Namun demikian apabila ditelaah lebih jauh inefisiensi pemasaran menempati peringkat tertinggi. Hal ini terkait erat dengan masalah infrastruktur pascapanen yang masih lemah dan kelembagaan pemasaran yang belum cukup efektif.

Inefisiensi pemasaran yang dicerminkan dengan panjangnya rantai pemasaran berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang memadai seperti : ketersediaan informasi, sarana transportasi dan jalan desa. Sistem pemasaran yang tidak adil terkait dengan keterbatasan permodalan yang menyebabkan petani banyak terjebak dalam sistem ijon yang melemahkan posisi tawar mereka. Disamping itu, sarana pasar bagi petani dan kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga seringkali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen. Kondisi ini diperburuk dengan membanjirnya produk impor di pasar domestik sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan, sehingga hanya beras dan gula yang mendapat perlindungan harga dari pemerintah.

6) Permasalahan Pemasaran Produk Pertanian Di Pasar Domestik Seperti Lemahnya Akses Pasar, Fluktuasi Harga Yang Seringkali Terjadi dan Lemahnya Informasi Pasar.

Pada umumnya para petani belum terbiasa melakukan penanganan produk yang mengarah kepada peningkatan mutu dan nilai tambah. Hasil usahatani yang diperjual belikan hanya diolah sampai tahap pengeringan, tanpa memperhatikan proses pengolahan yang bermutu, seperti melakukan pengkelasan (*grading*), pembersihan (*sortation*) dan pengemasan (*packing*) yang baik. Konsekuensi dari lemahnya pengelolaan mutu hasil pada penanganan produk ini mengakibatkan lemahnya posisi rebut tawar (*bargaining position*) dalam memasarkan hasil produksi. Sementara itu peningkatan kualitas pendidikan dan pendapatan masyarakat menuntut adanya peningkatan kualitas dari produk yang akan dikonsumsi.

- **Akses Pasar**

Produk-produk primer yang dihasilkan umumnya dipasarkan melalui pedagang perantara yang telah menguasai jaringan pasar secara keseluruhan. Para pedagang perantara ini begitu kuat posisi tawarnya; sehingga sangat berperan dalam penentuan harga, yang pada akhirnya mereka lah yang memperoleh margin keuntungan terbesar dari harga yang dibayar konsumen, sementara resiko yang mereka pikul lebih kecil daripada petani. Hal ini disebabkan antara lain terbatasnya sarana dan prasarana pasar serta lemahnya kelembagaan pemasaran ditingkat petani.

- **Fluktuasi Harga**

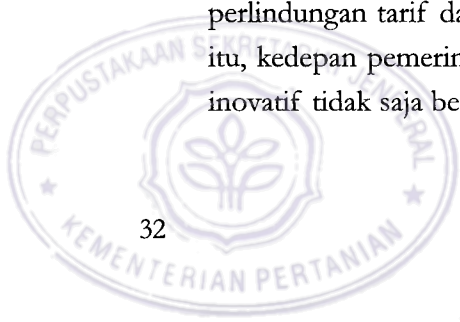
Komoditi pertanian umumnya bersifat musiman sehingga menyebabkan adanya fluktuasi produksi dan harga. Skala produksi yang kecil dan lokasi yang terpencar dengan hasil produksi yang relatif kecil menyebabkan terjadinya in-efisiensi dalam pengangkutan dan pemasaran. Kondisi tersebut menyebabkan ketidak-sesuaian antara permintaan dan pasokan, yang pada akhirnya mengakibatkan tingginya fluktuasi harga.

- **Informasi Harga dan Produk**

Kendala utama lainnya di bidang pemasaran pertanian rakyat adalah keterbatasan petani dalam perolehan informasi menyangkut harga, teknologi, permodalan, dan informasi mutu dan hasil produk yang dibutuhkan pasar. Keterbatasan itu menyebabkan lemahnya posisi tawar petani dalam perencanaan produk dan penetapan harga produk yang dihasilkan, yang akhirnya cenderung ditetapkan oleh pedagang pengumpul.

7) Permasalahan Liberalisasi Pasar Global dan Ketidakadilan Perdagangan.

Petani Indonesia saat ini menghadapi pasar persaingan yang tidak adil dengan petani dari negara lain yang dengan mudah mendapatkan perlindungan tarif dan subsidi langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, kedepan pemerintah akan mencari instrumen kebijakan perlindungan inovatif tidak saja berupa tarif tetapi juga perlindungan non tarif maupun



dukungan domestik lainnya dalam rangka memperkuat daya saing produk pertanian, namun diakhir tahun 2025 semua jenis proteksi sudah tidak ada lagi.

Selain hal di atas, pembentukan ekonomi kawasan seperti *North American Free Trade Area* (NAFTA), *European Union* (EU), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), ASEAN- China, dan yang lebih luas lagi *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) perlu mendapat perhatian karena akan dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi baru yang bukan lagi dalam hubungan antar negara namun dalam cakupan yang lebih luas lagi antar kawasan/regional. Ketimpangan antar kawasan ini dapat terjadi karena adanya proses pematangan kawasan ekonomi yang berbeda satu dengan lainnya. Salah satu kawasan ekonomi yang diperkirakan akan sangat kuat adalah Uni Eropa (*European Union*). Kawasan ini sudah mencapai suatu tahapan penyatuan mata uang, yaitu suatu tahapan yang paling maju dalam implementasi integrasi ekonomi. Kondisi tersebut akan semakin menyulitkan ekspor produk pertanian Indonesia dan negara-negara lain di luar Eropa, karena sudah pasti akan mendapat perlakuan yang berbeda dengan negara-negara yang berada di kawasan yang sama. Untuk menghadapi masalah ini, dalam jangka panjang Indonesia harus mulai mengembangkan produk pertanian olahan dan mengutamakan pangsa pasar dalam negeri yang potensinya juga sangat besar.

8) Permasalahan Sanitari dan Phytosanitari (SPS).

Sebuah contoh permasalahan SPS yang menarik bahwa Amerika Serikat memberikan penalti dalam bentuk diskon/reduksi harga secara otomatis kepada produk asal Indonesia untuk komoditas-komoditas kakao, lada, udang dan jamur dengan alasan antara lain terkontaminasi serangga, salmonella, logam berat dan antibiotik. Dalam hal ini Indonesia tidak bisa mengadu ke Komisi SPS WTO karena AS bisa membuktikan secara ilmiah dan Indonesia memang belum bisa mengatasinya.

Jepang menolak masuknya beberapa buah-buahan Indonesia seperti pisang dan beberapa jenis buah-buahan lainnya dengan alasan lalat buah. Dalam hal ini Indonesia tidak mengajukan protes ke Komisi SPS WTO karena kenyataannya memang terjadi di Indonesia dan sejauh ini

belum mampu mengatasinya. Selain itu, Jepang juga menolak masuknya pucuk tebu asal Indonesia dengan alasan penyakit mulut dan kuku (PMK). Untuk kasus ini Indonesia mengadukannya ke Komisi SPS WTO karena Indonesia dalam daftar OIE merupakan salah satu negara yang dinyatakan bebas PMK. Taiwan belakangan ini telah menerapkan SPS di mana paprika kita dan buah lainnya ditolak masuk Taiwan karena alasan Indonesia belum bebas lalat buah tertentu.

9) Permasalahan Technical Barriers to Trade (TBT).

Hampir serupa dengan perjanjian Sanitary & Phytosanitary (SPS) adalah TBT (*Technical Barriers to Trade*). Perjanjian ini mengatur standarisasi baik yang bersifat *mandatory* (wajib) maupun yang bersifat *voluntary* yang mencakup karakteristik produk; metode dan proses produk; terminologi dan simbol; serta persyaratan kemasan (*packaging*) dan label (*labeling*) suatu produk. Ketentuan ini ditetapkan untuk memberikan jaminan bagi kualitas suatu produk ekspor, memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan hidup. Perjanjian TBT ini mewajibkan para anggotanya untuk menggunakan standar internasional sebagai dasar penetapan standar, seperti ISO dan lainnya.

Untuk mencegah terjadinya penolakan (*claim*) atas komoditi ekspor yang sangat merugikan itu, diperlukan upaya peningkatan mutu yang ditopang dengan sistem pembinaan mutu dan dikembangkan secara terus-menerus. Untuk itu, pembinaan mutu terhadap komoditas ekspor unggulan, perlu dilakukan secara menyeluruh dari tingkat produsen pertanian sampai tingkat eksportir, terutama dalam menindaklanjuti kesepakatan EP (*Economic Partnership Agreement*).

10) Permasalahan Tarif

Ekspor CPO Indonesia ke negara India mengalami diskriminasi tarif yaitu adanya perbedaan penetapan tarif yang cukup besar antara minyak nabati atau *vegetable oil* yang berasal dari Indonesia dan yang berasal dari Amerika. Sementara itu tarif bea masuk impor komoditi pertanian sudah sangat rendah, bahkan untuk beberapa komoditi seperti buah-buahan, palawija, produk ternak, bea masuk yang rendah menyebabkan

banjirnya produk impor di dalam negeri dan mengancam kelangsungan produksi petani di dalam negeri.

Perjuangan Indonesia di forum WTO untuk melindungi produk-produk dalam negeri yang menyangkut isu pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan dan pembangunan masyarakat perdesaan, masih belum mencapai hasil yang diinginkan.

.3 Tantangan

Pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian menghadapi berbagai tantangan seperti:

1. Perubahan lingkungan ekonomi regional dan internasional, baik karena pengaruh liberalisasi ekonomi maupun karena perubahan fundamental dalam pasar produk pertanian global.
2. Sebagai tuntutan pasar atas efisiensi usaha, maka diperlukan adanya upaya adopsi teknologi yang terus mengarah pada efisiensi pada industrialisasi pertanian dan perdesaan.
3. Kecenderungan penurunan harga dan permintaan pasar internasional untuk komoditi pertanian ekspor akibat krisis keuangan global.
4. Perubahan pada sisi permintaan yang menuntut kualitas tinggi, kuantitas besar, ukuran seragam, ramah lingkungan, kontinuitas produk dan penyampaiannya tepat waktu serta harga yang kompetitif.
5. Perkembangan preferensi pasar (permintaan konsumen), tren konsumen akan informasi nutrisi serta jaminan kesehatan dan keamanan produk-produk pertanian.
6. Terdapat kecenderungan pemberlakuan *non-tariff barrier* dan *tariff escalation* bagi produk olahan sebagai persyaratan impor oleh negara-negara maju yang kuat.
7. Telah diterapkannya persyaratan ”*green products*” atau penolakan terhadap komoditi yang dalam proses produksi (budidayanya) dianggap tidak mengindahkan kelestarian alam dan lingkungan serta hak-hak asasi manusia khususnya oleh negara Uni Eropa dan negara maju lainnya .
8. Munculnya negara-negara pesaing (*competitors*) yang menghasilkan produk-produk hasil pertanian yang sejenis dan pada musim yang sama serta produk-produk substitusi merupakan tantangan bagi

pengembangan produk pertanian Indonesia, baik di dalam negeri maupun di negara-negara tujuan ekspor tradisional maupun negara-negara tujuan ekspor baru.

9. Perubahan iklim global yang mengakibatkan produksi pertanian cenderung fluktuatif. Akibat hal ini maka bahan baku industri pengolahan mengalami kendala.





Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian

1.1 Pengertian

Menurut USDA (Amanor-Boadu, 2005) nilai tambah dalam pertanian terbentuk ketika terjadi perubahan dalam bentuk fisik atau bentuk produk pertanian atau adopsi metode produksi atau proses penanganan yang bertujuan untuk meningkatkan basis konsumen bagi produk tersebut serta mendapatkan porsi yang lebih besar dari pengeluaran pembelanjaan konsumen yang tumbuh

untuk produsen

Amamor-Boadu (2004) menyatakan bahwa inisiatif nilai tambah bisnis pada suatu rantai pasokan yang ada terjadi sebagai imbalan atas aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha industri hilir pada suatu rantai pasokan. Ukuran imbalan tersebut secara langsung dan proporsional ditujukan untuk kepuasan konsumen. Imbalan tersebut berbentuk harga yang tinggi, peningkatan pangsa pasar, dan atau peningkatan akses pasar. Hal tersebut akan meningkatkan tingkat keuntungan bagi pelaku usaha.

Coltrain, Barton and Boland (2000) menyatakan bahwa terdapat dua tipe inisiatif nilai tambah, yaitu inovasi dan koordinasi.

- Inovasi meliputi aktivitas yang memperbaiki "proses yang ada, prosedur produk dan pelayanan atau menciptakan sesuatu yang baru"
- Koordinasi meliputi aktivitas yang berkaitan dengan manajemen operasi antar jaringan kerja atau dengan menggunakan atau memodifikasi konfigurasi organisasi yang telah ada.

Tabel 4.1. Peluang Nilai Tambah

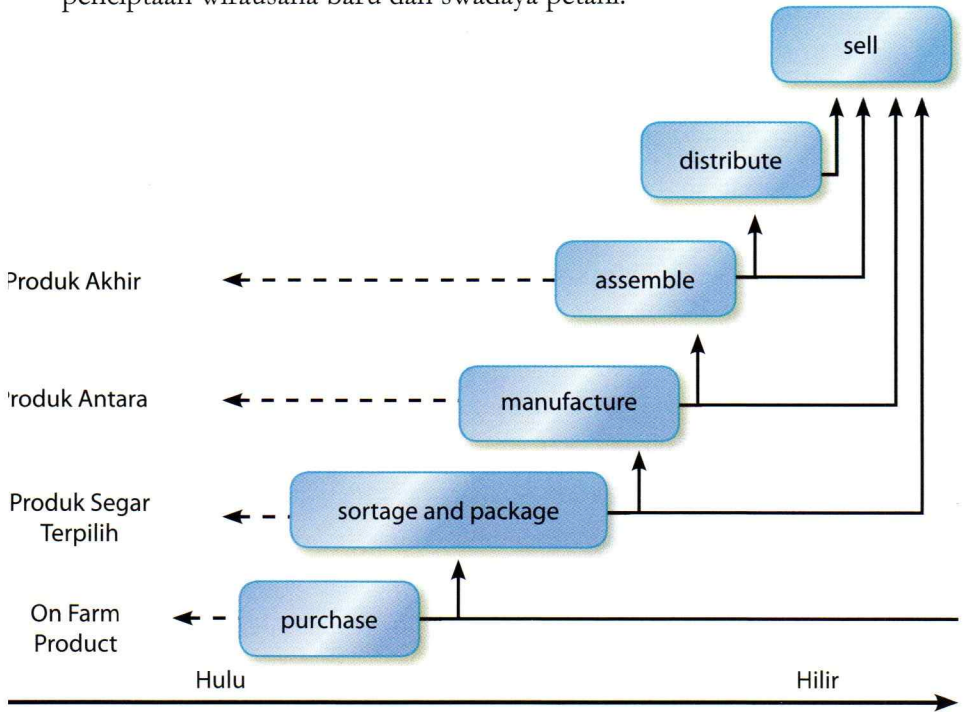
Peluang Nilai Tambah		
Dimensi	Inovasi	Koordinasi
Waktu	Kecepatan	Penyampaian <i>Just in Time</i>
Lokasi	Kenyamanan	Efisiensi
Produk/Pelayanan	Bentuk	Logistik
Proses/Metode	Teknologi	Aliansi Strategik
Informasi	Keamanan, Etika	Sistem Informasi
Insentif	Motivator	Transparansi

4.2 Peningkatan Nilai Tambah melalui Agribisnis Hilir

4.2.1 Tujuan

Tujuan pengembangan agribisnis hilir adalah : (a) untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen baik untuk konsumsi langsung maupun untuk bahan

baku agroindustri lanjutan (sekunder); (b) meningkatkan jaminan mutu dan harga, sehingga tercapai efisiensi kegiatan agrobisnis; (c) mengembangkan diversifikasi produk sebagai upaya penanggulangan kelebihan produksi atau kelangkaan permintaan pada periode tertentu; serta (d) sebagai wahana pengenalan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi sekaligus sebagai wahana peranserta masyarakat dalam menerapkan budaya industri, melalui penciptaan wirausaha baru dan swadaya petani.



Gambar 4.1. Proses rantai nilai pada produk pertanian

Proses peningkatan nilai tambah produk pertanian perlu dipahami dalam kerangka proses rantai nilai produk. Dimana dengan kerangka ini memberikan alternatif kegiatan yang beragam. Setiap tahapan proses memberikan nilai tambah dari hulu (on farm) sampai hilir (off farm), yakni aktivitas menjual hasil panen tanpa banyak perlakuan sampai pengolahan yang kompleks;

Secara umum kegiatan petani masih fokus pada on-farm. Kegiatan off-farm umumnya dilakukan oleh bukan petani. Kegiatan pasca panen yang

dilakukan oleh petani relatif sederhana, baru sebatas pengeringan hasil panen sedangkan pengolahan lebih lanjut dilakukan oleh pelaku usaha pengolahan. Beberapa kendala dalam pengembangan industri pengolahan hasil pertanian antara lain adalah masalah permodalan, pemasaran dan teknologi.

Salah satu kendala dalam pengembangan agroindustri di Indonesia adalah kemampuan mengolah produk yang masih rendah. Kondisi ini tentu saja memperkecil nilai tambah yang yang diperoleh dari ekspor produk pertanian, sehingga pengolahan lebih lanjut menjadi tuntutan bag perkembangan agroindustri di era global ini.

Adapun teknologi yang digolongkan sebagai teknologi agroindustri produk pertanian begitu beragam dan sangat luas mencakup teknologi pascapanen dan teknologi proses. Untuk memudahkan, secara garis besar teknologi pascapanen digolongkan berdasarkan tahapannya yaitu, tahap atau tahap sebelum pengolahan, tahap pengolahan dan tahap pengolahan lanjut.

Perlakuan pascapanen tahap awal meliputi, pembersihan, pengeringan sortasi dan pengeringan berdasarkan mutu, pengemasan, transport dan penyimpanan, pemotongan/pengirisan, penghilangan biji, pengupasan dan lainnya. Perlakuan pascapanen tahap pengolahan antara lain, fermentasi oksidasi, ekstraksi buah, ekstraksi rempah, distilasi dan sebagainya. Sedangkan contoh perlakuan pascapanen tahap lanjut dapat digolongkan ke dalam teknologi proses untuk agroindustri, yaitu penerapan pengubahar (kimiawi, biokimiawi, fisik) pada hasil pertanian menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Produk-produk yang dihasilkan ada yang dapat digunakan secara langsung dari sejak tahap awal, seperti rempah-rempah, sari buah dan lainnya, serta ada pula yang menjadi bahan baku untuk industri lainya, seperti industri makanan, kimia dan farmasi.

Tabel 4.2. Jenis Teknologi Pengolahan Yang Diterapkan pada Beberapa Produk Pertanian

Bahan Dasar	Teknologi yang Diterapkan	Produk
Padl	Pengeringan, penggilingan	Beras
Ubi kayu	Sortasi, pamarutan, ekstraksi, pengayakan, pengeringan	Tapioka

Buah Kelapa	Pengeringan, pengempaan, hidrolisis, penyabunan, pemucatan (<i>bleaching</i>), penghilangan bau (<i>deodorisasi</i>)	Minyak goreng
Tebu	Pemerasan, evaporasi, penjernihan (karbonisasi, sulfitasi), kristalisasi	Gula pasir
Daun the	Pelayuan, fermentasi, pengeringan	the hitam
Daun nilam	Penyulingan (distilasi)	Minyak nilam
Getah karet	Penggumpalan (koagulan), pengepresan, pembentukan, pengasapan	Karet sit asap (RSS)
Minyak nabati	Netralisasi, esterifikasi	Oleokimia (ester)
Minyak nilam	Isolasi, ekstraksi, pemurnian	Isolat
Gula kayu	Pemadatan, likuifaksi, sakarifikasi isomerasi, pemisahan (kromatografi)	Gula cair fruktosa
Anggur	Fermentasi, klasifikasi, asidifikasi, kristalisasi	Asam sitrat
Teles tebu	Fermentasi, penggaraman, kristalisasi	MSG (<i>monosodium actorte</i>)
Biji kakao	Fermentasi, pengeringan, penggilingan, pengempaan, formulasi	Cokelat
Kulit udang	Pengeringan, penggilingan, penghilangan protein, penghilangan mineral, destilasi	Khitin, Khitosan
Rumput laut	Pengeringan, penggilingan, ekstraksi, pemurnian	Karagenan
Cayu	Penghancuran, pemasakan dengan soda atau sulfat, termomekanis	Pulp
Pulp	Penghancuran (<i>beating</i>), penghalusan (<i>refining</i>), penambahan bahan pengisi	Kertas



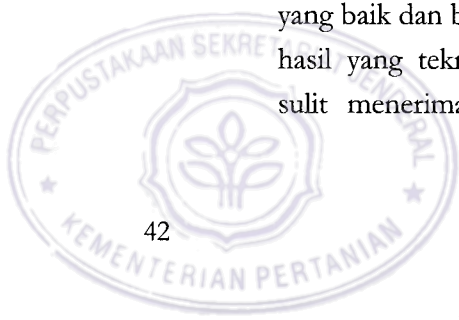
Gambar 4.2 Singkong

4.2.2 Pengolahan Hasil Pertanian Skala Kecil/Rumah Tangga

Pengolahan hasil pertanian skala kecil/rumah tangga umumnya masih menggunakan teknologi yang sederhana sehingga produk yang dihasilkan mutunya rendah dan kurang kompetitif. Oleh karena itu untuk mewujudkan industri pengolahan yang mampu menghasilkan produk-produk olahan yang bermutu dan memiliki daya saing, perlu dikembangkan cara-cara pengolahan hasil pertanian yang berorientasi Good Manufacturing Practices (GMP). Selain itu untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan perlu ditetapkan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Dengan menerapkan GMP dan HACCP pada industri pengolahan di pedesaan diharapkan dapat meningkatkan mutu dan nilai tambah secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata pada perekonomian pedesaan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya diseminasi teknologi pengolahan hasil adalah terdiri dari faktor teknis, sosial dan ekonomi. Dari segi teknis beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain : (a) Tingkat pengetahuan dan kesadaran petani akan pentingnya penerapan teknologi pengolahan hasil masih sangat terbatas; (b) Kurangnya tenaga yang terampil dalam mengoperasikan alat mesin pengolahan; (c) Dukungan perbengkelan dalam perbaikan, perawatan dan penyediaan suku cadang alat mesin masih rendah karena kemampuan permodalan bengkel pertanian masih lemah dan kesulitan dalam memperoleh permodalan; (d) introduksi beberapa teknologi belum sesuai dengan kebutuhan petani dan belum bersifat loka spesifik; (e) penyebaran alat dan mesin pengolahan masih terbatas; (f) kurangnya tenaga pembina yang terampil dalam bidang pengolahan dibandingkan dengan tenaga pembina pada kegiatan-kegiatan pertanian.

Dari segi sosial beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain (a) kebiasaan petani dalam melakukan kegiatan pengolahan dengan cara tradisional sulit untuk dirubah untuk menerapkan teknologi yang baik dan benar; (b) daerah yang mempunyai budaya pengolahan hasil yang teknologinya diperoleh secara turun temurun biasanya sulit menerima introduksi teknologi; (c) terbatasnya kemampuan



akses informasi tentang teknologi pengolahan bagi masyarakat yang berpendidikan rendah.

Dari segi ekonomi beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain: (a) daya beli masyarakat terhadap teknologi pengolahan hasil dan alat dan mesin pertanian masih rendah; (b) harga alat dan mesin pengolahan hasil pertanian relatif tinggi sehingga kurang efisien; (c) belum tersedianya skim kredit khusus untuk pengadaan alat dan mesin/ mekanisasi pertanian.



Gambar 4.3 Cassava

.3 Inovasi Teknologi Pengolahan Masih Terkendala

Masalah fundamental dalam inovasi teknologi pengolahan hasil adalah tidak paduan antara teknologi yang dikembangkan dengan kebutuhan pengguna teknologi (petani dan industri pengolahan pangan). Secara akademik ada dua alternatif yang bisa ditempuh yaitu dengan pendekatan *supply-push* mengembangkan teknologi terlebih dahulu, baru kemudian menawarkan kepada pengguna atau *demand-driven* (memahami terlebih dahulu kebutuhan pengguna, baru kemudian mengembangkan teknologi yang sesuai). Pendekatan *supply-*

push yang selama ini dominan dilakukan, secara faktual terbukti tidak mampu mengalirkan teknologi yang dikembangkan tersebut, sehingga teknologi tidak mampu memberikan kontribusi yang berarti. Fakta ini menuntut perlunya dilakukan reorientasi pendekatan, yaitu menggeser pendekatan dari yang lebih dominan *supply-push*, menjadi lebih dominan *demand-driven*.

Oleh karenanya, pembentukan Gapoktan pengolahan sebaiknya melakukan pendekatan *demand driven*, mulai dari rekrutmen anggota kelompok tani yang memiliki kebutuhan yang sama bergabung dalam suatu gabungan kelompok tani dan memiliki tujuan yang sama dalam usaha pengolahan hasil pertanian mereka: Petani sebaiknya tidak hanya diposisikan sebagai produsen bahan mentah tetapi secara bertahap harus diusahakan menjadi produsen bahan olahan. Dengan demikian tingkat keuntungan yang diperoleh menjadi lebih baik. Mengubah kebiasaan petani yang biasanya hanya bergerak pada kegiatan budidaya menjadi petani yang sekaligus juga mengolah hasil budidayanya bukan sesuatu yang mudah tetapi juga bukan merupakan suatu hal yang mustahil. Untuk memudahkan produk dan pemasaran maka sebaiknya petani bekerja dalam kelompok (Kelompok Tani/Kelompok Usaha). Untuk itu diperlukan manajemen kelompok yang baik sehingga setiap anggota kelompok akan mendapatkan manfaat dari kelompok tersebut. Dalam kelompok ini juga diperlukan pengaturan produksi dan tenaga kerja secara efektif dan efisien.

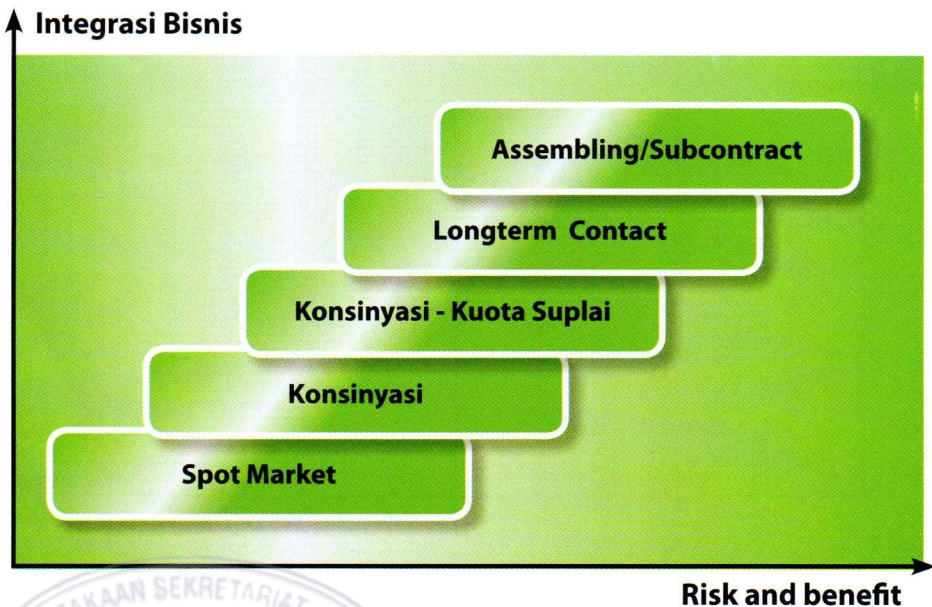
4.4 Kemitraan

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, perlu pengembangan agroindustri pedesaan menjadi usaha bisnis yang efisien, kuat dan bernilai tambah tinggi dengan mengembangkan pola kemitraan yang saling menguntungkan antara industri pengolahan pedesaan yang menghasilkan bahan baku dasar hasil pertanian dengan industri menengah besar yang melaksanakan pengolahan lebih lanjut menjadi produk akhir.

Petani berproduksi harus berorientasi terhadap pasar. Namun dalam kondisi seperti saat sekarang dimana pasar sangat dinamis dan kompetitif, maka sebagai pemain baru tentu petani relatif sulit dalam menembus pasar. Untuk itu perlu melakukan kemitraan usaha. Model transaksi ekonomi dalam kemitraan ini mempertimbangkan resiko/keuntungan di satu sisi yang mempengaruhi tingkat integrasi bisnis.

Sebagai suatu pendekatan yang mungkin secara alamiah bisnis dapat berjalan, maka kemitraan yang produktif dan berkelanjutan harus dikenalkan sebagai pola pengembangan usaha kecil. Hal-hal yang penting dalam Kemitraan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Kemitraan dapat membentuk tujuan jangka panjang, komitmen yang kuat, pengelolaan yang fleksibel, serta keuntungan yang jelas untuk setiap anggota kemitraan
2. Proporsi bisnis pada kemitraan harus mampu menciptakan naluri bisnis komersial jangka panjang bagi setiap anggota kemitraan;
3. Fokus pada pengembangan pola kemitraan, produk dan pasar harus diciptakan secara spesifik
4. Setiap anggota kemitraan harus saling menghargai dan mempercayai serta menciptakan strategi bisnis yang saling mendukung keberlanjutan usaha masing-masing;
5. Setiap anggota kemitraan harus menempatkan kualitas produk yang tinggi sebagai tujuan utama yang ingin dicapai;
6. Setiap anggota kemitraan harus membangun jalinan kerjasama dan komunikasi yang baik pada setiap level agribisnis-agroindustri –agroturisme



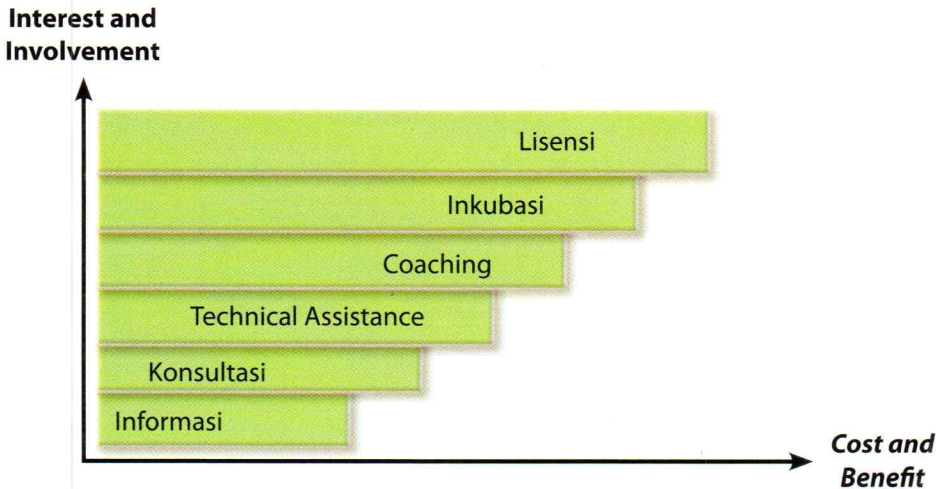
Gambar 4.4 Model transaksi dalam kemitraan usaha

4.5 Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Peran Pemda sebagai fasilitator ini cukup dilakukan sampai produk Petani ini dikenal oleh pasar dan mempunyai pemasaran yang baik, karena bantuan yang terus menerus justru kurang baik terhadap proses pemberdayaan Kelompok Tani itu sendiri.

Pada dasarnya kemitraan usaha agribisnis merupakan salah satu instrumen perekat untuk menstimulir keselarasan dan keserasian kerjasama yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan diantara pelaku agribisnis yaitu petani/ kelompok tani dengan pengusaha/perusahaan swasta, BUMN dan koperasi. Dengan terwujudnya kemitraan usaha diantara pelaku agribisnis tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah yang diterima secara proposional diantara pelaku kemitraan.

Keberhasilan kemitraan usaha dalam formasi perekonomian dewasa ini menuntut adanya suatu rekayasa institusi dalam berorientasi pada pengelolaan sumber daya dan posisi tawar. Bentuk institusi yang relevan untuk maksud kemitraan itu adalah Koperasi Tani / Kelompok Tani / GAPOKTAN. Rekayasa institusi semestinya berbasis pada kepentingan rakyat yang orientasinya kearah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.



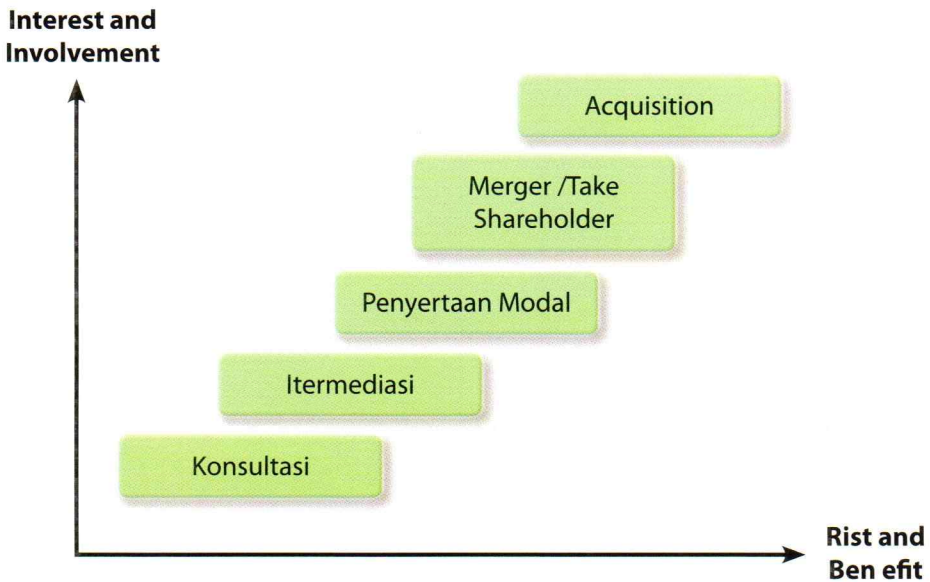
Gambar 4.5. Spektrum Intensitas kaitan pada akses alih teknologi

4.6 Alih teknologi dan Permodalan

Pengembangan kapasitas teknis kelompok pengolah hasil pertanian dapat dilakukan dengan alih teknologi. Beberapa tingkat kedalaman pembinaan atau kerjasama alih teknologi perlu dilakukan sesuai dengan spesifikasi komoditas dan tingkat perkembangan kapasitas kelembagaan kelompok pengolah.

Program kemitraan yang dikaitkan dengan alih teknologi perlu didorong untuk mempercepat kemampuan petani/kelompok pengolah meningkatkan nilai tambah produknya.

Kelembagaan melalui peningkatan alat/sarana pengolahan dapat memacu kemitraan yang lebih seimbang antara kelompok tani pengolah dengan perusahaan besar. Dengan adanya alat produksi yang baik dan sesuai maka intensitas skema pendanaan akan semakin meningkat.



Gambar 4.6. Spektrum Intensitas kaitan pada akses permodalan







Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian

.1 Pengertian

Dayasaing menggambarkan kemampuan bersaing di masa lalu, masa kini, an dapat diproyeksikan ke masa depan. Dayasaing bersifat dinamis dan akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu bergantung pada tingkat kompetisi, erubahan perilaku permintaan, dan kemampuan dasar industri. Dayasaing roduk dicapai melalui konversi keunggulan komparatif menjadi keunggulan

kompetitif dengan penerapan teknologi, pengelolaan dan pengembangan pasar dari produk tersebut terhadap jenis produk yang sama. Keunggulan kompetitif ini berkaitan dengan upaya peningkatan nilai tambah yang membentuk daya saing. Banyak faktor mempengaruhi daya saing produk.



Gambar 5.1. Faktor yang mempengaruhi daya saing

Konsep keunggulan kompetitif adalah suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi pesaing dan mampu menunjukkan perbedaan-perbedaan dengan lainnya. Dalam konteks komoditas pertanian, semua faktor berpengaruh secara langsung. Indonesia mempunyai sumberdaya alam yang unggul dibandingkan banyak negara lain di dunia. Keunggulan ini sangat nyata bila difokuskan pada pertanian tropis (*tropical agriculture*) dengan karakteristik dan faktor non-harga yang kuat.

Dalam faktor yang lain, Indonesia masih perlu melakukan upaya yang sungguh

ungguh untuk membentuk daya saing. Fokus upaya adalah mengembangkan dan menerapkan teknologi yang dapat menekan biaya (*cost reducing technology*) dan memperbaiki mutu (*quality enhancement technology*). Dalam jangka pendek, orientasi pada skala kecil dan infrastruktur terbatas. Pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis usaha kecil dengan arah peningkatan skala menjadi keharusan dalam jangka pendek dan menengah. Daya saing harus dibangun dari perbaikan efisiensi pengelolaan sehingga kualitas SDM menjadi faktor penentu.

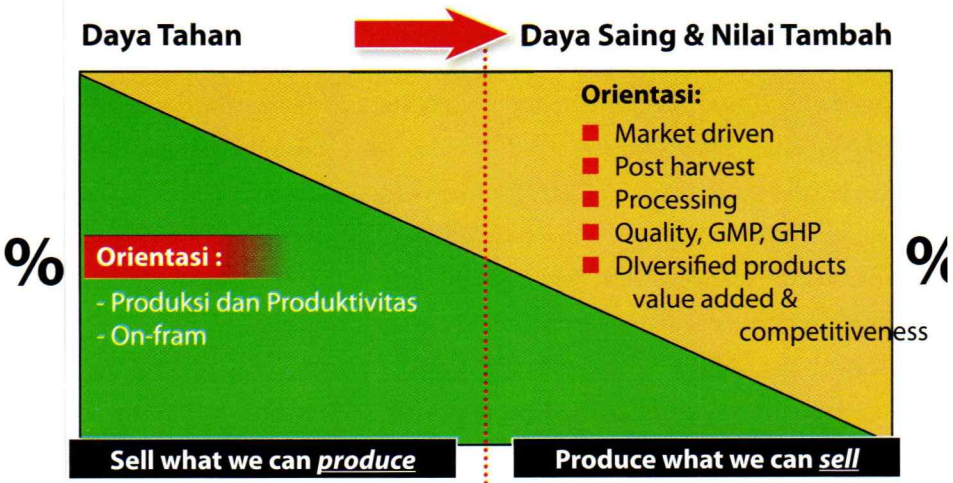
Faktor yang sepenuhnya dapat dikelola dengan baik adalah kebijakan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi sektor pertanian harus segera dikeluarkan. Sebaliknya, kebijakan yang menghambat, secara bertahap dikurangi sehingga perbaikan daya saing menjadi arus utama pembangunan pertanian. Infrastruktur menentukan daya saing karena terkait dengan produktivitas serta efisiensi pengadaan faktor produksi dan distribusi produk. Pada gilirannya menjadi faktor penentu harga pokok produksi, ketetapan waktu dan mutu produk. Oleh karena itu, upaya perbaikan daya saing tidak terlepas dari pengadaan dan pengembangan infrastruktur pendukung dan terkait dengan semua aspek produksi pertanian.

Strategi perusahaan dan struktur industri pendukung meskipun terkait langsung dengan daya saing komoditas pertanian, tidak menjadi faktor penentu utama dalam pembangunan pertanian Indonesia. Nilai tambah akan menjadi bagian tersendiri yang tidak ditempatkan sebagai faktor tetapi lebih dari itu sebagai program penguat pembangunan pertanian. Nilai tambah dapat diartikan dari berbagai perspektif. Dari perspektif komoditas atau produk adalah nilai yang diberikan (*attributed*) kepada produk sebagai hasil dari proses tertentu (proses produksi, penyimpanan, pengangkutan). Oleh karena itu, nilai yang terbentuk bergantung pada banyaknya tahapan pengolahan yang dilakukan. Secara teoritis, semakin ke hilir penerapan proses akan semakin besar nilai tambah yang dibentuk.

Nilai bagi konsumen (*customer value*) adalah perpaduan dari faktor daya saing yang berpadu dengan nilai tambah sehingga dapat ditingkatkan melalui tiga cara, yaitu kegiatan-kegiatan yang mampu menciptakan: keunggulan bersaing (*competitive advantage*), menekan biaya proses, atau mempercepat proses penyediaan produk ke tangan konsumen. Peningkatan daya saing ini dapat diperoleh dengan menerapkan cara-cara baru dalam melakukan kegiatan, menerapkan prosedur

dan teknologi baru, atau menggunakan masukan (input) yang berbeda.

Disisi lain, peningkatan daya saing produk melalui peningkatan nilai tambah harus memberikan *multiplier effect* yang tinggi. Sasaran program penguatan daya saing ini diarahkan untuk memperkuat dan menumbuhkembangkan industri perdesaan dengan *multiplier effect* yang tinggi karena sebagian besar penduduk ada di area perdesaan dan relatif dari sisi ekonomi masih lemah. Diharapkan melalui industri perdesaan akan tercipta lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan perekonomian perdesaan.



5.2 Pendekatan Kluster Pengembangan Agroindustri

Pendekatan kluster untuk pembangunan IKM makanan ringan berbahan baku produk pertanian membutuhkan adanya beberapa pelaku usaha atau perusahaan sebagai *champion*, dengan kriteria (a) bergerak dalam industri peningkatan nilai tambah makanan ringan dan sekaligus sebagai pengeksport, (b) mempunyai keterkaitan yang kuat dengan seluruh komponen *stakeholders* di dalam negeri dan jaringan bisnis di pasar local dan global, (c) mempunyai komitmen, kepedulian, dan motivasi terhadap pengembangan makan ringan di Indonesia. Pola pengembangan IKM makanan ringan dengan pendekatan kluster perlu diarahkan kearah peningkatan daya saing di pasar acto dan internasional.

Tiga actor utama daya saing yang perlu dioptimalkan mencakup mutu (*quality*), biaya (*cost*), pelayanan dan penyediaan (*service/delivery*). Penentuan

komoditas unggulan. Diantara beragam produk ekspor makanan ringan, seperti kerupuk, aneka keripik, aneka jenang, aneka dodol perlu mendapatkan perhatian khusus untuk terus dikembangkan mengingat kinerja ekspornya dan posisi pentingnya di pasaran regional dan pasar ekspor.

Pengembangan sentra produksi dan pewilayahan komoditi. Kesesuaian agroklimat dan sosial budaya (termasuk tradisi) suatu daerah terhadap kebutuhan suatu daerah tertentu sangat menentukan dalam pengembangan sentra produksi. Dukungan berupa akses terhadap sarana produksi akan meningkatkan produktifitas dan mutu bahan baku suatu sentra produksi.

Makanan Ringan adalah industry yang terdiri dari:

1. Industri Roti dan Sejenisnya (KBLI 15410);
2. Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula (KBLI 15432);
3. Industri Tempe dan Tahu (KBLI 15494);
4. Industri Makanan dari Kedele dan kacang-kacangan Lainnya selain Kecap, Tempe dan Tahu (KBLI 15495);
5. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya (KBLI 15496);
6. Industri Kue-kue Basah (KBLI 15498).

Tabel 5.1. Pengelompokan Industri makanan Ringan

No	Industri Hulu	Industri Hilir	
1.	Buah-buahan (3)	1. Ind. Pengalengan Buah-buahan 2. Ind. Pengasinan/ Pemanisan Buah-buahan	3. Ind. Pengeringan Buah-buahan
2.	Sayuran (3)	1. Ind. Pengalengan Sayuran 2. Ind. Pengasinan/ Pemanisan Sayuran	3. Ind. Pengeringan Sayuran
3.	Kacang dan Umbi (2)	1. Ind. Pembersihan dan Pengupasan Kacang-kacangan	2. Ind. Pembersihan dan Pengupasan Umbi-umbian
4.	Ind. Pemotongan ayam (1)	1. Nugget daging ayam	
5.	Ind. Pemotongan daging (2)	1. Nugget daging sapi	2. Nugget daging lainnya
6.	Pengolahan buah-buahan	1. Nanas kering 2. Rambutan kering 3. Anggur kering (kismis) 4. Mangga kering 5. Lengkek kering 6. Jambu kering 7. Jambu lainnya kering 8. Apel kering 9. Kedondong kering 10. Salak kering 11. Pisang kering 12. Cermat kering 13. Buah pala kering 14. Kolang-kaling kering	14. Nangka kering 15. Jeruk kering 16. Emping melinjo 17. Emping jengkol 18. Ceriping kentang 19. Ceriping pisang 20. Ceriping ubi kayu/singkong 21. Ceriping gadung 22. Ceriping tales 23. Ceriping lainnya 24. Keripik pisang 25. Keripik nangka 26. Keripik nanas

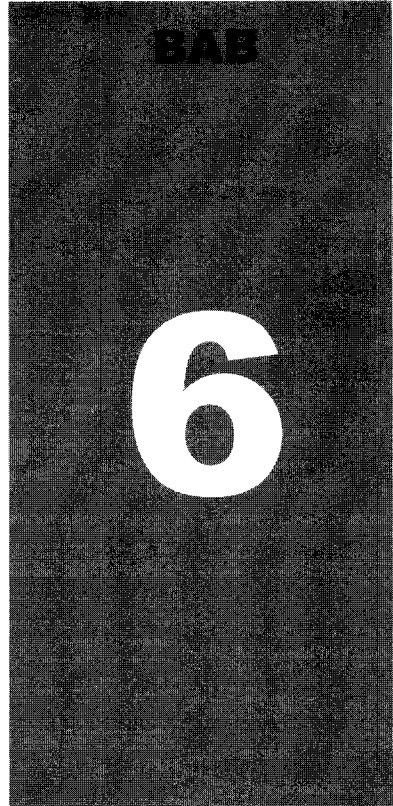
7	Pengolahan Sayuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jamur dan cendawan kering 2. Bawang merah 3. Bawang putih 4. Bawang Bombay 5. Sayuran daun-daunan kering 6. Rebung kering 7. Jagung muda kering 8. Kentang kering 9. Cabe kering 10. Sayuran lainnya yang dikeringkan 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Emping ketan 12. Emping beras 13. Emping teki 14. Emping jagung 15. Emping lainnya 16. Keripik jagung 17. Keripik bayam 18. Keripik kentang 19. Keripik gadung 20. Keripik lainnya
8	Ind. Tepung, Ind.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gula 2. Biskuit manis 3. Biskuit tawar 4. Wafel 5. Crackers 6. Kue semprong 7. Wafer 8. Koya 9. Sagon 10. Bapia 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Simping 12. Putri salju 13. Ledre pidang 14. Sus kering 15. Kuping gajah 16. Astor 17. Pilus 18. Chiki 19. Kue-kue kering lainnya
9.	Kacang-kacangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempe kedele 2. Tempe benguk 3. Tempe dari kacang-kacangan lainnya 4. Tempe dari ampas kacang-kacangan 5. Tempe gembus (ampas tahu) 6. Tempe ampas kacang-kacangan lainnya 7. Oncom kacang tanah 8. Oncom kacang kedele 9. Oncom dari kacang-kacangan lainnya 10. Oncom dari ampas kacang-kacangan 11. Oncom ampas tahu 12. Oncom ampas kacang-kacangan lainnya 13. Sari tempe 14. Tahu dari kedele 15. Tahu dari kacang hijau 	<ol style="list-style-type: none"> 16. Tahu dari kacang-kacangan lainnya 17. Kembang tahu dari kedele 18. Kembang tahu dari kacang-kacangan lainnya 19. Keripik oncom 20. Peyek kacang tanah 21. Peyek kacang kedele 22. Peyek kacang hijau 23. Peyek dari kacang-kacangan lainnya 24. Makanan ringan dari kacang-kacangan 25. Kacang kapri 26. Kacang asin tak berkulit 27. Kacang asin berkulit 28. Kacang tawar tak berkulit 29. Kacang tawar berkulit 30. Kacang sukro 31. Kacang bogor 32. Kacang bawang/taujin 33. Kacang tolo/ kacang kelitik
10	Ind. Tepung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerupuk udang 2. Kerupuk ikan 3. Kerupuk pati (kerupuk terung) 4. Kerupuk singkong 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kerupuk jagung 6. Kerupuk beras 7. Kerupuk lainnya





Gambar 5.2. Mangga dikemas di rumah kemas

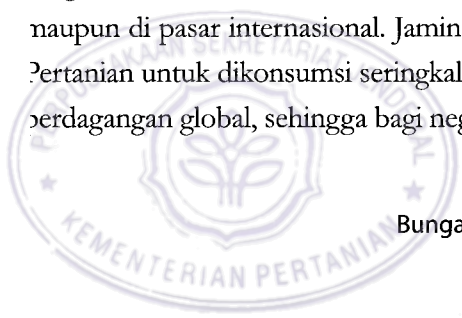




Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan

5.1 Latar Belakang

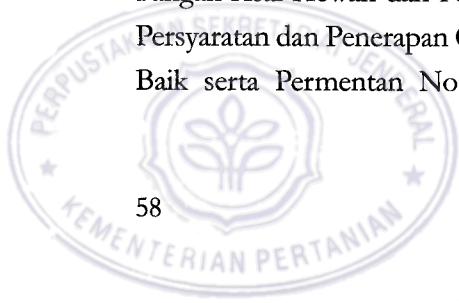
Tuntutan konsumen terhadap tersedianya produk pangan segar hasil pertanian yang aman dikonsumsi dan bermutu terus meningkat baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Hasil Pertanian untuk dikonsumsi seringkali digunakan sebagai persyaratan teknis dalam perdagangan global, sehingga bagi negara yang sudah maju akan mempersyaratkan



tingkat jaminan Mutu dan Keamanan Pangan lebih ketat dibanding negara berkembang. Dengan demikian jaminan mutu dan keamanan pangan merupakan salah satu faktor penentu daya saing produk pertanian baik dipasar Domestik maupun dipasar Internasional. Dalam rangka memenuhi tuntutan konsumen terhadap produk pertanian yang aman dikonsumsi dan bermutu serta meningkatkan daya saing baik di pasar domestik maupun dipasar internasional, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, seluruh tanggungjawab Pembinaan dan Pengawasan yang berkaitan dengan Mutu dan Keamanan Pangan didistribusikan secara jelas antara Produk Pangan Segar Hasil Pertanian dan Produk Pangan Olahan. Untuk Pembinaan dan Pengawasan Produk Pangan Segar Hasil Pertanian menjadi tanggungjawab Departemen Pertanian sedangkan untuk Produk Pangan Olahan menjadi tanggungjawab Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan tersebut Departemen Pertanian telah dilengkapi dengan kelembagaan untuk melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan. Tugas Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan pada bidang Budidaya dilakukan oleh Lembaga Struktural yang terdiri dari Direktorat Jenderal Budidaya lingkup Pertanian yaitu Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan dengan jajarannya Dinas Lingkup Pertanian Provinsi, Kabupaten dan Kota sedangkan tugas pembinaan pada tahap Pengolahan dan Pemasaran menjadi tanggungjawab Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian serta Badan Karantina Pertanian. Tugas Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) pada Lembaga Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian yang disebut sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah.

Dukungan berupa kebijakan tentang Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan juga telah terbentuk seperti Permentan No. 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian , ditindaklanjuti dengan peraturan untuk Persyaratan Dasar (Pre Requisite) Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/Ot.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan dan Permentan No.35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik serta Permentan No 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman



Penangan Paska Panen Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik. Semua regulasi teknis diatas merupakan Persyaratan Dasar (Pre Requisite) Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan berdasarkan Sistem HACCP, yang harus diterapkan lebih dahulu secara benar dan maksimal. Oleh karena itu diperlukan pedoman-pedoman yang akan digunakan sebagai acuan dalam rangka mengimplementasikan semua regulasi yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut diatas disusunlah Pedoman Penerapan Penanganan dan Pengolahan Pangan Segar Hasil Pertanian Yang Baik (GHP/GMP), Pedoman Sertifikasi dan Penilaian GHP/GMP tersebut serta Pedoman Pelabelan dan Penggunaan Tanda/Logo. Bagi pelaku usaha skala kecil, dapat menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan ini secara bertahap yaitu dengan menerapkan persyaratan dasar (*Pre Requisite*) saja terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan Sistem Mutu Keamanan Pangan berdasarkan Sistem HACCP, yang akhirnya dapat menghasilkan produk yang aman dan bermutu.

5.2 Acuan Normatif

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negar Nomor 3656);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT. 140/7 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri

- Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/2/2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian No 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian No.12/Permentan/OT.140/2/2007;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/Ot.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
 10. Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Budidaya Tanaman Pangan yang baik;
 11. Peraturan Menteri Pertanian No. 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian
 12. Peraturan Menteri Pertanian No.35/Permentan/OT. 140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 /Permentan/ OT.140/10/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Produk Segar Asal Tumbuhan
 14. Peraturan Menteri Pertanian No.44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Paska Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik;
 15. Permentan No.48/Permentan/OT.160/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayuran Yang Baik;
 16. Pedoman BSN 401-2000 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.
 17. SNI 19 – 19011 – 2005 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan atau Lingkungan;
 18. *CAC/RCP1-1969-Rev 4-2003 : Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene;*

6.3 Istilah dan Definisi

1. **Sertifikasi** adalah Rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa
2. **Sertifikat** adalah Jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga, Laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang jasa, proses, system atau personel telah memenuhi standar yang telah dipersyaratkan.
3. **Sertifikasi Mutu Pangan** adalah Rangkaian kegiatan penerbitan sertifikasi

terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

4. **Sertifikat Mutu Keamanan Pangan** adalah Jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat atau Daerah yang telah diakreditasi atau diverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan
5. **Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP- P)** adalah Institusi atau unit kerja dilingkup Departemen Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberi kewenangan untuk melaksanakan Pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
6. **Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)** adalah Institusi atau unit kerja dilingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan system jaminan mutu pangan hasil pertanian dan telah lulus verifikasi dari OKKP-Pusat
7. **Inspektur/Pengawas Mutu Hasil Pertanian** adalah Personel yang secara resmi ditugaskan oleh oleh OKKP-P untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga (OKKP-D) dalam menerapkan system jaminan mutu pangan yang ditetapkan.
8. **Pangan** adalah Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
9. **Pangan Segar** adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
10. **Mutu Pangan** adalah Nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
11. **Sanitasi Pangan** adalah Upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.

12. **Persyaratan Sanitasi** adalah Standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya untuk mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen dan mengurangi jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
13. **Persyaratan Keamanan Pangan** adalah Standard dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
14. **Audit** adalah Proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit terpenuhi.
15. **Bukti Audit** adalah Rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi
16. **Kriteria Audit** adalah Seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan
17. **Pelaku Usaha** adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pangan segar asal tumbuhan.
18. **Laboratorium Penguji** adalah Laboratorium yang melakukan pengujian dalam rangka sertifikasi Cara Penanganan Pasca Panen/Pengolahan Pangan Hasil Pertanian Yang Baik, baik dalam fungsi pengembangan dan penerapan desain sistem Cara Penanganan Pasca Panen/Pengolahan Pangan Hasil Pertanian Yang Baik, monitoring maupun pengujian produk akhir pangan hasil pertanian.
19. **Logo/Label** adalah Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan , dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 1999 disebut Label.
20. **Ketidaksesuaian** adalah Tingkat penyimpangan pelaku usaha/produsen pangan terhadap seperangkat kebijakan, prosedur dan persyaratan standar/ketentuan dalam bidang keamanan pangan

21. **Ketidaksesuaian Minor** adalah Tingkat penyimpangan yang kurang serius dan tidak menyebabkan resiko terhadap kualitas keamanan pangan produk
22. **Ketidaksesuaian Mayor** adalah Tingkat penyimpangan yang dapat menyebabkan resiko terhadap kualitas keamanan pangan produk
23. **Ketidaksesuaian Serius** adalah Tingkat penyimpangan yang serius yang dapat menyebabkan resiko terhadap kualitas keamanan pangan produk dan segera ditindaklanjuti
24. **Ketidaksesuaian Kritis** adalah Tingkat penyimpangan yang sangat serius dan sangat dapat menyebabkan resiko terhadap kualitas keamanan pangan produk dan harus segera ditindaklanjuti



Gambar 6.1. Buah bersertifikat prima

6.4 Mutu Dan Standardisasi

Standar dan sistem standardisasi mutu merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam pembinaan mutu hasil pertanian sejak proses produksi bahan baku hingga produk di tangan konsumen. Penerapan sistem standardisasi secara optimal sebagai alat pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran komoditi pangan serta mendorong berkembangnya investasi di sektor pertanian.

Untuk dapat mengawal dengan baik penerapan standar dan sistem jaminan mutu terpadu maka diperlukan ketersediaan infrastruktur penilaian kesesuaian sebagai kelembagaan mutu yang kredibel. Sesuai dengan fungsinya, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebagai salah satu kunci dalam pengawasan penerapan sistem jaminan mutu terpadu harus dikembangkan selaras dengan sistem standardisasi di bidang pertanian. LPK meliputi Lembaga Sertifikasi (LS Produk, LS sistem mutu, LS Personel, LS Pangan organik), Laboratorium Uji dan Lembaga Inspeksi. Mengingat fungsinya yang sangat penting, pengembang LPK harus didukung baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang terkoordinasi dalam sistem jaminan mutu hasil pertanian yang terpadu. Sampai dengan saat ini, ketersediaan LPK termasuk diantaranya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) yang berfungsi dalam pengawasan keamanan pangan hasil pertanian di daerah dirasakan masih kurang baik jumlah maupun perannya. Pembinaan LKP yang dilaksanakan cukup intensif dari tingkat pusat ternyata belum dapat sepenuhnya diselaraskan dengan kondisi di daerah dengan segala keterbatasannya baik dari aspek sumberdaya manusia, peralatan maupun dukungan biaya operasional. Kondisi ini menyebabkan kesiapan OKKP maupun Laboratorium pengujian mutu di daerah sangat bervariasi dan belum dapat memberikan pelayanan sertifikasi mutu secara optimal kepada unit usaha pertanian yang telah menerapkan sistem jaminan mutu terpadu.

Untuk mengatasi hambatan ekspor hasil pertanian khususnya terkait dengan mutu produk yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu harus ditempuh berbagai upaya. Diantaranya adalah meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan fasilitas yang diatur oleh organisasi perdagangan dunia (WTO) melalui perjanjian-perjanjian WTO (*Technical Barrier to Trade Agreement* dan *Sanitary and Phytosanitary Agreement*) misalnya pengembangan regulasi teknis yang dapat mendukung perdagangan yang adil (*fair*), *special and differential treatment* untuk negara-negara berkembang. Pemanfaatan fasilitas tersebut oleh Indonesia dalam mengharmonisasikan sistem jaminan mutu dengan negara mitra bisnis sampai dengan saat ini belum optimal. Sebagai contoh, pengembangan regulasi teknis

serta fungsi proses notifikasi sebagai salah satu prinsip transparansi belum berjalan efektif, hal ini antara lain disebabkan masih lemahnya koordinasi diantara pihak-pihak terkait serta lemahnya pemahaman tentang ketentuan-ketentuan yang ada.

Kondisi yang diinginkan dari pengembangan sistem standardisasi di bidang pertanian ini adalah tersedianya standar-standar di bidang pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, diterapkannya standar mutu hasil pertanian baik untuk produk segar, bahan baku, produk setengah jadi maupun produk jadi serta tersusunnya kebijakan-kebijakan standardisasi yang mendorong terciptanya iklim kondusif bagi penerapaaan sistem standardisasi yang efektif. Dengan terlaksananya penerapan sistem standardisasi di bidang pertanian yang efektif dan efisien diharapkan dapat dihasilkan:

1. Sejumlah kebijakan standardisasi maupun SNI di bidang pertanian yang selaras dengan standar internasional untuk kebutuhan harmonisasi sistem jaminan mutu secara internasional dan kesepakatan perdagangan;

Tabel 6.1. Kegiatan-kegiatan dalam Program Perumusan Kebijakan Standardisasi dan SNI Tahun 2005 - 2009

Kegiatan	Tahapan/Jumlah Kegiatan				
	2005	2006	2007	2008	2009
1. Perumusan kebijakan	-	2	4	6	8
2. Penyusunan RSNI Pertanian	-	4	8	12	16
3. Pelaksanaan Konsensus RSNI	-	50	100	150	200
4. Analisis kebutuhan dan kesesuaian standar sektor pertanian	-	-	2	4	6
5. Kaji ulang SNI	-	2	4	6	8
6. Perumusan pedoman	-	4	8	12	16
7. Bimbingan teknis perumusan standar dan pedoman	-	-	4	8	12
8. Sosialisasi SNI dan Kebijakan Standardisasi	-	4	8	12	16

2. Penerapan standar oleh pelaku usaha pertanian yang dapat menunjang peningkatan efisiensi dan produktivitas hasil pertanian, menjamin

terlaksananya perlindungan konsumen dalam aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan maupun pelestarian lingkungan.

Tabel 6.2. Berbagai Kegiatan dalam Program Pengembangan Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu Tahun 2005 - 2009

Kegiatan	Tahapan/Jumlah Kegiatan				
	2005	2006	2007	2008	2009
1. Penyusunan dokumen prerequisite produk pertanian	-	4	8	12	16
2. Fasilitasi penyusunan penerapan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan pada unit usaha	-	5	10	15	20
3. Monitoring keamanan pangan dan kesesuaian terhadap SNI	-	1000	2000	3000	4000
4. Sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan jaminan mutu pada aparat dan pelaku usaha	-	40	80	120	160
5. Fasilitasi tenaga pengawas mutu	-	20	40	60	80
6. Fasilitasi sertifikasi kehalalan	-	-	1	2	3
7. Fasilitasi pelabelan	-	-	2	4	6
8. Evaluasi penerapan dan pengawasan sistem jaminan mutu	-	-	1	2	3
9. Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan mutu Pangan organik	-	1	2	3	4
10. Fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	-	-	20	33	33

- Sumberdaya manusia yang kompeten dalam pembinaan dan pengawas sistem jaminan mutu hasil pertanian yang terpadu;
- Lembaga Penilaian Kesesuaian baik Lembaga Sertifikasi, Laboratorium Uji maupun Lembaga Inspeksi yang kredibel dan memadai untuk memberikan pelayanan sertifikasi mutu hasil pertanian;
- Keunggulan kompetitif dari produk pertanian Indonesia baik di pasar domestik maupun pasar global;
- Harmonisasi dan pemasyarakatan informasi standarisasi yang diperlukan oleh pelaku usaha pertanian, pemerintah dan konsumen dalam rangka pembinaan mutu produk pertanian dan fasilitas dalam memperlancar arus perdagangan domestik maupun internasional;

Tabel 6.3. Program Pengembangan Kerjasama dan Harmonisasi Tahun 2005 - 2009

Program	Kegiatan	Tahapan/Jumlah Kegiatan				
		2005	2006	2007	2008	2009
Pengembangan Kerjasama dan Harmonisasi	1. Penyusunan kebijakan/pedoman kerjasama dan harmonisasi standardisasi	-	5	10	15	20
	2. Sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan dan standar mutu internasional	-	2	4	6	8
	3. Kerjasama instansi terkait, dan " Approval Program " antara pemasok dan industri / eksportir	-	4	10	15	20
	4. Kerjasama standardisasi dengan memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional (Codex, SPS, ISO , ILAC, APLAC, ACCSQ)	-	10	20	30	40
	5. Fasilitasi notifikasi dan pembahasan hambatan teknis perdagangan	-	5	10	15	20
	6. Pengembangan jaringan kerjasama informasi dan penyebaran informasi/dokumentasi mutu sektor pertanian	-	4	8	12	16
	7. Pertemuan teknis dan penyelenggaraan bulan mutu nasional	-	2	3	4	5
	8. Bimbingan teknis Kerjasama peningkatan SDM.	-	2	4	6	8
	9. Kerjasama dan Harmonisasi dengan negara mitra	-	5	10	15	20



BAHAGIAN II : KILAS PERJALANAN, PERAN DAN FUNGSI STRATEGIS PPHP

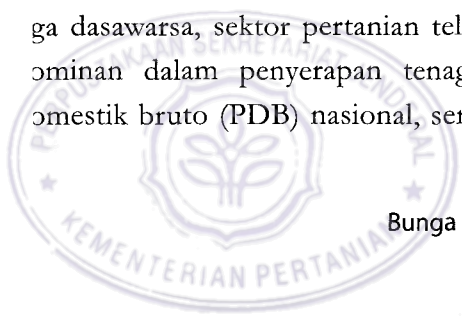




Arah Pembangunan Pertanian Kedepan

1.1 Pergeseran Paradigma Pembangunan Pertanian

Sejarah membuktikan bahwa peran pertanian sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi bangsa sudah tidak bisa diragukan lagi. Selama ini, sektor pertanian telah berhasil memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, serta penyedia pangan utama bagi sebagian



besar masyarakat Indonesia.

Walau demikian, belajar dari pengalaman yang lalu dan mempertimbangkan tantangan dan peluang masa depan, maka kebijakan pembangunan pertanian di masa depan perlu dilakukan reorientasi. Hal ini mengingat adanya sejumlah kecenderungan-kecenderungan baru selaras dengan pesatnya perkembangan sistem ekonomi, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta industrialisasi di segala bidang. Beberapa kecenderungan baru tersebut adalah: **Pertama**, berubahnya kegiatan ekonomi dari orientasi peningkatan produksi ke orientasi pasar. **Kedua**, berkembangnya kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan memperdagangkan sarana produksi usahatani, serta kegiatan yang mengolah hasil usahatani dan perdagangannya, baik di pasar domestik maupun internasional. **Ketiga**, makin kuatnya keterkaitan antara kegiatan usahatani dengan kegiatan di luar usahatani. **Keempat**, adanya perubahan motor penggerak kegiatan ekonomi yakni dari usahatani ke industri pengolahan hasil pertanian. Adanya kecenderungan tersebut mendorong perubahan kegiatan ekonomi dari yang masih terbatas pada kegiatan usahatani (*on-farm*) menjadi suatu sektor ekonomi modern dan besar yang dikenal sebagai sektor *agribisnis*.

Sistem agribisnis merupakan totalitas atau kesatuan kinerja dari lima sub-sistem agribisnis yang terdiri dari: **Pertama**, sub-sistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) yakni industri-industri yang menghasilkan bahan modal bagi pertanian yakni industri perbenihan atau pembibitan tumbuhan dan ternak, industri agrokimia dan industri agro-otomotif serta industri pendukungnya. **Kedua**, sub-sistem usahatani (*on-farm agribusiness*) yakni kegiatan yang menggunakan barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. **Ketiga**, sub-sistem agribisnis pengolahan (*down-stream agribusiness*) yakni industri yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan baik produk antara (*intermedia product*) maupun produk akhir (*finish product*). Termasuk di dalamnya adalah industri makanan, industri minuman, industri barang-barang serat alam (seperti barang-barang karet, *plywood*, *pulp*, kertas, bahan-bahan bangunan terbuat dari kayu, rayon, benang dari kapas atau sutera, barang-barang kulit, tali dan karung), industri biofarmaka, serta industri agrowisata dan estetika. **Keempat**, sub-sistem agribisnis pemasaran yakni kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan di dalam dan di lu-

geri. Termasuk didalamnya adalah kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditi dari sentra produksi ke sentra konsumsi, promosi, informasi, serta intelijen pasar (*market intelligence*). **Kelima**, sub-sistem jasa yang menyediakan jasa bagi sub-sistem agribisnis hulu, sub-sistem usahatani dan sub-sistem agribisnis hilir. Termasuk kedalam sub-sistem ini adalah penelitian dan pengembangan, perkreditan dan asuransi, transportasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, sistem informasi dan dukungan kebijakan pemerintah.

Dalam pembangunan sistem agribisnis, kelima sub-sistem tersebut serta usaha-usaha di dalamnya harus dikembangkan secara simultan dan harmonis. Karena itu, tugas manajemen pembangunan ke depan adalah mengorkestra perkembangan kelima sub-sistem agribisnis tersebut secara harmonis, sehingga didapat nilai tambah, daya saing dan akses pasar yang lebih tinggi bagi produk pertanian Indonesia.



Gambar 7.1. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Program 2 in 1

2 Arah Pembangunan Pertanian Jangka Panjang 2005-2025

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025, maka pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, yakni memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi yang berdaya saing global. Untuk itu butir 15 dan 16 lampiran UU No 17 tahun 2004 mengamanatkan bahwa:

Butir 15: Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer, terutama sektor pertanian dalam arti luas, ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi secara nasional. Hal ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan. Semua itu harus dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian nasional ke arah yang lebih maju dan lebih kokoh pada era globalisasi.

Butir 16: Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah pertanian dalam arti luas dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani. Peningkatan itu diselenggarakan melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumberdaya, dan pengembangan sumberdaya manusia pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya, upaya tersebut dapat menciptakan diversifikasi perekonomian pedesaan yang pada gilirannya meningkatkan sumbangan di dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Perhatian perlu diberikan pada upaya pengembangan kemampuan masyarakat, pengentasan kemiskinan secara terarah, serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.

Untuk langkah operasionalnya Kemtan menyusun RENSTRA jangka panjang, yakni dengan tujuan akhir pembangunan pertanian adalah **terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sistem pertanian industri**. Pembangunan pertanian jangka panjang sektor pertanian berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian.

Sasaran jangka panjang pembangunan pertanian adalah (1) **terwujudnya sistem pertanian industri yang berdaya saing**, (2) mantapnya ketahanan pangan secara mandiri, (3) terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat

pertanian, dan (4) terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian dan tercapainya pendapatan petani US \$ 2.500 per kapita per tahun.

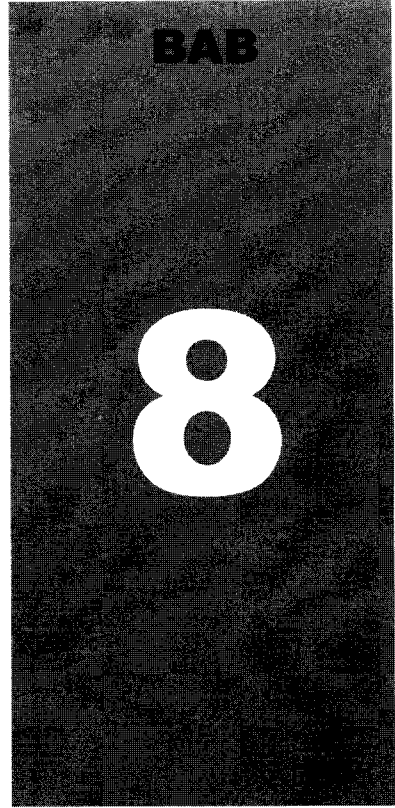
Visi pembangunan pertanian periode tahun 2005 – 2025 adalah ” **Terwujudnya sistem pertanian industrial berkelanjutan yang berdayasaing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani ”.**

Untuk mencapai visi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah

- 1). Membangun basis bagi partisipasi petani.
- 2). Meningkatkan potensi basis produksi dan skala usaha pertanian.
- 3). Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sumberdaya insani pertanian yang berkualitas.
- 4). Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian.
- 5). Mewujudkan sistem pembiayaan pertanian tepat guna.
- 6). Mewujudkan sistem inovasi pertanian
- 7). Penyediaan sistem insentif dan perlindungan bagi petani.
- 8). Mewujudkan sistem usahatani bernilai tinggi melalui intensifikasi dan perwilayahan pengembangan komodita unggulan.
- 9). Mewujudkan agroindustri berbasis pertanian domestik di perdesaan.
- 10). Mewujudkan sistem rantai pasok terpadu berbasis kelembagaan pertanian yang kokoh.
- 11). Menetapkan pratek pertanian dan manufaktur yang baik.
- 12). Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berpihak kepada petani dan pertanian.

Bahwa berdasarkan arahan-arahan kebijakan pembangunan pertanian 2005-2025 baik yang tertuang dalam tujuan, sasaran, visi maupun garis-garis besar kebijakan terlihat peranan sektor pengolahan dan pemasaran hasil pertanian termasuk didalamnya peningkatan mutu hasil pertanian sangatlah besar bagi keberhasilan pembangunan pertanian di indonesia.





Sekilas Perjalanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian Di Kementerian Pertanian

3.1. Perjalanan Organisasi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Dinamika pembangunan nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II) menunjukkan bahwa pembangunan pertanian saat itu dan prediksi ke masa depan pada hakekatnya dilandasi keinginan untuk menangkap signal-signal positif dan perubahan pada lingkungan strategis baik eksternal maupun internal terutama yang terkait dengan dinamika permintaan, teknologi dan sumberdaya.

Dalam hal ini, penajaman, peningkatan dan perluasan dalam pembangunan pertanian merupakan suatu keharusan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat pertanian serta ketahanan dan daya saing ekonomi Indonesia.

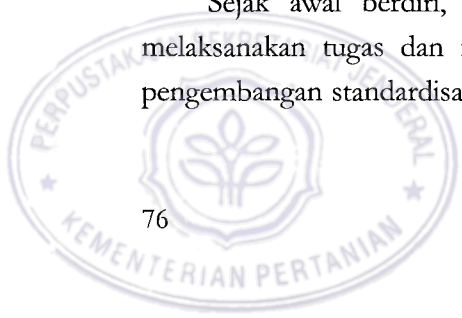
Berdasarkan kerangka berpikir strategis tersebut, pembangunan pertanian dengan pendekatan sistem agribisnis saat itu merupakan suatu upaya yang sangat strategis untuk mencapai berbagai tujuan ganda, antara lain untuk (1) mendorong sektor pertanian, (2) menciptakan struktur pertanian yang tangguh, (3) menciptakan nilai tambah, (4) meningkatkan penerimaan devisa, (5) menciptakan lapangan kerja, dan (6) memperbaiki distribusi pendapatan dan sekaligus mengeliminasi kemiskinan.

Bahwa proses perakitan pendekatan pembangunan pertanian berwawasan agribisnis tersebut diharapkan menjadi wahana atau proses untuk mencapai sasaran strategis seperti pendapatan, nilai tambah, pemerataan dan stabilitas dan akan terus berlangsung secara bertahap menuju postur idealnya.

Untuk memacu pelaksanaan pengembangan agribisnis di Indonesia, maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1993 yang selanjutnya dijabarkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT/210/2/1994 dibentuklah satu unit eselon I yang menangani pengembangan usaha pertanian yaitu Badan Agribisnis dengan tugas melaksanakan pengembang agribisnis. Dalam menjalankan tugas tersebut Badan Agribisnis menyelenggarakan fungsi : (1) perumusan kebijakan teknis pengembangan agribisnis, (2) perumus program dan pembinaan kegiatan pengembangan agribisnis, (3) pelaksanaan kegiatan standardisasi mutu, pengembangan pasar dan informasi pasar, kemitraan usaha, pengembangan pola investasi dan penanaman modal serta penanganan AMDAL, dan (4) pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Badan Agribisnis.

Sebagai unsur pendukung, Badan Agribisnis diharapkan mampu menyusur suatu rancang bangun, model-model serta instrumen kebijakan pengembang agribisnis untuk dapat diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Teknis c.q. Direktorat Bina Usaha dan Pengolahan Hasil dalam upaya mempercepat pengembangan agribisnis.

Sejak awal berdiri, Badan Agribisnis telah berupaya sebaik-baiknya melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya yang berkaitan dengan upaya pengembangan standardisasi dan akreditasi, pengembangan informasi dan pasar.





Gambar 8.1. Gedung Kementerian Pertanian

pengembangan usaha dan kelembagaan agribisnis, serta pengembangan investasi, ermodalan dan AMDAL. Keberhasilan di dalam mendorong pengembangan gribisnis tersebut dimungkinkan berkat dukungan pengembangan tatanan rganisasi yang utuh dan sesuai dengan kebutuhan saat itu. Namun dikarenakan inamika pengembangan aspek substansial pengembangan agribisnis nampaknya erjalan lebih cepat dari pada dukungan aspek organisasi, sehingga menimbulkan erbagai permasalahan seperti; (a) terjadinya tumpang-tindih kegiatan antar pusat, b) kurangnya koordinasi pelaksanaan kegiatan, (c) belum sinkronnya berbagai ebijakan operasional dan program kegiatan, (d) kurangnya keterkaitan hubungan erja antar unit kerja internal maupun eksternal, serta (e) permasalahan manajemen innya.

Berdasarkan pengalaman tersebut dan untuk dapat mengelola keberhasilan pengembangan agribisnis, maka Badan Agribisnis direorganisasi kearah yang ebih operasional untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Pada masa Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keppres Jo.136 Tahun 1999 dengan Menteriya DR.Muhammad Prakoso terjadi erubahan organisasi dimana Badan Agribisnsi direorganisasi untuk dapat lebih perasional menjadi Direktorat Jenderal Industri Primer Dan Pemasaran Hasil

Pertanian melalui Keputusan Menteri Nomor 160 Tahun 2000.

Pada tahun 2000 Kabinet Persatuan Nasional (selanjutnya berdasarkan Keppres No. 234/ M Tahun 2000) dibubarkan, dan dibentuk Kabinet Gotong Royong berdasarkan Keppres No. 228/ M Tahun 2001. Pada masa Kabinet Gotong Royong dilakukan konsolidasi dan penataan struktur organisasi.

Berdasarkan Keppres No.109 Tahun 2001, Direktorat Jenderal Industri Primer dan Pemasaran Hasil Pertanian berubah namanya menjadi Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang unit pendukung dibawahnya berdasarkan pendekatan komoditas yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Direktorat Pengembangan Usaha.

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional serta mempertimbangkan kendala-kendala yang dihadapi, maka pada tahun 2005 berdasarkan Keppres No. 10 tahun 2005, Unit Organisasi yang menangani pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tersebut mengalami perubahan menjadi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan penekatan fungsi pada unit pendukung dibawahnya.

8.2 Peraturan Yang Terkait :

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman.

Dalam undang-undang ini diatur mengenai penanganan Pasca Panen Standar Mutu Hasil Budidaya, Standar Unit Pengolahan, Alat Transportas dan Unit Penyimpanan Hasil Budidaya Tanaman, serta harga dasar hasil budidaya tanaman tertentu (pasal 31,32, 33 , 34 dan 36).

Pasal 4 : ruang lingkup system budidaya tanaman meliputi prose kegiatan produksi sampai pasca panen.

Pasal 31 : Ayat (1) Pasca panen meliputi kegiatan pembersihan pengupasan, sortasi, pengawetan, penyimpanan, satndardisasi mutu dan transportasi hasil budidaya tanaman. Ayat (2) kegiatan pasca panen ditujukan untuk meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan dan ata kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya gun serta nilai tambah.

Pasal 36 Pemerintah menetapkan harga dasar hasil budidaya tanaman tertentu

- 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumberdaya manusi yang berkualitas, untuk itu maka perlu pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia.

- 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Departemen Pertanian bertanggung jawab terhadap :

- 1) Pemenuhan persyaratan sanitasi diseluruh kegiatan rantai pangan segar dengan cara penerapan cara budidaya yang baik dan produksi pangan segar yang baik.
 - 2) Bertanggung jawab terhadap penetapan persyaratan pangan segar yang akan dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk di edarkan maupun dikeluarkan dari wilayah Indonesia.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri.

Dalam peraturan ini kewenangan Departemen Pertanian adalah : a. Gula pasir dari tebu, b. Esktraksi kelapa sawit, c. Penggilingan padi dan penyosohan beras, d. Teh hitam dan hijau, e. Vaksin, sera dan bahan-bahan diagnostika biologis. Namun demikian sesuai pasal 3 penambahan kewenangan ini dimungkinkan dengan melalui mekanisme Peraturan Presiden.

- 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 380/Kpts/OT.130/10/2005 Tentang Penunjukan Direktorat Jenderal PPHP Sebagai Otoritas Kompeten Pangan Organik .

Keputusan Menteri Pertanian nomor 170 tentang penunjukan Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagai Notification Body (Single Central Government Authority) untuk notifikasi peraturan SPS (Sanitary And Phytosanitary) di Indonesia. Kewenangan sebagai Notification Body ini sudah dilakukan sejak Badan Agribisnis (..).

- 4. Keppres No. 47 Tahun 1986 Tentang Penanganan Pasca Panen

Pasal 2 Ayat (1) ; Penanganan Pasca Panen hasil pertanian meliputi

semua kegiatan perlakuan dan pengolahan langsung terhadap hasil pertanian yang karena sifatnya harus segera ditangani untuk meningkatkan mutu hasil pertanian agar mempunyai daya simpan dan daya guna.

Pasal 7. Dalam melaksanakan tugas peningkatan penanganan pascapanen hasil pertanian Menteri Pertanian berkewajiban : a). Menyusun dan mengembangkan program peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian, b). Menyelenggarakan penelitian, pengujian, dan penerapan teknologi pasca panen, c). Menyelenggarakan pendidikan, penyuluhan dan latihan yang diperlukan dalam rangka peningkatan penanganan pasca panen, d). Menentukan jenis, mutu, alat, dan sarana pasca panen, e). Menetapkan sertifikat mutu dan sertifikat kelayakan unit pengolahan hasil pertanian sesuai dengan Standar Pertanian Indonesia, f). Menetapkan dan menerapkan Standar Pertanian Indonesia, dan g). Merekomendasikan produk hasil pertanian untuk industri.

- h. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Industri Nasional:

Bahwa rancangan Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Industri Nasional (KPIN) diharapkan dapat menjadi tuntunan serta acuan bagi seluruh pihak yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pembangunan industri baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Industri Nasional yaitu Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru Tahun 2020.

Bahwa dengan mencantumkan keterlibatan Departemen Pertanian dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan industri nasional ini merupakan suatu pengakuan adanya peranan Departemen Pertanian dalam bidang industri dengan batasan tertentu.

- i. Revitalisasi Pertanian - *Profit Centre Must be on the Farmer*

Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) merupakan komitmen dan program Kabinet Indonesia bersatu yang dicanangkan oleh Presiden republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Juni 2005 dengan agenda dan program ekonomi dan kesejahteraan :

Perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja melalui ; (1) revitalisasi pertanian dan pedesaan, (2) revitalisasi kelautan dan wilayah pesisir, (

reformasi agraria, dan (4) daya saing ekonomi pedesaan.

Penghapusan kemiskinan melalui ; (1) **ketahanan pangan**, (2) **revitalisasi pertanian dan pedesaan**, (3) revitalisasi kelautan dan wilayah pesisir, dan (4) **infrastruktur pedesaan** dan daerah terpencil.

Fokus pengembangan produk dan bisnis pertanian, perikanan dan kehutanan mencakup lingkup kategori produk yang berfungsi dan berperan dalam.

- 1) Membangun ketahanan pangan, yang terkait dengan aspek pasokan produk, aspek pendapatan dan keterjangkauan, dan aspek kemandirian.
- 2) Sumber perolehan devisa, terutama terkait dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di pasar internasional.
- 3) Penciptaan lapangan usaha dan pertumbuhan baru, terutama terkait dengan peluang pengembangan kegiatan usaha baru dan pemanfaatan pasar domestik, dan
- 4) Pengembangan produk-produk baru, yang terkait dengan berbagai isu dan kecenderungan perkembangan masa depan.
- 5) Kebijakan dan strategi RPPK dinyatakan dalam setiap instrumen kebijakan dan keputusan dengan prioritas-prioritas sebagai berikut : (a) investasi dan pembiayaan, (b) manajemen pertanahan dan tataruang, (c) pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam, (d) infrastruktur pedesaan, (e) pengembangan SDM dan pemberdayaan petani-nelayan, (f) riset dan pengembangan teknologi, (g) kebijakan perdagangan, (h) promosi dan pemasaran, (i) perpajakan dan retribusi, (j) dukungan langsung bagi petani, nelayan, dan petani-hutan, (k) kebijakan pangan, dan (l) agroindustrialisasi pedesaan.

Terkait dengan komitmen dan program yang tertuang dalam RPPK terlihat bahwa peran bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sangat dominan (termasuk upaya perbaikan mutu hasil pertanian).

Mencermati peraturan-peraturan terkait tersebut di atas maka sudah wajar apabila fungsi-fungsi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian diperkuat perannya di lingkup Departemen Pertanian. Agar pelaksanaan program pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berjalan dengan optimal

maka idealnya fungsi tersebut dilaksanakan oleh instansi setara dengan eselon lainnya. Bahkan fungsi dan peranan organisasinya perlu didorong dan diperkuat sampai ke tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota.





Peranan Pengolahan Hasil Pertanian (Industri Primer)

.1 Kondisi Saat Ini

- a. *Triple Track Strategy*” dalam Program Pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2005 - 2009 yang meliputi “*pro growth, pro poor dan pro job*” dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional merupakan acuan bagi semua Departemen dalam menyusun program kegiatan.

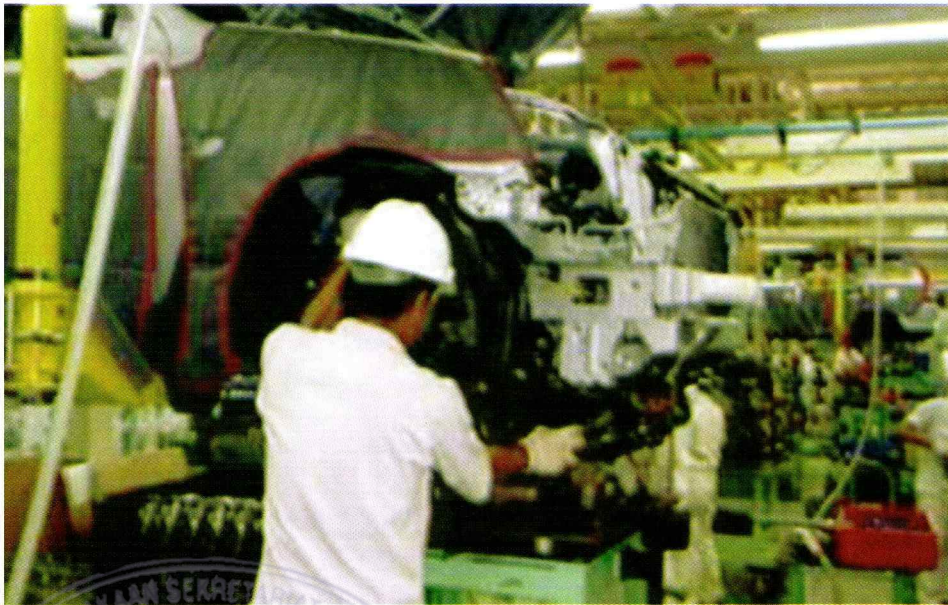
Dalam mengimplementasikan strategi tersebut berbagai masalah pembangunan di sektor pertanian dan perdesaan akan memberikan dampak serius terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Salah satu kondisi sosial ekonomi dan kebijakan yang perlu direvitalisasikan ialah bahwa *profit centre* usaha agribisnis/agroindustri tidak berada pada petani sehingga petani hanya menerima bagian terkecil dari keuntungan agribisnis/ agroindustri.

- b. Daya saing Indonesia mengalami kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun. Menurut *World Economic Forum's* dalam laporannya tentang *Global Competitiveness Report*, pada tahun 2000 Indonesia berada pada peringkat ke-44 dari 59 negara, sedangkan pada tahun 2001 turun menjadi peringkat ke 62 dunia. Pada tahun 2002 turun kembali ke peringkat 67, pada tahun 2003 menjadi peringkat 72, 2004 naik ke peringkat 64, dan pada tahun 2005 turun ke peringkat 74 dari 117 negara di dunia. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN di tahun 2005 Indonesia memiliki peringkat *Growth Competitiveness* yang sangat rendah, kecuali jika dibandingkan dengan Philipina yang berada di peringkat 77 dan Vietnam pada peringkat 81.
- c. Sektor pertanian memiliki peranan strategis dalam mengatasi permasalahan struktural pembangunan nasional yang ditunjukkan oleh kontribusinya pada urutan ketiga terbesar dalam pembentukan GDI nasional (13.81% pada Triwulan ke III) tahun 2006 dan dominan dalam penyerapan tenaga kerja (45.0%). Kontribusi makro yang signifikan tersebut diperkuat dengan peran lain, yaitu kontribusi produk-produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (PPK) dalam ekspor netto yang positif dan bertumbuh, serta peran PPK dalam menyangga ekonomi pada saat krisis (*buffer role*). Pada saat ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif hingga - 13,7 % tahun 1997/1998, PPK masih tumbuh positif 0,9 %. Namun, produktivitas sektor pertanian masih rendah karena masih tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran di pedesaan yang berimplikasi pada rendahnya kesejahteraan petani.
- d. Berdasarkan hasil kegiatan dibawah ini terlihat bahwa kondisi saat ini, perolehan keuntungan/pembagian pendapatan dalam sistem

agribisnis masih sangat timpang dimana sub sistem budidaya hanya memperoleh 9 % dari keseluruhan pendapatan yang didapat dalam proses produk hasil pertanian. Sementara itu yang bergerak di sub sistem budidaya adalah para petani. Untuk itulah mau tidak mau pembangunan pertanian ke depan harus dapat mengubah pola pendapatan ini dengan mendorong petani dapat dan mau berperan aktif di bidang pengolahan dan pemasaran yang memperoleh porsi terbesar keuntungan yaitu melalui program industrialisasi pedesaan dan mendorong petani untuk dapat menjadi pemasok.

Lapangan Usaha		Persentase
A	Manufaktur Sarana Produksi	12 %
B	Budidaya	9 %
C	Pengolahan/agroindustri	17 %
D	Perdagangan besar/grosir	21 %
E	Pengecer	23 %
F	Distribusi	18 %

Sumber : *) Bayu Krisnamurthi (2001) dalam Damardjati, (2007).



Gambar 9.1. Pengolahan/Agroindustri

9.2 Pembelajaran dari Negara lain

a. Malaysia

Sejak tahun 2004 Kementerian Pertanian Malaysia berubah nama menjadi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (*Ministry of Agriculture and Agrobased Industry*). Perubahan ini terjadi karena adanya keinginan Pemerintah Malaysia untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian yang dapat dinikmati langsung oleh petani. Dengan perubahan ini, maka semua industri pengolahan yang mengutamakan komoditas/produk pertanian sebagai bahan bakunya menjadi binaan dari Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Oleh sebab itu, visi yang diangkat untuk kementerian ini adalah “*Leader in agricultural transformation*” yang tujuan utamanya bagaimana meningkatkan nilai tambah komoditas, kesejahteraan pertanian dan sekaligus sebagai sumber devisa yang dapat diandalkan.

Dengan konsep tersebut di atas, maka industri pengolahan kopi misalnya sudah menjadi binaan langsung dari Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Bahkan, salah satu tugas dari Kementerian tersebut adalah mengupayakan diversifikasi industri produk pertanian. Demikian juga dengan beberapa produk makanan yang menggunakan bahan baku produk pertanian merupakan tanggung jawab dari Kementerian tersebut.

b. Australia

Di Australia pembangunan sektor pertanian dan agroindustri ditangan oleh Departement of Primary Industry (DPI). Sebagai gambaran, di negara bagian Queensland misalnya, visi yang diangkat adalah “*profitable primary industries for Queensland, and supports strategic industry development at all stages of the industry lifecycle and throughout the entire value chain from production to consumption*”. Sedangkan misi yang diemban adalah “*to maximize the economic potential of Queensland’s Primary industries on a sustainable basis*”.

Dari visi dan misi tersebut terlihat bahwa Pemerintah Australia benar benar memberikan wewenang kepada DPI untuk melakukan pembinaan teknis terhadap industri yang menggunakan bahan baku produk pertanian. Dengan demikian maka tugas dari DPI tidak hanya pembinaan di sub sistim on-farm, tetapi bagaimana produk pertanian dan olahannya sampai kepada konsumen dengan baik. Hal ini sangat beralasan sehingga pembangun pertanian dapat berjalan dengan sangat kondusif karena nilai tambah yang

diperoleh berada pada tingkat petani ataupun kepada petani. Contoh yang sangat nyata di Australia bahwa industri susu segar merupakan binaan DPI.

c. Selain contoh di atas, hampir seluruh negara-negara di dunia memiliki organisasi/departemen yang menangani Industri Primer bidang pertanian. Berikut adalah daftar negara-negara yang memiliki unit/departemen Industri Primer (serupa dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian) :

- 1) The Ministry of Agricultura and Agrobased Industry, Malaysia
- 2) Assitant Secretary Agribusiness & Marketing & Goal 2 Focal Person, Departement of Agriculture the Philippines
- 3) Office of Agriculture Economics, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand
- 4) Departement of Primary Industries & Fisheries, Queensland Australia
- 5) Departmentof Primary Industries Victoria, Australia
- 6) NSW Department of Primary Industries, New South Wales, Australia
- 7) Department of Primary Industries and Water, Tasmania, Australia
- 6) Department of Primary Industries and Resources, South Australia, Australia
- 9) Departmen of Primary Industries, Queensland, Brisbane, Australia
- 10) Department of Primary Industry, Fisheries, and Mines – DPIFM, Northern Territory Australia
- 11) The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), India. APEDA adalah unit organisasi yang didirikan untuk mengembangkan komoditas pertanian dan olahan pangan dan meningkatkan eksportnya.
- 12) Brazil bahkan mempunyai 2 organisasi dibawah Ministerio da Agricultura Pecuarua e Abastecimento (Departemen Pertanian Brazil) yang menangani industry primer dan pemasaran yaitu :
 - a. Secretaria de Relacoes International do Agronegocio (menangani pemasaran dan promosi serta hubungan internasional termasuk negosiasi bidang pertanian dan SPS)
 - b. Secretria de Politica Agrocola (pemasaran, ekonomi dan politik

- pertanian serta masyarakat pedesaan)
- a. Secretaria de Relacoes International do Agronegocio (menangar pemasaran dan promosi serta hubungan internasional termaksu negosiasi bidang pertanian dan SPS)
 - b. Secretria de Politica Agricola (pemasaran, ekonomi dan politi pertanian serta masyarakat pedesaan)

9.3 Struktur Organisasi dan Tupoksi

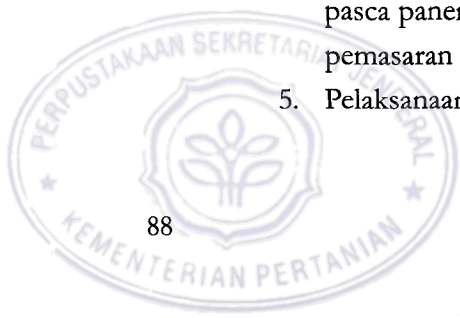
Unit Organisasi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian

9.3.1. Di Tingkat Pusat

Penanganan masalah pengolahan dan pemasaran has pertanian di tingkat pusat yang dilakukan secara terfokus dimul dengan berdirinya Badan Agribinis pada tahun 1994, dan terakh sesuai tuntutan perkembangan berdasarkan Keputusan Presiden F Nomor 10 Tahun 2005 menjadi Direktorat Jenderal Pengolahan Da Pemasaran Hasil Pertanian.

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertania mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan da standardisasi teknis di bidang pengolahan pemasaran hasil pertanian dengan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan pas panen, pengolahan hasil pertanian, mutu dan standardisa pemasaran domestik, dan pemasaran internasional.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan penanganan pas panen, pengolahan hasil pertanian, mutu dan standardisa pemasaran domestik dan pemasaran internasional.
3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur bidang penanganan pasca panen, pengolahan hasil pertanian mutu dan standardisasi, pemasaran domestik dan pemasar internasional.
4. Pemberian bimibingan teknis dan evaluasi di bidang penangan pasca panen, pengolahan hasil pertanian, mutu dan standardisa pemasaran domestik, pemasaran internasional.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

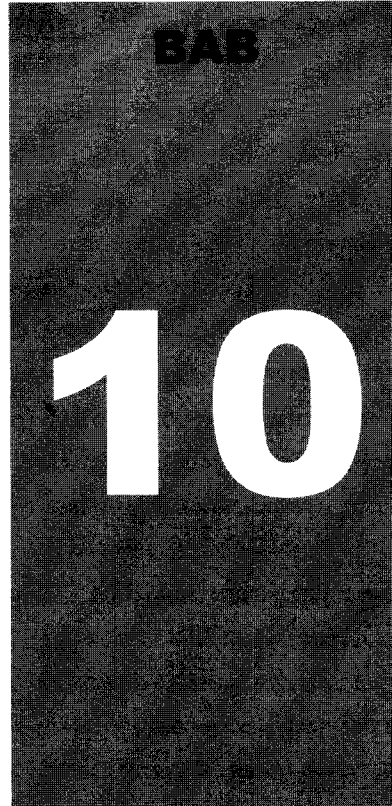


Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri dari :1). Sekretariat Direktorat Jenderal. 2). Direktorat Penanganan Pasca Panen, 3). Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, 4). Direktorat Mutu dan Standardisasi, 5). Direktorat Pemasaran Domestik, dan 6). Direktorat Pemasaran Internasional

9.3.2. Di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota.

Penangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di tingkat daerah baik di propinsi maupun Kabupaten/Kota masih bervariasi, antara lain di beberapa daerah ditangani oleh unit eselon III (Kepala Bidang) di bawah dinas lingkup pertanian sedangkan sebagian lain masih ditangani oleh eselon IV (Kepala Seksi) bahkan ada yang hanya merupakan salah satu tugas dan fungsi eselon IV.





Peran Di Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian

1.1 Penanganan Pasca Panen

Kegiatan penanganan pasca panen mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Restrukturisasi Departemen Pertanian khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan.

Melalui kegiatan penanganan pasca panen ini maka kehilangan hasil komoditas pertanian akan ditangani secara intensif dan ini akan mengurangi tingkat kehilangan hasil yang nantinya akan berdampak pada perolehan nilai tambah petani dan apabila dihitung secara nasional akan berdampak pada peningkatan stok beras nasional. Berikut adalah salah satu program kegiatan dalam penanganan pasca panen :

- 1) Pengembangan 4500 GAPOKTAN padi melalui fasilitasi peralatan panen revitalisasi penggilingan padi, dan pendampingan di 139 Kab./Kota.
- 2) Pengembangan 350 GAPOKTAN jagung melalui fasilitasi sarana pengeringan dan pergudangan (SILO) di 70 Kab./Kota.
- 3) Pengembangan grading and packaging house dan pergudangan berbasis sistem jaminan mutu produk hortikultura (manggis, mangga, jeruk, bawang merah, biofarmaka) di 100 GAPOKTAN.
- 4) Pengembangan high quality fermented cocoa bean sesuai SNI di 58 Kab., Kota.
- 5) Pengembangan bahan olah karet (bokar) bermutu sesuai SNI di 35 Kab., Kota.
- 6) Revitalisasi Rumah Potong Hewan/ Unggas higienis di 170 Kab./Kota.

10.2 Pengolahan Hasil Pertanian

Kegiatan pengolahan hasil pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Restrukturisasi Departemen Pertanian khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui penumbuhan budaya industri / industrialisasi pedesaan, perolehan nilai tambah bagi petani dan perluasan kesempatan kerja serta penumbuhan kelompok-kelompok usaha.

Melalui kegiatan pengolahan hasil pertanian ini maka upaya peningkatan nilai tambah bagi petani akan diupayakan meningkat melalui program industrialisasi pedesaan yang berbasis pertanian. Hal ini perlu dilakukan, pengalaman dan hasil kajian menunjukkan bahwa sub sistem budidaya hanya memperoleh porsi terkecil dari keseluruhan rantai komoditas pertanian dan yang terbesar ada di sub sistem hilir, oleh karena itu maka sebagai penjabaran salah satu arah dari kebijakan pembangunan pertanian ke depan, maka penumbuhan budaya industri

nelalui industrialisasi pedesaan yang berbasis pertanian memegang peran kunci ang sangat penting. Berikut adalah program dan kegiatan di bidang pengolahan asil pertanian :

-) Pengembangan 60 GAPOKTAN pengolah bahan pangan karbohidrat non-beras berbasis sumberdaya lokal di 45 Kab./Kota.
-) Pengembangan 200 GAPOKTAN pengolah hasil perkebunan (kelapa, kopi, nilam/ minyak atsiri, lada, gambir, kakao) di 80 Kab./Kota.
-) Pengembangan 100 GAPOKTAN pengolah hasil hortikultura (mangga, jeruk, pisang, cabe, bawang merah, biofarmaka) di 60 Kab./Kota.
-) Pengembangan 110 GAPOKTAN pengolah hasil peternakan (susu dan olahan daging) di 100 Kab./Kota.
-) Pengembangan 1000 GAPOKTAN pengolah bio-energy berbasis kelapa , jarak pagar, dan bio-gas limbah ternak sebagai pengganti BBM pada daerah langka BBM di 80 Kab./Kota.
-) Pengembangan 15 kebijakan agroindustri pedesaan.

0.3 Mutu dan Standardisasi

Kegiatan penanganan mutu dan standardisasi pertanian mempunyai peranan ang sangat penting dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 ahun 2007, Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Restra Departemen Pertanian khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan kaulitas asil pertanian dan membangun kemampuan daya saing komoditas pertanian.

Melalui kegiatan penanganan mutu dan standardisasi hasil pertanian ini naka praktek pertanian yang baik akan ditangani secara serius dan ini akan nenumbuhkan kemampuan daya saing produk-produk pertanian. Di era globalisasi anya produk yang berkualitas yang akan mampu bersaing. Untuk itulah maka upaya peningkatan kualitas produk pertanian Indonesia perlu ditangani secara erius dengan penerapan praktek pertanian yang baik, pengembangan sistem aminan mutu dan pengebangan kelembagaan mutu yang terakreditasi. Hal- ial tersebut berlaku secara umum di negara-negara lain termasuk di dalamnya agimana kita melindungi produk pertanian dari serbuan produk pertanian egara lain. Berikut adalah salah satu program/ kegiatan dalam penangan mutu lan standardisasi :

-) Pembangunan dan pengoperasian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan

di Pusat dan di 33 Provinsi.

- 2) Pembangunan dan pengoperasian Otoritas Kompeten Pangan Organik Pusat dan 20 LSO.
- 3) Penyusunan 85 kebijakan Pangan Organik, Mutu dan Keamanan Pangan dan Laboratorium Penguji Rujukan (50 RSNI, 5 Permentan, 30 Pedoman)
- 4) Fasilitasi sertifikasi jaminan mutu terhadap 280 GAPOKTAN.
- 5) Peningkatan kompetensi 1200 fasilitator dan pengawas Mutu dan Keamanan Pangan, dan negosiator Mutu dan Standardisasi.
- 6) Pengembangan UPT Balai Pengujian Mutu Alsintan untuk bisa melakukan 100 pengujian mutu dan sertifikasi alsintan per tahun.
- 7) Berperan aktif dalam kerjasama dan harmonisasi standar di forum region dan internasional.

10.4 Pemasaran Domestik

Kegiatan penanganan pemasaran domestik mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Restrukturisasi Departemen Pertanian khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan posisi tawar petani, meningkatkan pendapatan petani dan perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.

Melalui kegiatan penanganan pemasaran domestik ini, maka kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian termasuk masalah distribusi untuk memperlancar arus komoditas dari sentra produksi ke sentra konsumen, promosi, informasi pasar, serta intelijen pasar akan dapat ditangani dengan baik. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan posisi tawar dan pendapatan petani secara umum. Berikut adalah salah satu program/kegiatan dalam penanganan pemasaran domestik :

- 1) Penyusunan 8 kebijakan Menteri tentang pengaturan importasi beras jagung, kedelai, dan bawang merah.
- 2) Penyusunan 500 rekomendasi pengaturan volume impor beras tertentu.
- 3) Penyusunan dan pengawalan kebijakan HPP dan HMR komoditi strategis
- 4) Pengembangan 200 jaringan kerjasama dan kemitraan pemasaran komoditi strategis di 200 GAPOKTAN.
- 5) Pembangunan dan pengoperasian 70 pasar tani, 50 farm gate market , 1

- pasar lelang, dan 50 pasar ternak di 160 GAPOKTAN.
-) Pembangunan sistem informasi pasar yang “interaktif dan real time” di Pusat, di 33 Ibukota Provinsi dan di 200 Kab./Kota.
 -) Pelaksanaan 25 event promosi dalam negeri untuk meningkatkan serapan pasar sebesar minimal 10 %.



Gambar 10.1. Mangga Cirebon

0.5 Pemasaran Internasional

Kegiatan penanganan pemasaran internasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Restrukturisasi Departemen Pertanian khususnya dalam peningkatan sumber devisa, menciptakan keunggulan komparatif di pasar internasional serta perlindungan terhadap produk domestik dalam negeri melalui berbagai perundingan-perundingan dengan negara lain. Berikut adalah salah satu program/ kegiatan dalam penanganan pemasaran internasional :

- 1) Pengembangan 40 GAPOKTAN komoditi strategis yang berorientasi ekspor.
- 2) Pelaksanaan 40 misi dagang, eksebisi/ pameran internasional. dan kampanye green product di 16 negara.
- 3) Pengembangan dan pengimplementasian 10 kerjasama pedagang bilateral dan regional untuk meningkatkan ekspor.
- 4) Pengembangan analisa pasar dan market intelijen untuk 10 komoditi strategi: (minyak sawit, kakao, karet, kopi, rempah, mangga, manggis, pisang, nenas dan tanaman hias).
- 5) Pengembangan kebijakan Pungutan Ekspor (PE), PPN, dan Tarif Be: Masuk (TBM) untuk promosi dan proteksi komoditi strategis.
- 6) Intensifikasi perundingan di forum bilateral, regional, dan multilateral untuk meningkatkan akses pasar produk pertanian Indonesia.

Beberapa peran dan kinerja lainnya.

- 1) Pembinaan diversifikasi usahatani tersebut semakin intensif sejajar perubahan dari Badan Agribisnis ke Direktorat Jenderal Teknis dalam jajaran Departemen Pertanian pada tahun 2000. Sampai dengan tahun 2006 jumlah usaha agroindustri perdesaan yang telah dibina melalui kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian oleh pusat dan daerah kurang lebih sebanyak 6626 unit, terdiri dari pengolahar tanaman pangan (1426 unit), hortikultura (537 unit), peternakan (526 unit) perkebunan (3756 unit) dan produksi kompos/pupuk organik (381 unit) yang tersebar diseluruh Indonesia.
- 2) Telah dilakukan kegiatan penumbuhan Desa Agroindustri yang berbasis pada upaya peningkatan mutu gabah/beras serta penurunan kehilangan hasil tanaman padi pada skala kegiatan optimal melalui pengembangar wilayah percontohan setingkat kecamatan dan selanjutnya disebut Forum Kecamatan Pasca Panen. Sampai saat ini telah ditumbuhkan Forum Kecamatan Pasca Panen sebanyak : (1) tahun 1994 sebanyak 9 (sembilan) unit, (2) tahun 2005 sebanyak 7 (tujuh) unit, dan tahun 2006 dibentuk d seluruh propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, D I Yogyakarta, Jawa Barat Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

-) Melalui kegiatan Forum Kecamatan pasca panen ini telah berdampak bagi penurunan kehilangan hasil walaupun masih sangat bervariasi antara propinsi maupun wilayah, dengan kisaran antara 3 % s/d 5 % tergantung pada tingkat penyerapan teknologi serta kemampuan dan ketrampilan petani dalam mengimplementasikan teknologi pasca panen yang ada.
-) Melalui kegiatan penumbuhan Desa Agroindustri (UP3HP) telah tumbuh di 32 Propinsi dan 197 Kabupaten/Kota dan 394 Desa Agroindustri. Selain hal tersebut telah dibentuk 2 (dua) unit pilot proyek desa agroindustri yaitu UP3HP Bawang Putih di Kabupaten Pati dan UP3HP Sakato di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
-) Dalam pengendalian impor beras, dimana setiap permohonan importasi beras harus melalui rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
-) Penetapan harga dasar beberapa komoditas antara lain beras/gabah, kedelai.
-) Pembentukan kelembagaan pemasaran antara lain pasar lelang, TA/STA, Resi Gudang, Pasar Tani (34 lokasi).
-) Mendorong agar daerah mempromosikan hasil pertanian unggulan serta pembetulan kalender event promosi baik yang diselenggara oleh daerah maupun pusat.
-) Mendorong terbentuknya kemitraan dalam pemasaran hasil pertanian.
-) Mendorong terbentuknya arus informasi harga komoditas pertanian (33 Ibukota Propinsi dan 200 Kab/Kota).
- 1) Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya asosiasi-asosiasi pelaku pertanian maupun Dewan-Dewan Komoditas misalnya Dewan Minyak Sawit Indonesia, Dewan Kakao Indonesia, Dewan Susu Indonesia, Dewan Minyak Atsiri Indonesia, Komisi Karet Indonesia, Komisi Kakao Indonesia, Komisi Perkelapaan
- 2) Melakukan dan mendorong upaya pengendalian dan pengamanan harga komoditas pertanian.
- 3) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian berperan sebagai ketua tim perundingan perdagangan internasional bidang pertanian, ketua kelompok G33 yang beranggotakan 46 Negara-negara berkembang dalam WTO. G33 memperjuangkan special product (SP) dan Special

Safeguard mechanism (SSM). SP adalah beberapa komoditi pertanian yang diperjuangkan oleh kelompok G33 dari kewajiban penurunan tarif (Bound Tariff). Sedangkan SSM adalah mekanisme perlindungan sementara dan banjirnya impor atas produk-produk pertanian secara berlebihan sehingga di khawatirkan menimbulkan *injury* atas industri pertanian Negara-negara yang terkena.

- 14) Direktorat Jenderal pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian merupakan wakil Departemen Pertanian, berpartisipasi secara aktif dan menajad anggota dari tim tarif yang bertugas merumuskan besaran tarif rasion ekspor dan impor berbagai komoditi/ produk termasuk komoditi/produk pertanian.
- 15) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagai wakil Departemen Pertanian berpartisipasi secara aktif mewakili Indonesia dalam berbagai kerjasama komoditi pertanian baik secara bilateral, regional maupun internasional.
- 16) Berikut adalah posisi Indonesia dalam kerjasama komoditi pertanian internasional :

No	Komoditas	Organisasi Internasional	Posisi
1	Kopi	Internasional Coffe Organization (ICO)	Anggota
2	Kakao	International Cacao Organization (ICCO)	Sedang dalam proses menjadi anggota
3	Karet	<ul style="list-style-type: none"> • International Tripatite Rubber Community (ITRC) • Association Natural Rubber Production Countries (ANRPS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya terdiri dari tiga Negara sebagai anggota yaitu : Indonesia, Thailand dan Malaysia • Anggota
4	Kelapa	Asian and Pasific Coconut Community (APCC)	Anggota
5	Kelapa Sawit	<ul style="list-style-type: none"> • Roundtable Sustainable Palmoil Organization (RSPO) • Joint Promotion on Green Product Campaign Between Indonesia and Malaysia 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota • Kerjasama promosi dalam menangkis negative campaign dari UE dan USA mengenai pengembangan kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan
6	Lada	International Pepper Community (IPC)	Anggota
7	Pendanaan Komoditas	Common Fund for Commodities (CFC)	Saat ini Indonesia menjadi BoD (Board of Director) yang diwakili oleh Deplu.



Analisa Swot Peran Strategis PPHP

1.1 Kekuatan

- . Sumberdaya produksi ; sumberdaya alam kita cukup subur dan ini merupakan input yang besar bagi produksi, demikian juga dengan sarana produksiya.
- . Kebijakan Pengembangan industri nasional dan daerah; bahwa dengan adanya kemauan politik dari Pemerintah untuk menata kembali pondasi industri nasional khususya kemauan politik untuk m engembangkan

- industri nasional di bidang pertanian, dimana hal ini dapat memacu gairah pergerakan industrialisasi pertanian.
3. Pancayasa (perbaikan infrastruktur pertanian, pengembangan kelembagaan pengolahan dan pemasaran, pemasaran hasil pertanian); sebagai komitmen pimpinan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan serta program dengan pondasi Pancayasa yang di dalamnya terdapat kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
 4. Trilogi Pembangunan PPHP sebagai komitmen untuk meningkatkan nilai tambah petani dalam setiap upaya pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
 5. Revitalisasi pertanian sebagai suatu komitmen politik, dimana di dalamnya banyak mengandung amanat bagi kegiatan untuk membangun pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang lebih baik.
 6. Paradigma pembangunan pertanian; dengan adanya perubahan paradigma pembangunan pertanian dari orientasi produksi ke agribisnis maka hal ini menunjukkan akan pentingnya penanganan sub system hilir dengan keterpaduan dengan on-farm.

11.2 Kelemahan

1. Budaya; walaupun komitmen politik telah sepakat akan pentingnya sektor hilir namun merubah budaya dari petani produsen ke petani supplier maupun petani sebagai pelaku industri hasil pertanian adalah hal yang masih sulit.
2. Alokasi anggaran masih terfokus kepada budidaya; komitmen pemerintah belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena dalam alokasi pendanaan masih porsi terbesar di kegiatan budidaya, sementara kegiatan hilir yang berdasarkan beberapa kajian mempunyai nilai tambah terbesar masih memperoleh porsi kecil (belum dapat mendukung sepenuhnya sektor budidaya).
3. Overlapping antar Eselon I Departemen Pertanian (dalam implementasi kegiatan) dan antar dinas di daerah. Apabila melihat apa yang tertulis dalam Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :299/Kpts/OT.140/7/2006 Tugas dan fungsi antar Unit Eselon I tidak ada yang overlapping. Overlapping terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Hal ini dikarenakan dalam siste

penganggaran belum sepenuhnya berdasarkan tupoksi atau belum pernah dilakukan suatu audit yang benar-benar berbasis kinerja (sesuai dengan tupoksi masing-masing bukan berbasis pelaksanaan anggaran).

Tidak adanya unit khusus yang menangani pengolahan dan pemasaran di beberapa Propinsi dan Kab/Kota; tidak semua propinsi, kab/kota mempunyai unit yang menangani pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan ini dapat menimbulkan dampak negatif dalam koordinasi kegiatan.

Jumlah dan kompetensi SDM tidak sebanding dengan beban tugas yang semestinya ditangani baik di pusat maupun daerah; Jumlah SDM di Pusat masih sangat terbatas, walaupun hal ini dapat segera dipenuhi namun karena adanya keterbatasan ruang kerja di Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Disamping itu latar belakang pendidikan SDM yang ada sekarang masih belum dapat memenuhi kebutuhan lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsi karena. Hal tersebut belum dapat dilakukan hal ini dapat mengancam terhadap pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Sedangkan SDM di daerah (di beberapa propinsi dan kab/kota) penanganan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian masih ditangani Kepala Seksi atau bahwa level staf.

Peraturan perundangan yang mendukung masih terbatas ; peraturan yang secara khusus mendukung eksistensi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Sinergi antar sektor dan sub sektor belum optimal.

1.3 Peluang

Tuntutan realitas globalisasi dalam bidang pertanian :

- 1) Pasar ekspor yang semakin terbuka; dengan adanya perjanjian-perjanjian di tingkat bilateral, regional dan multilateral maka pasar untuk suatu negara yang bermitra akan terbuka sekuas-luasnya, sehingga setiap negara berlomba untuk memanfaatkan peluang yang ada. Untuk itu maka diperlukan upaya khususnya dalam penanganan pelaksanaan negosiasi pemasaran komoditas pertanian secara terarah yang mampu menciptakan peluang pasar bagi Indonesia.
- 2) Kelangkaan energi, keterbatasan sumber daya energi berbasis fosil telah mendorong penggunaan bahan baku hasil pertanian menjadi

sumber energi. Hal ini mendorong untuk lebih mengoptimalkan nilai tambah dari produk pertanian, bukan saja sebagai sumber pangan tetapi juga sebagai sumber energi. Hal ini menimbulkan implikasi terbukanya industri pengolahan berbasis pertanian (tumbuhnya agrindustri pedesaan).

2. Dinamika preferensi konsumen yang memerlukan antisipasi secara cepat karena perekonomian dunia yang semakin membaik mempengaruhi sikap dan preferensi masyarakat terhadap bahan-bahan yang dikonsumsi. Permintaan terhadap produk pertanian olahan dan semakin memperhatikan unsur kualitas, kandungan gizi serta tingkat keamanan pangan.
3. Berkembangnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian globalisasi perdagangan berimbas terhadap perkembangan teknologi pengolahan dan pemasaran secara tidak terbatas ke seluruh dunia. Hal tersebut harus dicermati dengan kesiapan setiap negara untuk menerapkan teknologi yang ditunjang dengan kesiapan infrastruktur dan SDM yang memadai.
4. Paradigma yang memfokuskan Off-Farm dari pada On-Farm. Perubahan paradigma dari orientasi produksi ke orientasi pasar mendorong setiap usaha untuk lebih mengutamakan permintaan konsumen dari pada kehendak produsen. Prinsip tersebut mendorong untuk mengoptimalkan fungsi pemasaran disamping fungsi produksi. Fungsi pemasaran seyogyanya menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan terhadap apa yang dikembangkan di sektor produksi.
5. Ketersediaan sumber produksi dan teknologi. Indonesia memiliki sumber daya produksi yang sangat besar yang ditunjang dengan teknologi terapan untuk pengolahan hasil pertanian. Dengan pengembangan pengolahan berarti mengurangi kehilangan hasil akibat busuk maupun rusak, sekaligus meningkatkan nilai tambah karena adanya perubahan nilai suatu produk hasil pertanian.
6. Arah kebijakan pembangunan Daerah yang mengarahkan kepada peningkatan nilai tambah dan daya saing. Kebijakan pemerintah Daerah untuk bisa mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Di era ekonomi saat ini menumbuhkan peluang untuk perlunya penanganan pengolahan dan pemasaran produk secara lebih intensif dan terpadu.

- . Kerjasama internasional di bidang pemasaran hasil pertanian baik Bilateral, Regional dan Multilateral. Setelah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia banyak menjalin kerjasama perdagangan. Kerjasama perdagangan pada prinsipnya dapat memberikan keuntungan bagi suatu Negara asalkan dapat memanfaatkan potensi yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
- . Sinergi pengembangan pengolahan dan pemasaran melalui pola kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta, dan pemerintah (ABG) yang selama ini telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Kerjasama ketiga untur tersebut merupakan stimulan yang baik dalam mengembangkan usaha pertanian.

1.4 Ancaman

- . Globalisasi Perdagangan; selain memberikan peluang, maka juga dapat menjadi ancaman karena perlakuan yang sama juga diberikan terhadap mitra dagang Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia perlu memperkuat kebijakannya dalam pemasaran agar faktor ancaman produk pertanian dari luar dapat ditekan sekecil mungkin.
- . Tuntutan Kosumen; Adanya preferensi konsumen terhadap beberapa alternatif produk pertanian mendorong agar setiap negara menyediakan produk yang terbaik untuk konsumennya di dalam negeri agar pilihan konsumen tidak beralih ke produk dari luar.
- . Kesenjangan aplikasi teknologi pengolahan dengan negara maju lain; negara maju akan memanfaatkan keunggulannya dalam bidang teknologi untuk melakukan penetrasi dagang ke negara mitranya
- . Adanya disintegrasi program; Masing-masing organisai memang memiliki tujuan masing-masing, namun kesemuanya harus bermuara pada tujuan induk organisasinya sehingga program yang dilaksanakan seyogyanya terintegrasi dengan baik.
- . Inkonsistensi pelaksanaan tugas fungsi antar unit Eselon I Deptan. Inkonsistensi ini akan melemahkan suatu organisasi karena masing-masing eselon I akan mengutamakan tujuan organisasinya sendiri tanpa memperhatikan tujuan utama Departemen.
- . Inkonsistensi kebijakan Departemen Pertanian antar waktu; Kesenambungan

kebijakan antar waktu sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kinerja Departemen Pertanian menuju sasaran visi dan misinya.

11.5 Kesimpulan dan Saran

1. Bahwa telah disadari untuk menghadapi tantangan ke depan, maka ma tidak mau harus dilakukan perubahan paradigma pembangunan pertanian dari orientasi produksi ke sistem agribisnis secara totalitas. Dengan demikian diperlukan suatu organisasi Departemen yang dapat memerankan kebutuhan akan tuntutan tugas yang memberikan pengaturan di sub sistem hilir.
2. Bahwa berdasarkan arahan-arahan kebijakan pembangunan pertanian 2005-2025 baik yang tertuang dalam tujuan, sasaran, visi maupun garis-garis besar kebijakan yang merupakan komitmen politik bangsa Indonesia serta mempertimbangkan pembelajaran dari negara-negara lain, terlihat nyata peranan sektor pengolahan dan pemasaran hasil pertanian termasuk didalamnya peningkatan mutu hasil pertanian sangatlah besar bagi keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia.
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani maka perlu adanya pengembangan peranan petani dari petani produsen menjadi petani pemasok baik produk segar maupun olahan. Untuk itu diperlukan suatu unit organisasi yang secara khusus dan terus menerus melakukan pembinaan dibidang tersebut.
4. Dalam rangka menciptakan produk pertanian yang kompetitif serta membawa dampak bagi pendapatan petani serta negara tersebut, diperlukan penanganan dan pembinaan yang lebih fokus dan intensif di bidang penanganan pasca panen, pengolahan, lingkungan, mutu dan standarisasi pemasaran domestik serta pemasaran internasional oleh suatu institusi khusus di Departemen Pertanian.
5. Mencermati uraian tersebut di atas, maka sudah sewajarnya apabila fungsi fungsi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian diperkuat perannya di lingkup Departemen Pertanian. Agar pelaksanaan program pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berjalan dengan optimal maka idealnya fungsi tersebut dilaksanakan oleh instansi setara dengan eselon I lainnya. Bahkan fungsi dan peranan organisasinya perlu didorong dan diperkuat sampai tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

1. Terkait hubungan dengan unit eselon I lingkup Departemen Pertanian, apabila dicermati dari tugas dan fungsi masing-masing sebetulnya tidak terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi. Namun demikian di dalam implementasi, kegiatan sering terjadi hal yang sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena faktor budaya serta kurangnya pengendalian terhadap pengajuan kegiatan (anggaran pelaksanaan kegiatan). Sehingga kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian belum memperoleh porsi anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan on-farm., namun disisi lain terdapat kegiatan sub sistem hilir yang dilaksanakan oleh unit kerja “on-farm”



BAHAGIAN III: RAGAM KEGIATAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN



12

Strategi Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Pertanian

2.1 Konsep Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing

Peningkatan produktivitas pada produk pertanian erat kaitannya dengan peningkatan daya saing dan nilai tambah industri perdesaan. Kementerian Pertanian RI, melalui Permentan No :18/ Permentan/OT.140/2/2010 tentang blue print peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dengan pemberian insentif bagi tumbuhnya industri perdesaan, yang sebagian besar

tupoksinya berada di Dirjen PPHP.

Peningkatan daya saing dan nilai tambah melalui industri perdesaan harus melalui perumusan yang komprehensif yang melibatkan lintas sektor yang mencakup hulu hilir sehingga program yang dikembangkan dapat saling menunjang satu sama lain. Dengan memperhatikan push and pull factor (faktor pendorong dan penarik) dirumuskan insentif yang dapat diberikan dalam aspek kebijakan dan operasional untuk menciptakan iklim tumbuhnya industri yang kondusif, modal, dukungan infrastruktur, penerapan teknologi peningkatan SDM serta fasilitasi pemasaran produk. Peningkatan nilai tambah dapat difokuskan pada produk strategis dalam rantai nilai dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Penentuan skala prioritas ini mengacu pada kondisi terkini, permasalahan yang ada, dan peluang ke depan yang dapat ditentukan melalui analisis SWOT.

Besarnya nilai-tambah yang ditimbulkan dari proses pengolahan dihitung dari nilai produk yang dihasilkan dikurangi biaya bahan baku dan input lainnya. Proses ini ditempuh melalui proses produksi, distribusi, transportasi dan pemasaran. Tingkat keuntungan diperoleh dari kelebihan yang didapat setelah harga dikurangi dengan keseluruhan biaya yang keluar selama proses pengadaan produk, sehingga keunggulan bersaing diperoleh jika keseluruhan proses dapat menghasilkan nilai konsumen yang sama dengan atau lebih rendah dari biaya atau penerapan cara yang menghasilkan nilai konsumen yang lebih besar. Analisis rantai-nilai dapat menghitung kontribusi nilai-tambah dari setiap aktivitas dalam proses pengolahan suatu produk, sehingga dapat digunakan untuk menghitung besarnya nilai yang layak diterima oleh masing-masing pelaku dalam suatu sistem komoditi. Analisis nilai tambah bermanfaat untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang menaikkan nilai tambah atau sebaliknya.

Strategi pengembangan industri perdesaan didasarkan pada hasil analisis SWOT. Berdasarkan strategi tersebut selanjutnya disusun strategi umum pengembangan produk yang dipilih. Peran dari masing-masing sektoral untuk masing-masing produk yang dikembangkan diidentifikasi melalui mapping, program lintas sektoral yang ada di Departemen terkait.

Selanjutnya strategi operasional pengembangan produk dirumuskan

berdasarkan pada strategi masing-masing produk dan dijabarkan dalam rencana aksi yang disusun berdasarkan jangka panjang, menengah dan pendek selama lima tahun (2010-2014).

Pelaku pertanian (petani, buruh tani, dan pelaku lainnya) belum bekerja sesuai dengan tuntutan persaingan yang ketat. Kualitas SDM yang relatif rendah menghambat pertumbuhan sektor pertanian yang berdayasaing dan berkontribusi dalam perolehan nilai tambah (ekonomi). Revolusi pertanian hampir tidak terjadi selama kurun waktu pembangunan yang telah dijalani karena SDM-nya belum mampu menjadi penggerak yang tidak memenuhi kebutuhan.

Pertanian sebagai obyek pembangunan melibatkan banyak pemangku kepentingan baik pelaku langsung maupun pengambil kebijakan dan layanan pendukung. Pada tataran kebijakan belum terpadu dan serasi antar pembuatan kebijakan baik di hulu (Badan Pertanahan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan), dalam produksi (Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah), dan di hilir (Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan). Pemaduserasian kebijakan menjadi bagian penting dari pembangunan pertanian masa datang.

2.2 Skala Teknis dan Ekonomis

Skala teknis adalah ukuran dan keadaan lahan pertanian sehingga memungkinkan penerapan teknologi dan penggunaan alat-mesin pengolahan lahan, budidaya dan penanganan pasca panen. Ukuran petakan sawah dan kebun yang kecil serta kemiringan yang curam tidak memungkinkan penerapan teknologi secara optimal. Skala ekonomis adalah luasan pengusahaan lahan sehingga diperoleh penerimaan (ekonomis) yang melebihi biaya dan kebutuhan petani secara wajar. Lahan yang kecil tidak memungkinkan petani memperoleh hasil yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga usahataniya tidak dapat sejahteraan. Rataan pemilikan lahan petani di pedesaan sebesar 0,41 ha dan 0,96 ha masing-masing di Jawa dan Luar Jawa.

Dalam perspektif daya saing, skala kecil menyebabkan:

- a) Tidak efisien: pengadaan dan penggunaan input, pengelolaan usaha serta penanganan dan pemasaran hasil dilakukan dengan korbanan yang besar. Akibatnya “biaya” yang digunakan melebihi kewajaran

- membentuk harga pokok produksi menjadi sangat tinggi sehingga tidak dapat bersaing.
- b) Pemaksaan produktivitas: Dalam skala yang kecil, pendapatan hanya dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang dimiliki. Penggunaan yang berlebihan (*over exploitation*) menguras kesuburan tanah, menggunakan air secara “berlebihan dan menghilangkan keragaman hayati. Dalam jangka panjang akan terjadi kerusakan lahan yang berakibat pada penurunan produktivitas normal.
 - c) Penerapan teknologi dan mekanisasi terbatas: alat dan mesin pertanian mempunyai kelayakan skala minimum, jika lebih kecil menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Lahan yang kecil menyebabkan penerapan mekanisasi menjadi sangat terbatas.
 - d) Penyebab kemiskinan: penghasilan adalah faktor utama pembentuk kesejahteraan. Bagi petani, penghasilan berbanding lurus dengan produksi yang merupakan pengalian produktivitas dengan luas. Dengan demikian, luas adalah faktor penentu yang dalam banyak aspek tidak dapat dikendalikan oleh petani.
 - e) Tidak terorganisir: skala kecil tidak dapat berdiri sendiri untuk memperbaiki efisiensi. Dalam perspektif ekonomi, kecuali ada kekhasan, skala kecil lemah dalam pengelolaan usaha (pengadaan sarana produksi sampai dengan pemasaran). Hal ini menyebabkan lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnya tataniaga dan belum adilnya sistem pemasaran.
 - f) Tidak kompetitif: skala kecil merupakan kumpulan karakteristik penyebab inefisiensi. Di hulu berhadapan dengan biaya produksi di tengah bertemu dengan skala ekonomis dan di hilir dihadapkan persoalan volume, mutu dan kesinambungan. Semua ini berakibat pada daya saing yang lemah.

12.3 Strategi, Kebijakan, dan Program

Berdasarkan pada analisis SWOT komoditas dikembangkan strategi spesifik dalam memanfaatkan peluang dan kekuatan serta mengatasi masalah dan ancaman. Dari strategi spesifik tersebut dikembangkan strategi pokok

yang bersifat umum sebagai berikut: (i) perbaikan skala teknis dan ekonomis usaha tani, (ii) pengendalian konversi lahan subur, (iii) perbaikan teknologi budidaya dan penanganan pasca panen (perbaikan dayasaing, (iv) peningkatan produktivitas dan produksi, (v) peningkatan kualitas penanganan pasca panen untuk perbaikan mutu dan pengurangan susut, (vi) pengembangan agroindustri perolehan nilai tambah), (vii) penyediaan dana pengembangan pertanian, (viii) penguatan posisi tawar produk pertanian, (ix) penganeekaragaman bahan pangan pokok dan gula, (x) pertanian adaptif dan berkelanjutan, (xi) penguatan kelembagaan (Poktan, Gapoktan dan Koptan), (xii) peningkatan kualitas SDM penyuluh, petani dan pelaku industri perdesaan, (xiii) pemberian insentif yang berorientasi penguatan dayasaing dan penumbuhan industri perdesaan, dan (xiv) percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian.

Pembangunan pertanian tidak dapat berdiri sendiri dan secara kuat terkait dengan kementerian dan instansi lainnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian sebagian besar ditentukan oleh kontribusi sektor lain. Diantara kebijakan eksternal tersebut adalah penataan lahan (redistribusi lahan), revisi kewenangan di bidang pembinaan agroindustri, skim kredit khusus untuk mendorong industri hilir pertanian (bunga rendah), bank pertanian, subsidi output, kebijakan perbaikan infrastruktur dan pemberian insentif transportasi produk pertanian, peningkatan pajak impor untuk produk hilir yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri, peningkatan pajak ekspor untuk produk primer perkebunan (khususnya biji kakao), penghilangan pungutan kontribusi produk pertanian, stabilisasi harga, dan kebijakan pengutamaan penggunaan bahan baku lokal untuk pemenuhan kebutuhan agroindustri dalam negeri (khususnya susu, tepung, jagung, kakao).

Kebijakan teknis internal yang diperlukan dalam peningkatan daya saing dan nilai tambah adalah bantuan sarana produksi, bantuan mesin dan peralatan pasca panen dan pengolahan, pembangunan infrastruktur pertanian (khususnya jaringan irigasi tersier, jalan usahatani, embung), pelatihan dan pendampingan, penerapan system jaminan mutu melalui instrumen SPS dan TBT, dan penguatan promosi (pameran, iklan layanan masyarakat).

Selain kordinasi dan keterpaduan antar Instansi Pemerintah (Government), keberhasilan program juga ditentukan oleh peran aktif dunia usaha (Business) sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi, dan akademisi (Academic) sebagai

penghasil teknologi termasuk pemikiran ilmiah pembentuk dayasaing. Pera aktif harus terencana, terpadu dan terprogram sehingga terjadi keserasia yang saling terkait dan menguatkan.

12.4 Program Aksi

Program aksi peningkatan nilai tambah dan daya saing melat penumbuhan agroindustri perdesaan disusun berdasarkan komoditas strategis yang dianalisis berdasar kondisi terkini dan sasaran minimum lima tahu yang akan datang. Dari analisis tersebut disusun strategi (inti dan penguat yang dijabarkan dalam rencana aksi yang akan dilaksanakan setiap tahun ole semua pemangku kepentingan.

Komoditas yang dipilih sebagai penghela tumbuhnya industri perdesaa disesuaikan dengan komoditas prioritas yang dikelompokkan sebag komoditas pangan utama yang meliputi beras, jagung, kedelai, daging saq Komoditas andalan ekspor yang meliputi sawit, karet, kakao dan dagir ayam. Kelompok emerging products yang mempunyai peluang pasar yar luas baik internasional maupun domestik seperti buah tropika (mangg manggis, salak dan pisang), produk biofarmaka, tanaman hias daun da minyak atsiri Kelompok produk yang diarahkan untuk substitusi impo seperti susu, tepung lokal (cassava dan sagu) serta jeruk. Pemilihan jen komoditas ini diharapkan dapat mewakili dari kelompok komoditi yang ad mempunyai potensi untuk peningkatan dayasaing dan nilai tambah yar tinggi serta mempunyai multiplier effect yang luas terhadap peningkatan indust perdesaan.

Outcome masing-masing rencana aksi pengembangan produk adala sebagai berikut:

- a. Sawit: Meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor produk berbasis saw melalui peningkatan peran perkebunan sawit rakyat, infrastruktu transportasi dan pelabuhan, dan pengembangan industri hilir turuna minyak sawit (termasuk bioenergy) untuk meningkatkan nisbah ekspor produk olahan.
- b. Karet: Peningkatan mutu melalui penerapan SNI wajib, GA dan GMP yang didukung oleh perbaikan produktivitas kebun da pengembangan industri hilir berbasis karet (khususnya sheet)

- c. Kakao: Memenuhi kebutuhan industri pengolahan dalam negeri dan meningkatkan nilai ekspor kakao melalui pengembangan kakao fermentasi dan penumbuhkembangan industri pedesaan pengolahan kakao (lemak dan bubuk kakao).



Gambar 12.1. *Cocoa Bean*





Program Two In One: Kegiatan Akselerasi Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing

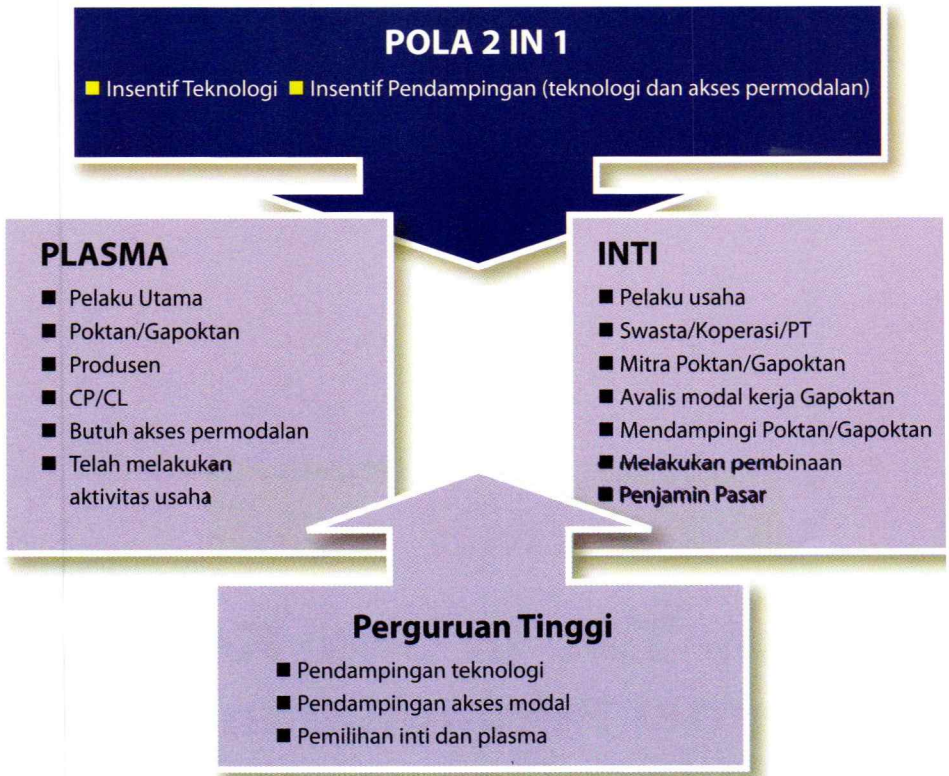
3.1 Pendahuluan

Program 2 in 1 merupakan program terobosan yang harus terus dijaga keberlangsungannya dengan perbaikan implementasi pelaksanaannya. Program in 1 merupakan program pola insentif yang memberikan insentif berupa paket teknologi dan insentif ke lembaga keuangan. Ditjen PPHP memberikan bantuan berupa paket teknologi kepada Gapoktan dan mitra yang menjadi avalis/penjamin

modal kerja bagi Gapoktan. Avalis dan Gapoktan yang menjadi peserta progra 2 in 1 diupayakan untuk bekerjasama model *cooperative farming*.

13.2 Pola dan Konsep Pengembangan

Pola 2 in 1 merupakan pola insentif yang juga dinikmati oleh pelaku usal dan pelaku utama. Pelaku utama adalah Poktan/Gapoktan yang menjadi penyupl (suplier) kepada pelaku usaha (mitra) yang sekaligus menjadi avalis. Secara gar besar diagram dibawah ini menggambarkan pelaku dan sasaran program ini.

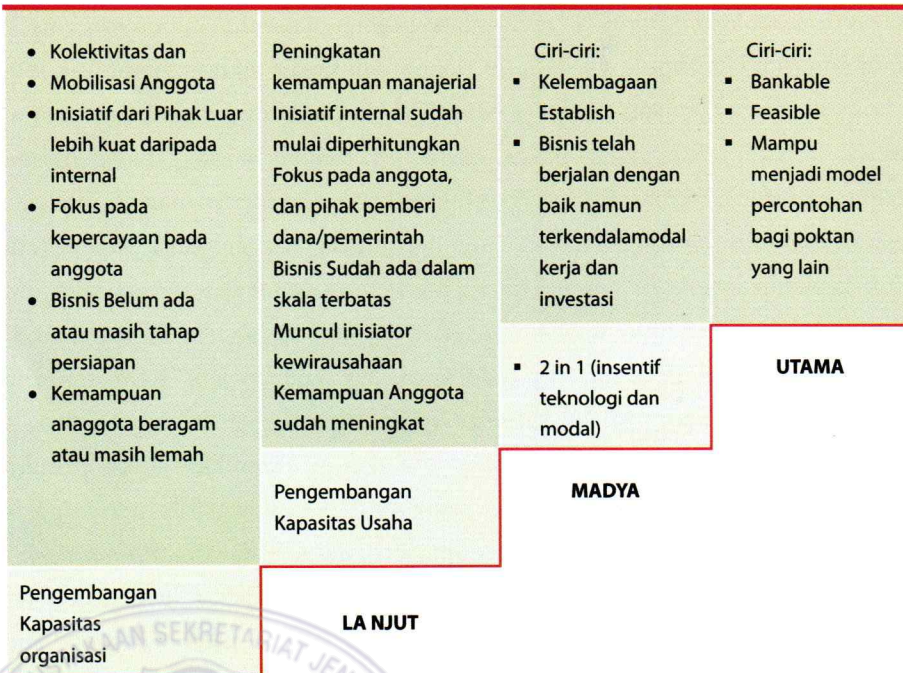


Dalam pola pelaksanaan yang telah berjalan telah dilakukan revisi da perbaikan. Revisi menyangkut pola kerjasama antara Gapoktan dan Mitra yan sekaligus sebagai avalis dan sanksi bila terjadi perubahan atau permasalahan pad pelaksanaan baik oleh Gapoktan maupun mitra/avalis. Model pola kerjasam mitra/avalis dengan Gapoktan harus lebih jelas diarahkan model kerjasamanya: semua Direktorat di PPHP harus ikut terlibat dalam pengembangan 2 in 1 ir secara bersama-sama dan keterlibatan Perguruan Tinggi pendamping dapa diikutsertakan di awal program.

Model pola pembinaan Gapoktan pola insentif ini harus merupakan lanjutan dari program sebelumnya. Program pembinaan harus dirancang multiyears dan berkelanjutan. Setiap pengaju untuk bantuan pola 2 in 1 harus memiliki rencana usaha, minimal selama 3 tahun, dan para pengaju ini merupakan inaan Ditjen PPHP sebelumnya.

Keberhasilan program 2 in 1 tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak, baik dari swasta, pemerintah maupun poktan sendiri. Pengembangan apoktan ini melihat dari sisi pemberdayaannya menerapkan model *cooperative farming*. Model *cooperative farming* merupakan model pemberdayaan petani melalui kelompok dengan melakukan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi, dan nilai tambah. Rekayasa sosial dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan tani, penyuluhan, dan pengembangan SDM.

Rekayasa ekonomi dilakukan dengan pengembangan akses permodalan untuk pengadaan Sarana produksi dan akses pasar. Rekayasa teknologi dapat dilakukan dengan pencapaian kesepakatan teknologi anjuran dengan kebiasaan petani. Terakhir, rekayasa nilai tambah dilakukan melalui pengembangan usaha *ff-farm* yang terkoordinasi secara vertikal dan horisontal.

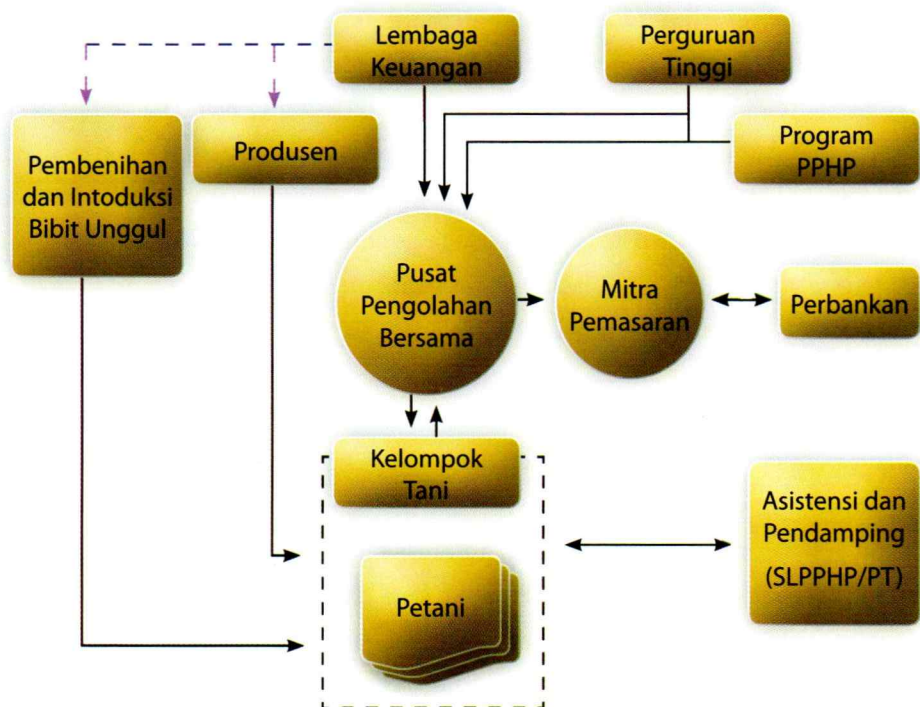


PEMULA

Koordinasi secara vertikal dan horisontal akan melibatkan banyak stakeholder yang diwadahi suatu kemitraan dalam penerapan model *cooperative farming*. Stakeholder yang dapat dilibatkan dalam *cooperative farming* antara lain adalah petani, swasta, dan pemerintah. Petani akan bertindak sebagai anggota sekaligus pengelola. Sebagai anggota, petani harus berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan usaha *on-farm* dan *off-farm* dan menyepakati teknologi yang akan dilaksanakan serta menerapkan teknologi tersebut. Pihak swasta sebagai penanam modal/investor melalui jalinan kemitraan *cooperative farming* dari sistem hulu sampai dengan hilir. Sebagai mitra subsistem hulu, pihak swasta menanamkan modal dengan menyediakan sarana produksi pertanian, yaitu benih, pupuk, dan obat-obatan untuk berusahatani. Sebagai mitra subsistem hilir pihak swasta bertanggung jawab sebagai penampung produksi dan mitra pemasaran. Sementara pemerintah akan bertindak sebagai fasilitator sekaligus katalisator dalam kegiatan perencanaan, penyusunan strategi usaha, introduksi teknologi terapan spesifik lokasi yang efisien, pengadaan modal, saprodi, dan alsintan, serta fasilitator dalam proses pemasaran hasil.

Mengingat penerapan model *cooperative farming* membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit, maka dalam mengimplementasikannya harus memperhatikan tahap-tahap sebagai berikut (1) identifikasi potensi wilayah, (2) pengorganisasian petani anggota kelompok wilayah, (3) penentuan paket teknologi spesifik lokasi, (4) konsolidasi pengadaan sarana produksi, (5) konsolidasi pelaksanaan usaha *on-farm*, (6) konsolidasi kegiatan pasca panen, (7) konsolidasi kegiatan pemasaran. Setiap tahap implementasi merupakan faktor kritis dan menentukan keberhasilan kegiatan *cooperative farming*. Wilayah yang ditentukan sebagai lokasi yang potensial untuk kegiatan *cooperative farming* harus memenuhi beberapa persyaratan dasar. Persyaratan dasar wilayah untuk *cooperative farming* adalah (1) merupakan satu hamparan minimal 500 ha, (2) kelompok CF merupakan penyempurnaan kelompok tani sebelumnya, (3) kelompok CF dapat dibagi dalam beberapa sub-kelompok CF berdasarkan wilayah geografis, dan (4) memiliki sarana/prasarana CF, antara lain kantor kelompok, kios saprodi dan modal usaha pertanian, alat mesin pengolahan. Selain harus terpenuhi persyaratan wilayah, *cooperative farming* harus mempunyai struktur organisasi yang mantap, dilengkapi dengan pengurus dan terdiri dari beberapa seksi yang diperlukan dalam mendukung program usaha. Struktur organisasi dari posisi teratas terdiri dari musyawarah anggota

Forum komunikasi kelompok, pengelola (manajer, sekretaris, dan bendahara), seksi-seksi, dan sub kelompok. Seksi dibentuk dengan jumlah sesuai kebutuhan pengelolaan sumberdaya air, alsintan, permodalan dan saprodi, *on-farm*, dan *off-farm*.



Mekanisme Kerja Pengembangan Poktan

(Diadopsi dan diperbaiki dari Model Cooperative Farming, Sri Nuryanti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Dimuat pada Tabloid Sinar Tani, 29 Juni – 5 juli 2005)

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat sinergi antar stakeholder *operative farming* dalam mencapai tujuan usaha. Lembaga keuangan dari pihak swasta akan menginvestasikan modal kepada produsen saprodi, yaitu pupuk (1) dan bibit unggul (2). Selanjutnya produsen saprodi akan menyediakan pupuk (3) dan benih (4) bagi petani yang dikoordinasikan pengelola dengan kantor/pusat

kegiatan milik kelompok (5), digunakan anggota untuk berusahatani (6). Ketik panen, para anggota melakukan pasca panen terpadu (7) di pusat pengolahan terpadu (8). Apabila pasca panen sudah tuntas, produk dipasarkan oleh swasta mitra pemasaran (9). Mitra pemasaran permodalannya ditunjang oleh perbankan (10). Secara periodik *cooperative farming* diawasi dan dievaluasi kelayakan usahanya oleh investor (11). Pemerintah secara aktif berperan sebagai fasilitator kemitraan sekaligus katalisator komunikasi antara petani dengan pihak swasta. Dari uraian di atas, tampak bahwa model *cooperative farming* dalam penerapannya dapat secara efektif memberdayakan petani melalui kelompok tani. Kendala keterbatasan modal dapat diatasi melalui kemitraan kerja. Pencapaian target efisiensi usahanya dapat dilakukan melalui keterpaduan kegiatan penyediaan sarana produksi pola tanam, keseragaman teknologi, pasca panen terpadu, dan pemasaran yang terorganisasi. Hak pribadi masing-masing petani atas kepemilikan lahan tidak terusik tanpa adanya konsolidasi lahan.

Cooperative farming secara langsung telah memberdayakan lembaga tani yang ada, yaitu kelompok tani, mengembangkan kualitas SDM melalui penyuluhan tentang pentingnya kemitraan, kesepakatan, dan kebersamaan. Selain itu, jalannya kerjasama yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal dengan pihak swasta dengan fasilitator pemerintah telah mampu mengurangi cara-cara koordinasi yang bersifat *top-down* dan sentralistik. Pola *topdown* dan sentralistik masih tercerminkan dalam model *corporate farming*. Sementara dengan *cooperate farming* pemerintah memfasilitasi petani dengan pemberdayaan secara *bottomup* dan terdesentralisasi sehingga lebih mengenai sasaran utama, yaitu mengembangkan kualitas SDI petani. Petani akan secara aktif terlibat di setiap kegiatan dan mempunyai *sense of belonging* yang tinggi akan keberhasilan usaha kelompoknya karena organisasi tersebut berasal beranggotakan mereka sendiri, dikelola oleh mereka sendiri, dan keberhasilannya akan diambil manfaatnya untuk mereka sendiri. Tujuan akhirnya rantai pemasaran menjadi pendek dan lebih efisien, sehingga petani dapat memperoleh harga yang sesuai dan meningkatkan pendapatannya.



Gambar 13.1. Unit Pengolahan Hasil Pertanian





Konsep Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Pada Agribisnis Persusuan Indonesia

1.1 Kondisi Persusuan di Indonesia

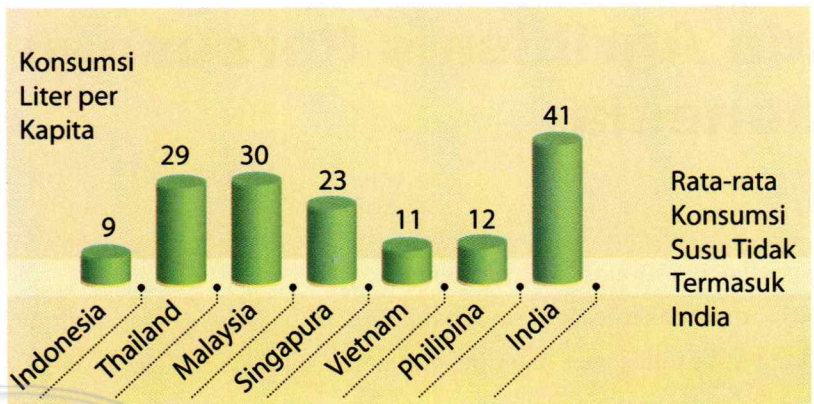
Susu merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, karena nilai gizinya yang tinggi dengan komposisi yang lengkap yakni kandungan protein, karbohidrat, lemak dan mineral dalam perbandingan yang sempurna. Untuk itu, perlu mendapat perhatian yang serius karena susu juga merupakan komoditas ekonomi yang sangat strategis

untuk dikembangkan, mengingat usaha peternakan sapi perah di Indonesia merupakan salah satu industri berbasis perdesaan yang padat karya.

Kebutuhan produksi susu dalam negeri yang sampai saat ini belum dapat terpenuhi, mengakibatkan importasi bahan baku industri susu dalam jumlah yang sangat besar dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut merupakan indikator masih rendahnya ketahanan pangan produk asal ternak dan ketahanan pangan nasional pada umumnya.

Perkembangan populasi sapi perah pada tahun 2009 mencapai sebanyak 486.991.000 ekor dan 96,7% populasi sapi perah tersebut terkonsentrasi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur mempunyai jumlah populasi sapi perah terbanyak yaitu 221.944.000 ekor disusul Jawa Tengah 134.821.000 ekor, Jawa Barat 114.588.000 ekor, D.I Yogyakarta 5.709.000 ekor. Pengusahaan sapi perah rakyat masih diusahakan secara sambilan belum memenuhi standar skala ekonomi yaitu kepemilikan sapi rata-rata 3-4 ekor sedangkan skala ekonomi adalah sekitar 10-12 ekor, sehingga peluang usaha masih dapat ditingkatkan. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan sapi perah rakyat adalah keterbatasan modal usaha dan lahan hijauan pakan ternak, apabila kedua kendala ini dapat diatasi kemungkinan populasi sapi dapat ditingkatkan.

Bagi masyarakat Indonesia, susu masih merupakan 'barang mewah'. Konsumsi susu Indonesia adalah yang terendah dibandingkan negara Asia lainnya yaitu hanya 9,51 liter per kapita per tahun dibandingkan Malaysia yang sudah mencapai 25,4 liter dan Vietnam 10,7 liter per kapita per tahun.



Source: Total Milk Consumption

Dalam peta perdagangan internasional produk-produk susu, saat ini Indonesia berada pada posisi sebagai *net-consumer*. Sampai saat ini industri pengolahan susu Nusantara masih sangat bergantung pada impor bahan baku susu. Jika kondisi tersebut tidak dibenahi dengan membangun sebuah sistem agribisnis yang berbasis peternakan, maka Indonesia akan terus menjadi negara net-impor hasil ternak khususnya susu sapi.

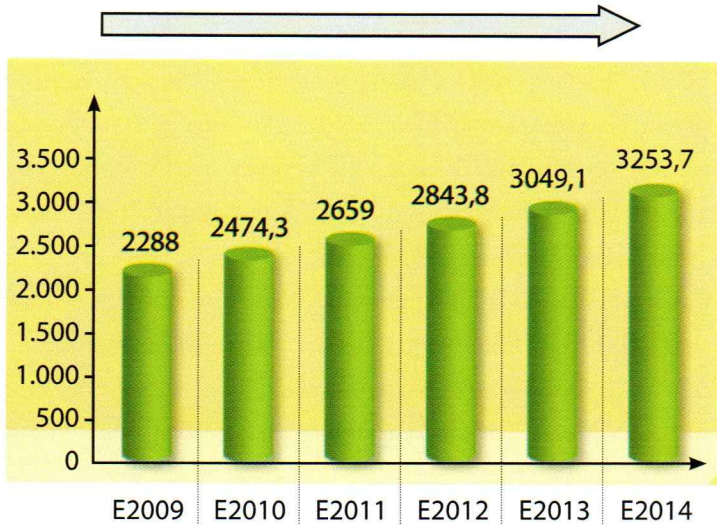
Masyarakat Indonesia lebih mengenal susu bubuk ketimbang susu segar atau susu cair. Lebih dari 90% warga negeri ini terbiasa mengkonsumsi susu berupa bubuk atau kental manis, dan tak lebih dari 10% yang kesehariannya minum dalam bentuk cair. Padahal jamaknya, masyarakat dunia mengkonsumsi susu dalam bentuk segar atau susu cair. Ditinjau dari tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia, ternyata konsumsi susu cair dalam bentuk UHT 4,6 % (8,5 ribu Ton), Susu Steril 2,7 % (69 ribu Ton) dan susu Pasteurisasi 1,2 % (30 ribu Ton) dan paling banyak dikonsumsi dalam bentuk bubuk (43,3 %).

Berdasarkan data tersebut tergambar bahwa jenis susu yang dikonsumsi masyarakat sebagian besar berupa susu bubuk yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga susu segar/pasteurisasi Sehingga akses masyarakat untuk mengkonsumsi susu hanya dimiliki oleh masyarakat dari kalangan menengah atas.

Indonesia memiliki prospek pengembangan industri sapi perah yang relatif besar untuk menciptakan Indonesia sebagai negara produsen susu. Pertama dilihat dari permintaan potensial susu oleh 250 juta penduduk, permintaan efektif yang terus berkembang sesuai dengan pertumbuhan perekonomian. Saat ini, produksi susu sangat rendah baru mencapai 26,20 % kebutuhan permintaan efektif.

Produksi susu segar dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Walaupun begitu, kenaikan ini masih jauh untuk memenuhi tercukupinya kebutuhan susu dalam negeri. Tahun 2008 produksi susu Nusantara sebesar 647.000 ton, ternyata masih tidak dapat mencukupi kebutuhan konsumsi susu nasional.

Produksi susu nasional hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi susu nasional sebesar 26,20 % atau sebanyak 2,19 kg per kapita tiap tahun atau 6,01 gram per kapita tiap hari. Kebutuhan sisanya dipenuhi dari impor sebanyak 73,80 % dari total konsumsi susu. Pasar susu diperkirakan akan tumbuh sekitar 7,3% tiap tahun.



Source: Canadean Survey 2008

Dari data tersebut, terlihat bahwa potensi pengembangan susu masih har digali dan digalakkan, walaupun kita mengetahui bahwa marjin keuntungan peternak masih lebih rendah dari yang diperoleh para pelaku tata niaga. Harga susu di pasaran terlalu tinggi. Hal ini karena pelaku tata niaga susu mendapat marj atau selisih tataniaga terlalu besar, karena sebenarnya pelaku usaha membeli susu dari peternak sapi perah kurang lebih dari Rp. 3.500 per liter, sedangkan harga pasaran dapat mencapai Rp. 8.000 per liter.

Kondisi tersebut tidak bisa dielakkan manakala harga beli susu dari peternak sebagai wujud penghargaan atas kerjanya tidaklah sepadan. Peningkatan kualitas akan sulit dilakukan bila pendapatan yang diperoleh dari penjualan susu dari hari ke hari semakin menurun. Peningkatan kualitas susu melalui peningkatan pakan dan teknologi dapat terjadi bila upah dari menjual susu lebih dari mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Tak heran bila produksi dan produktivitas peternak sapi perah di Indonesia sungguh memprihatinkan. Sementara negara lain yang telah peduli mengembangkan agribisnis ini sebagai salah satu pilar pembangunan ekonominya kini tengah menikmati dampak tingginya harga susu dunia. Maka terdapat jalan lain kecuali segera berpacu menetapkan kerangka percepatan agribisnis persusuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakatnya secara lebih mandiri.

Peningkatan konsumsi susu tidak terlepas dari kesadaran masyarakat akan pentingnya susu bagi kesehatan dan dapat meningkatkan kualitas hidup.

usia. Untuk itu, maka perlu dilakukan upaya terobosan guna menyadarkan masyarakat melalui gerakan-gerakan untuk membiasakan masyarakat meminum susu. Bagi pelaku peternakan sapi perah apabila terdapat peningkatan konsumsi masyarakat terhadap susu, maka permintaan akan susu meningkat dan hal ini dapat menggairahkan budidaya sapi perah.

Pada tahun 2000, FAO (Food & Agriculture Organization) mencanangkan Hari Susu Sedunia (World Milk Day) dengan alasan berikut:

Menyebarkan informasi mengenai manfaat susu

Mengajak masyarakat luas mengkonsumsi susu sebagai makanan cair yang bermanfaat bagi tubuh

Meningkatkan industri susu yang menguntungkan bagi peternak sapi perah

Sejak pencanangannya, negara-negara lain di dunia, seperti Jerman, Australia, India, Malaysia, Thailand, turut berpartisipasi untuk merayakan Hari Susu dunia untuk meningkatkan konsumsi susu per kapita dan meningkatkan industri persusuan. Beberapa dari negara tersebut, seperti Cina, akhirnya mencanangkan Hari Susu Nasional di negara masing-masing. Indonesia mencanangkan Hari Susu Nusantara pada 1 Juni dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian nomor: 2182/Kpts/PD.420/5/2009 tanggal 13 Mei 2009.



Gambar 14.1. Sapi Perah

14.2 Kebijakan Pengembangan Persusuan Perspektif PPHP

Kebijakan jangka panjang pengolahan dan pemasaran susu diarahkan untuk mewujudkan agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing, berkelanjutan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak dan mengurangi ketergantungan impor. Sedangkan untuk jangka menengah/pendek adalah mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri dengan meningkatkan pengolahan susu skala kecil di sentra produksi.

Dalam upaya mengembangkan persusuan nasional, maka salah satu kebijakan adalah melaksanakan program aksi dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk mengurangi permasalahan peternak. Dari sisi produksi susu sapi perah rakyat, masalah utama yang terjadi sampai saat ini adalah rendahnya kualitas susu yang dihasilkan sehingga mempengaruhi tingkat harga susu segar yang diterima peternak. Dari sisi lain, usaha pengolahan susu segar di tingkat peternak Kelompok/Gapoknab relatif masih kurang sehingga pemasaran susu segar yang dihasilkan peternak, masih sangat tergantung pada Industri Pengolahan Susu (*Single buyer*). Untuk itu diharapkan para peternak membentuk kelompok pengolahan susu sehingga dapat mencapai skala ekonomi yang efisien dan memudahkan mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah maupun perbankan.

Agar pangsa pasar susu yang dihasilkan peternak dapat ditingkatkan, maka masalah-masalah yang dihadapi selama ini perlu ditanggulangi dengan baik. Kebijakan peningkatan produksi dan konsumsi nasional tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kualitas susu yang dihasilkan peternak.

Upaya untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan program aksi dalam rangka pengembangan penanganan dan pengolahan susu segar, yakni :

- Memberikan dukungan nyata kepada para peternak, untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil ternak sapi perah (susu).
- Daya saing susu sapi perah yang dihasilkan peternak, hanya akan dapat ditingkatkan apabila produktifitas dan kualitas tersebut dapat ditingkatkan. Untuk itu, fasilitasi peralatan penanganan susu segar mutlak dilakukan pada setiap jumlah ternak dan atau jumlah peternak di suatu kawasan dengan pendekatan Kelompok/Gapoknab.
- Peningkatan kemampuan pengolahan susu pada tingkat peternak yang berbasis pada Kelompok/Gapoknab. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyediaan bantuan teknik dan peralatan pengolahan susu di sentra produksi.

susu sapi perah.

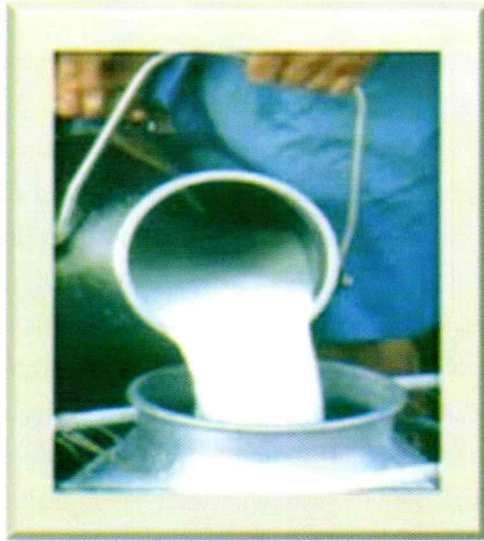
- Peningkatan kemampuan peternak/pelaku usaha penanganan, pengolahan dan pemasaran susu dalam mengembangkan usahanya.
- Upaya yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan kegiatan pendampingan usaha bagi peternak/Kelompok/Gapoknack dengan merekrut tenaga yang kompeten baik dari Perguruan Tinggi maupun dari lembaga-lembaga lain yang relevan dengan hal tersebut.
- Peningkatan kemampuan penjualan langsung ke konsumen. Merupakan tantangan yang dihadapi dalam hal ini bahwa minum susu belum merupakan budaya masyarakat, sehingga diperlukan suatu rencana aksi dengan membuat suatu kebiasaan minum susu yang kemudian kebiasaan itulah yang akan membentuk budaya minum susu. Upaya ini dapat dilakukan dengan promosi minum susu segar atau susu murni bagi anak sekolah dan kelompok masyarakat gizi buruk.

Untuk mewujudkan program aksi tersebut, kegiatan utama yang dilakukan antara lain; fasilitasi peralatan penanganan, pengolahan dan pemasaran susu segar, pendampingan pengembangan usaha, Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) serta kegiatan pemasaran susu dimasyarakat.

Untuk merealisasikan program aksi di atas, maka sejak tahun 2005 telah dilakukan penyebaran bantuan alat pengolahan susu pasteurisasi yang diberikan di 11 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

Bantuan alat tersebut diberikan melalui kelompok tani sapi perah yang dalam operasionalnya bekerjasama dengan koperasi susu setempat. Tujuan dari bantuan alat adalah apabila produksi susu para peternak yang ditolak oleh koperasi (IPS) dapat diolah menjadi susu pasteurisasi yang dikemas dalam cup dan diberi label. Dalam proses pengolahan dan pengemasan tentunya disesuaikan dengan standar higienis yang berlaku agar konsumen yang meminum susu tidak sakit (*biosecurity*).





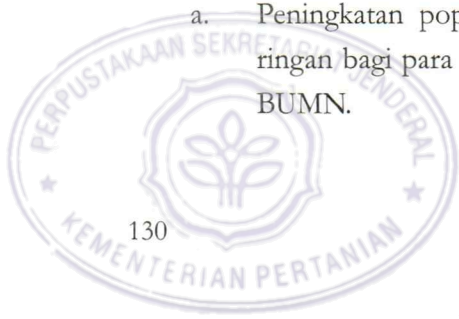
Gambar 14.2. Susu

14.3 Program Peningkatan Produksi dan Konsumsi Susu

Jangka Pendek dan Menengah

1. Peningkatan konsumsi susu segar
 - a. Melakukan kerjasama (MOU) dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka penciptaan pasar tetap bagi susu segar melalui pemberian insentif susu untuk anak sekolah, susu untuk olahragawan susu untuk karyawan dan susu untuk masyarakat.
 - b. Melakukan kerjasama (MOU) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka Sosialisasi Gerakan Minum Susu Segar di Seluruh Indonesia.
 - c. Melakukan kerjasama (MOU) dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan kelembagaan usaha Koperasi Susu untuk meningkatkan produksi susu segar di sentra – sentra produksi susu.

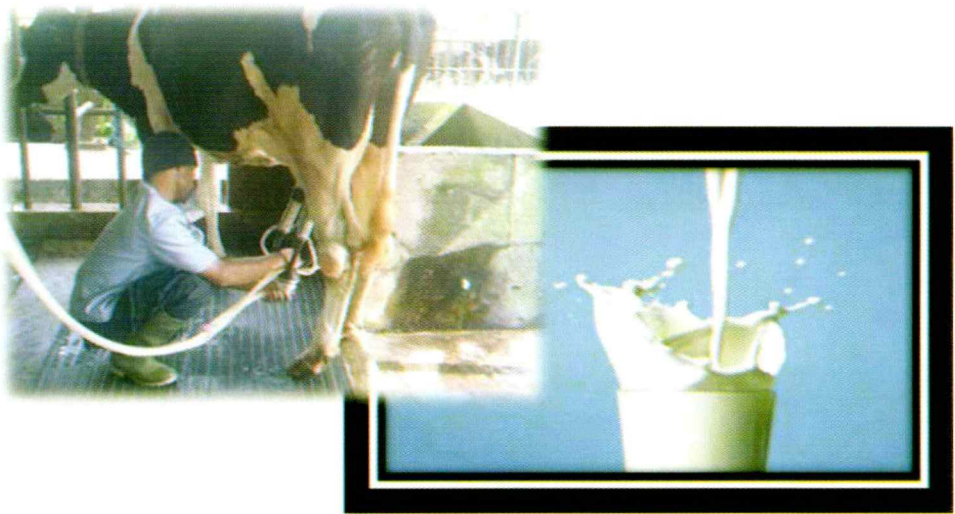
2. Peningkatan Produksi susu
 - a. Peningkatan populasi sapi perah antara lain melalui kredit bunga ringan bagi para peternak serta kerjasama dengan pihak industri dan BUMN.



- b. Perbaiki penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk mendapatkan produksi susu yang lebih tinggi.

Jangka Panjang

1. Perbaiki kualitas dan kuantitas susu sapi perah lokal dengan:
 - a. Mengadakan pelatihan berkelanjutan kepada para peternak khususnya dalam bidang pakan ternak dan manajemen peternakan yang higienis
 - b. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga peneliti antara lain Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Universitas dan juga bantuan teknis dari lembaga luar negeri untuk penyusunan dan implementasi program berkelanjutan
2. Membangun peternak berdaya saing tinggi melalui sistem peternakan yang mempunyai rendah biaya operasional seperti peternakan koloni dan sistem klaster.
3. Perbaiki dan pengembangan genetik sapi perah lokal di Indonesia melalui pembangunan rearing.



Gambar 14.3. Susu Segar dan Siap Minum





Pengembangan Agroindustri Aneka Tepung

5.1 Potensi Pengembangan Agroindustri Aneka Tepung

Kebutuhan aneka tepung untuk industri makanan, pakan dan industri setiap tahun cenderung meningkat dan dipenuhi melalui tepung impor dan sebagian dari tepung lokal. Impor gandum tahun 2005 : 4.962.500 ton, tahun 2006 : 1028.893 Ton, tahun 2007 : 5.137.377 ton, tahun 2008 : 5.303.564 ton, dan tahun 2009 sebesar 5.159.338 ton. Diperkirakan kebutuhannya akan meningkat seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berbahan baku tepung.

Disamping itu pada tahun 2009 Indonesia juga mengimpor 1,86 juta ton tepung tapioka.

Sementara itu potensi bahan baku yang dapat diolah menjadi tepung cuku besar. Ubi kayu saat ini luas panennya 1.173.203 Ha (2010) dengan produk 22.116.222 ton (2010). Komoditi lain seperti jagung, ubi jalar, ganyong, garu gandum local dan sagu juga merupakan potensi yang dapat menghasilkan tepung.

Produktivitas ubi kayu setiap tahun mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 3,47 % per tahun. Pada tahun 2009, produktivitas ubi kayu mencapai 188,51 ku/ha. Untuk selengkapnya, perkembangan luas panen, produktivitas dan produksi ubi kayu tahun 2005 – 2010 dapat dilihat pada Tabel 15.1.

Tabel 15.1. Perkembangan luas panen, produktivitas dan produksi ubi kayu tahun 2005 – 2010

No	Tahun	Luas Panen		Produktivitas		Produksi	
		(Ha)	%	Ku/Ha	%	Ton	%
1	2005	1.213.460	-	159,22	-	19.321.183	-
2	2006	1.227.459	1,15	162,83	2,27	19.986.640	3,4
3	2007	1.201.481	-2,12	166,36	2,17	19.988.058	0,0
4	2008	1.204.933	0,29	180,57	8,54	21.756.991	8,8
5	2009*	1.117.819	-2,50	187,51	3,84	22.028.502	1,2
6	2010*	1.173.203	-0,14	188,51	0,53	22.116.222	0,4
Pertumbuhan		1.173.203	-0,66		3,47		2,7

Ekspor ubi kayu Indonesia dilakukan dalam bentuk ubi kayu kering (gaple atau lainnya) dan tepung tapioka. Perkembangan ekspor – impor ubi kayu selama tahun 2005 – 2010 terlihat pada tabel 2. Pada tahun 2009, ekspor dan impor tapioka menunjukkan angka yang cukup besar. Indonesia mengimpor *cassia starch* dalam jumlah yang cukup besar. Tingginya impor produk ini diperkirakan karena jumlah pasokan dalam negeri yang tidak mencukupi. Meskipun begitu jumlah ekspor tapioka pada tahun 2009 lebih besar dari pada impornya sehingga kinerja ekspor dapat dikatakan cukup bagus.

Tabel 15.2. Perkembangan ekspor – impor ubi kayu selama tahun 2005 – 2010

No	Tahun	Impor*		Ekspor**		Net Ekspor - Impor	
		Volume (Ton)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (Ton)	Nilai (Ribu US\$)	Volume (Ton)	Nilai (Ribu US\$)
1	2005	103.075	24.497	343.230	45.140	240.155	20.643
2	2006	305.309	70.372	200.600	20.209	(104.709)	(50.163)
3	2007	306.648	77.888	247.546	43.814	(59.102)	(34.074)
4	2008	158.100	57.950	166.690	35.870	8.590	(22.080)
5	2009*	1.886.176	323.558	9.177.379	1.425.085	7.291.196	1.101.527
Pertumbuhan		531.247	105.954	1.958.443	30.996	1.147.196	199.042

Indonesia adalah pengimpor biji gandum terbesar di dunia. Biji gandum olah menjadi tepung terigu yang merupakan bahan pangan terbesar kedua setelah beras. Konsumsi terigu dalam negeri cenderung terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan semakin membaiknya gizi masyarakat terutama di perkotaan. Tanaman gandum sebetulnya dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di Indonesia, terutama di daerah dataran tinggi bersuhu sejuk. Namun penanaman dan produksi gandum nasional masih sangat rendah bahkan petani masih mengalami kesulitan terutama menyangkut ketersediaan benih gandum. Untuk selengkapnya, perkembangan luas panen, produktivitas dan produksi gandum tahun 2005 – 2010 dapat dilihat pada Tabel 15.3 dan perkembangan impor gandum dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 15.3. Perkembangan luas panen, produktivitas dan produksi gandum tahun 2005 – 2010

No	Tahun	Luas Panen		Produktivitas		Produksi	
		(Ha)	%	Ku/Ha	%	Ton	%
1	2005	395	-	15.4	-	608.3	-
2	2006	284	-28.101	17.2	11.688	488.48	-19.6975
3	2007	310	9.15493	17.9	4.0698	554.01	13.4151
4	2008	184	-40.645	23.51	31.341	432.58	-21.9184
5	2009	112.5	-38.859	20.74	-11.782	233.32	-46.0632
6	2010	-	-	-	-	-	-
Pertumbuhan			-24.613		8.8292		-18.566

Tabel 15.4. Perkembangan impor gandum

No	TAHUN	IMPOR	
		Volume Ton	Nilai (Ribu US\$)
1	2005	4,962,500	990,738
2	2006	5,028,893	994,486
3	2007	5,137,377	1,041,387
4	2008	5,303,564	1,444,784
5	2009	5,159,338	2,371,699
Rata-rata		5,118,334	1,368,618



Gambar 15.1. Cassava

15.2. Strategi Pengembangan

Berdasarkan kondisi/gambaran tentang produktivitas dan kinerja ekspor impor aneka produk tepung di atas, maka untuk mewujudkan pengembangan agroindustri pengolahan hasil pertanian (khususnya aneka tepung) maka strate pokok yang harus ditempuh adalah:

- . Pengembangan pengolahan hasil pertanian (khususnya aneka tepung) melalui konsep agribisnis yang berkelanjutan di sentra-sentra produksi pertanian.
- 1. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan
- 2. Meningkatkan efisien usaha pengolahan hasil pertanian (khususnya aneka tepung) melalui revitalisasi sarana pengolahan
- 3. Meningkatkan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani melalui GAPOKTAN
- 4. Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan usaha pengolahan (Bio energi, Bio Fuel)

Pengembangan agroindustri aneka tepung didukung oleh empat strategi, yang pertama yaitu strategi akselerasi pengembangan agroindustri tepung. Strategi ini bertujuan untuk penumbuhan agroindustri pedesaan yang mengolah tepung lokal. Guna mendukung strategi akselerasi ini, pemerintah dalam kebijakannya yang dituangkan dalam Blue Print Nilai Tambah dan Daya Saing merencanakan dalam tahun 2010 – 2014 akan mensubstitusi 20 % impor gandum dengan aneka produk tepung lokal yaitu sebanyak 1,2 juta ton ($20\% \times 6$ juta ton) atau 240 ribu ton per tahun. Untuk pemenuhan diatas pemerintah berusaha melakukan pemberian bantuan (pilot proyek) sebesar 10 % (24 ribu ton / tahun) melalui program pengembangan agribisnis aneka tepung, sedangkan sisanya diharapkan dipenuhi melalui swasta dan masyarakat. Program pemenuhan pemerintah ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi yang ada dan atau melalui pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) tepung (pabrik baru). Kapasitas produksi setiap UPH sebesar 2 ton per hari (25 hari kerja, 12 bulan per tahun). Program pengembangan agroindustri aneka tepung telah dimulai sejak tahun 2007. Sampai tahun 2009 telah dibangun sebanyak 38 unit UPH tepung. Pada tahun 2010 sedang berjalan pembangunan sebanyak 10 unit UPH tepung

Strategi yang kedua adalah strategi pengembangan sumber daya manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis petugas pendamping, penyuluh lapang spesialis agroindustri dan SDM pelaku agroindustri pedesaan pengolahan tepung lokal. Strategi yang ketiga adalah peningkatan citra tepung lokal sebagai alat pemasaran. Hal ini dilakukan dengan cara pengembangan brand

image tepung lokal dengan mengedapankan program kemandirian pangan dan pengembangan media informasi untuk mendorong kampanye aku cinta tepung lokal. Sebagai bentuk cinta akan produk tepung lokal, maka pemanfaatan tepung lokal menjadi olahan makanan dan minuman sangat diharapkan. Sebagai makanan kesehatan diperoleh informasi bahwa makanan dari singkong bermanfaat untuk functional food (makanan kesehatan) yang saat ini kecenderungan permintaannya semakin meningkat. Makanan ini cocok untuk penderita penyakit diabetes karena index glikemiknya yang kecil. Begitu juga untuk penyandang autisme tepung moca diinformasikan dapat sebagai bahan makanan terapi, karena tepung ini tidak mengandung gluten seperti pada tepung gandum.

Disisi lain Presentase penggunaan ubi kayu dalam industri masih 22.31 % dari total ubi kayu per tahun (20 juta ton/th), yang sebagian besar diolah menjadi produk tapioka dengan produksi 727.700 ton/th. Pemanfaatan lainnya diolah menjadi casava, onggok, etanol, liquid CO₂, fuse oil, gula cair dan gula kristal Untuk Selengkapnya, penggunaan ubi kayu dalam industri dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 15.5. Penggunaan Ubi Kayu Dalam Industri

Produk	Produksi	Satuan	R (%)	Bahan baku	Satuan
Tapioka	727,700	Ton/th	25	2,910,800	Ton/th
Casava	3,000	Ton/th	30	10,000	Ton/th
Onggok	3,600	Ton/th	30	12,000	Ton/th
Etanol	60,000	kL/th	20	300,000	Ton/th
Liquid CO ₂	33,000	MT	20	165,000	Ton/th
Fuse oil	108,000	kL/th	20	540,000	Ton/th
Gulacair	96,000	Ton/th	20	480,000	Ton/th
Gula kristal	5,250	Ton/th	12	43,750	Ton/th
Total Bahan Baku				4,461,550	
Total produksi ubi Kayu/th				20,000,000	
Persentase penggunaan ubikayu				22.31	%

Strategi yang terakhir adalah strategi kelembagaan, yaitu dilakukan dengan cara memperkokoh poktan/gapoktan untuk menjadi ujung tombak pengembang agroindustri tepung lokal, pengembangan kemitraan ABGF (Academic Business Government Farmer), dan pengembangan pasar dengan kemitraan dengan sektor

isnis yang bisa jadi penghela.

Sistem agroindustri tepung lokal, baik tepung terigu, tepung kasava dan tepung ubi jalar adalah dalam bentuk cluster. Para petani menjual bahan baku tepung (segar/olahan chip) ke UPH Poktan/Gapoktan yang berkapasitas 0.5 – 1.5 ton tepung. Para petani ini menjalin kemitraan dengan UPH Poktan/Gapoktan sehingga adanya jaminan ketersediaan bahan baku untuk UPH dan adanya jaminan dari UPH untuk petani dalam hal pembelian bahan baku. Kemudian UPH akan mencari pasar yang mau menerima tepung untuk diolah lebih lanjut, dan selanjutnya dijual ke konsumen akhir. Selain itu, bahan baku juga bisa dijual dalam bentuk segar ke pasar alternatif.

Begitu juga dengan model pengembangan sistem agroindustri mocaf yaitu melalui sistem klaster yaitu klaster inti dan plasma. Hanya perbedaannya dengan model sebelumnya, kelompok tani sebagai plasma menjual bahan baku ke inti dalam bentuk olahan chip sehingga kelompok tani mendapatkan nilai tambah. Dalam hal ini Inti dapat berupa KUD/Gapoktan atau pelaku swasta. Setiap inti dapat bermitra dengan 10 (sepuluh) Plasma. Peran inti dalam klaster antara lain mengumpulkan bahan baku, menggiling chip menjadi tepung, menampung olahan dari Plasma, Pengemasan-penyimpanan-promosi-pemasaran. Setiap inti menghasilkan 2 ton tepung/hari, dan membina 10 (sepuluh) plasma. Peran plasma dalam klaster adalah membuat chip singkong kering, menyeter chip kering ke Inti. Setiap plasma menghasilkan chip 2 kwintal/hr, operasional 5 sampai 12 bulan dengan 25 hari/kerja/bulan. Setiap inti klaster memiliki peralatan produksi tepung seperti : bak pencucian/perendaman, alat pengiris/slicer/penyawut, alat pengepres, rak penjemur, alat pengering, penggiling dan alat pengemas. Setiap plasma memiliki sarana/peralatan untuk mendukung proses produksi seperti : pengiris/slicer dan rak penjemur.

Direktorat Jenderal PPHP sejak tahun 2007 sampai 2010 telah mengalokasikan dana Tugas Pembantuan untuk memfasilitasi 48 UPH percontohan pengembangan agroindustri tepung-tepungan berbasis tanaman pangan khususnya tanaman serelia dan umbi-umbian di beberapa kabupaten di Indonesia. Kegiatan ini sebagian besar diarahkan kepada peningkatan nilai tambah komoditi menjadi tepung seperti tepung tapioka, tepung casava, tepung mocaf, tepung ubi jalar, dan tepung ganyong. Kegiatan ini didukung dengan kegiatan pendampingan, pembinaan dan pengawalan. Dalam kegiatan ini pelaku usaha

diarahkan untuk memproduksi tepung sesuai dengan cara produksi yang baik dan benar (memenuhi kaidah dan persyaratan GMP).

Pada tahun 2011, telah diusulkan proposal dari 33 propinsi lokasi kawasan sentra umbi-umbian dan sereal untuk pengembangan agroindustri tepung tepungan yang terdiri dari 3 pengembangan agroindustri sagu, 1 pengembangan agroindustri ubi jalar, dan 29 pengembangan agroindustri singkong. Target jumlah UPH yang akan dikembangkan pada tahun 2011 sebanyak 45 buah. Pola usaha yang diprioritaskan untuk usulan kegiatan 2011 adalah kemitraan *two in one*.



16

Profil Pemetaan Investasi Tanaman Pangan

16.1 Pendahuluan

Sektor Pertanian merupakan “*major element*” dari perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbang 15 % terhadap GDP Indonesia, menyerap 42 % angkatan kerja, penyedia pangan dan bahan baku industri. Dengan demikian, sangat wajar apabila pemerintah menempatkan sektor ini menjadi salah satu primadona dalam memacu pembangunan nasional. Peran serta dan kontribusi masyarakat pertanian baik dalam negeri maupun luar negeri diberi ruang dan kesempatan

yang luas untuk mendorong laju pembangunan nasional.

Disamping itu, Investasi adalah bagian sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian. Dalam perspektif ekonomi makro jangka panjang, maka investasi akan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah telah berupaya untuk mendorong investasi baik oleh pengusaha dalam negeri maupun luar negeri melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Namun masih banyak faktor lingkungan strategis lainnya yang ikut berpengaruh signifikan terhadap perkembangan investasi di bidang pertanian.

Percepatan investasi pertanian, khususnya pada sub sektor tanaman pangan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka ketahanan pangan. Hal-hal substansial yang berkaitan dengan ketahanan pangan adalah permasalahan strategis mengenai (1) Lahan, Kawasan, dan Tata Ruang, (2) Infrastruktur (3) Litbang, (4) Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi, (5) Pangan dan Gizi dan (6) Perubahan Iklim.

Indonesia juga memiliki sumberdaya alam berupa lahan dengan kondisi agroklimat yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai usaha pertanian produktif. Lahan-lahan potensial tersebut diidentifikasi merupakan peluang pengembangan sektor pertanian masa datang. Data statistik Indonesia, tahun 2004, tercatat areal seluas 10,19 juta ha lahan pertanian yang belum dimanfaatkan. Disamping banyak terdapat lahan kering yang merupakan tegalan, kebun dan ladang/huma mencapai 15,58 juta ha dengan produktifitas yang relatif rendah dan 2,39 juta ladang rumput yang siap untuk dimanfaatkan termasuk untuk pengembangan sektor peternakan.

Dewasa ini masih banyak produk-produk pertanian yang dihasilkan belum diolah dan tetap dalam bentuk produk primer. Oleh karena itu program pengembangan hilirisasi produk-produk pertanian merupakan tantangan yang potensial untuk pengembangan pengolahan produk-produk pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk. Misalnya program pengembangan hilirisasi kelapa sawit terutama produksi oleokimia membutuhkan investasi sebesar US\$ 800 juta hingga tahun 2015.

Potensi yang tersedia tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan, sehingga perlu penggerak baik dari faktor internal maupun eksternal. Dalam hal ini investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan pembangunan mengingat bahwa kegiatan investasi memiliki multiplier efek luas dalam perekonomian

seperti peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah, devisa, pajak, dan lain-lain. Sementara ini Negara dalam kondisi keuangan yang menyebabkan terbatasnya peran pemerintah dalam mengelola pembangunan nasional, porsi terbesar diharapkan berasal dari masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri melalui penanaman modal (investasi).

Upaya peningkatan masuknya penanaman modal, termasuk modal asing dalam bentuk investasi langsung (*foreign direct investment/FDI*) diyakini sebagai kunci utama menuju pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan pendapatan nasional. Oleh karena itu pembentukan modal menjadi faktor penting dalam proses pembangunan. Kondisi ini berkaitan dengan upaya pemeliharaan kesinambungan pembangunan nasional baik dalam jangka pendek dan menengah maupun jangka panjang.

Adanya dinamika di dunia usaha yang berkembang pesat dan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif maka informasi/data yang akurat dan terkini terkait investasi sangat dibutuhkan. Informasi/data tersebut dapat dijadikan acuan/bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan untuk berinvestasi di sektor pertanian. Untuk memudahkan calon investor, pelaku usaha dan aparat pertanian yang menangani bidang investasi untuk mendapatkan informasi data terkait dengan rencana pengembangan investasi sektor pertanian baik jangka pendek dan jangka menengah maupun jangka panjang maka dilakukan kegiatan Penyusunan Roadmap Investasi Pertanian.

Berangkat dari paparan diatas, maka perlu penyusunan *Roadmap* bagi kebijakan investasi di Indonesia. Relevansi roadmap investasi terletak pada kebutuhan perencanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Tolak ukur keberhasilan investasi, baik investasi asing maupun domestik terletak pada dampak dan implikasi adanya prioritas subsektor maupun komoditas akan lebih erat dengan roadmap investasi pertanian.

Peluang investasi pertanian di Indonesia masih besar berdasarkan beberapa indikator, yakni :

- 1) ketersediaan sumberdaya alam (lahan, air dan iklim);
- 2) Permintaan domestik terhadap produk pertanian akan terus meningkat karena peningkatan jumlah penduduk (yang sudah tinggi) dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- 3) Naiknya harga pangan dunia yang memberikan peluang peningkatan

- keuntungan dan usaha yang berkelanjutan bagi pelaku usaha;
- (4) Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan dan peraturan;

Garis-garis besar kebijakan pengembangan investasi pertanian yang akan dilakukan adalah:

- 1). Membangun basis bagi partisipasi petani.

Basis partisipasi petani perlu dibangun dengan kuat agar mereka mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan sehingga mampu memperoleh hasil sebesar-besarnya dan terdistribusi secara adil dan merata. Basis partisipasi petani untuk mengakses modal, faktor-faktor produksi serta insentif dan fasilitasi kebijakan pemerintah dibangun agar petani mampu mengaktualisasikan kegiatan usahatani secara optimal untuk menunjang peningkatan pendapatannya. Untuk itu, peraturan keagrariaan akan digunakan, individu petani akan diberdayakan dan organisasi petani akan ditumbuh-kembangkan

- 2). Meningkatkan potensi basis produksi dan skala usaha pertanian.

Basis usaha pertanian ditingkatkan melalui revitalisasi, ekstensifikasi dan diversifikasi utamanya pembukaan areal baru khususnya di Luar Jawa dengan memacu investasi swasta baik usaha pertanian rakyat maupun perusahaan besar pertanian yang bermitra dengan usaha pertanian rakyat dengan dukungan fasilitasi komplementer dan insentif dari pemerintah. Peningkatan potensi basis produksi dikembangkan dengan sasaran peningkatan skala usaha, peningkatan dan perluasan kapasitas produksi agregat dan penyeimbangan pemanfaatan lahan antar wilayah di Indonesia. Peningkatan skala usaha pertanian juga dilakukan melalui pengembangan usaha kooperatif, serta penyediaan lapangan kerja non-pertanian guna mengurangi tekanan tenaga kerja terhadap pertanian utamanya melalui pengembangan industri di pedesaan.

- 3). Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sumberdaya insani pertanian yang berkualitas.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini difokuskan pada peningkatan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan dan manajemen usaha tani melalui pengembangan sistem pendidikan dan

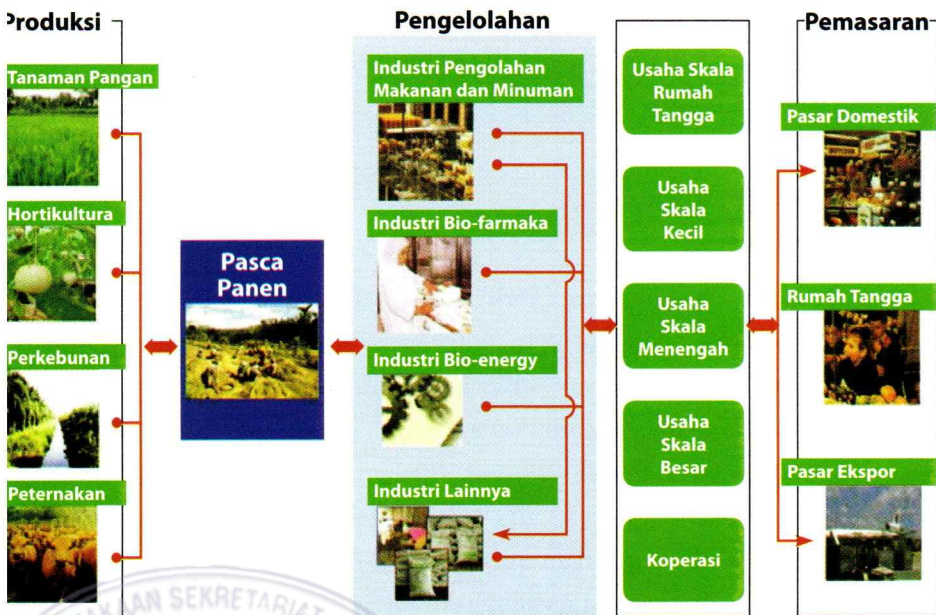
penyuluhan pertanian. Kebijakan ini diimplementasikan dalam bentuk revitalisasi sistem pendidikan dan penyuluhan pertanian guna menciptakan insan pertanian berkualitas yang mampu menguasai dan menerapkan teknologi serta mengelola usahatannya secara efisien.

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian.

Kebutuhan infrastruktur pertanian utamanya sarana irigasi, jalan pertanian dan pedesaan, kelistrikan dan telekomunikasi pedesaan serta pasar pertanian yang bersifat publik dibangun selengkap mungkin oleh pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada swasta untuk turut berpartisipasi pada bidang-bidang tertentu yang mungkin diusahakan secara komersial.

Mewujudkan sistem pembiayaan pertanian tepat guna

Sistem pembiayaan pertanian yang sesuai dengan karakteristik petani dibangun dengan menumbuh kembangkan lembaga keuangan khusus yang melayani pertanian, baik berupa bank pertanian maupun lembaga keuangan mikro. Pemerintah akan memberikan dukungan dan insentif mencakup perlakuan khusus dan berbeda, penjaminan kredit dana talangan dan subsidi harga.



Gambar 16.1. Bagan Alur Pengolahan Padi

6). Mewujudkan sistem inovasi pertanian

Sistem inovasi pertanian dibangun dengan lembaga peneliti pemerintah sebagai penggerak utamanya dan lembaga penelitian swasta sebagai komplementaritasnya. Sistem inovasi pertanian mengintegrasikan lembaga penelitian penghasil IPTEK dasar,

16.2 Profil Pemetaan Investasi Padi

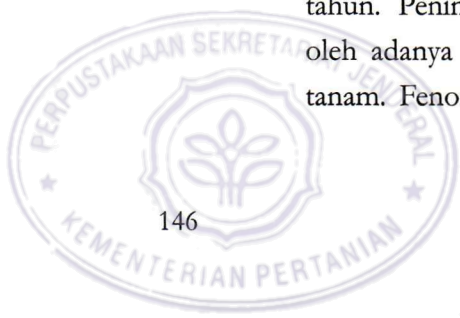
**16.2.1 Gambaran Umum Investasi Padi dan Isu Regional
Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas**

Selama periode 2006-2010, luas areal pertanaman Padi Indonesia rata-rata 12,479 juta hektar dengan peningkatan sebesar 3.1% per tahun (Tabel 2.1).

Tabel 16.1 . Perkembangan areal, produktivitas dan produksi Padi di Indonesia, tahun 2006-2010.

Tahun	Luas Panen(Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi(Ton)
2006	11 786 430	46,20	54 454 937
2007	12 147 637	47,05	57 157 435
2008	12 327 425	48,94	60 325 925
2009	12 883 576	49,99	64 398 890
2010	13 253 450	50,15	66 469 394

Produktivitas Padi yang masih rendah (4,85 ton/h walaupun cenderung meningkat 2,1 % per tahun, menggambarkan bahwa penggunaan benih Padi berkualitas di tingkat petani belum berkembang seperti diharapkan, disamping cara pemeliharaan yang juga belum intensif. Dalam periode 2006-2010 rata-rata produksi Padi 60,56 juta ton dan cenderung meningkat 5,5 % per tahun. Peningkatan produksi Padi ini lebih banyak ditentukan oleh adanya peningkatan produktivitas daripada peningkatan luasan tanam. Fenomena ini menunjukkan bahwa perluasan penggunaan



benih hibrida di tingkat petani diperkirakan mampu meningkatkan produksi Padi, mengingat menurut Badan Litbang Pertanian bibit unggul dapat mencapai 7 ton/ha.

Daerah penghasil utama Padi di Indonesia Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung. Selain itu juga Sumatera barat, Banten, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Aceh dan Kalimantan Barat. Areal panen dan total produksi Padi dari 13 propinsi tersebut adalah 87,77% dari luas panen dan produksi total Padi nasional. Propinsi yang paling dominan, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur menyumbang 50.39% produksi nasional.

Tabel 16.2. Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Tahun 2009 menurut 13 Propinsi Utama (Penghasil di atas 1 juta Ton)

No.	Provinsi	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
	Indonesia	13 253 450	50,15	66,469,394
1	Jawa Barat	2 037 657	57,60	11,737,070
2	Jawa Timur	1 963 983	59,29	11,643,773
3	Jawa Tengah	1 801 397	56,13	10,110,830
4	Sulawesi Selatan	886 354	49,44	4,382,443
5	Sumatera Utara	754 674	47,47	3,582,302
6	Sumatera Selatan	769 478	42,53	3,272,451
7	Lampung	590 608	47,54	2,807,676
8	Sumatera Barat	460 497	48,02	2,211,248
9	Banten	406 411	50,39	2,048,047
10	Kalimantan Selatan	471 166	39,10	1,842,089
11	Nusa Tenggara Barat	374 284	47,41	1,774,499
12	Aceh	352 281	44,92	1,582,393
13	Kalimantan Barat	428 461	31,37	1,343,888



**Tabel 16.3. Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi
Tahun 2009 menurut Propinsi Lainnya**

No	Provinsi	Luas Panen(Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
14	Sulawesi Tengah	208 628	45,88	957,108
15	Bali	152 190	57,11	869,161
16	DI Yogyakarta	147 058	56,02	823,887
17	Kalimantan Tengah	247 577	26,27	650,416
18	Jambi	153 897	40,86	628,828
19	Kalimantan Timur	150 031	39,25	588,879
20	Sulawesi Utara	119 771	48,76	584,030
21	Riau	156 088	36,83	574,864
22	NTT	174 674	31,80	555,493
23	Bengkulu	133 629	38,68	516,869
24	Sulawesi Tenggara	107 751	42,19	454,644
25	Sulawesi Barat	75 923	47,80	362,900
26	Gorontalo	45 937	55,20	253,563
27	Papua	26 686	38,45	102,610
28	Maluku	20 233	41,08	83,109
29	Maluku Utara	16 071	34,47	55,401
30	Papua Barat	9 464	36,19	34,254
31	Bangka Belitung	8 180	27,21	22,259
33	DKI Jakarta	2 015	55,40	11,164
34	Kepulauan Riau	396	31,46	1,246

16.2.2 Kebutuhan Penggunaan Padi

Selama periode 2005 - 2008, ketergantungan akan impor sebagai salah satu indikator kekuatan penyediaan pangan dalam negeri, mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 1.522,14 ril ton (20,53 persen). Hal itu menunjukkan bahwa ketergantungan impor bahan pangan memiliki ratio yang relatif kecil. Keadaan ini menggambarkan upaya peningkatan produksi tanaman pangan

cukup berhasil sehingga dapat meningkatkan ketersediaan yang dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Namun demikian, tahun 2014 produksi padi ditargetkan sebesar 81,73 juta untuk menekan import bahkan mampu mengekspor. Pada Tahun 2010, tercatat impor beras mencapai 1,8 juta ton, sebagaimana dicatat oleh USDA (2010).

Tabel 16.4. Sepuluh Besar Negara Pengimpor Beras tahun 2010

Peringkat	Negara	Kuantitas (dalam juta ton)
1	Nigeria	1.9
2	Philippines	1.9
3	Indonesia	1.8
4	EU	1.4
5	Iran	1.2
6	Irak	1.2
7	Saudi Arabia	1.1
8	Malaysia	1.0
9	Bangladesh	0.9
10	Cote d'Ivoire	0.9

16.2.3 Potensi Peningkatan Produksi Padi

Pada tahun 2010 - 2014 target peningkatan ketahanan pangan ekuivalen dengan target peningkatan produksi per tahun yang rata-rata padi 5,22 persen, Sasaran tersebut ditetapkan berdasarkan kebutuhan, penambahan penduduk dan situasi lingkungan strategis kedepan (Renstra Ditjen Tanaman Pangan 2010-2014). Faktor produksi utama dalam menunjang peningkatan produksi dipaparkan sebagai berikut :

1) Lahan

Berdasarkan data BPS tahun 2008, adalah data luas lahan pada kondisi akhir tahun dan merupakan data *existing*, bukan berdasarkan status lahan atau data *planning*. Indonesia memiliki luas lahan

sawah 8,015 juta hektar. Berdasarkan jenis pengairan, adalah irigasi seluas 4,842 juta hektar, yaitu di pulau Jawa seluas 2,499 juta hektar dan luar Jawa seluas 2,343 juta hektar; 2) non irigasi seluas 3,173 juta hektar, yaitu di pulau Jawa seluas 798 ribu hektar dan luar Jawa seluas 2,375 juta hektar. Di Indonesia luas lahan tegelahan kebun yaitu 11,854 juta hektar, lahan ladang/huma seluas 5,324 juta hektar, dan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 14,8 juta hektar. Kondisi ini mengindikasikan untuk pengembangan sub-sektor tanaman pangan dengan program penambahan baku lahan dapat diarahkan ke daerah-daerah di luar pulau Jawa. Potensi pengembangan untuk areal irigasi memungkinkan di pulau Sumatera dan Sulawesi. Selain itu untuk penumbuhan kantong-kantong produksi dapat juga dikembangkan pada lahan non irigasi (tadah hujan, pasang surut, lebak dan polder) yang banyak terdapat di pulau Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan untuk lahan yang sementara tidak diusahakan masih banyak terdapat di Papua seluas 5,329 juta hektar.

2) Jaringan Irigasi

Ketersediaan air sangat berperan besar dalam aktivitas usahatani. Kebutuhan air untuk usahatani dapat bersumber dari air hujan, air tanah, sungai dan lain-lain, yang dikelola salah satunya dengan sistem irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian. Beberapa jenis irigasi yang dimanfaatkan untuk usaha pertanian tanaman pangan terutama padi, jagung dan kedelai, yaitu irigasi sederhana, irigasi setengah teknis, irigasi tadah hujan dan irigasi teknis.

Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan irigasi yang mencakup penyediaan, pengambilan dan pembagian air terdiri dari jaringan tersier dan jaringan utama. Di masa mendatang seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan terhadap air irigasi untuk memproduksi pangan khususnya padi akan semakin meningkat. Berdasarkan Asem tahun 2010, sumbangan produk

padi nasional masih didominasi oleh padi sawah yaitu sebesar 62,96 juta ton GKG atau 94,81 persen, sedangkan padi ladang hanya sebesar 3,45 juta ton GKG atau 5,19 persen dari total produksi sebesar 66,41 juta ton GKG.

Melambatnya laju perluasan lahan irigasi yang terjadi sejak dekade 80-an, merupakan akibat simultan turunnya investasi pemerintah dibidang irigasi akibat beban utang, resistensi politik, meningkatnya biaya riil untuk investasi irigasi, turunnya harga riil komoditas pangan dan alih fungsi lahan akibat perluasan perkotaan dan tuntutan ekonomi. Menyikapi hal tersebut perlu kebijakan optimalisasi peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi, disamping kebijakan fiskal berupa peningkatan anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi.

3) Jalan Usahatani

Optimalisasi usahatani untuk menjadi usahatani yang efisien dan efektif serta mendatangkan keuntungan yang memadai bagi petani, perlu mendapat dukungan oleh adanya prasarana jalan yang akan meningkatkan akses petani ke objek-objek yang dibutuhkan. Prasarana jalan yang dirancang khusus untuk kegiatan usahatani biasa disebut jalan usahatani, selama ini telah ada dan telah aplikatif. Namun kondisinya belum sesuai kebutuhan dan banyak diantara yang sudah ada perlu rehabilitasi.

Jalan usahatani (JUT) adalah suatu prasarana transportasi dalam kawasan lahan usahatani tanaman pangan sebagai sarana produksi pertanian, hasil panen dan alat mesin pertanian. Jalan usahatani dikategorikan kepada jalan khusus, yaitu jalan yang pembangunan dan pembinaannya merupakan tanggung jawab Kementerian terkait (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004). Pada umumnya jalan usahatani yang ada belum memadai sehingga masih diperlukan pembangunan baru, peningkatan kapasitas dan rehabilitasi yang memenuhi standar teknis untuk dilalui oleh kendaraan dan alat mesin pertanian yang diperlukan.

4.) Perbenihan

Fokus utama pengembangan perbenihan dalam rang peningkatan produksi tanaman pangan ialah mendorong peningkatan penggunaan benih varietas unggul bermutu. Masyarakat penggunaan benih varietas unggul bermutu sejalan dengan pembangunan atau pengembangan kelembagaan perbenihan peningkatan penyediaan/produksi benih varietas unggul bermutu peningkatan/pemberdayaan penangkar dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan perbenihan. Upaya pembangunan dibidang perbenihan telah cukup baik, penggunaan benih varietas unggul bermutu padi sudah mencapai 65,00 persen. Upaya ini cukup baik, dimana selama beberapa tahun terakhir penggunaan benih varietas unggul bermutu untuk padi hanya berada pada kisaran 45 persen. Permasalahan yang mendasar adalah ketersediaan benih varietas unggul bermutu belum mencukupi apabila hanya mengandalkan potensi aktual sumber benih yang ada saat ini.

5) Alat dan Mesin Pertanian

Penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja usaha tani dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Alsintan yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) kategori : 1) alsintan pra-panen, 2) alsintan panen dan 3) alsintan pasca panen. Kemampuan kepemilikan alat dan mesin pertanian berikut suku cadangnya oleh petani masih sangat rendah, oleh karena itu perlu kebijakan yang dapat menjadi stimulan ataupun fasilitas bagi optimalisasi pemanfaatan alsintan

Gambaran ketersediaan alsintan di Indonesia menurut data tahun 2009 adalah: 1) Traktor tangan 98.493 unit dengan kapasitas 40 ha/th/unit. Kebutuhan saat ini adalah 183.705 unit; 2) Traktor roda empat 2.213 unit dengan kapasitas 75 ha/th/unit. Kebutuhan saat ini 45.926 unit; 3) Pompa air 133.979 unit dengan kapasitas 25 ha/th/unit. Kebutuhan 437.393 unit. Berdasarkan data di atas maka kebijakan pengembangan alat dan mesin pertanian masih sangat diperlukan. Upaya optimalisasi alsintan dapat dilakukan

dengan optimalisasi atau pemberdayaan unit-unit pelayanan jasa alsintan dan penambahan unit alsintan melalui bantuan berupa fasilitasi APBN, kemitraan, petani atau swasta.

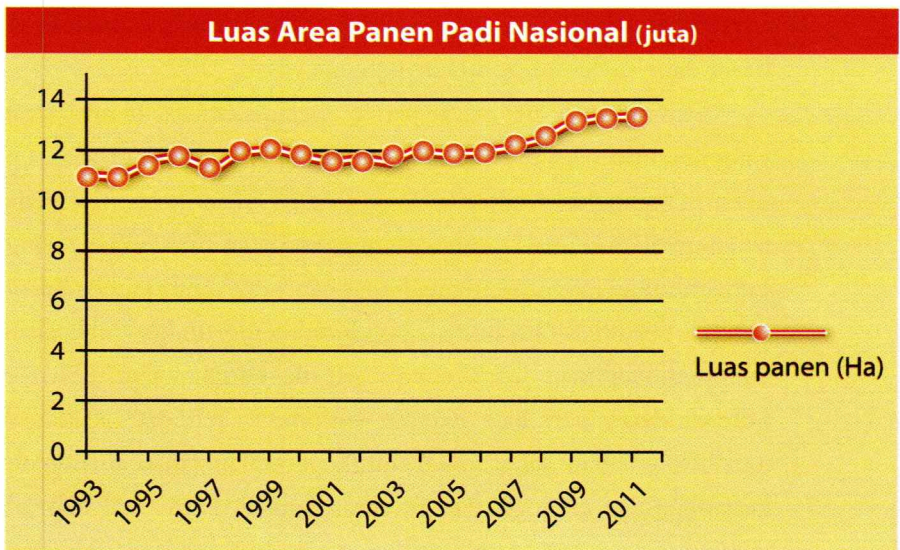
8) Pupuk

Berdasarkan data penggunaan pupuk bersubsidi belum sesuai dengan yang diharapkan disebabkan : 1) Terbatasnya modal petani; 2) Jumlah pupuk bersubsidi yang tersedia belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang diusulkan daerah; 3) Kemampuan distribusi pupuk tidak dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan; 4) Pabrik pupuk beroperasi dibawah kapasitas terpasang karena terbatasnya suplay bahan baku gas; 5) Permintaan pasar pupuk dan bahan baku pupuk di pasar Internasional meningkat; 6) Perbedaan harga pupuk bersubsidi dengan harga non subsidi di pasar internasional semakin besar dan; 7) Belum optimalnya pengawasan.

Peningkatan luas areal panen merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam mendukung upaya peningkatan produksi padi di samping tingkat produktivitas tanaman. Di Indonesia, ketersediaan lahan menjadi kendala utama dalam pencapaian swasembada pangan. Pertumbuhan luas areal menjadi masalah yang serius karena bersaing dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, industrialisasi dan pembangunan infrastruktur pabrik. Padahal jika dilihat dari potensi lahan dari luas daratan Indonesia, terdapat sekitar 94,1 juta hektar lahan yang sesuai untuk pertanian tanpa mengganggu keseimbangan ekologis daerah aliran sungai. Dari total luas lahan daratan yang sesuai untuk pertanian tersebut, terdapat sekitar 63,7 juta hektar yang sudah dijadikan lahan pertanian. Dengan demikian masih terbuka peluang untuk perluasan areal pertanian sekitar 30,4 juta hektar dengan 24 juta hektar diantaranya merupakan lahan subur untuk persawahan, perkebunan dan pengembangan komoditas lain. Sedangkan 6,4 juta hektar lainnya merupakan sawah pasang surut, lebak dan gambut yang masih memerlukan inovasi khusus. Disamping itu, hingga saat ini lahan pertanian terlantar jumlahnya cukup luas, yaitu sekitar 12,4 juta hektar (Deptan 2009). Peluang untuk perluasan

areal pertanian belum dimanfaatkan dengan optimal. Selain itu, menurut Menteri Pertanian Suswono, konversi lahan pertanian menjadi peruntukkan lain telah mencapai 100.000 hektar per tahun. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam menciptakan lahan baru hanya maksimal 30.000 hektar per tahun.¹ Dengan demikian setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian sebesar 70.000 hektar.

Berdasarkan data BPS, dapat dilihat bahwa pertumbuhan luas areal panen relatif stagnan. Pertumbuhan rata-rata per tahunnya adalah satu persen. Pertumbuhan luas areal panen pada lima tahun terakhir ini relatif tinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 4,5 persen atau 556,151 ribu hektar (Gambar 2.1).



Sumber: BPS (2011 diolah)²

Gambar 2.1. Perkembangan Luas Areal Panen Padi (juta ha) Tahun 1993-2011

1 Suara Karya. 2010. Swasembada Terkendala Ketersediaan Lahan. <http://bataviase.co.id/node/225086>. [19 Oktober 2011]

2 www.bps.go.id. [3 Februari 2012]

Cara lain untuk meningkatkan produksi adalah peningkatan tingkat produktivitas padi. Hal ini dikarenakan produktivitas padi akan sangat menentukan produksi total padi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas adalah input produksi, teknik budidaya, kondisi lahan dan iklim. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan beberapa alternative yaitu optimalisasi daerah yang memiliki produktivitas tinggi. Berdasarkan geografis, maka wilayah yang memiliki produktivitas tinggi adalah di Pulau Jawa. Dengan demikian mempertahankan Pulau Jawa sebagai sentra produksi padi dalam rangka peningkatan produksi dinilai cukup baik. Namun demikian perlu pengembangan areal di luar Jawa meskipun dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah hal ini bisa diimbangi dengan satuan luas lahan yang lebih tinggi.

Selanjutnya peningkatan produksi dan produktivitas bisa dilakukan dengan adanya peningkatan mutu benih. Pada tahun 2007 pemerintah juga sudah menggalakkan program benih bersertifikat untuk menunjang produksi, namun demikian perlu juga diperhatikan ketersediaan dan harga. Tidak dapat dipungkiri bahwa harga benih bersertifikat adalah lebih mahal daripada nonbersertifikat. Dalam hal ini subsidi benih masih sangat diperlukan oleh petani. Selain itu pengembangan benih bersertifikat juga akan menghasilkan produksi yang optimal jika dibarengi dengan pola teknologi budidaya yang baik (*good agriculture practice*) yang meliputi benih bermutu, pemupukan berimbang, penggunaan obat-obatan tepat sasaran. Selain pola budidaya yang benar diperlukan juga penanganan pasca panen yang benar. Hal ini terkait dengan proses penanganan mulai perontokkan, pengeringan, serta penyimpanan. *Good agriculture practice* (GAP) ini akan berjalan baik jika petani benar-benar memahami akan pentingnya pola budidaya yang benar. Dengan demikian perlu adanya pendidikan kepada petani yang sebenarnya bisa difasilitasi oleh petugas penyuluh lapangan (PPL). Dengan demikian penguatan kelembagaan penyuluhan juga perlu diperkuat dan harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan petani seperti Gapoktan.

Pada Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa selama periode tahun 1993-2011, penurunan produktivitas terjadi pada tahun 1998-1999. Penurunan produktivitas sekitar 2,37 kuintal per hektar. Penurunan produktivitas ini disebabkan oleh bencana El-Nino dan La-Nina yang merusak sebagian besar areal persawahan. Meskipun demikian, setelah tahun 2000 produktivitas stabil kembali. Bahkan sejak tahun 2006, produktivitas padi di Indonesia cenderung meningkat setiap

tahunnya. Peningkatan produksi di Indonesia juga pada umumnya dikarenakan peningkatan produktivitas.



Sumber: BPS (2011 diolah)³

Gambar 2.2. Produktivitas Padi Nasional Tahun 1993-2011

Sementara itu peluang untuk peningkatan produktivitas masih terbuka lebar di setiap wilayah di Indonesia. Berikut ini sebaran produktivitas disajikan pada Tabel 2.5. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa sebaran produktivitas lahan terbanyak adalah pada selang 5-6 ton/ha yaitu sebanyak 42.38 persen. Sementara itu lahan yang masih memiliki produktivitas dibawah 5 ton/ha sebanyak 45.16 persen dengan luas panen 2.009.911 ha. Dengan demikian upaya-upaya untuk meningkatkan produksi melalui peningkatan produktivitas masih sangat mungkin dilakukan.

³ www.bps.go.id. [3 Februari 2012]



Tabel 16.5. Sebaran Produktivitas Lahan di Indonesia

NO	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	%	Lokasi	
				Prov	Kab/Kota
1	< 4	2,009,911	15.17	22	158
2	4 - 5	3,974,366	29.99	26	146
3	5 - 6	5,616,819	42.38	20	122
4	> 6	1,652,362	12.47	8	31
	Jumlah	13,253,458	100.00	33	

Sumber : BPS, 2010 (diolah)

16.2.4 Lingkungan Strategis Komoditas Padi

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang berpengaruh dalam pengembangan investasi komoditas pangan pada umumnya dan komoditas padi khususnya berdasarkan hasil survey lapangan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* adalah:

1. Komitmen pemerintah yang kuat dalam rangka menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan
2. Jumlah SDM yang terlibat dalam usaha komoditas padi cukup besar
3. Kepemilikan lahan pertanian yang relatif sempit dan isu pengalihfungsian lahan pertanian ke nonpertanian yang menyebabkan semakin rentannya peningkatan produksi pangan pokok;
4. Tingkat produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian yang masih rendah;
5. Diseminasi dan transfer teknologi pertanian, termasuk perkembangan mekanisasi pertanian kepada petani masih lamban;
6. Rendahnya akses petani pada sumber daya produktif, antara lain, permodalan dan informasi;
7. Kelembagaan petani, termasuk penyuluhan, yang belum berkembang baik;

8. Penanganan organisme pengganggu tanaman yang masih harus terus ditingkatkan;

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal yang berpengaruh dalam pengembangan investasi komoditas tanaman pangan secara umum dan komoditas padi khususnya adalah:

1. Isu lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan
2. Isu otonomi daerah mendukung dan meningkatkan pembangunan pertanian secara menyeluruh
3. Permintaan dan kebutuhan beras sebagai bahan pangan utama di beberapa Negara termasuk Indonesia yang semakin meningkat.
4. Harga sarana produksi dan hasil pertanian masih fluktuatif
5. Infrastruktur pertanian yang belum baik dan masih banyak yang perlu diperbaiki;
6. Semakin tingginya frekuensi dan risiko bencana alam, yang antara lain disebabkan oleh perubahan iklim yang berdampak pada produksi, produktivitas, dan mutu;
7. Dimulainya liberalisasi perdagangan dan investasi negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik (AFTA 2003, AIA2003, APEC2020).

Secara spesifik hasil temuan lapangan sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan lingkungan internal dan eksternal selanjutnya dikelompokkan berdasarkan variabel pada analisis SWOT sebagai berikut:

Strengths:

1. Komitmen pemerintah yang kuat dalam rangka menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan
2. Jumlah SDM yang terlibat dalam usaha komoditas pangan cukup besar

Weakness:

1. Kepemilikan lahan pertanian yang relatif sempit dan inefisiensi pengalihfungsian lahan pertanian ke nonpertanian yang

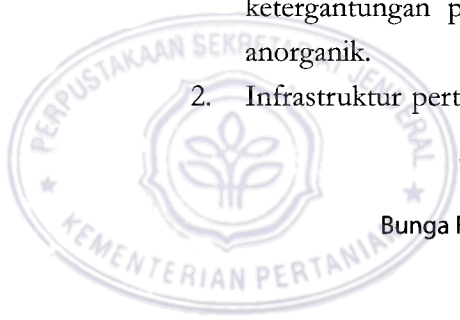
- menyebabkan semakin rentannya peningkatan produksi pangan pokok;
2. Tingkat produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian yang masih rendah;
 3. Diseminasi dan transfer teknologi pertanian, termasuk perkembangan mekanisasi pertanian kepada petani masih lambat;
 4. Rendahnya akses petani pada sumber daya produktif, antara lain, permodalan dan informasi. Rendahnya akses petani terhadap permodalan terjadi karena seringkali petani tidak punya agunan untuk dijaminkan di bank. Sedangkan rendahnya informasi, selain akibat terbatasnya infrastruktur, SDM petani yang masih rendah juga menjadi salah satu faktor penyebabnya.
 5. Kelembagaan petani, termasuk penyuluhan, yang belum berkembang baik;
 6. Penanganan organisme pengganggu tanaman yang masih harus terus ditingkatkan;

Opportunities

1. Isu lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan
2. Isu otonomi daerah mendukung dan meningkatkan pembangunan pertanian secara menyeluruh
3. Permintaan dan kebutuhan beras sebagai bahan pangan utama di beberapa Negara termasuk Indonesia yang semakin meningkat.

Threats:

1. Harga sarana produksi dan hasil pertanian masih fluktuatif. Hal ini terjadi karena sebagian besar bahan baru sarana produksi (obat dan pupuk) masih dimpor. Selain itu, adanya ketergantungan petani pada pupuk buatan dan pestisida anorganik.
2. Infrastruktur pertanian yang belum baik dan masih banyak



yang perlu diperbaiki;

3. Semakin tingginya frekuensi dan risiko bencana alam, ya antara lain disebabkan oleh perubahan iklim yang berdampak pada produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian;
4. Dimulainya liberalisasi perdagangan dan investasi negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik (AFTA 2003, AIA2003, APEC2020). Meskipun terdapat perbedaan tingkat maupun waktu penurunan tarif dan subsidi dalam bidang pertanian, tetapi kebijakan ini dinilai kurang efektif. Hal ini terjadi karena perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, teknologi, infrastruktur dasar serta kualitas sumber daya manusianya.

Berdasarkan kondisi di atas selanjutnya berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh beberapa strategi yang perlu ditempuh dalam upaya pengembangan investasi di bidang komoditas padi, yaitu:

Strategi SO mencakup:

1. Insentif bagi pengembangan investasi industri pendukung pertanian;
2. Penguatan lembaga penelitian & pengembangan
3. Peningkatan kualitas SDM petani

Strategi WO mencakup:

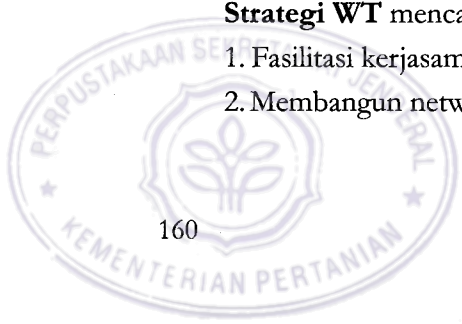
1. Penyediaan lahan-lahan baru;
2. Peningkatan produktivitas,
3. Pengamanan produksi;
4. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan

Strategi ST mencakup:

1. Kerjasama pengembangan infrastruktur dengan pihak swasta;
2. Stabilisasi harga komoditi

Strategi WT mencakup:

1. Fasilitasi kerjasama dalam pemanfaatan lahan tidur atau terlantar;
2. Membangun networking dan kerjasama dengan Negara lain;



Tabel 16.6. Strategi Pengembangan Investasi Padi

	Strengths	Weakness
Opportunities	Kebijakan SO 1. Insentif bagi pengembangan investasi industri pendukung pertanian; 2. Penguatan lembaga penelitian & pengembangan 3. Peningkatan kualitas SDM petani	Kebijakan WO 1. Penyediaan lahan-lahan baru; 2. Peningkatan produktivitas, 3. Pengamanan produksi; 4. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan
Threats	Kebijakan ST 1. Kerjasama pengembangan infrastruktur dengan pihak swasta; 2. Stabilisasi harga komoditi	Kebijakan WT 1. Fasilitasi kerjasama dalam pemanfaatan lahan tidur atau terlantar; 2. Membangun networking dan kerjasama dengan Negara lain;

2. Kelembagaan Penanaman Modal dan Pembiayaan

Pembiayaan, baik yang berasal dari masyarakat maupun lembaga keuangan sangat berperan dalam perjalanan pembangunan pertanian di Indonesia. Ketersediaan modal untuk pertanian khususnya kredit lunak saat ini menjadi sangat terbatas setelah berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan LoI antara Pemerintah Indonesia dengan IMF. Kebijakan tersebut mengisyaratkan bahwa pembiayaan pertanian tidak dapat sepenuhnya bergantung pada KLBI, akan tetapi lebih banyak mengandalkan ketersediaan modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan perbankan dan non perbankan di dalam negeri maupun luar negeri, dengan pola penyaluran yang mengarah pada sistem pembiayaan komersial. Sehubungan dengan itu, diperlukan upaya dalam memfasilitasi pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan yang ada maupun

pengembangan sumber pembiayaan baru bagi para pelaku agribisnis, mulai dari petani skala kecil, menengah, koperasi sampai skala besar.

Kelembagaan penanaman modal dan pembiayaan khususnya untuk padi masih sangat sedikit di Indonesia. Hal ini karena komoditas ini masuk termasuk salah satu komoditas yang tergolong beresiko (sebagaimana karakteristik komoditas pertanian pada umumnya). Selain itu masalah aksesibilitas petani dan pelaku agribisnis pada sumber-sumber permodalan adalah masalah klasik yang di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya terpecahkan. Masalah aksesibilitas ini seringkali terkendala oleh masalah ketiadaan jaminan / agunan, banyak dan luasnya nasabah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan perbankan dan tidak adanya bantuan dan bimbingan teknis yang diberikan. Oleh karena itu diperlukan upaya terobosan untuk mengatasi masalah tersebut. Terbukanya akses petani kepada sumber permodalan dan kemampuannya memanfaatkan permodalan tersebut dengan dukungan dari perbankan sendiri, pemerintah dan LSM adalah bagian strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat tani.

Penguatan modal yang terjadi di lingkungan petani sendiri adalah adanya kelembagaan PUAP yang sudah berjalan di beberapa daerah. Optimalisasi keberadaan GAPOKTAN-PUAP harus terus diupayakan karena masih relatif sulitnya kontribusi perbankan dalam pengembangan komoditas pertanian khususnya tanaman padi. Selain itu, perlu dikembangkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau investor guna pengembangan beras premium. Salah satu program yang sudah terlaksana dan harus terus dikembangkan adalah rice estate.

Program rice estate memerlukan pencetakan sawah baru, diperkirakan memerlukan biaya Rp. 10 juta untuk mencetak 1 Ha sawah atau Rp. 10 miliar untuk tiap 1000 Ha. Sementara itu pembangunan infrastruktur memerlukan biaya Rp. 23,56 miliar untuk tiap 1000 Ha lahan. Dengan demikian diperlukan dan investasi sebesar Rp. 33,56 miliar untuk membangun 1000 Ha rice estate.

Swasta bersama negara dalam strategi pengembangan sistem pertanian padi secara luas (*rice estate*) berperan sebagai pengembang infrastruktur pertanian seperti saluran air irigasi dan jalan usahatani yang selama ini terbengkalai. Selama ini pemerintah tidak bisa membangun dan mengembangkan infrastruktur pertanian karena terhambat masalah pendanaan. Swasta atau industri besar yang mempunyai sumber daya cukup diajak dan diberi peluang untuk masuk dalam

strategi dan kebijakan ini dengan jaminan kepastian usaha, insentif pajak, dan berbagai daya tarik lainnya.

3. Peluang Pengembangan

Peluang investasi padi masih sangat luas. Kondisi ini terjadi karena masih besarnya permintaan dalam negeri dan luar negeri terkait dengan krisis pangan yang melanda dunia dalam beberapa tahun terakhir. Masalah utama dalam sistem pangan dunia dan nasional adalah kurang atau terbatasnya pasokan. Permintaan yang begitu tinggi karena China dan India naik menjadi negara industri, yang konsumsinya sangat tinggi. Faktor lain, konversi lahan pertanian dunia untuk pangan ligheser menjadi lahan pertanian untuk energi biodiesel. Artinya, pasokan pangan dilihat dari luas panen mengalami stagnasi, bahkan menurun karena konversi itu. Peningkatan harga membuat akses masyarakat bawah atas pangan kian sempit.

Kenaikan harga pangan dunia seolah menjadi ancaman kelaparan atau kekurangan gizi golongan bawah. Keadaan ini cukup kritis dan kekhawatiran atas krisis pangan meluas hingga perlu mendapat perhatian serius pemerintah dan mengambil kebijakan. PBB menggambarkan krisis pangan ini sebagai *the silent sunami* karena secara diam-diam dapat membunuh jutaan penduduk miskin dunia. Penyebab kenaikan harga pangan ini relative permanen. Publikasi media internasional menyebutkan satu kesimpulan, tidak ada lagi harga pangan murah. Kenaikan harga komoditas pangan dipicu sejumlah faktor di China dan India, dua negara besar dengan permintaan pangan yang meningkat pesat. Lonjakan minyak dunia yang berimbas penggalakan program biofuel mengakibatkan permintaan komoditas pangan meningkat. Berdasarkan faktor tersebut, maka investasi untuk tanaman khususnya padi masih sangat potensial untuk beberapa tahun mendatang.

4. Potensi Permintaan Padi

Pertanian Tanaman Pangan mempunyai arti yang strategis dalam perekonomian nasional. Subsektor ini juga menyediakan bahan baku industri, serta membuka kesempatan usahadibidang industri dan jasad perdesaan. Subsektori tanaman pangan khususnya komoditas padi menyediakan kebutuhan yang esensial bagi kehidupan ialah bahan pangan, dan pada saat ini menopang kehidupan lebih dari 60 persen petani di Indonesia. Selain itu kegagalan dalam

program diversifikasi makanan pokok, menyebabkan konsumsi beras akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Seiring dengan digalakkannya diversifikasi makanan pokok, upaya peningkatan produktivitas padi harus terus dilakukan. Selain itu, perlunya orientasi pergeseran kebijakan pemerintah dari swasembada beras menjadi Swasembada Makanan Pokok karena di Indonesia kaya akan tanaman sumber karbohidrat non beras seperti ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu dan lainnya. Perubahan kebijakan ini juga untuk menghindari kebijakan yang tumpang tindih (antara kebijakan diversifikasi pangan dan kebijakan swasembada beras). Penghilangan jargon swasembada beras memang bukanlah sebuah kebijakan yang populer, tetapi sangat penting untuk dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas ini. Meskipun produksi Indonesia mencapai 66 juta ton, namun masih memerlukan tambahan dari impor pada tahun 2010 sampai sekitar 1,8 juta ton, mengingat kebutuhan dalam negeri terus meningkat, Impor sebanyak itu menempatkan Indonesia pada posisi nomor 3 dalam 10 besar pengimpor beras dunia.

Tabel 16.7. Sepuluh (10) besar negara pengimpor beras di dunia

Peringkat	Negara	Jumlah (Juta Ton)
1	Nigeria	1,9
2	Philippines	1,9
3	Indonesia	1,8
4	EU	1,4
5	Iran	1,2
6	Iraq	1,2
7	Saudi Arabia	1,1
8	Malaysia	1,0
9	Bangladesh	0,9
10	Pantai Gading	0,9

Besarnya impor tersebut juga menggambarkan besarnya ketergantungan rakyat Indonesia terhadap beras. Bahkan terdapat kecenderungan masyarakat yang dulunya tidak mengkonsumsi beras beralih ke komoditi beras sebagai bahan makanan pokok. Berbagai kelebihan beras dan kemudahan teknologi pengolahan

menyebabkan masyarakat enggan untuk berpindah ke bahan pangan lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka keberhasilan pembangunan tanaman pangan khususnya beras akan berdampak langsung terhadap ketahanan dan keamanan nasional. Sampai saat ini, sub sektor tanaman pangan masih memberikan sumbangan yang nyata terhadap pertumbuhan PDB nasional; penyerapan tenaga kerja di perdesaan; peningkatan pendapatan petani dan penyumbang devisa. Namun laju pertumbuhan pembangunan sub- sektor tanaman pangan relatif semakin tertinggal dibandingkan sektor – sektor lainnya. Hal ini sejalan dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu visi yang tepat untuk menempatkan sub-sektor tanaman pangan dalam perekonomian nasional. Di lain pihak, kebutuhan akan produk tanaman pangan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi oleh beras, semakin berkembangnya industriolahan berbasis pangan. Disamping itu sub-sektor tanaman pangan masih dihadapkan pada perubahan iklim global dan terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi. Pada 20 (duapuluh) tahun mendatang pertanian sub-sektor tanaman pangan seharusnya menjadi pertanian yang tangguh dan modern berbasis pada pengelolaan sumberdaya alam dan genetik secara berkelanjutan yang menjamin ketahanan, keamanan dan mutu pangan, penyediaan bahan baku industri dan kesejahteraan petani, serta berdaya saing global.

Selama tahun 2010 - 2014, dari 4 (empat) target utama Kementerian Pertanian, maka Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan adalah target utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sedangkan komoditas yang menjadi **unggulan nasional** terdiri dari 7 (tujuh) komoditas, yaitu : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Dari 7 (tujuh) komoditas tersebut, 3 (tiga) diantaranya yaitu padi, jagung dan kedelai merupakan **komoditas pangan utama**, yang dipacu peningkatan produksinya untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. Saat ini, komoditas padi dan jagung sudah swasembada, sehingga target ke depan adalah swasembada berkelanjutan dan diharapkan ke dua komoditas ini bisa menjadi komoditas ekspor.

Untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan komoditas tanaman pangan utama difokuskan pada propinsi-propinsi NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten, Bali, NTB, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Gorontalo

5. Kondisi Lingkungan Bisnis Padi

Indonesia sebagai negara dengan iklim tropis mempunyai keunggulan komparatif dibidang pertanian, karena dengan kondisi iklim tersebut memberikan kekayaan yang tak ternilai bagi sumberdaya alamnya. Kecukupan sinar matahari sebagai sumber energi dan membantu percepatan proses pelapukan dan fosilisasi, menjadikan negeri ini kaya akan tanah-tanah yang subur yang kaya akan mineral. Iklim yang cukup bersahabat, dan ketersediaan air yang relatif baik dibanding negara lain menjadikan Indonesia sangat unggul di sektor pertanian. Pengembangan sub-sektor tanaman pangan, menjadi suatu potensi yang besar. Terlebih lagi kebutuhan utama umat manusia adalah pangan.

Beberapa hal yang dapat dijadikan potensi bagi pengembangan sub-sektor tanaman pangan adalah:

1) Teknologi

Produktivitas tanaman pangan masih berpeluang besar untuk ditingkatkan karena masih terdapat kesenjangan antara produktivitas di pengembangan produksi berbagai komoditas pangan. Disamping itu, kondisi lahan yang secara umum subur dan iklim yang mendukung merupakan peluang yang sangat menguntungkan untuk pembangunan tanaman pangan.

2) Diversifikasi Penggunaan Produk Tanaman Pangan

Penggunaan produk tanaman pangan semakin beragam, tidak saja untuk konsumsi langsung, tetapi juga sebagai bahan baku industri (makanan dan non makanan), pakan ternak bahkan sebagai bahan baku penghasil energi. Diversifikasi penggunaan produk mendorong peningkatan permintaan terhadap produk tanaman pangan. Dengan berkembangnya industri pengolahan dapat meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional.

3) Pasar

Pasar domestik sangat berpotensi untuk pemasaran produk tanaman pangan, dan cenderung meningkat terus akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain jumlahnya meningkat, keragaman produknya semakin bervariasi sehingga akan membuka peluang yang lebih besar terhadap pemasaran produk tanaman pangan. Sejalan dengan eraglobalisasi dan pemberlakuan pasar bebas juga berpeluang untuk memasarkan produk tanaman pangan dipasar internasional.

b) Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja untuk sub-sektor tanaman pangan lebih dari cukup, apalagi terdapat limpahan tenaga kerja ke sub-sektor tanaman pangan akibat nelambatnya pertumbuhan sektor industri. Dengan demikian pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia secara optimal merupakan peluang untuk meningkatkan pembangunan tanaman pangan.

16.2.5 Fasilitas (Insentif) dan Harmonisasi Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman sebagai dasar perencanaan yang telah dirumuskan dan disetujui untuk dilaksanakan. Salah satu kebijakan yang telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia yaitu kebijakan perberasan. Kebijakan perberasan dapat dibuat oleh presiden, Kementerian Pertanian dan pemerintahan lainnya yang terkait dengan kebijakan beras. Berdasarkan Inpres No.2/2005, kebijakan perberasan di Indonesia terbagi menjadi Kebijakan Produksi, Kebijakan Harga, Kebijakan Distribusi, dan Kebijakan Impor. Tujuan utama dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan beras nasional sepanjang waktu dan stabilisasi harga beras yang menguntungkan pihak petani maupun masyarakat. Kebijakan perberasan sangatlah penting dalam pencapaian swasembada beras berkelanjutan. Kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat sektoral melainkan lintas sektoral dan lintas lembaga.

Melalui Departemen Pertanian, pemerintah terus menginisiasi berbagai program peningkatan produksi beras. Pemerintah terus mengupayakan Program Peningkatan Produksi Padi (P4) melalui berbagai kebijakan. Program pertama yang dikeluarkan adalah Program Padi Sentra pada tahun 1958. Program Padi Sentra kurang berhasil dikarenakan partisipasi petani rendah. Ketidakberhasilan program ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan serta perubahan kebijakan guna meningkatkan produksi padi. Pada tahun 1965 pemerintah mengeluarkan Program Bimbingan Masal (Bimas), dan Program Intensifikasi Khusus (Insus) melalui SK Menteri Pertanian No. 003 Tahun 1979 pada tahun 1979. Program intensifikasi melalui teknologi Panca Usahatani mengantarkan

Indonesia menuju keberhasilan mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Pada tahun 1987 Insus disempurnakan menjadi Supr Insus. Namun program ini kurang berhasil. Produksi cenderung stagnan dan impor beras terus meningkat.

Pada tahun 1995 pemerintah mengeluarkan Program Sister Usahatani Berbasis Padi Berorientasi Agribisnis (SUTPA), Intensifikasi yang Berwawasan Agribisnis (INBIS) pada tahun 1997, dan Gem Palagung pada tahun 1998 dengan tujuan untuk merespon berbagai perubahan lingkungan internasional dan domestik. Program ini kurang berhasil. Saat implementasi program terjadi penyimpangan iklim El Niño yang menyebabkan panen mundur dan produksi rendah.

Kebijakan produksi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) yang digulirkan sejak awal tahun 2007. Program ini didukung oleh berbagai kebijakan subsidi dan bantuan penyediaan pupuk, benih, dan penerapan berbagai inovasi teknologi melalui kegiatan penyuluhan dan koordinasi pihak terkait baik di pusat maupun daerah. Target dari program ini adalah pertumbuhan produksi padi sebesar lima persen setiap tahunnya. Target produksi ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan luas areal panen dan produktivitas.

Tabel 16.8. Perkembangan Kebijakan Peningkatan Produksi Padi dan Paket Teknologi Anjuran Tahun 1959-2007 (Suseno dan Maryono, 2012)

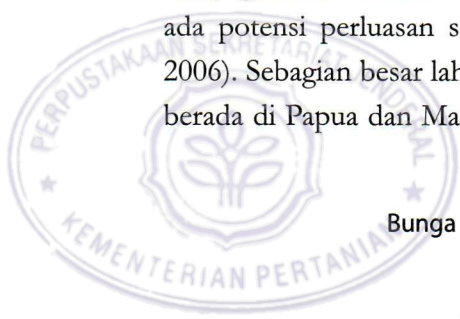
Program	Tahun	Hard Technology	Soft Technology	Keberhasilan
Padi Sentra	1959	Varietas Si Gadis, Jelita, Dara, Bengawan	Komando operasi gerakan makmur	Kurang berhasil karena rendahnya partisipasi petani
Bimas	1965	Sama dengan Padi Sentra	Perbaikan kelembagaan dan kredit	Varietas unggul meluas
Inmas	1968	Varietas PB5 dan PB8 (IRRI)	Perbaikan kelembagaan	Kurang berhasil karena masalah pendanaan
Bimas Gotong Royong	1969	Penggunaan varietas PB5 dan PB8	Penguatan kelembagaan modal swasta	Relatif berhasil
Insus	1979	Panca Usahatani	Pembentukan kelompok tani	Swasembada beras tahun 1984

Supra Insus	1987	Sapta Usahatani	Penguatan kelompok tani	Kurang berhasil, produksi stagnan
SUTPA	1995	Varietas Cibodas dan Membramo	Diversifikasi pertanian	Kurang berhasil
NBIS	1997	Varietas Cibodas dan Membramo	Pendampingan petani	Kurang berhasil karena El-Nino
Sema Palangung	1998	Sapta Usahatani	Kredit Usaha Tani (KUT)	Kurang berhasil, kredit macet
Corporate Farming	2000	Varietas Cibodas dan Membramo	Konsolidasi petani sehamparan	Kurang berhasil karena kesalahan persepsi petani
PKP	2000	Varietas Cibodas dan Membramo	Bantuan dana langsung	Kurang berhasil karena petani sulit dimonitor
PTT	2001	Perpaduan sumberdaya	Kelompok agribisnis dan penguatan modal	Kurang berhasil, tekanan kerjasama LN
P2BN	2007	Bantuan benih dan pupuk bersubsidi, perbaikan irigasi	Pengendalian OPT, manajemen, pasca panen, kelembagaan	Berhasil meningkatkan produksi 2,6 juta ton GKG



Gambar 16.2. Beras Organik

Fasilitas dan harmonisasi kebijakan ini mencakup berbagai kebijakan antara lain penambahan luas areal panen, pengembangan infrastruktur, adopsi teknologi dan peningkatan SDM petani. Secara keseluruhan seluas 24,5 juta hektar lahan yang secara agroklimat sesuai untuk dijadikan sawah. Dari jumlah tersebut yang telah didayagunakan adalah sekitar 8,5 juta hektar, yang berarti masih ada potensi perluasan sekitar 16 juta hektar (Mulyani dan Agus, 2006). Sebagian besar lahan sawah yang masih dapat didayagunakan berada di Papua dan Maluku, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.



Menyimak distribusi spatialnya, untuk merealisasikannya sangatla tidak mudah. Kendala utama tidak hanya terletak pada mahalny biaya investasi untuk pengembangan prasarana irigasi, tetapi jug kesiapan infrastruktur fisik pendukung (jalan raya, pasar, listrik, da sebagainya), teknologi usahatani, kelembagaan pendukung usaf pertanian, dan kesiapan sumberdaya manusia setempat.

Kebijakan yang harus dilakukan selain pengembangan lu panen adalah penegakan peraturan mengenai pemanfaatan laha untuk mencegah semakin meluasnya konversi lahan produktif denga disertai adanya insentif dan disinsentif bagi pelaksananya. Hal iu perlu segera diwujudkan karena konverasi lahan merupakan masala laten yang sulit untuk dipecahkan dan manfaatnya baru akan teras dalam jangka panjang. Reformasi agraria dapat dilakukan melah peraturan pemerintah mengenai larangan fragmentasi lahan produkt dan sistem kepemilikan lahan sehamparan untuk menghambat laj konversi. Kebijakan ini harus dilengkapi dengan insentif bagi pemil seperti pembebasan pajak tanah pertanian sebagaimana yang dilakuka oleh pemerintah Vietnam. Kebijakan reformasi agraria memang tida terkait langsung dengan invetastasi pada komoditas padi dalam jangl pendek, tetapi akan sangat terasa akibatnya dalam jangka panjang jil tidak segera diterapkan.

Pengembangan luas areal panen ini harus diikuti denga pengembangan infrastruktur penunjang, antara lain perluasa cakupan saluran irigasi, peningkatan kapasitas jalan usaha tar JITUT dan JIDES. Selain itu, perlu adanya penerapan teknolo budidaya, pasca panen, pengolahan. Pemerintah memiliki andil yar besar dalam pengembangan infrastruktur maupun adopsi teknolo karena dana yang dibutuhkan sangat besar. Sebagai pendukun penambahan jumlah PPL didaerah juga harus ditingkatkan untu mempercepat adopsi teknologi sekaligus untuk meningkatka kualitas sumberdaya manusia petani yang ada.

Rencana Aksi

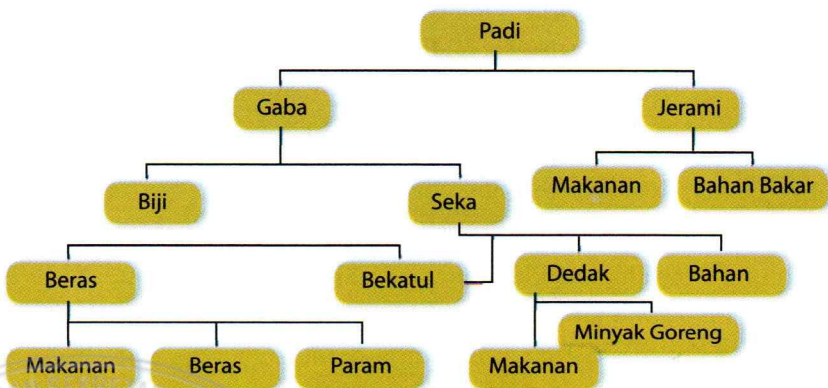
Beras merupakan komoditas strategis, primadona dan utar



dalam mendukung pembangunan sektor ekonomi dan ketahanan pangan nasional, serta menjadi basis utama dalam revitalisasi pertanian di masa mendatang. Hingga saat ini dan puluhan tahun yang akan datang, beras masih tetap menjadi sumber utama gizi dan Energi lebih dari 90% penduduk Indonesia. Selain untuk konsumsi langsung, berbagai alternatif potensi untuk meningkatkan nilai tambah beras dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi pasca panen termasuk produk sampingannya.

Peranan sub-sektor tanaman pangan yang sangat penting adalah mencukupi kebutuhan pangan nasional, serta memelihara dan menjamin ketahanan pangan nasional. Produksi komoditas utama tanaman pangan selama periode tahun 2005 - 2010 pertumbuhannya secara nasional telah menunjukkan prestasi sangat baik, antara lain peningkatan produksi padi dari 54,15 juta ton GKG tahun 2005 menjadi 66,41 juta ton GKG (Asem 2010), atau meningkat rata-rata pertahunnya 4,19 persen dengan target produksi padi tahun 2010 sebesar 66,68 juta ton GKG. Peningkatan produksi ini telah menempatkan Indonesia meraih swasembada beras sejak tahun 2007 dan terhindar dari krisis pangan seperti negara-negara lainnya

Demikian halnya dengan limbah dari tanaman ini yaitu jerami sangat potensi digunakan terutama sebagai pakan/silase terutama pad MK I dan MK II. Berbagai alternatif dan potensi dari produk turunan dari padi disajikan pada Gambar 2.3.



Gambar 16.3. Pohon Produk Turunan dan Sampingan Padi

Prospek pengembangan beras dalam negeri cukup cera terutama untuk mengisi pasar domestik, mengingat produk padi/beras dalam negeri sampai saat ini belum mampu memenuhi kebutuhannya secara baik, sehingga kekurangannya sekitar 5% harus diimpor. Peluang pasar ini akan terus meningkat seiring meningkatnya permintaan beras dalam negeri baik untuk konsumsi langsung maupun untuk memenuhi industri olahan. Karena Indonesia juga memiliki keunggulan komparatif untuk memproduksi padi/beras, maka selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pengembangan beras/padi juga berpeluang untuk mengisi pasar ekspor, apalagi kondisi pasar beras dunia selama ini bersifat tipis hanya 5-6% dari produksi beras dunia.

Untuk memanfaatkan peluang yang ada, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan padi/beras ke depan adalah bagaimana padi/beras produksi dalam negeri bisa bersaing dengan pasar ekspor. Negara utama yang menjadi pesaing Indonesia dalam memproduksi padi/beras adalah Thailand dan Vietnam. Beberapa usaha seperti traktor, *thresher*, dan penggilingan padi (RMU) yang terkait langsung mendukung pengembangan padi/beras, juga memberikan keuntungan yang cukup menarik bagi para pelakunya. Pengembangan teknologi benih dan input lain didalam negeri melalui kemitraan dengan swasta perlu dikembangkan sehingga harga benih lebih kompetitif.

Selama ini, pengembangan benih hanya dilakukan oleh pemerintah saja sehingga jika terdapat keterbatasan pada pendanaan maka riset yang dilakukan menjadi terhenti. Pembangunan dan perawatan sarana irigasi harus terus dilakukan.

Kerusakan sawah irigasi mencapai 45% di seluruh Indonesia. Kerusakan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat mencapai 40% (Imam Agus Nugroho, Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Kementerian PU, 2011). Semua rencana aksi ini pada gilirannya harus dibarengi dengan komitmen dari pemerintah karena tanpa adanya komitmen dari pemerintah, maka semuanya akan sulit terwujud.

16.2.6 Sasaran Pengembangan

Peta jalan (*road map*) program pengembangan industri beras di Indonesia baik dalam program jangka pendek (2005-2010), jangka menengah (2011 -2015) maupun jangka panjang (2016-2025) disajikan pada Gambar 2.4 dan 2.5.



Gambar 16.4. Peta Jalan Program Pengembangan Industri Beras di Indonesia

Tampak bahwa baik dalam program jangka pendek, menengah dan panjang, pengembangan industri beras masih tetap dikonsentrasikan pada peningkatan produksi beras untuk kebutuhan konsumsi langsung, baik melalui program intensifikasi maupun ekstensifikasi. Namun demikian mulai pada program jangka menengah dan panjang selain tetap dikonsentrasikan pada peningkatan produksi beras nasional juga diikuti dengan program perbaikan kualitas beras agar mampu bersaing dengan beras dunia.

Rencana Jangka Menengah (2012-2014)

Untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan pada tahun 2014 produksi padi yang ditargetkan sebesar 81,73 juta ton GKG, maka padi difokuskan pada propinsi-propinsi NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten, Bali, NTB, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Gorontalo.

A. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan :

1. Pengelolaan produksi tanaman pangan melalui SLPTT

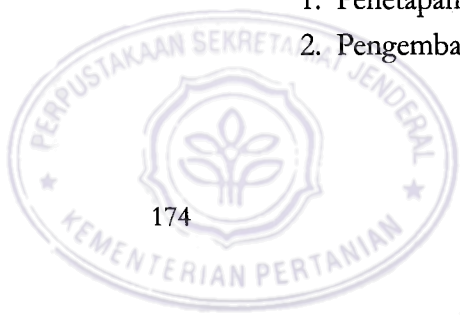
2. Pengelolaan system penyediaan benih tanaman pangan: melal perbanyak benih komoditas utama tanaman; penilaian varieta pengawasan dan sertifikasi; bantuan langsung benih ungg (BLBU) komoditas utama tanaman pangan; dan pengembang penangkar benih.
3. Perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT, Damp Perubahan Iklim (DPI), dan bencana alam (banjir dan kekeringa operasional Brigade Proteksi, SLPHT, SLI, dan pemberiz bantuan pengendalian OPT dan DPI.
4. Peningkatan pelayanan penanganan pascapanen tanam pangan dengan memberikan bantuan sarana pascapane dan pengembangan pascapanen tanaman pangan untu meningkatkan mutu hasil, mengurangi kehilangan hasil tanam pangan.
5. Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerap sistem pengujian mutu benih tanaman pangan.
6. Pengembangan peramalan serangan organisme penggangg tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI).

B. Investasi Pemerintah dan Swasta :

1. Pelayanan pembiayaan usahatani tanaman pangan.
2. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan petani, disertai dukungan pengembangan usaha antara lain melalui Lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3)
3. Optimalisasi pelayanan perizinan dan investasi di bidang pertanian tanaman pangan
4. Mendorong keterlibatan sektor untuk mendukung upaya peningkatan produksi pangan utama
5. Peningkatan kapasitas jalan usaha tani, JITUT dan JIDES

C. Harga Produk/Output :

1. Penetapan HPP untuk produk pertanian
2. Pengembangan kemitraan antara swasta dan petani



D. Tambah Lahan Pertanian :

1. Perluasan areal pertanian serta optimalisasi pemanfaatan lahan dan air.
2. Penyelesaian PP dari UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan.

Rencana Jangka panjang 2015 – 2025

1. Posisi swasembada dapat berkelanjutan, maka target peningkatan produksinya harus dipertahankan minimal sama dengan pertumbuhan permintaan dalam negeri. Dengan kondisi pertumbuhan jumlah penduduk secara nasional rata-rata sebesar 1,50 persen per tahun, permintaan bahan baku industri dalam negeri, kebutuhan stok nasional dalam rangka stabilitas harga, pemenuhan peluang ekspor, serta pertumbuhan industri hilir dalam negeri yang semakin pesat maka target.

2. Pengembangan padi hibrida di Indonesia dengan merakit sendiri varietas padi hibrida dengan memanfaatkan plasma nutfah nasional. Dalam jangka pendek dan menengah dapat ditempuh beberapa pendekatan, yaitu: (1) merakit VUH dari galur-galur tetua introduksi, (2) merakit VUH dengan mengombinasikan galur-galur introduksi dengan galur nasional, (3) menguji varietas hibrida introduksi untuk mengetahui daya adaptasi dan keragaannya diberbagai lokasi sebelum diusulkan untuk dilepas. Pendekatan yang terakhir memungkinkan untuk mengimpor benih F1 langsung dari negara asal, namun cara ini memiliki kelemahan dan risiko, baik dalam aspek kekarantinaan maupun aspek sosial, ekonomi, dan ketergantungan.

Secara lebih jelasnya, kerangka roadmap pengembangan investasi padi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 16.5.

Sektor Inti	Sektor Penunjang	Sektor Terkait
Budidaya Padi	Industri Alsintan Industri Pupuk Sistem Logistik : Distribusi dan Transportasi	Industri Pakan Ternak Industri Makanan Ringan Industri Tepung/Pati Jagung



Rencana Jangka Menengah (2012-2014)

Untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan pada tahun 2014 produksi padi yang ditargetkan sebesar 81,73 juta ton GKG

1. Peningkatan Produktivitas;
2. Perluasan Areal Tanam;
3. Pemantapan Teknologi Pasca Panen;

Rencana Jangka panjang 2015 – 2025

1. Mempertahankan posisi swasembada dapat berkelanjutan, minimal sama dengan pertumbuhan permintaan dalam negeri. Dengan kondisi pertambahan jumlah penduduk secara nasional rata-rata sebesar 1,50 persen per tahun, permintaan bahan baku industri dalam negeri, kebutuhan stok nasional dalam rangka stabilitas harga, pemenuhan peluang ekspor, serta pertumbuhan industri hilir dalam negeri yang semakin pesat maka target.
2. Pengembangan padi hibrida di Indonesia dengan merakit sendiri varietas padi hibrida dengan memanfaatkan plasma nutfah nasional.

STRATEGI :

(1) Peningkatan produktivitas, (2) Perluasan areal tanam; (3) Pengamanan produksi; (4) Penguatan kelembagaan dan pembiayaan

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2012 – 2014)

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan :
 - a. Pengelolaan produksi tanaman pangan melalui SLPTT
 - b. Pengelolaan system penyediaan benih tanaman pangan: melalui perbanyak benih komoditas utama tanaman; penilaian varietas, pengawasan dan sertifikasi; bantuan langsung benih unggul (BLBU) komoditas utama tanaman pangan; dan pengembangan penangkar benih.
 - c. Perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT, Dampak Perubahan Iklim (DPI), dan bencana alam (banjir dan kekeringan); operasional Brigade Proteksi, SLPHT, SLI, dan pemberian bantuan pengendalian OPT dan DPI.
 - d. Peningkatan pelayanan penanganan pascapanen tanaman pangan dengan memberikan bantuan sarana pascapanen; dan pengembangan pascapanen tanaman pangan untuk meningkatkan mutu hasil, mengurangi kehilangan hasil tanaman pangan.
 - e. Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem pengujian mutu benih tanaman pangan.
 - f. Pengembangan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI).
2. Investasi Pemerintah dan Swasta :
 - a. Pelayanan pembiayaan usahatani tanaman pangan.
 - b. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan petani, disertai dukungan pengembangan usaha antara lain melalui Lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3)
 - c. Optimalisasi pelayanan perizinan dan investasi di bidang pertanian tanaman pangan
 - d. Mendorong keterlibatan sektor untuk mendukung upaya peningkatan produksi pangan utama
 - e. Peningkatan kapasitas jalan usaha tani, JITUT dan JIDES
3. Harga Produk/Output :
 - a. Penetapan HPP untuk produk pertanian



- b. Pengembangan kemitraan antara swasta dan petani
- 4. Tambahan Lahan Pertanian :
 - a. Perluasan areal pertanian serta optimalisasi pemanfaatan lahan dan air.
 - b. Penyelesaian PP dari UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan.

Gambar 16.5. Kerangka Road Map Pengembangan Investasi Padi

3. Profil Pemetaan Investasi Jagung

16.3.1. Gambaran Umum Investasi Jagung dan Isu Regional Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas

Selama periode 2006-2010, luas areal pertanaman jagung di Indonesia rata-rata 3,37 juta hektar dengan peningkatan sebesar 0,49% per tahun (Tabel 3.1). Dibandingkan dengan tanaman pesaingnya, luas pertanaman jagung pada periode yang sama hanya sekitar 0,31 kali dari luas pertanaman padi atau 2,49 kali luas pertanaman kedelai.

Di Indonesia, jagung dibudidayakan pada lingkungan yang beragam. Hasil studi 18 tahun yang lalu menunjukkan bahwa sekitar 79% areal pertanaman jagung terdapat di lahan kering, 11% terdapat di lahan sawah irigasi, dan 10% di sawah tadah hujan. Dewasa ini data tersebut telah mengalami pergeseran. Diperkirakan areal pertanaman jagung pada lahan sawah irigasi dan sawah tadah hujan meningkat berturut-turut menjadi 10-15% dan 20-30%, terutama di daerah produksi jagung komersial.

Tabel 16.9. Perkembangan areal, produktivitas dan produksi jagung di Indonesia, tahun 2006-2010.

Tahun	Luas Panen(Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
2006	3 345 805	34,70	11 609 463
2007	3 630 324	36,60	13 287 527
2008	4 001 724	40,78	16 317 252
2009	4 160 659	42,37	17 629 748
2010	4 143 246	44,32	18 641 430



Produktivitas jagung yang masih rendah (3,34 ton/ha) walaupun cenderung meningkat 3,34% per tahun, menggambarkan bahwa penggunaan benih jagung berkualitas di tingkat petani belum berkembang seperti diharapkan, disamping cara pemeliharaan yang juga belum intensif. Dalam periode 2006-2010 rata-rata produksi jagung 8,72 juta ton dan cenderung meningkat 3,71% per tahun. Tampak bahwa peningkatan produksi jagung lebih banyak ditentukan oleh adanya peningkatan produktivitas daripada peningkatan luas tanam. Fenomena ini menunjukkan bahwa perluasan penggunaan benih hibrida di tingkat petani diperkirakan mampu meningkatkan produksi jagung, mengingat hasilnya dapat mencapai 6 ton/ha.

Tabel 16.10. Luas Panen dan Produksi Tanaman Jagung Tahun 2009 menurut Sebelas Propinsi Utama

No	Provinsi	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Prosentase Luas Panen	Prosentase Produksi
	Indonesia	4.160.659	42,37	17.629.748	100%	100%
1	Jawa Timur	1.295.070	40,67	5.266.720	31%	29,87%
2	Jawa Tengah	661.706	46,21	3.057.845	16%	17,34%
3	Lampung	434.542	47,58	2.067.710	10%	11,73%
4	Sulawesi Selatan	299.669	46,58	1.395.742	7%	7,92%
5	Sumatera Utara	247.782	47,08	1.166.548	6%	6,62%
6	Jawa Barat	136.707	57,61	787.599	3%	4,47%
7	NTT	250.536	25,50	38.899	6%	3,62%
8	Gorontalo	124.798	45,60	569.110	3%	3,23%
9	Sulawesi Utara	126.349	35,69	450.989	3%	2,56%
10	Sumatera barat	70.882	57,11	404.795	2%	2,30%
11	DI Yogyakarta	74.563	42,24	314.937	2%	1,79%

Daerah penghasil utama jagung di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Areal panen dan total produksi jagung dari ketujuh propinsi tersebut berturut-turut adalah

89,47% dari luas panen dan produksi total jagung nasional. Sekitar 57% produksi biji jagung di Indonesia dihasilkan oleh pertanaman jagung pada musim hujan (MH), 24% pada musim kemarau (MK) I dan 19% pada MK II. Pada MH, jagung umumnya diusahakan pada lahan kering, sedangkan pada MK ditanam pada sawah tadah hujan dan irigasi.

16.3.2. Kebutuhan Penggunaan Jagung

Produksi jagung Indonesia dalam periode 1990-2003 belum mampu memenuhi kebutuhan. Status Indonesia dalam perdagangan jagung dunia adalah sebagai *net importir*. Impor jagung dalam kurun waktu 2006-2010 rata-rata 750 ribu ton per tahun atau meningkat 10,5% per tahun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Bahkan sejak tahun 2000, volume impor jagung sudah di atas 1 juta ton. Kalau dilihat dari pangsaanya terhadap kebutuhan dalam negeri memang masih kecil (8,21%) dengan laju peningkatan pangsa sekitar 7% per tahun. Namun tanpa upaya pemacuan produksi dalam negeri, volume dan pangsa impor jagung terus meningkat, mengingat laju peningkatan kebutuhan lebih cepat dari laju peningkatan produksi.

16.3.3 Potensi Peningkatan Produksi Jagung

Apabila laju kecepatan peningkatan produksi jagung dalam negeri dapat dipertahankan sebesar 4,24%, seperti rata-rata tahun 2000 – 2004, dan laju peningkatan kebutuhan seperti saat ini, maka pada tahun 2006 Indonesia telah berswasembada jagung, bahkan kelebihan produksi sebanyak 187.760 ton dapat diekspor. Hingga tahun 2010, berdasarkan ketersediaan teknologi produksi yang telah ada (varietas unggul dan budidaya), upaya mempertahankan laju peningkatan produksi sebesar 4,24% per tahun akan lebih mengandalkan peningkatan produktivitas (3,38% per tahun); sementara laju peningkatan areal panen diproyeksikan hanya 1% per tahun. Hal ini dapat ditempuh melalui perluasan penggunaan benih jagung hibrida dan komposit unggul yang berkualitas, disertai dengan penerapan teknologi budidaya maju.

1) Faktor Produksi

Untuk menjamin keberhasilan pengembangan jagung perlu adanya sistem pengadaan yang lebih baik untuk benih berkualitas dari varietas unggul, pupuk, herbisida/pestisida, dan alsintan. Hal ini diupayakan dengan cara (a) mendorong tumbuh kembangnya kemitraan antara petani dengan swasta/pengusaha dan pemerintah dalam menyediakan sarana produksi, (b) memperbaiki sistem produksi benih jagung nasional dalam penyediaan benih jagung yang berkualitas dengan harga murah, antara lain dengan menumbuhkembangkan penangkar benih jagung unggul kompos di pedesaan, dan (c) menumbuhkembangkan usaha jasa alsintan dalam penyiapan lahan, penanaman, dan pascapanen (traktor, alat tanam, pemipil, dan pengering).

2) Perluasan Areal Tanam

Perluasan areal tanam diarahkan ke luar Jawa pada lahan sawah yang tidak ditanami padi selama musim kemarau dan lahan kering. Dalam kurun waktu 2005–2015 terjadi tambahan areal panen seluas 456.810 ha, penambahan luas lebih difokuskan pada lahan sawah setelah padi (peningkatan Indeks Pertanaman). Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan investasi yang lebih murah (tidak membuka lahan), produk yang akan diperoleh lebih berkualitas, dan harga akan lebih baik karena pasokan jagung kurang pada musim kemarau.

Untuk penetapan daerah/lokasi diupayakan melalui analisis daya saing komoditas, kecukupan air irigasi (permukaan atau air tanah), dan ketersediaan tenaga kerja.

Selama kurun waktu 2015–2025, pengembangan areal tanam (minimal 974.490 ha) difokuskan kepada lahan kering di luar Jawa. Dalam kaitan ini diperlukan pewilayahan komoditas, sebab areal yang sama juga berpeluang dikembangkan untuk komoditas selain jagung (perkebunan, pangan, dan hortikultura). Pemanfaatan lahan sawah setelah padi (musim kemarau) perlu diarahkan pada lahan yang ketersediaan air irigasinya memadai, baik dari air permukaan



maupun air tanah. Untuk memanfaatkan air tanah perlu direncanakan pembuatan sumur dan penyediaan pompa. Bagi lahan kering, untuk penetapan areal perlu dilakukan pewilayahan komoditas agar tidak terjadi tumpang tindih rencana penggunaan lahan dengan komoditas lain. Agar proses produksi jagung pada lahan kering berkelanjutan, maka aspek konservasi lahan perlu mendapat perhatian. Untuk daerah-daerah yang baru dibuka perlu dukungan pembangunan infrastruktur (jalan, transportasi), kelembagaan sarana produksi, alsintan, serta permodalan.

3) Dukungan Inovasi Teknologi

Penelitian juga diperlukan untuk mendukung program pengembangan jagung, seperti (a) pembentukan varietas hibrida dan komposit yang lebih unggul (termasuk penggunaan bioteknologi), diantaranya varietas toleran kemasaman tanah dan kekeringan, (b) produksi benih sumber dan sistem perbenihannya, (c) teknologi budidaya yang makin efisien (pendekatan PTT), serta (d) Pascapanen untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk.

16.3.4 Lingkungan Strategis Komoditas Jagung

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang dapat menjadi kekuatan dalam pengembangan investasi komoditas pangan pada umumnya dan komoditas jagung khususnya berdasarkan hasil survey lapangan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* adalah:

1. Komitmen pemerintah yang kuat dalam rangka menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan
2. Jumlah SDM yang terlibat dalam usaha komoditas jagung cukup besar
3. Kepemilikan lahan pertanian yang relatif sempit dan isu pengalihfungsian lahan pertanian ke nonpertanian yang menyebabkan semakin rentannya peningkatan produksi;
4. Tingkat produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian yang masih rendah;

5. Diseminasi dan transfer teknologi pertanian, termasuk perkembangan mekanisasi pertanian kepada petani masih lambat;
6. Rendahnya akses petani pada sumber daya produktif, antara lain permodalan dan informasi;
7. Kelembagaan petani, termasuk penyuluhan, yang belum berkembang baik;
8. Penanganan organisme pengganggu tanaman yang masih harus terus ditingkatkan;

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal yang berpengaruh dalam pengembangan investasi komoditas tanaman pangan secara umum dan komoditas jagung khususnya adalah:

1. Isu lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan
2. Isu otonomi daerah mendukung dan meningkatkan pembangunan pertanian secara menyeluruh
3. Permintaan dan kebutuhan jagung sebagai bahan pangan maupun industri di beberapa negara termasuk Indonesia yang semakin meningkat.
4. Harga sarana produksi dan hasil pertanian masih fluktuatif;
5. Infrastruktur pertanian yang belum baik dan masih banyak yang perlu diperbaiki;
6. Semakin tingginya frekuensi dan risiko bencana alam, yang antara lain disebabkan oleh perubahan iklim yang berdampak pada produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian;
7. Dimulainya liberalisasi perdagangan dan investasi negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik (AFTA 2002, AIA2000, APEC2020).

Secara spesifik hasil temuan lapangan sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan lingkungan internal dan eksternal selanjutnya dikelompokkan berdasarkan variabel pada analisis SWOT sebagai berikut:

Strengths:

1. Komitmen pemerintah yang kuat dalam rangka menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan
2. Jumlah SDM yang terlibat dalam usaha komoditas jagung cukup besar

Weakness:

1. Kepemilikan lahan pertanian yang relatif sempit dan isu pengalihfungsian lahan pertanian ke nonpertanian yang menyebabkan semakin rentannya peningkatan produksi pangan pokok;
2. Tingkat produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian yang masih rendah;
3. Diseminasi dan transfer teknologi pertanian, termasuk perkembangan mekanisasi pertanian kepada petani masih lamban;
4. Rendahnya akses petani pada sumber daya produktif, antara lain, permodalan dan informasi;
5. Kelembagaan petani, termasuk penyuluhan, yang belum berkembang baik;
6. Penanganan organisme pengganggu tanaman yang masih harus terus ditingkatkan;

Opportunities

1. Isu lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan
2. Isu otonomi daerah mendukung dan meningkatkan pembangunan pertanian secara menyeluruh
3. Permintaan dan kebutuhan jagung sebagai bahan pangan utama di beberapa Negara termasuk Indonesia yang semakin meningkat.

Threats:

- 1) Harga sarana produksi dan hasil pertanian masih fluktuatif;
- 2) Infrastruktur pertanian yang belum baik dan masih banyak yang perlu diperbaiki;
- 3) Semakin tingginya frekuensi dan risiko bencana alam, yang antara lain disebabkan oleh perubahan iklim yang berdampak pada

produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian;

4) Dimulainya liberalisasi perdagangan dan investasi negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik (AFTA 2002, AIA2000, APEC2020).

Berdasarkan kondisi di atas selanjutnya berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh beberapa strategi yang perlu ditempuh dalam upaya pengembangan investasi di bidang komoditas pangan yaitu:

Strategi SO mencakup:

1. Insentif bagi pengembangan investasi industri pendukung pertanian;
2. Peningkatan kualitas SDM petani

Strategi WO mencakup:

1. Penyediaan lahan-lahan baru;
2. Peningkatan produktivitas,
3. Pengamanan produksi;
4. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan

Strategi ST mencakup:

1. Pengembangan infrastruktur;
2. Stabilisasi harga komoditi
3. Mengembangkan Industri pengolahan

Strategi WT mencakup:

1. Membangun networking dan kerjasama dengan Negara lain;

Pada Tabel 16.11 dapat dilihat strategi pengembangan untuk investasi jagung.

Tabel 16.11. Strategi Pengembangan Investasi Jagung

	Strengths	Weakness
Opportunities	Kebijakan SO 1. Insentif bagi pengembangan investasi industri pendukung pertanian; 2. Peningkatan kualitas SDM petani	Kebijakan WO 1. Penyediaan lahan-lahan baru; 2. Peningkatan produktivitas, 3. Pengamanan produksi; 4. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan



Threats	Kebijakan ST	Kebijakan WT
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur; 2. Stabilisasi harga komoditi 3. Mengembangkan industri pengolahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun networking dan kerjasama dengan Negara lain;

16.4 Kelembagaan Penanaman Modal dan Pembiayaan

Pembiayaan dan kelembagaan penanaman modal khususnya untuk tanaman jagung masih sangat terbatas. Setelah berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan LoI antara Pemerintah Indonesia dengan IMF, membuat ketersediaan modal untuk pertanian berupa kredit lunak menjadi sangat terbatas. Dengan adanya kebijaksanaan tersebut, pembiayaan pertanian tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada KLBI, sehingga lebih menyulitkan petani mendapatkan akses permodalan dari perbankan karena pola penyaluran modal lebih mengarah pada pola komersial.

Usaha penanaman jagung seperti halnya komoditas pertanian pada umumnya adalah usaha yang memiliki resiko usaha yang sulit diperkirakan (*unpredictable*). Meskipun dengan pemanfaatan teknologi dan budidaya yang lebih baik resiko usaha bisa diminimalkan, namun tingkat resiko sulit dipastikan karena sangat tergantung pada berbagai hal seperti iklim, hama/penyakit termasuk resiko bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan pembiayaan dan kelembagaan modal usaha yang dapat mengakomodir karakteristik usaha di bidang pertanian.

Selain itu masalah aksesibilitas petani dan pelaku agribisnis pada sumber-sumber permodalan adalah masalah klasik yang di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya terpecahkan. Masalah aksesibilitas ini seringkali terkendala oleh masalah ketiadaan jaminan/agunan, banyak dan luasnya nasabah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan perbankan dan tidak adanya bantuan dan bimbingan teknis yang diberikan. Oleh karena itu diperlukan upaya terobosan untuk mengatasi masalah tersebut. Terbukanya akses petani kepada sumber permodalan dan kemampuannya memanfaatkan permodalan tersebut dengan dukungan dari perbankan sendiri, pemerintah dan LSM adalah bagian strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat tani.

Sehubungan dengan itu, diperlukan upaya dalam memfasilitasi pemanfaatan

sumber-sumber pembiayaan yang ada maupun pengembangan sumber pembiayaar baru bagi para pelaku agribisnis, mulai dari petani skala kecil, menengah, koperas sampai skala besar. Pembiayaan, baik yang berasal dari masyarakat maupun lembaga keuangan sangat berperan dalam perjalanan pembangunan pertanian d Indonesia.

Penguatan modal yang terjadi di lingkungan petani sendiri adalah dengan adanya kelembagaan PUAP yang sudah berjalan di beberapa daerah. Optimalisasi keberadaan GAPOKTAN-PUAP harus terus diupayakan karena masih relatif sulitnya kontribusi perbankan dalam pengembangan komodita: pertanian khususnya tanaman jagung. Selain itu, perlu dikembangkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau investor guna peningkatan produktivita: jagung dan pengembangan industri pengolahan atau agroindustri jagung untuk mengurangi ketergantungan pada impor jagung.

Swasta bersama negara dalam strategi pengembangan sistem pertanian berperan sebagai pengembang infrastruktur pertanian seperti saluran air irigas dan jalan usahatani yang selama ini terbengkalai. Selama ini pemerintah tidal bisa membangun dan mengembangkan infrastruktur pertanian karena terhamba masalah pendanaan. Swasta atau industri besar yang mempunyai sumber daya cukup diajak dan diberi peluang untuk masuk dalam strategi dan kebijakan in dengan jaminan kepastian usaha, insentif pajak, dan berbagai daya tarik lainnya.

Jika pengembangan sistem agroindustri jagung atau industri yang berbasis gabungan kelompok tani yang identik dengan perhimpunan petani jagung dengat total luas lahan yang lebih besar, yang terintegrasi dengan industri pengolahai jagung maka peningkatan produktivitas bisa lebih tercapai, mengurang ketergantungan pada impor jagung bahkan lebih jauh surplus produksinya dapa diekspor.

16.5 Peluang Pengembangan

16.5.1 Potensi Permintaan Jagung

Selama tahun 1990-2004, produksi jagung dunia sekitar 57. juta ton dan meningkat 2,23% per tahun. Di pasar dunia, negar produsen utama jagung adalah Amerika Serikat. Produksi jagung AS selama tahun 1990-2004 mencapai 231,3 juta ton/tahun atau 40,23% dari total produksi dunia. Produsen utama berikutnya

adalah Cina, dengan pangsa pasar 19,6%. Selain sebagai produsen utama, AS juga merupakan eksportir utama komoditas jagung, dengan pangsa ekspor 61,7% dan meningkat 0,15% per tahun. Ekspor jagung AS rata-rata 21,0% dari total produksi, sehingga penggunaan jagung untuk kebutuhan domestiknya mencapai 79,0%. Argentina merupakan eksportir utama jagung setelah AS dengan pangsa 10,31% terhadap total ekspor dunia. Selama tahun 1990-2003, ekspor jagung dunia rata-rata 75,5 juta ton atau 13,5% dari total produksi dunia. Volume ekspor dunia meningkat 1,79% per tahun, akan tetapi pangasanya terhadap total produksi dunia menurun 0,02% per tahun.

Dari sisi impor, Jepang merupakan negara importir utama untuk komoditas jagung. Selama tahun 1990-2003, Jepang mengimpor jagung 16,4 juta ton per tahun atau 21,73% dari total impor dunia. Volume impor jagung Jepang relatif stabil dengan sedikit peningkatan (0,09% per tahun). Korea Selatan juga termasuk negara importir utama, dengan pangsa 10,1% per tahun. Sementara itu, walaupun dengan pangsa impor sangat kecil (0,99% dari total impor dunia), peningkatan volume impor jagung Indonesia cukup tajam (10,85%) dan jauh di atas rata-rata peningkatan impor dunia (1,97% per tahun).

Permintaan jagung di pasar domestik dan pasar dunia terus meningkat seiring dengan berkembangnya industri pakan dan pangan. Meningkatnya pendapatan per kapita menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap produk turunan jagung, seperti produk makanan yang menggunakan bahan baku jagung, daging ayam, telur dan sebagainya.

Selama periode 1990-2001, pangsa penggunaan jagung impor sebagai bahan baku industri pakan dalam negeri meningkat cukup tajam, yaitu 11,8% per tahun. Sebaliknya, pangsa penggunaan jagung produksi domestik turun 3,77% per tahun. Mulai tahun 1994, ketergantungan pabrik pakan dalam negeri terhadap jagung impor sangat tinggi, mencapai 40,3%. Pada tahun 2000 penggunaan jagung impor dan jagung domestik dalam industri pakan ternak

hampir berimbang, yaitu 47,0% dan 53,0%.

Kebutuhan jagung domestik pada tahun 2005 mencapai 11,1 juta ton, pada tahun 2010 diperkirakan meningkat menjadi 13,6 juta ton, dan pada tahun 2015 dan 2020 masing-masing 15,9 juta ton dan 18,9 juta ton. Tanpa upaya khusus untuk memacu produksi nasional, maka impor jagung diperkirakan pada tahun 2005 dan 2010 masing-masing sebesar 937 ribu ton dan 740 ribu ton, dan pada tahun 2015 dan 2020 berturut-turut mencapai 1,03 juta ton dan 1,61 juta ton. Di sisi lain, rata-rata volume jagung yang diperdagangkan di pasar dunia dalam periode 1990-2003 hanya 75,5 juta ton atau 13,5% dari total produksi dunia, dan menurun 0,02% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar jagung dunia relatif tipis (*thin market*).

Berpijak dari informasi di atas, maka prospek pasar jagung baik di pasar domestik maupun pasar dunia sangat cerah. Pasar jagung domestik masih terbuka lebar, mengingat sampai saat ini produksi jagung Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan permintaan dalam negeri. Meningkatnya permintaan dan tipisnya pasar jagung dunia menunjukkan bahwa pasar jagung dunia terbuka lebar bagi para eksportir baru. Oleh karena itu, upaya Indonesia untuk mengembangkan jagung dalam jangka menengah (2005-2009) dan jangka panjang (2010-2025) prospektif ditinjau dari aspek pasar.

16.5.2 Kondisi Lingkungan Bisnis Jagung

Pelaku industri pakan ternak masih akan memenuhi kebutuhan jagung untuk bahan baku pakan dari impor. Dimana dari total kebutuhan jagung untuk pakan sebesar 6 juta ton, impor diperkirakan mencapai 2 juta ton. Tahun 2010, impor jagung untuk pakan sebesar 1,5 juta ton dari total kebutuhan sekitar 5 juta ton. Pelaku industri pakan dalam negeri masih mengandalkan jagung impor karena lebih ada jaminan suplai dan transparansi harga dibandingkan membeli dari pedagang lokal. Meskipun jagung lokal memiliki mutu lebih baik dan lebih segar dari jagung impor. Namun pelaku butuh jaminan suplai sehingga memilih impor dari negara-negara seperti Thailand, Myanmar, India, Amerika Serikat, Brazil

dan Argentina.

Saat ini sentralisasi produksi jagung di pulau Jawa berakibat pada sulitnya distribusi jagung dan tingginya biaya pengiriman. Sebagai contoh, biaya pengiriman jagung dari Dompu ke Jakarta mencapai Rp 480 per kilogram atau sama dengan biaya pengiriman dari Chicago ke Jakarta.

Kementerian pertanian, mengemukakan data Angka Ramalan I Badan Pusat Statistik, produksi jagung tahun ini diperkirakan naik 4,1 juta ton dari tahun lalu 17,9 juta ton menjadi 22 juta ton. Sementara kebutuhan jagung tahun ini diprediksi 13,3 juta ton.

Rata-rata pertumbuhan produksi jagung dalam 5 tahun terakhir mencapai 6,52%. Pada tahun 2007, produksi jagung 13,28 juta ton, tapi tahun 2010 naik signifikan menjadi 18,3 juta ton. Target produksi tahun ini, jelas dia, dapat tercapai kalau luas lahan panen jagung mencapai 4,06 juta hektare.

Hal ini menunjukkan masih ada kendala lain terkait pencapaian produksi jagung nasional tahun ini, yakni tidak meratanya penanaman. Sekitar 79% jagung ditanam di lahan kering ketika musim hujan terjadi. Sebaliknya, lahan sawah yang menjadi tempat penanaman jagung tidak bisa ditanami karena curah hujan masih tinggi dan menyebabkan areal sawah masih tergenang. Dampaknya, puncak panen terjadi di musim hujan tetapi akan ada defisit di musim kemarau. Defisit produksi akan terjadi pada Juni-Juli dan Oktober-Desember, namun dapat ditutup dari surplus produksi pada bulan lainnya.

Produksi jagung nasional masih rentan akan terkena dampak perubahan iklim dan ketersediaan lahan di daerah sentra produksi jagung. Apalagi, perluasan lahan jagung terhambat otonomi daerah yang membuat pelaku usaha tidak mudah membuka lahan jagung baru.

Pemerintah mendorong pihak swasta untuk berinvestasi di sektor jagung. Tercatat ada beberapa pelaku swasta yang berminat, antara lain Timsco Group, PT Sampoerna Agro Tbk, dan PT Bangun Tjipta Sarana.

Kebutuhan Jagung bagi Pabrik Pakan

Industri pakan ternak nasional masih didominasi pemain asing seperti Charoen Pokphand, Japfa Comfeed, Sierad Produce, CJ Feec Gold Coin, dan Sentra Profeed. Dari 81 perusahaan pakan yang saat ini ada di Indonesia, PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) adalah perusahaan utama dalam industri ini dengan market share sebanyak 31,2% dari total industri pakan Indonesia dengan focus bisnis pada pakan ayam dan ikan. Hal ini dikarenakan CPI adalah perusahaan pakan asing yang paling awal memasuki industri pakan Indonesia dengan struktur permodalan yang kuat yang ditopang oleh grup besarnya di Thailand dengan office area di seluruh dunia. Tetapi market share ini semakin tahun semakin menurun direbut industri pakan lainnya seperti Cheil Jedang dan Sierad dengan ekspansi kapasitas produksi yang signifikan serta penambahan-penambahan pabrik untuk memperluas jangkauan pasar.

Tabel 16.12. Jumlah Pabrik Pakan Berdasarkan Sebaran Lokasinya di Indonesia, 2007.

No	Propinsi	Jumlah Pabrik Pakan	Produksi (juta ton)	Share	Kapasitas Produksi (juta ton)
1.	Sumatera Utara	8	0,93	12,19	1,33
2.	Lampung	4	0,25	3,30	0,66
3.	Banten	10	2,00	25,90	2,71
4.	DKI Jakarta	4	0,27	3,40	0,60
5.	Jawa Barat	4	0,94	12,20	1,11
6.	Sulawesi	2	0,13	1,60	0,14
7.	Selatan	15	2,71	35,20	3,64
8.	Jawa Timur & Jawa Tengah	3	0,48	6,20	1,12
Total		50	7,70	100	11,30

Sumber: Datacn (2008) dan Destiana, M (2010)

Jumlah kebutuhan jagung sebagai bahan baku pakan ternak pada 10 propinsi (yang merupakan lokasi pabrik-pabrik pakan) meningkat setiap tahunnya rata-rata 9%.

Tabel 16.13 . Konsumsi Jagung Bahan Baku Pakan Pada Pabrik Pakan Ternak, 2004-2008.

No	Propinsi	Tahun					Trend %/thn
		2004	2005	2006	2007	2008	
1.	Sumut	360726	353326	409731	475754	486306	8.96
2.	Sumbar	0	0	0	0	48960	-
3.	Lampung	165648	171100	128325	128134	237150	6.02
4.	DKI Jakarta	120194	125105	131840	135306	109892	-0.84
5.	Jabar	388611	392877	462398	478222	482903	6.21
6.	Jateng	178964	185345	232660	244516	248431	9.09
7.	Jatim	992459	1046126	1299030	1383666	137420	8.99
8.	Kalsel	0	0	0	0	18360	-
9.	Sulsel	30451	37773	51103	63791	113752	32.44
10.	Banten	810402	864057	957236	1017629	1042317	6.58
Indonesia		3047455	3175710	3672321	3927017	4159491	8,27

Jika dilakukan pemetaan sebaran sentra produksi dan konsumsi terdapat kesenjangan pada propinsi Banten, DKI Jakarta dan Sumbar yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi terhadap jagung tapi bukan merupakan sentra produksi jagung.

Tabel 16.14. Pemetaan Sentra Produksi dan Konsumsi Jagung Nasional, 2008.

Propinsi	Sentra Produksi (Ton)			Sentra Konsumsi (Ton)	
	Tahun		% 2008 Thd Indonesia	Propinsi	2008
	2008	2010			
Sumut	1,098,969	1,282,974	6.74	Sumut	486,306
Lampung	1,809,886	2,061,377	11.09	Sumbar	48,960
Jawa Barat	639,822	800,363	3.92	Lampung	237,150
Jawa Tengah	2,679,914	3,311,596	16.42	DKI Jakarta	109,892
Jawa Timur	5,053,107	5,229,478	30.97	Jabar	482,903
NTB	196,263	245,805	1.20	Jateng	248,431
NTT	673,112	702,387	4.13	Jatim	1,371,420
Sulsel	1,195,691	1,414,208	7.33	Kalsel	18,360
Gorontalo	753,598	665,113	4.62	Sulsel	113,752
Sub Total	14,100,362	15,713,301	86.41	Banten	1,042,317
Indonesia	16,317,252	18,115,165	100.00	Indonesia	4,159,491

Berikut ini tabel 16.15 dan tabel 16.16 yang menggambarkan proyeksi populasi ternak yang menjadi dasar dari proyeksi kebutuhan jagung.



Tabel 16.15. Proyeksi Ternak Ras Petelur di Indonesia, 2010-2020 (ekor)

Tahun	Ras Petelur	Ras Pedaging	Babi
2005	84,790,411	811,188,684	6,800,698
2006	100,201,556	797,527,446	6,218,202
2007	111,488,878	891,659,345	6,710,758
2008	107,955,170	902,052,418	6,837,528
2009	110,106,248	930,317,847	7,384,126
Trend (%/thn)	5.67	3.96	2.63
2010	116,349,272	967,158,434	7,578,329
2011	122,946,276	1,005,457,908	7,777,639
2012	129,917,330	1,045,274,041	7,982,193
2013	137,283,642	1,086,666,893	8,192,122
2014	145,067,625	1,129,698,902	8,407,575
2015	153,292,959	1,174,434,978	8,628,694
2016	161,984,670	1,220,942,603	8,855,629
2017	171,169,201	1,269,291,931	9,088,532
2018	180,874,495	1,319,555,931	9,327,560
2019	191,130,078	1,371,810,304	9,572,875
2020	201,967,154	1,426,133,992	9,824,642

Tabel 16.16. Proyeksi Kebutuhan Pakan Per Jenis Ternak, 2010-2020 (Ton) (Pendekatan Populasi dan Pabrik Pakan)

Tahun	Kebutuhan Pakan			Total Pend. Populasi	Total Pend. Pabrik
	Ras Petelur	Broiler	Babi		
2010	3,519,586	2,064,411	810,320	6,394,317	8,830,355
2011	3,812,063	2,205,823	852,456	6,870,342	9,560,625
2012	4,128,846	2,356,922	896,784	7,382,552	10,351,289
2013	4,471,953	2,518,371	943,417	7,933,741	11,207,341
2014	4,843,572	2,690,879	992,475	8,526,936	12,134,188
2015	5,246,073	2,875,205	1,044,083	9,165,361	13,137,685
2016	5,682,021	3,072,156	1,098,376	9,852,553	14,224,172
2017	6,154,197	3,282,599	1,155,491	10,592,287	15,400,511
2018	6,665,611	3,507,457	1,215,577	11,388,645	16,674,133
2019	7,219,523	3,747,718	1,278,787	12,246,028	18,053,084
2020	7,819,466	4,004,436	1,345,284	13,169,186	19,546,074

Tahun	Kebutuhan Jagung (Sesuai pend, Populasi)					Kebut. Jagung pend. Konsumsi Pabrik
	Ras Petelur	Broiler	Babi	Lainnya	Total	
2010	1,659,133	1,130,014	399,812	317,329	3,490,624	4,503,481
2011	1,797,007	1,207,420	420,602	340,748	3,748,232	4,875,919
2012	1,946,338	1,290,128	442,473	365,896	4,024,852	5,279,157
2013	2,108,078	1,378,502	465,482	392,899	4,321,886	5,715,744
2014	2,283,260	1,472,930	489,687	421,895	4,640,841	6,188,436
2015	2,472,999	1,573,825	515,151	453,030	4,983,335	6,700,219
2016	2,678,505	1,681,632	541,939	486,464	5,351,105	7,254,328
2017	2,901,089	1,796,824	570,119	522,365	5,746,017	7,854,260
2018	3,142,169	1,919,907	599,766	560,916	6,170,073	8,503,808
2019	3,403,283	2,051,420	630,953	602,311	6,625,424	9,207,073
2020	3,686,096	2,191,943	663,763	646,762	7,114,381	9,968,498

Tabel 16.17. Proyeksi Kebutuhan Jagung Per Jenis Ternak, 2010-2020 (Ton) (Pendekatan Populasi Ternak)

6.6 Fasilitas (Insentif) dan Harmonisasi Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman sebagai dasar perencanaan yang telah dirumuskan dan disetujui untuk dilaksanakan. Kebijakan meliputi tahapan spesifik dan menyeluruh dari usaha pemerintah untuk menghasilkan lingkungan esensial untuk fungsi yang tepat dan keberhasilan pengembangan usaha pertanian.

Dalam rangka pengembangan usaha penanaman jagung di Indonesia, kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas dan peningkatan mutu panen agar memenuhi kebutuhan industri pengolahan jagung, baik untuk industri pangan maupun pakan ternak. Kebijakan tersebut dapat dibuat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah serta berbagai instansi yang berkaitan dengan kebijakan usaha pengembangan jagung, baik kebijakan produksi, kebijakan harga, kebijakan distribusi dan perdagangan, serta kebijakan impor.

Tujuan utama dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan bahan baku jagung, baik untuk konsumsi pangan maupun untuk kebutuhan industri serta stabilisasi harga jagung yang menguntungkan pihak petani maupun masyarakat atau pelaku usaha pengolahan. Kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk menunjang kebijakan diversifikasi pangan dan kelangsungan usaha industri pengolahan jagung. Kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat sektoral melainkan lintas sektoral dan lintas lembaga.

Pemerintah terus berusaha menginisiasi berbagai program peningkatan produksi jagung melalui Departemen Pertanian dengan berbagai kebijakan. Kebijakan peningkatan produksi yang berlaku di Indonesia saat ini didukung oleh berbagai kebijakan subsidi dan bantuan penyediaan pupuk, benih, dan penerapan berbagai inovasi teknologi melalui kegiatan penyuluhan dan koordinasi pihak terkait baik di pusat maupun daerah. Target dari program ini adalah pertumbuhan produksi jagung yang dapat diwujudkan dengan meningkatkan luas areal panen dan produktivitas.

Fasilitas dan harmonisasi kebijakan ini mencakup berbagai kebijakan antara lain penambahan luas areal panen, pengembangan infrastruktur, adopsi teknologi dan peningkatan SDM petani.

Ke depan perluasan areal penanaman jagung diarahkan pada lahan kering di luar Jawa yang memiliki agroklimat yang sesuai untuk penanaman jagung. Untuk merealisasikannya tidaklah mudah. Kendala utama tidak hanya terletak pada mahal biaya investasi untuk pengembangan prasarana irigasi, tetapi juga kesiapan infrastruktur fisik pendukung (jalan raya, pasar, listrik, dan sebagainya), teknologi usahatani, kelembagaan pendukung usaha pertanian, dan kesiapan sumberdaya manusia setempat.

Kebijakan yang harus dilakukan selain pengembangan luas panen adalah penegakan peraturan mengenai pemanfaatan lahan untuk mencegah semakin meluasnya konversi lahan produktif dengan disertai adanya insentif dan disinsentif bagi pelaksananya. Hal ini perlu segera diwujudkan karena konversi lahan merupakan masalah laten yang sulit untuk dipecahkan dan manfaatnya baru akan terasa dalam jangka panjang. Reformasi agraria dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah mengenai larangan fragmentasi lahan produktif dan sistem kepemilikan lahan schamparan untuk menghambat laju konversi. Kebijakan ini harus dilengkapi dengan insentif bagi pemilik seperti pembebasan pajak tanah pertanian. Kebijakan reformasi agraria memang tidak terkait langsung dengan investasi pada komoditas jagung dalam jangka pendek tetapi akan sangat terasa akibatnya dalam jangka panjang jika tidak segera diterapkan.

Pengembangan luas areal panen ini harus diikuti dengan pengembangan infrastruktur penunjang, antara lain perluasan cakupan saluran irigasi, peningkatan kapasitas jalan usaha tani. Selain itu, perlu adanya penerapan teknologi budidaya

pasca panen, dan pengolahan. Pemerintah memiliki andil yang besar dalam pengembangan infrastruktur maupun adopsi teknologi karena dana yang dibutuhkan sangat besar. Sebagai pendukung, penambahan jumlah PPL di daerah-daerah harus ditingkatkan untuk mempercepat adopsi teknologi sekaligus untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani yang ada.

6.7 Rencana Aksi

Indonesia ditargetkan telah berswasembada jagung pada tahun 2014 dan bahkan telah mulai mengeksport kelebihan produksi. Oleh karena itu, untuk dapat tercapainya sasaran pengembangan jagung di Indonesia, dalam jangka 5-10 tahun ke depan, proses produksi dalam negeri harus memiliki ciri: a) bermuatan inovasi teknologi maju Sehingga proses produksi berlangsung efisien, b) menghasilkan produk yang berkualitas dan bernilai tambah, c) mempunyai daya saing di pasar global, d) meningkatnya peran *stakeholder* dan swasta, serta e) adanya dukungan pemerintah daerah dan pusat. Secara simultan program litbang jagung harus diikuti oleh diseminasi iptek jagung, peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pembentukan jaringan pasar, dan dukungan kebijakan pemerintah. Peta jalan (*road map*) untuk menuju sasaran pengembangan jagung perlu dibuat secara cermat agar tahapan pengembangan dan langkah-langkah operasional dapat lebih terarah.

Produksi : 29 juta ton Pasca panen/pengolahan :

- Susut dipanen diturunkan sebesar 10%
- Ketersediaan alat dan mesin pasca panen
- Kandungan aflatoksin dapat ditekan <20 ppb
- Industri pedesaan pengolahan pakan dan pangan (*grits* dan tepung jagung) berkembang

Perdagangan (Pemasaran) :

- Sentra produksi dengan industri pakan dan pangan terintegrasi (klaster)
- Pangan: 3,0 juta ton
- Pakan: 4.6 juta ton
- Impor: 0
- Ekspor hasil olahan jagung meningkat
- Bioenergi: meningkat

16.7.1 Sasaran Pengembangan

Rencana Jangka Menengah (2012-2014)

Roadmap pengembangan jagung untuk sasaran jangka menengah menggambarkan lima program utama yaitu:

1. Menguatkan basis kelompok tani dan GAPOKTAN sebagai kelompok pengolahan on farm maupun off farm;
2. Kemitraan dengan industri besar pada daerah sentra (pabrik pakan, pabrik makanan, pabrik farmasi);
3. Melakukan perluasan lahan budidaya ; dengan menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam rangka penyediaan lahan untuk ketahanan pangan yakni adanya MoU (SKB) tiga Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional;
4. Program diseminasi inovasi teknologi, 3) program aksi atau *scaling up*,
5. Program produksi massal (*mass production*), dan 5) program pembentukan jaringan pasar. Hirarki ke-4 dan ke-5 masing-masing adalah calon penerima manfaat dan dampak yang diharapkan.

Tabel 16.18. Target Pencapaian Jangka Menengah

No.	Jenis	Tahun		
		2012	2013	2014
1.	Produksi (juta ton)	23	25	29
2.	Industri Kecil Girts, tepung (unit)	10	15	20
3.	Import (juta ton)	2,5	1,5	0
4.	Eksport	0	0	1

Penguatan kelembagaan petani melalui kelompok tani dan GAPOKTA menjadi langkah yang sangat penting dalam rangka mobilisasi investasi persediaan dan merupakan pintu masuk bagi program-program dari pusat dan kemitraan dengan perusahaan swasta besar.

Perluasan lahan budidaya dilakukan di daerah luar Jawa yang memang sudah mencadangkan lahannya untuk budidaya jagung.

Program penelitian dan pengembangan jagung diawali dengan pengayaan materi genetik untuk pembentukan varietas unggul, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Secara simultan juga dilakukan perakitan varietas-varietas

unggul baru komposit maupun hibrida. Perakitan varietas unggul baru yang toleran terhadap cekaman lingkungan pada lahan marjinal, seperti toleran masaman tanah, toleran kekeringan, dan umur genjah harus diintensifkan agar unggul dapat dikembangkan pada lahan-lahan marjinal potensial. Penciptaan teknologi budidaya yang produktif dan efisien, terutama pada lahan-lahan marjinal perlu terus dikaji. Pemberian pupuk yang lebih efisien dapat diupayakan dengan penggunaan bagan warna daun untuk lebih menghemat tenaga dan biaya produksi. Teknologi penanganan panen dan pascapanen yang efektif dan efisien perlu terus dikaji untuk meningkatkan mutu hasil serta mampu bersaing dipasar global. Dalam aspek kelembagaan, perlu segera dilakukan revitalisasi kelompok ini, penyuluhan, permodalan, dan konsolidasi manajemen agribisnis.

Diseminasi iptek jagung ditujukan untuk mempercepat penerapan teknologi yang telah dihasilkan dari penelitian maupun teknologi introduksi. Program ini dapat dilakukan dengan penyuluhan langsung kepada petani, mengembangkan sistem perbenihan berbasis komunitas, mengadakan *dem-farm* usahatani jagung, *dem-farm* teknologi panen di tingkat primer maupun sekunder. Pemasarakatan teknik Jagung juga dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

Penerbitan dan penyebarluasan brosur dengan bahasa yang mudah dipahami diyakini dapat memberi pengertian dan pengetahuan kepada petani. Pembuatan format diseminasi dalam bentuk VCD diharapkan mampu menyebarluaskan teknik lebih cepat karena teknologi audiovisual sudah berkembang ke desa.

Peningkatan produksi jagung nasional dapat ditempuh melalui peningkatan produktivitas, perluasan penggunaan benih hibrida dan komposit unggul yang berkualitas, serta penerapan teknologi budidaya yang efisien. Pada daerah-daerah yang telah memiliki tingkat produktivitas tinggi ($>6,0$ t/ha), program yang dikembangkan adalah pemantapan produktivitas. Untuk daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah ($<5,0$ t/ha), diperlukan pergeseran penggunaan unggul ke jenis hibrida dan komposit dengan benih berkualitas.

Peningkatan produksi dapat pula ditempuh melalui perluasan areal panen, dengan memanfaatkan lahan kering potensial yang belum diusahakan dan lahan sawah setelah padi. Pemanfaatan lahan sawah setelah padi (musim kemarau) perlu diarahkan pada lahan yang *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Jagung* GRO . Ketersediaan air irigasinya memadai, baik dari air permukaan maupun air tanah. Untuk memanfaatkan air tanah perlu direncanakan pembuatan sumur

dan penyediaan pompa. Pengembangan jagung nasional harus diikuti dengan pengembangan jaringan pasar global. Pengolahan dan pemasaran jagung diarahkan untuk mewujudkan tumbuhnya usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan harga yang wajar di tingkat petani, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, maka program yang perlu dibangun dan diimplementasikan antara lain: a) meningkatkan mutu produk dan mengolah produksi menjadi bahan setengah jadi, b) pembagian keuntungan (*profit sharii*) yang proporsional bagi petani, c) menumbuhkan unit-unit pengolahan berbasis baku jagung dan pemasaran jagung yang dikelola oleh Kelompok tani/gabungan kelompok tani atau asosiasi perjagungan, d) meningkatkan efisiensi biaya pengolahan dan pemasaran, juga memperpendek mata rantai pemasaran, serta mengurangi impor dan meningkatkan ekspor jagung.

Penerima manfaat dari pengembangan jagung nasional adalah rumah tangga petani yang mengembangkan usahatani jagung secara efisien. Dengan pengembangan jagung melalui peningkatan produktivitas dan kualitas, petani akan memperoleh peningkatan harga jual produk. Pengembangan jagung melalui perluasan areal panen pada lahan sawah setelah padi, petani akan mampu meningkatkan indeks pertanaman, memperoleh pendapatan tambahan, dan sekaligus melakukan konservasi tanah. Di lain pihak, pengusaha yang bergerak di bidang prosesing bahan baku maupun makanan jadi juga mendapat keuntungan dari proses peningkatan nilai tambah.

Rencana Jangka panjang 2015 – 2025

1. Investasi berupa penambahan luas areal tanam potensial yang belum tertanam di luar Jawa. Sebagai catatan saat ini luas panen adalah 4,16 juta H (Tahun 2009) dan ini perlu ditambah mengingat target penuhi kebutuhan domestik makin meningkat. Diperkirakan lahan yang dapat dikembangkan sebagai berikut :
 - Sumatera 2 juta Ha
 - Kalimantan 7,2 juta Ha
 - Sulawesi 335 ribu Ha
 - Maluku-Papua 9 juta Ha

Penciptaan daerah budidaya baru ini harus ada kesesuaian antara varietas yang ditanam

dengan kebutuhan industrinya,

2. Investasi Integrated Farming antara peternakan sapi atau unggas dengan perkebunan jagung
3. Mendorong Investasi berupa pabrik corn wet-mill

Sasaran jangka panjang pengembangan jagung nasional adalah meningkatnya luas panen jagung. Pada tahun 2025 diharapkan luas panen jagung akan mencapai 4.885.880 ha, difokuskan pada lahan kering di luar Jawa. Dengan luas panen ini, produksi jagung nasional diharapkan mencapai 27.158.390 ton. Dalam perluasan areal

Panen pada lahan kering, perlu dilakukan pewilayahan komoditas agar tidak terjadi tumpang tindih rencana penggunaan lahan untuk jagung dengan komoditas lain. Agar proses produksi jagung pada lahan kering dapat berkelanjutan, maka aspek konservasi lahan perlu mendapat perhatian. Untuk daerah-daerah yang baru dibuka perlu dukungan pembangunan infrastruktur (jalan, transportasi), kelembagaan sarana produksi, alsintan, dan permodalan. Peta jalan menuju sasaran jangka panjang yang ditunjukkan pada Gambar 2 ditinjau dari beberapa keterkaitan dalam pengembangan jagung yaitu: 1) keterkaitan institusional, 2) keterkaitan horisontal, 3) keterkaitan vertikal, 4) keterkaitan regional, dan 5) diterima manfaat.

Keterkaitan institusional merupakan *pre-requisite* dan pondasi yang kokoh, meliputi: 1) revitalisasi kelembagaan petani, penyuluhan, serta kelembagaan permodalan untuk percepatan proses adopsi dan difusi inovasi teknologi, 2) konsolidasi manajemen usaha agribisnis dan pengembangan sistem agribisnis kemitraan, serta 3) regulasi Kebijakan pemerintah. Keterkaitan horizontal adalah pelaksanaan program secara konsisten dalam sistem produksi jagung yang diawali dengan pembentukan varietas dan litkaji efisiensi pemberian pupuk berdasarkan bagan warna daun, litkaji teknologi produksi jagung yang produktif dan efisien pada lahan marginal, serta penanganan panen dan pascapanen rimer yang efektif dan efisien. Selanjutnya dilakukan pengembangan sistem usahatani jagung yang produktif dan efisien pada lahan kering maupun lahan sawah. Dalam hal ini diperlukan varietas jagung yang toleran terhadap cekaman kekeringan

Rencana pelaksanaan kegiatan investasi dalam mendukung roadmap tersebut:

1. Menguatkan basis kelompok tani dan GAPOKTAN sebagai kelompok pengolah on farm maupun off farm;
2. Kemitraan dengan industri besar pada daerah sentra (pabrik pakan, pabrik makanan, pabrik farmasi);
3. Melakukan perluasan lahan budidaya ; dengan menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam rangka penyediaan lahan untuk ketahanan pangan yakni adanya MoU (SKB ?) tiga Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional;

16.7.2 Rekomendasi utk pengembangan investasi

1. Investasi berbasis jagung diarahkan pada sentra produsen jagung;
2. Penetapan SNI berbagai jenis produk antara (bahan baku industri) agar komersialisasinya berjalan dengan mantap;
3. Penyebaran Informasi tentang jenis/varietas jagung terkait dengan kecocokan penggunaannya (pangan, pakan, atau bahan baku industri lainnya)

Tabel 16.19 Kerangka Road Map Pengembangan Investasi Jagung di Indoensia.

SEKTOR INTI	SEKTOR PENUNJANG	SEKTOR TERKAIT
Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Penyediaan Bibit Unggul	Industri Pakan Ternak
Budidaya	Penyediaan Pupuk	Industri Makanan Ringan
Jagung	Penyediaan Lahan	Industri Tepung/Pati Jagung



Sasaran	
<p style="text-align: center;">Jangka Menengah (2011-2014)</p> <p>Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku; Fasilitasi Kerjasama GAPOKTAN dengan Pabrik Pakan Ternak;</p>	<p style="text-align: center;">Rencana Jangka panjang (2015 – 2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan intensifikasi dengan penggunaan bibit unggul (dengan produktivitas diatas ton/ha) dan modernisasi. • Memperluas pengembangan produk akhir untuk mendukung ketahanan pangan dan sumber energi terbarukan; • Fasilitasi kemitraan industri hilir jagung dan industri rakyat; • Fasilitasi Investasi Agroindustri Berbasis Jagung skala besar di Luar Jawa
<p>Strategi</p> <p>Memfasilitasi kerjasama investasi dengan dukungan Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta dan Perbankan</p>	
<p>Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2012 – 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan basis kelompok tani dan GAPOKTAN sebagai kelompok pengolah on farm maupun off farm; • Kemitraan dengan industri besar pada daerah sentra (pabrik pakan, pabrik makanan, pabrik farmasi); • Melakukan perluasan lahan budidaya; dengan menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam rangka penyediaan lahan untuk ketahanan pangan yakni adanya MoU (SKB ?) tiga Kementrian/ Lembaga yakni Kementrian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional; 	<p>Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2015– 2025)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi Ekstensifikasi budidaya jagung; 2. memantapkan kemitraan GAPOKTAN dengan Pabrik Pakan; 3. Diversifikasi produk olahan jagung;



16.8 Profil Pemetaan Investasi Ubi Kayu KAYU

16.8.1 Gambaran Umum Investasi Ubi Kayu dan Isu Regional Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas

Selama periode 2006-2010, luas areal pertanaman ubi kayu Indonesia rata-rata 1,199 juta hektar. Namun cenderung mengalami penurunan sebesar 0,49% per tahun (Tabel 16.20).

Tabel 16.20. Perkembangan areal, produktivitas dan produksi Ubi Kayu di Indonesia, tahun 2006-2010.

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Pertumb Luas Panen	Pertumb Produksi
2006	1,227,459	163.00	19,986,640		
2007	1,201,481	166.36	19,988,058	-2.12%	0.01%
2008	1,204,933	180.57	21,756,991	0.29%	8.85%
2009	1,175,666	187.46	22,039,145	-2.43%	1.30%
2010	1,183,047	202.17	23,918,118	0.63%	8.53%
Rataan	1,191,282	184.14	21,925,578	-0.908%	4.670%

Produktivitas ubi kayu rata-rata dari tahun 2006-2010 masih rendah yakni 18,4 T/ha, walaupun cenderung meningkat, namun ini menggambarkan bahwa penggunaan benih ubi kayu berkualitas di tingkat petani belum berkembang seperti diharapkan, disamping cara pemeliharaan yang juga belum intensif. Dalam periode 2006-2010 rata-rata produksi ubi kayu 21,9 juta ton dan cenderung meningkat 4,67% per tahun. Tampak bahwa peningkatan produksi ubi kayu lebih banyak ditentukan oleh adanya peningkatan produktivitas daripada peningkatan luas tanam yang menurun (-0,9% pertahun). Fenomena ini menunjukkan bahwa perluasan penggunaan benih unggul di tingkat petani diperkirakan mampu meningkatkan produksi ubi kayu.

Sebagai penyangga komoditas pangan, berdasarkan program Departemen Pertanian (Permentan No. 18/ Permentan/OT.140/2/2010) bahwa pada th 201 ditargetkan produksi Ubi kayu mencapai 37 Juta ton dengan produktivitas : 18, T/Ha.

Sebagai tanaman relatif mudah tumbuh, maka ubi kayu tersebar di seluruh Indonesia. Menurut data statistik (http://www.bps.go.id/tmn_pgn.php) sepuluh propinsi utama penghasil ubi kayu, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 16.21. Produksi Komoditas Ubi Kayu tahun 2010
pada 10 Propinsi**

No.	Propinsi	Produksi (ton)	Prosentase
Indonesia		23,918,118	100.00%
1	Lampung	8,637,594	36.11%
2	Jawa Tengah	3,876,242	16.21%
3	Jawa Timur	3,667,058	15.33%
4	Jawa Barat	2,014,402	8.42%
5	DI Yogyakarta	1,114,665	4.66%
6	Nusa Tenggara Timur	1,032,538	4.32%
7	Sumatera Utara	905,571	3.79%
8	Sulawesi Selatan	601,437	2.51%
9	Sulawesi Tenggara	163,350	0.68%
10	Sumatera Selatan	159,929	0.67%
Propinsi Lainnya		1,745,332	7.30%

16.8.2 Kebutuhan Penggunaan Ubi Kayu

Dari tanaman ubi kayu, banyak sekali variasi-variasi bahan, mulai dari umbi, batang dan daun yang dapat diproduksi sebagai hasil pengolahan ubi kayu, sehingga sangat tepat untuk dikembangkan sebagai suatu sistem agroindustri. Pada dasarnya sesungguhnya tanaman ubi kayu dengan mudah dapat mencapai produksi sebesar 40-50 ton umbi/ha meskipun ditanam di tanah yang tidak subur, tanpa irigasi dan dengan masukan yang rendah sekali. Ke depan, ubi kayu akan memegang peranan penting dalam penyediaan energi, pangan, dan bahan-bahan kimia penting di daerah tropik.

Ubi kayu dimanfaatkan untuk pangan baik secara langsung (pengolahan tradisional) maupun melalui pengolahan (industri), serta untuk pakan dan industri non pangan. Dewasa ini sebagian besar hasil ubi kayu dalam negeri dimanfaatkan untuk pangan yakni sekitar 75 %, selebihnya untuk pakan 2%, industri (non pangan) 14%, dan hilang karena tercecer sebesar 9%. Ke depan peranan dan jumlah kebutuhan ubi kayu nasional untuk pangan maupun industri akan meningkat. Kendala dan permasalahan yang semakin berat dan kompleks dalam memproduksi padi akan berdampak secara potensial kepada meningkatnya ubi kayu sebagai sumber karbohidrat non beras.

Pemerintah menetapkan target untuk mensubstitusi tepung terigu (gandum) (dengan tepung umbi-umbian lokal) sampai paling tidak sejumlah

10% dari total impor tepung terigu (tahun 2010 sebanyak 6 juta ton) atau setara 600 ribu ton per tahun.

Tabel 16.22. Perdagangan Ubi Kayu Asal Thailand

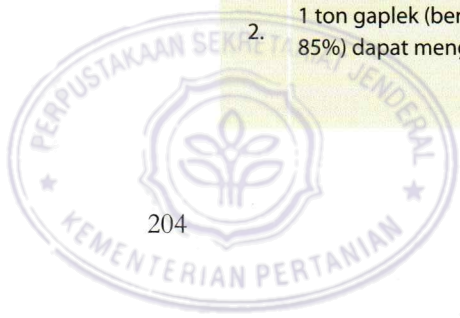
	2005	2006	2007	2008
	(ribu ton)			
Total	9,240	6,811	9,402	11,590
Flour and Starch	4,416	3,963	4,991	5,626
Jepang	729	873	746	744
China	694	611	1220	1368
Chinese Prov. of Taiwan	548	483	684	631
Indonesia	667	417	617	901
Malaysia	256	296	412	483
Others	1,523	1284	1311	1500
Chip and Pellets	4,824	2,848	4,411	5,964
China	3,168	1214	4237	5925
Republic of Korea	20	480	111	15
European Union	1,436	984	17	5
Others	200	170	46	20

Thai Tapioca Trade Association (TTTA)

Jika Indonesia mampu menyediakan sendiri produk starch dan flour yang biasa defisit sehingga harus diimpor dari Thailand, maka akan banyak menghemat devisa. Paling tidak terdapat potensi substitusi impor sebanyak 901 ribu ton (setara dengan 1,353 juta ton galek kering (berat kering 85% setara dengan 3 juta ton ubi kayu segar (berat kering 38%). Potensi ini diluar peluang untuk menggantikan tepung terigu sebanyak 10% – 20% dari impor

Tabel 16.23. Faktor konversi produk-produk berbasis singkong

No.	Bahan Baku	Hasil Konversi
1.	1 ton singkong (berat kering 38%) dapat menghasilkan	450 kg galek (berat kering 85%) 440 kg pelet keras 250-300 kg pati murni 665 kg pati murni 665 kg pati termodifikasi
2.	1 ton galek (berat kering 85%) dapat menghasilkan	770 kg sorbitol 70% 770 kg maltol 70% 500 kg kristal sorbitol 500 kg mannitol



3.	1 ton pati murni menghasilkan	1.111 kg tepung tapioka 1.087 kg sirup glukosa 770 kg glukosa murni 665-1.000 kg maltosa 833 kg sorbitol 417 kg MSG 568 kg bioethanol 96%
4.	1 ton gapek dapat menghasilkan	420 liter bioethanol

Konsep agroindustri tanaman ubi kayu sebagai suatu sistem memiliki ikatan yang erat sekali antara industri atau proses pengolahan ubi kayu dengan lahan pertanian, dimana setiap bagian tanaman perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Unsur nutrisi (NPK) yang tidak bermanfaat di dalam proses produksi dapat dikembalikan ke lahan pertanian sebagai pupuk, dengan demikian masalah pencemaran karena buangan industri juga bisa teratasi. Mengingat besarnya kebutuhan penggunaan ubi kayu, maka pengembangan usaha penanaman ubi kayu perlu diintegrasikan dengan pengembangan industri pengolahan ubi kayu di wilayah sentra produksi.

16.8.3 Potensi Peningkatan Produksi Ubi Kayu

Hingga kini rata-rata hasil ubi kayu nasional masih tergolong rendah, yaitu sekitar 15,5 ton per hektar. Dari segi teknis produksi, penyebab penting atas rendahnya tingkat hasil ubi kayu di tingkat petani adalah terbatasnya penggunaan varietas unggul yang berdaya hasil tinggi dan kurangnya penggunaan pupuk.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka upaya peningkatan produksi ubi kayu baik untuk pangan maupun industri harus mendapat perhatian besar dari semua pihak, termasuk dalam penyediaan teknologi produksinya. Banyak hasil-hasil penelitian atau teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi ubi kayu dan meningkatkan pendapatan petani penghasil ubi kayu.

Dari sisi penerapan teknologi, dua penyebab penting atas rendahnya tingkat hasil ubi kayu di Indonesia adalah masih sedikitnya areal ubi kayu yang ditanami varietas unggul baru (10%) serta petani hanya sedikit atau tidak memberikan pupuk dalam budidaya ubi kayu (Karama 2003); sehingga dua

hal ini penting untuk diperbaiki di dalam upaya meningkatkan produktivitas dan produksi ubi kayu nasional. Sebagian besar ubi kayu diusahakan pada lahan kering, dan hanya sebagian kecil saja yang diusahakan pada lahan sawah. Meskipun ditanam pada berbagai jenis tanah, namun secara umum ubi kayu banyak diusahakan pada tanah Alfisol (Mediteran), Ultisol (Podsolik dan Oxisol (Latosol) yang umumnya mempunyai tingkat kesuburan tanah sedang sampai rendah sehingga masalah perbaikan kesuburan tanah harus mendapat perhatian besar di dalam pengembangan ubi kayu.

Sesuai dengan data Statistik tahun 2004, diketahui bahwa urutan penyebaran produksi ubi kayu berdasarkan wilayah pulau atau region adalah Jawa (55%), selanjutnya secara berurutan diikuti Sumatera (30%), Bali + Nusa Tenggara (6%), Sulawesi (5%), Kalimantan (3%), serta Maluku + Papua (1%) (BPS 2005). Dua pulau penghasil utama ubi kayu adalah Jawa dan Sumatera, keduanya berkontribusi sebesar 83–85% dari total produk Indonesia. Apabila dianalisis data produksi ubi kayu lima tahun terakhir (2000–2004) pulau Sumatera mempunyai tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada pulau Jawa yakni masing-masing sebesar 9,69% dan 3,86% tahun. Hal ini memberikan petunjuk bahwa ke depan wilayah penghasil ubi kayu akan bergerak tumbuh ke luar Jawa, khususnya Sumatera. Hal ini sejalan dengan ketersediaan lahan dan berkembangnya industri pengolahan bahan baku ubi kayu. Menyadari hal tersebut, maka di dalam penyediaan teknologi produksi, perhatian ke luar Jawa harus semakin besar.

1). Inovasi Teknologi

Keberhasilan peningkatan produksi dan produktivitas pertanaman serta pendapatan petani ubi kayu sangat tergantung pada dan ditentukan oleh ketersediaan dan menerapkan teknologi produksinya meliputi varietas unggul dan teknik budidayanya.

2). Varietas Unggul

Di antara komponen teknologi produksi, varietas unggul mempunyai peran penting serta strategis, mengingat varietas unggul terkait dengan potensi hasil per satuan luas, kualitas produk yang menentukan preferen

pengguna, serta potensial mudah diadopsi petani apabila bibitnya tersedia. Dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar), pembentukan/pelepasan varietas unggul ubi kayu di Indonesia adalah tertinggal atau lambat, sebab selama ini di samping komoditas ubi kayu belum memperoleh prioritas, juga karena umur panennya panjang (8–10 bulan). Sejak tahun 1978 hingga sekarang baru berhasil dilepas 10 varietas unggul dengan karakter beragam. Dari pengujian di beberapa lokasi (uji multilokasi), hasil ubi segarnya berkisar antara 20–102 ton/ha, tergantung pada varietas dan kondisi lahannya. Ada yang mempunyai rasa enak (tidak pahit), agak pahit, dan pahit. Berdasarkan kadar HCN dan tingkat rasa pahit, ubi kayu dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok pahit dengan kadar HCN lebih besar dari 100 ppm, agak pahit dengan kadar HCN 50–100 ppm, dan ubi kayu tidak pahit dengan kadar HCN lebih kecil dari 50 ppm. Untuk meningkatkan rata-rata produktivitas ubi kayu dalam negeri yang sekarang baru mencapai 15,5 ton/ha ubi segar, ketersediaan varietas unggul ubi kayu seperti pada Tabel 4.5. dinilai sudah cukup memadai. Meskipun demikian upaya untuk memperoleh varietas baru yang lebih unggul dari segi potensi hasil dan karakternya tetap terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan yang selalu berkembang.

Tabel 16.24. Varietas Bibit Unggul Ubi Kayu

Varietas	Keunggulan
Adira 1	Umur panen 215 hari, produksi 22 ton/ha, serta tahan layu tungau merah.
Adira 2	Umur panen 250 hari, produksi 21 ton/ha, serta tahan layu dan tungau merah
Adira 4	Umur panen 240 hari, produksi 35 ton/ha, dan tahan layu
Malang 1	Umur panen 270 hari, produksi 36,6 ton/ha, tahan tungau merah, dan tahan bercak cokelat daun
Malang 2	Umur panen 240 hari, produksi 31,5 ton/ha, tahan tungau merah, dan tahan bercak cokelat daun
UJ-3	Umur panen 7 bulan, potensi hasil 20-35 ton/ha, dan kandungan pati 20-27%
UJ-5	Potensi hasil 25-38 ton/ha, kanopi cepat menutup, dan kandungan pati 19-30%
UJ-3	Umur panen 8-10 bulan dan produksi 20-35 ton/ha
UJ-5	Umur panen 9-10 bulan dan produksi 25-38 ton/ha
UJ-3	Umur panen 8-10 bulan dan produksi 20-35 ton/ha
UJ-5	Umur panen 9-10 bulan dan produksi 25-38 ton/ha
Malang-4	Umur panen 9 bulan dan produksi 39,7 ton/ha
Malang-6	Umur panen 9 bulan dan produksi 36,41 ton/ha

3). Teknologi Budidaya

Di samping varietas, jarak tanam atau populasi tanaman per hektar merupakan komponen teknologi yang paling pertama dulu mendapat perhatian para petani, sebab komponen tersebut selain mudah dipahami dan diterapkan petani, juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Jarak tanam ubi kayu yang sesuai sangat ditentukan antara lain oleh sistem tanam dan kemudahan untuk melakukan panen. Ubi kayu ditanam baik secara monokultur maupun tumpang-sari dengan tanaman lain. Untuk monokultur, penanaman dapat berjarak tanam 1,0 m x 1,0 m, 2,0 m x 0,5 m, atau 1,8 m x 0,6 m .

Pada pertanaman tumpang-sari dengan jagung, garut, dan kacang tanah, ubi kayu dianjurkan ditanam dengan sistem baris ganda dengan jarak tanam 50 cm antar barisan yang dekat dan 200 cm antar barisan yang jauh, dengan jarak antar tanaman dalam barisan sejauh 100 cm. Dari pengamatan lapangan di Lampung, kini banyak petani yang menanam ubi kayu dengan jarak tanam rapat yaitu berjarak 60 cm antar baris tanaman dan 40 cm antar tanaman dalam barisan. Alasan pastinya belum jelas nampaknya terkait dengan tujuan untuk memudahkan pencabutan saat panen.

Dengan jarak tanam rapat pertumbuhan tanaman dan ukuran umbi akan lebih kecil dan sedikit per individu tanaman, sehingga mudah dicabut biarpun oleh ibu-ibu maupun anak-anak. Hal ini cukup beralasan mengingat pada saat panen raya ubi kayu, petani dan atau penebas sering dihadapkan pada permasalahan kekurangan tenaga kerja untuk memanen.

4). Pemupukan

Berdasarkan data kebutuhan hara N, P, dan K yang dikemukakan Cooke dalam Subandi et.al (2006), untuk rata-rata hasil nasional tahun 2000 pada pertanaman ubi kayu, padi, jagung, dan kedelai dihitung besarnya kebutuhan hara N, P, dan K. Sesuai penelitian yang dilakukan, maka tidak benar penyampaian banyak pihak bahwa tanaman ubi kayu rakus unsur hara. Yang betul adalah karena kemampuan menghasilkan umbi tinggi apabila dibudidayakan dengan teknologi maju (30–40 ton/ha), maka ubi kayu banyak menyerap hara dari tanah.

Tabel 16.25. Kebutuhan hara N, P, dan K tanaman ubi kayu, padi, jagung, dan kedelai pada tingkat hasil rata-rata nasional 2004.

No.	Jenis Tanaman	Rata-Rata Hasil Nasional (t/ha)	Kebutuhan hara (kg/ha)		
			N	P	K
1	Ubi Kayu	15,5	62,0	20,7	96,1
2	Padi Sawah	4,7	104,6	14,9	123,7
3	Jagung	3,3	90,3	16,0	60,8
4	Kedelai	1,3	63,7	9,1	27,3

Sumber : Subandi et.al (2006)

Kemampuan adaptasi tanaman ubi kayu yang baik menyebabkan tanaman ini dapat tumbuh dan menghasilkan biarpun diusahakan pada lahan sub optimal maupun marjinal. Meskipun demikian, tanaman ini produktivitasnya juga akan cepat menurun pada lahan sub optimal/marjinal dalam pengusahaan jangka panjang tanpa disertai dengan pemupukan.

Sekarang dan ke depan pertanaman ubi kayu telah dan akan semakin luas dibudidayakan pada lahan kering masam di luar Jawa yang tanahnya didominasi Ultisol (Podsolik) yang banyak mengandung Al-dd dan miskin unsur hara serta bahan organik. Dari segi keracunan Al, tanaman ubi kayu tergolong tahan, karena kadar kritis kejenuhan Al-dd bagi ubi kayu adalah sekitar 80%, padahal tingkat kejenuhan Al-dd tanah Ultisol di Indonesia umumnya jarang yang melampaui 75%. Walaupun demikian, pemberian kapur dengan takaran rendah yang ditujukan untuk memupuk Ca dan/atau Ca + Mg ternyata dapat meningkatkan hasil ubi kayu, dan takaran kapurnya cukup 300 kg/ha (Tabel 8). Pada tanah Alfisol Bantur (Malang) yang kandungan bahan organiknya rendah (kadar C-organik 1,04%), pemberian pupuk kandang dengan takaran 3 dan 6 ton/ha dapat meningkatkan hasil ubi kayu.

Dalam praktik, penggunaan pupuk kandang sekarang banyak dilakukan oleh petani ubi kayu di Lampung, hal ini sebagian terkait dengan semakin sulit dan mahal untuk mendapatkan dan membeli pupuk anorganik. Sehubungan dengan ini maka usahatani integrasi ternak–tanaman akan semakin strategis untuk membantu petani dalam menyediakan pupuk organik.

5). Pertanaman Tumpangsari

Diperkirakan lebih dari 95% produk ubi kayu di Indonesia dihasilkan dari pertanaman petani yang umumnya berskala kecil. Di Lampung, sebagai provinsi penghasil ubi kayu nomor satu dan banyak terdapat industri pengolahan ubi kayu, menurut informasi beberapa pihak sekitar 80% produksi ubi kayu berasal dari petani, yang 20% selebihnya diproduksi oleh perusahaan atau industri pengolahan ubi kayu.

Pemilikan lahan garapan ubi kayu individu petani adalah sempit dan ke depan dipastikan akan semakin menyempit, khususnya di Jawa yang sekarang menyumbang sekitar 55% terhadap total produksi ubi kayu Nasional. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dari lahan pertaniannya yang sempit petani ingin memperoleh hasil panen atau pendapatan yang relatif tinggi. Sehubungan dengan itu, petani berupaya untuk menanar komoditas lain di areal tanaman ubi kayu secara tumpangsari, seperti padi gogo, jagung, ataupun kacang-kacangan. Sistem pertanaman tumpangsari tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan lahan, yakni dapat meningkatkan nisbah kesetaraan lahan (*Land Equivalent Ratio* = LER) (Gambar 3). Pada tumpangsari dengan kacang buncis (*common bean*), nilai LER berkisar antara 1,50 sampai 1,75 tergantung pada saat tanam kacang terhadap saat tanam ubi kayu. Nilai LER relatif lebih tinggi apabila kacang buncis ditanam bersamaan atau beberapa hari hingga dua minggu sebelum penanaman ubi kayu.

16.8.4 Lingkungan Strategis Komoditas Ubi Kayu

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang dapat berpengaruh dalam pengembangan investasi ubi kayu di Indonesia berdasarkan hasil survey lapangan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) adalah:

1. Komitmen pemerintah yang kuat dalam rangka mengembangkan komoditas lokal dan menekan import bahan baku berbasis ubi kayu
2. Jumlah SDM yang terlibat dalam usaha komoditas ubi kayu cukup besar;
3. Kepemilikan lahan pertanian yang relatif sempit dan isu pengalihfungsian lahan pertanian ke nonpertanian yang menyebabkan

semakin rentannya peningkatan produksi;

4. Tingkat produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian yang masih rendah;
5. Diseminasi dan transfer teknologi pertanian, terutama penggunaan bibit unggul kepada petani masih lamban;
6. Rendahnya akses petani pada sumber daya produktif, antara lain, permodalan dan informasi;
7. Kelembagaan petani, termasuk penyuluhan, yang belum berkembang baik;
8. Rendahnya kualitas SDM petani dan lemahnya infrastruktur penunjang industri pengolahan

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal yang berpengaruh dan dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pengembangan investasi komoditas tanaman pangan secara umum dan komoditas ubi kayu khususnya adalah:

1. Isu lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Isu otonomi daerah mendukung dan meningkatkan pembangunan pertanian secara menyeluruh;
3. Permintaan dan kebutuhan singkong sebagai bahan pangan dan pakan maupun industri kimia dasar di beberapa Negara termasuk Indonesia yang semakin meningkat;
4. Harga sarana produksi dan hasil pertanian masih fluktuatif;
5. Infrastruktur pertanian yang belum baik dan masih banyak yang perlu diperbaiki;
6. Semakin tingginya frekuensi dan risiko bencana alam, yang antara lain disebabkan oleh perubahan iklim yang berdampak pada produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian;
7. Tingkat suku bunga perbankan masih cukup tinggi;
8. Dimulainya liberalisasi perdagangan dan investasi negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik (AFTA 2002, AIA2003, APEC2020).

Secara spesifik hasil temuan lapang sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan lingkungan internal dan eksternal selanjutnya dikelompokkan berdasarkan variabel pada analisis SWOT sebagai berikut:

Strengts:

1. Komitmen pemerintah yang kuat dalam rangka mengembangkan produk diversifikasi pangan
2. Jumlah SDM yang terlibat dalam usaha komoditas ubi kayu cukup besar

Weakness:

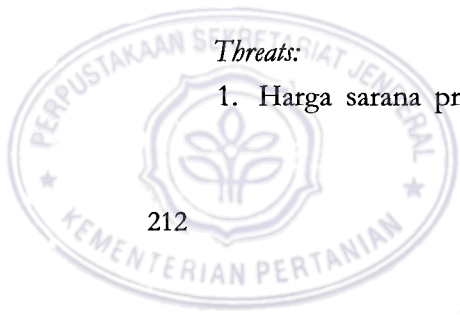
1. Kepemilikan lahan pertanian yang relatif sempit dan isu pengalihfungsia lahan pertanian ke nonpertanian yang menyebabkan semakin rentannya peningkatan produksi komoditas pertanian.
2. Tingkat produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian yang masih rendah;
3. Diseminasi dan transfer teknologi pertanian, termasuk perkembangan mekanisasi pertanian kepada petani masih lambat;
4. Rendahnya akses petani pada sumber daya produktif, antara lain permodalan dan informasi.
5. Rendahnya kualitas SDM petani dan lemahnya infrastruktur penunjang industri pengolahan
6. Kelembagaan petani, termasuk penyuluhan, yang belum berkembang baik;

Opportunities

1. Isu lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan
2. Isu otonomi daerah mendukung dan meningkatkan pembangunan pertanian secara menyeluruh
3. Permintaan dan kebutuhan ubi kayu sebagai bahan baku industri pengolahan ubi kayu di beberapa Negara termasuk Indonesia yang semakin meningkat.

Threats:

1. Harga sarana produksi dan hasil pertanian masih fluktuatif. Hal ini



terjadi karena sebagian besar bahan baru sarana produksi (obat dan pupuk) masih dimpor. Selain itu, adanya ketergantungan petani pada pupuk buatan dan pestisida anorganik;

2. Infrastruktur pertanian yang belum baik dan masih banyak yang perlu diperbaiki;
3. Semakin tingginya frekuensi dan risiko bencana alam, yang antara lain disebabkan oleh perubahan iklim yang berdampak pada produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian;
4. Tingkat suku bunga perbankan masih cukup tinggi;
5. Dimulainya liberalisasi perdagangan dan investasi negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik (AFTA 2002, AIA 2003, APEC 2020). Meskipun terdapat perbedaan tingkat maupun waktu penurunan tarif dan subsidi dalam bidang pertanian, tetapi kebijakan ini dinilai kurang efektif. Hal ini terjadi karena perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, teknologi, infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusianya.

Berdasarkan kondisi diatas selanjutnya berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh beberapa strategi yang perlu ditempuh dalam upaya pengembangan investasi di bidang komoditas ubi kayu, yaitu:

Strategi SO mencakup:

1. Insentif bagi pengembangan investasi industri pengolahan ubi kayu
2. Penguatan lembaga penelitian & pengembangan
3. Peningkatan kualitas SDM petani ubi kayu

Strategi WO mencakup:

1. Penyediaan lahan-lahan baru;
2. Peningkatan produktivitas,
3. Pengamanan produksi;
4. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan
5. Mengintegrasikan dan penguatan kelembagaan penyuluhan, informasi.

Strategi ST mencakup:

1. Kerjasama pengembangan infrastruktur dengan pihak swasta;

2. Stabilisasi harga komoditi

Strategi WT mencakup:

1. Fasilitasi kerjasama dalam pemanfaatan lahan tidur atau terlantar;
2. Fasilitasi kelembagaan pembiayaan dan modal usaha
3. Membangun networking dan kerjasama internasional

Analisis SWOT yang menghasilkan beberapa strategi untuk pengembangan investasi ubi kayu dapat dilihat pada Tabel 16.26.

Tabel 16.26. Srategi Pengembangan Investasi Ubi kayu

	Strenghts	Weakness
Opportunities	Kebijakan SO 1. Insentif bagi pengembangan investasi industri pengolahan ubi kayu 2. Penguatan lembaga penelitian & pengembangan 3. Peningkatan kualitas SDM petani ubi kayu	Kebijakan WO 1. Penyediaan lahan-lahan baru; 2. Peningkatan produktivitas, 3. Pengamanan produksi; 4. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan 5. Mengintegrasikan dan penguatan kelembagan penyuluhan, informasi.
Threats	Kebijakan ST 1. Kerjasama pengembangan infrastruktur dengan pihak swasta; 2. Stabilisasi harga komoditi	Kebijakan WT 1. Fasilitasi kerjasama dalam pemanfaatan lahan tidur atau terlantar; 2. Fasilitasi kelembagaan pembiayaan dan modal usaha 3. Membangun networking dan kerjasama dengan Negara lain;

16.9 Kelembagaan Penanaman Modal dan Pembiayaan

Keberadaan kelembagaan pendukung pengembangan sektor pertanian nasional sangat penting untuk menciptakan pembangunan pertanian Indonesia yang lebih kompetitif. Dalam mengembangkan usaha pertanian, lembag pembiayaan memegang peranan penting, terutama dalam penyediaan moda investasi dan modal kerja.

Pembiayaan bukan hanya dilakukan untuk produsen primer (usaha tani, perkebunan), melainkan juga usaha yang ada di hulu dan hilir. Di sektor hulu pembiayaan diperlukan untuk memperlancar arus distribusi dan penyediaan input-input pertanian, seperti usaha pembibitan, peralatan pertanian, pupuk dan sebagainya. Begitu juga di sektor hilir, di samping agroindustri juga lembaga-lembaga pemasaran yang menangani distribusi hasil produksi pertanian.

Fenomena yang menjadi penghambat berkembangnya usaha-usaha jasa distribusi, terutama di bidang usaha pertanian adalah terbatasnya modal operasi, sementara skema kredit untuk usaha tani yang diintroduksi oleh pemerintah tidak mudah menyentuh para pelaku usaha pertanian. Program pembiayaan yang dicanangkan pemerintah masih mensyaratkan agunan, berupa sertifikat tanah dan sejenisnya, sehingga para pelaku usaha tani sulit tersentuh oleh program pembiayaan tersebut.

Dengan demikian, penataan lembaga-lembaga pembiayaan usaha pertanian perlu dilakukan, terutama dalam membuka akses yang seluas-luasnya bagi pelaku agribisnis skala kecil dan menengah yang tidak memiliki aset yang cukup untuk diagunkan guna memperoleh pembiayaan usaha.

Untuk usaha pengembangan ubi kayu, kelembagaan penanaman modal dan pembiayaan masih sangat terbatas. Karena ubi kayu seperti halnya komoditas pertanian lainnya memiliki tingkat resiko yang sulit diperkirakan, sehingga penanaman modal dan pembiayaan di bidang ini memerlukan pertimbangan yang matang. Masalah aksesibilitas dan terbatasnya informasi juga menjadi kendala bagi petani untuk memperoleh bantuan permodalan untuk pengembangan usaha. Oleh karena itu diperlukan upaya terobosan untuk mengatasi masalah tersebut. Terbukanya akses petani kepada sumber permodalan dan kemampuannya memanfaatkan permodalan tersebut dengan dukungan dari perbankan sendiri, pemerintah dan LSM adalah bagian strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat tani.

Penguatan modal yang terjadi di lingkungan petani sendiri adalah adanya kelembagaan PUAP yang sudah berjalan di beberapa daerah. Optimalisasi keberadaan GAPOKTAN-PUAP harus terus diupayakan karena masih relatif sulitnya kontribusi perbankan dalam pengembangan komoditas pertanian khususnya tanaman ubi kayu. Selain itu, perlu dikembangkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau investor guna pengembangan usaha ubi kayu.

16.10 Peluang Pengembangan

16.10.1 Potensi Permintaan Ubi Kayu

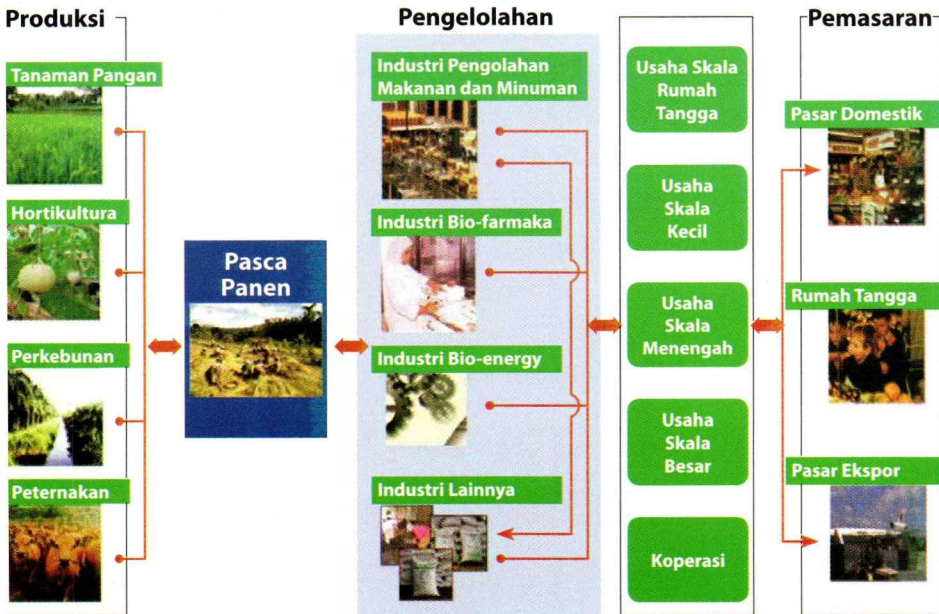
Produksi global

Prospek produksi ubi kayu dunia yang menguntungkan dan mungkin bersisa sekitar 192 juta ton pada laporan tahun 2003 (FAO, 2004). Estimasi tanaman dari beberapa negara produsen besar di Afrika, terdapat level produksi mencapai 103 juta ton pada 2003. Di Tanzania, pemerintah berencana meningkatkan penanaman ubi kayu dengan tujuan agar bisa mengekspor lebih banyak pati dan tepung.

FAO berinisiatif untuk mendistribusikan tanaman yang dapat tumbuh lebih cepat dan lebih tahan penyakit di Rwanda dan Republik Afrika Tengah agar segera terjadi peningkatan hasil. Sedangkan di Nigeria, terdapat konsorsium internasional yang mendukung program ubi kayu komersial dengan nilai mencapai 11 juta dolar. Pada saat yang sama, produksi di Ghana dan Uganda diharapkan meningkat melalui investasi skala besar bagi infrastruktur ubi kayu, terutama pada level pengolahan. Kombinasi dari promosi pemerintah terhadap budidaya ubi kayu dan dukungan dari organisasi internasional akan memunculkan perluasan industri ubi kayu di Afrika. Di Asia, khususnya Thailand dan Indonesia, pada beberapa tahun terakhir tercatat peningkatan produksi ubi kayu secara global, produksi diharapkan untuk meningkat lebih lanjut sesuai dengan tingginya harga domestik dan ekspor.

Perdagangan global ubi kayu

Perdagangan internasional untuk produk ubi kayu kering (atau yang disebut dengan tapioka) diperkirakan 8.4 juta metrik ton (MT), dimana Thailand dan Indonesia adalah pengeksport utama ubi kayu. Ekspor umumnya dilakukan dalam bentuk chips ubi kayu, pelet, pati dan tepung ubi kayu. Meskipun Nigeria merupakan produsen ubi kayu terbesar tapi ekspornya tidak berarti. Ekspor Afrika dan Amerika Latin hanya sekitar 400.000 T. Sedangkan Thailand yang meskipun merupakan eksportir ubi kayu terbesar dunia dengan 80% total ekspor dunia, tetapi Thailand hanya urutan ketiga sebagai produsen tapioka selain Nigeria dan Brasil. Menurunnya produksi ubi kayu Thailand cukup mengkhawatirkan karena petani mulai beralih menanam jenis tanaman lain yang dinilai lebih menguntungkan.

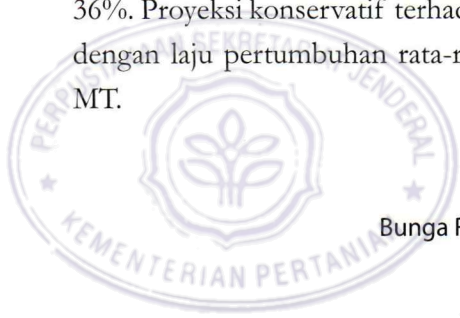


Gambar 16.3. Pemetaan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Ubi Kayu

Trend pasar global

Pasar internasional untuk produk ubi kayu mulai berkembang sejak tahun 1950, dengan adanya ekspor produk berupa penggilingan tepung ubi kayu oleh Thailand ke pasaran Eropa. Setengah abad kemudian, Uni Eropa masih menjadi tujuan utama, dan Thailand masih merupakan distributor utama. Beberapa tahun terakhir, peluang pasar mulai berkembang, khususnya di Asia dimana produk ubi kayu digunakan sebagai produk antara, khususnya pati ubi kayu. Thailand masih merupakan suplier ubi kayu dengan market share 80%.

Dalam perdagangan internasional, industri ubi kayu tumbuh dengan cepat. Volume perdagangan antara tahun 1995 dan 2005 meningkat sekitar 36%. Proyeksi konservatif terhadap perdagangan ubi kayu pada tahun 2015 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 40% adalah sekitar 11.76 juta MT.



16.10.2 Kondisi Lingkungan Bisnis Ubi Kayu

Pangsa pasar ubi kayu dunia didominasi oleh Thailand, meskipun bukan terbesar (hanya 12,49%), namun mayoritas produk ubi kayunya ekspor ke seluruh dunia. Sedangkan di negara-negara Afrika yang memiliki produksi 51,71% banyak dikonsumsi sendiri. Demikian pula Indonesia meski produksinya mencapai 22 juta ton, tapi banyak dikonsumsi di dalam negeri.

Tabel 16.27. Sebaran Produksi Ubi Kayu Dunia

	Production (1,000 t)	
World	240,989	100.00%
Africa	124,615	51.71%
LAC	34,677	14.39%
Asia	81,473	33.81%
Cambodia	3,497	1.45%
China	4,511	1.87%
India	9,623	3.99%
Indonesia	22,039	9.15%
Laos	152	0.06%
Malaysia	430	0.18%
Myanmar	211	0.09%
Philippines	2,043	0.85%
Sri Lanka	277	0.11%
Thailand	30,088	12.49%
Timor Leste	49	0.02%
Vietnam	8,556	3.55%

Jika dilihat dari pangsa ekspor dunia, Thailand menguasai 72,7% pangsa ekspor flour and starch, dan 85,3% untuk chip and pellet. Sementara Indonesia hanya mengekspor 1,4% produk chip dan pellet dan mengimpor dari pangsa ekspor dunia, Thailand menguasai 72,7% pangsa ekspor flour sebanyak 901 ribu ton pada tahun 2008 (Tabel 16.28).



Tabel 16.28 Ekspor Ubi Kayu Dunia (product weight equivalent)

	2007		2008		2009		2010	
Total	12,518		9,452		4,089		14,625	
Flour and Starch	6,012	100.0%	4,265	100.0%	8,062	100.0%	7,636	100.0%
Thailand	4,416	73.5%	3,963	92.9%	4,991	61.9%	5,626	73.7%
Vietnam	1,328	22.1%	946	22.2%	2,735	33.9%	1,642	21.5%
Others	269	4.5%	302	7.1%	335	4.2%	369	4.8%
Chip and Pellets	6,506	100.0%	5,187	100%	6,027	100%	6,989	100%
Thailand	4,824	74.1%	2,848	54.9%	4,411	73.2%	5,964	85.3%
Vietnam	1,316	20.2%	2,000	38.6%	1,265	21.0%	759	10.9%
Indonesia	210	3.2%	170	3.3%	160	2.7%	96	1.4%
Others	156	2.4%	169	3.3%	191	3.2%	170	2.4%

Pendekatan Rantai Nilai

Penyusunan Roadmap Pengembangan Investasi dapat dikembangkan dengan menggunakan Pendekatan Rantai Nilai, yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem organisasi perubahan dari produksi sampai konsumsi, yang ditujukan untuk meningkatkan nilai dan kompetitif ubi kayu. Pendekatan ini juga sebuah gabungan usaha, yang bekerja secara vertikal untuk mencapai akses pasar yang lebih besar.

Sebagai sebuah perusahaan industri ubi kayu haruslah kompetitif, baik untuk pasar lokal, maupun secara glonal. Dalam dokumen roadmap pengembangan investasi ini dianalisa batasan dan peluang yang dihadapi oleh rantai nilai ubi kayu pada setiap tahapan mulai dari usaha tani sampai pada pasar. Spesifik **input, kebijakan dan support sistem (sistem pendukung)** merupakan fungsi kritis untuk setiap tahapan, dan penting untuk pengembangan rantai nilai ubi kayu yang kompetitif.

Input mencakup bahan baku, teknologi, finansial, dukungan institusi dan teknik, dan administrasi sumberdaya manusia.

Kebijakan meliputi tahapan spesifik dan menyeluruh dari usaha pemerintah untuk menghasilkan lingkungan esensial untuk fungsi yang tepat dan keberhasilan keseluruhan rantai nilai.

Sistem pendukung mengembangkan dan atau memonitor kualitas dan kemampuan distribusi yang tepat pada waktunya. Beberapa contoh adalah kelembagaan yang berhubungan dengan riset, penyediaan sertifikasi produk, promosi, pembuatan dan penyebaran informasi. Kelembagaan

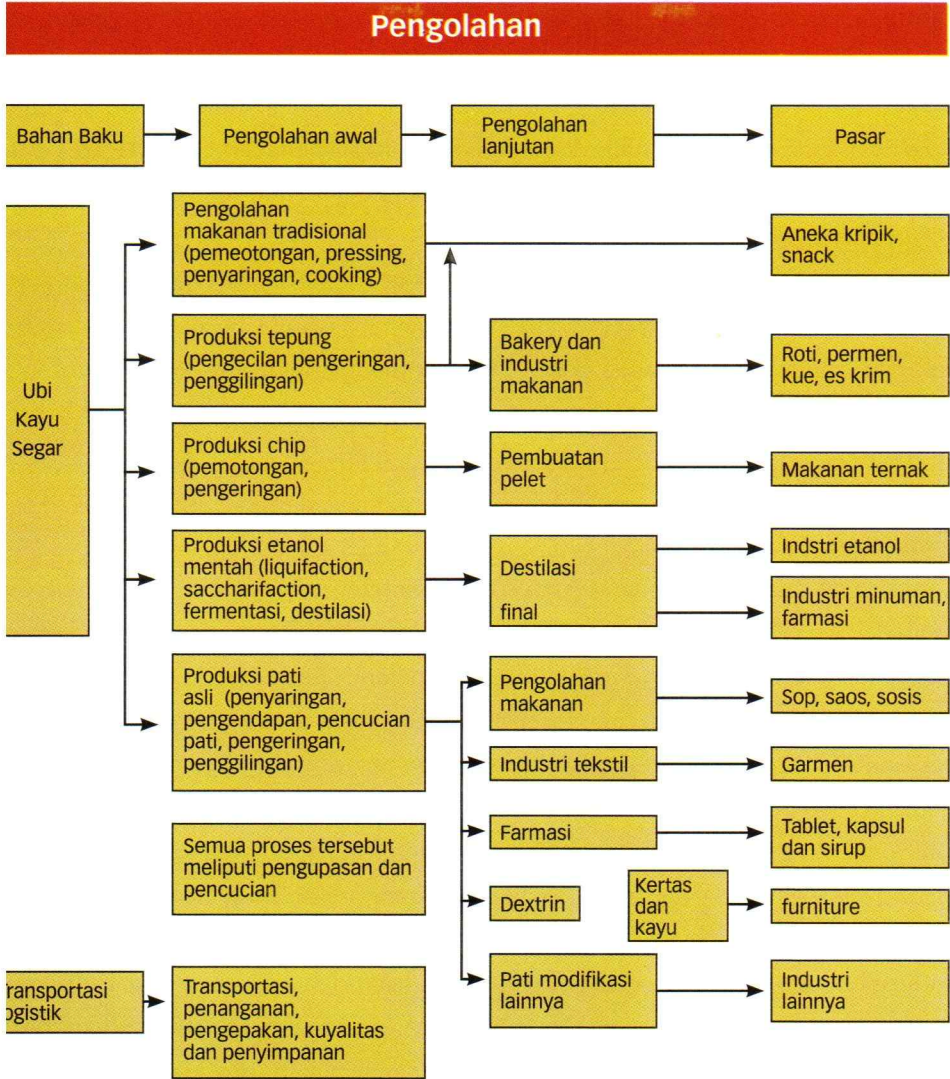
ini secara signifikan berkontribusi terhadap keseluruhan target kinerja industri.

Rantai nilai meliputi kisaran penuh aktivitas dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi dan atau melayani mulai dari proses produksi sampai pada produk akhir. Hal ini juga meliputi pasar akhir hingga produk atau jasa terjual, baik secara lokal, nasional, regional atau global. Aktor dalam rantai nilai adalah penggerak berupa insentif, profit, harga, komposisi atau beberapa faktor ekstrinsik lainnya. Hal ini merupakan insentif dalam rantai nilai yang mendorong investasi sektor swasta untuk kemajuan sektor industri.

Untuk keberhasilan dalam pasar global, rantai nilai harus menggerakkan produk mulai dari produksi sampai ke tangan konsumen secara efisien dengan kualitas yang lebih baik dan atau diferensiasi produk yang unggul. Industri ubi kayu yang kompetitif tergantung pada kemampuan untuk mengembangkan dan menangani persaingan pasar.

Rantai nilai ubi kayu dapat dilihat pada gambar 4.1. mulai dari produksi ubi kayu sebagai bahan dasar awal. Komponen pengolahan terdiri dari perusahaan pengolah yang bervariasi yang mengembangkan berbagai produk yang berbahan baku ubi kayu. Komponen pasar termasuk pengumpul produk akhir, atau perusahaan pengolahan lainnya yang menggunakan produk hasil olahan ubi kayu sebagai bahan baku industrinya.

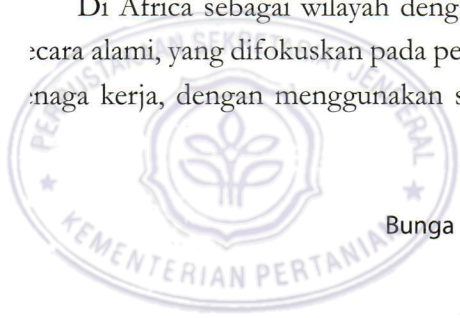




Gambar 16.4. Rantai nilai ubi kayu secara sederhana

Perubahan dinamis dalam Rantai Nilai Ubi Kayu Global
reduksi

Di Africa sebagai wilayah dengan produksi terbesar, ubi kayu diusahakan secara alami, yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan keluarga. Intensifikasi tenaga kerja, dengan menggunakan sedikit fertilisasi dan input pestisida. Sejak



tahun 1990, di Amerika Latin ada kemajuan yang signifikan dalam input dan perluasan skala produksi secara regional seperti di Brazil. Produksi Asia memiliki target untuk memenuhi kebutuhan makanan ternak dan industri pati sehingga lebih komersial dan memiliki karakteristik berupa penanaman pada area yang lebih luas, penggunaan mekanisasi dengan level yang lebih tinggi, dan penggunaan input dan irigasi.

Sektor swasta, memimpin sub kontrak produksi ubi kayu juga berkembang secara perlahan sebagai industri pengolahan yang berusaha mengeliminasi kesinambungan suplai bahan baku. Dengan mengembangkan varietas ubi kayu yang lebih tahan penyakit, meningkatkan produktivitas dan kompetitif para usaha tani.

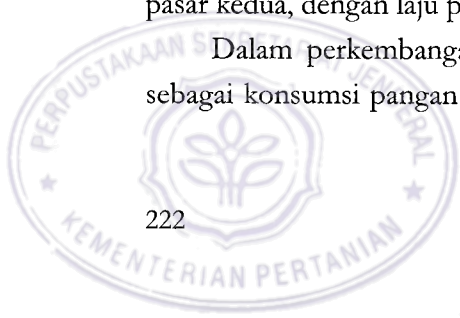
Pengolahan

Di wilayah Sub Sahara Afrika, pengembangan dilakukan dalam bentuk usaha skala kecil, dengan penerapan teknologi pengolahan ubi kayu sederhana berbiaya rendah yang dapat dilakukan oleh petani untuk menghasilkan ubi kayu dengan kualitas yang lebih tinggi, sebagai bahan dasar utama makanan. Teknologi tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi petani yang memandang ubi kayu sebagai “tanaman cadangan pada saat kemarau” dengan memproduksi produk ubi kayu yang berkualitas lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan penjualan pada pasar yang ada dan menghasilkan peluang pasar yang baru. Di Asia dan Amerika Latin, industri pemerintah menggunakan teknologi proses untuk industri pengolahan pati, etanol, tepung ubi kayu dan makanan ternak. Wilayah ini juga mengembangkan proses subkontrak pasar dimana perkebunan besar mempekerjakan perkebunan kecil untuk menyediakan produk setengah jadi seperti potongan ubi kayu (chips).

Utilisasi (pasar)

Konsumsi global ubi kayu mengalami perubahan sejak tahun 1960. Penggunaan untuk makanan lebih dominan di pasar Afrika dan Asia dan mengalami peningkatan sebesar 70%. Di Amerika Latin, konsumsi merupakan pasar kedua, dengan laju peningkatan 50%.

Dalam perkembangan terbaru, penggunaan ubi kayu secara tradisional sebagai konsumsi pangan manusia beralih menjadi produk industri olahan. I



Asia, ubi kayu mengalami diversifikasi sebagai produk industri. Akarnya atau umbi ubi kayu telah mengalami perubahan susunan produk dari mulai sebagai sumber makanan berupa umbi dan pati, diolah menjadi tepung, hingga menjadi produk etanol dan makanan ternak untuk industri. Di Amerika Latin dan Afrika, pasar tradisional didominasi oleh industri pengolahan. Sebagai contoh, di Brazil, produksi pati dan etanol dari ubi kayu mengalami peningkatan. Di Eropa, Amerika Latin dan Asia umumnya peningkatan konsumsi ubi kayu digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri makanan ternak. Sedangkan di Afrika penggunaan ubi kayu masih dominan sebagai konsumsi manusia hingga mencapai 90%.

Perdagangan industri ubi kayu domestik, regional dan industri global dibagi dalam empat sub sektor utama yaitu etanol, pati, tepung dan chips/pellet. Penggunaan ubi kayu sebagai bahan baku untuk produksi etanol, sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, diharapkan meningkat dengan tumbuhnya kesadaran dan perhatian terhadap makin terbatasnya bahan bakar fosil pada masa yang akan datang dan pengaruhnya terhadap lingkungan sebagaimana yang dinyatakan dalam protokol Tokyo tahun 2000. Negara anggota protokol Tokyo memproduksi atau menggunakan lebih banyak etanol serta menyediakan insentif untuk industri etanol yang mengembangkan produksinya sebagai bahan bakar.

Perdagangan pellet dunia dikuasai oleh Thailand, yang dimulai sejak tahun 1967, dan beberapa tahun setelahnya dengan mengekspornya ke Uni Eropa. Meskipun Thailand kehilangan kemudahan ekspor ke Eropa tahun 1990an, Thailand masih mengekspor chips ubi kayu dan pellet ke negara Asia lainnya, khususnya China, dimana China menggunakan pellet untuk makanan ternak dan produksi etanol.

Harga ekspor pelet ke Uni Eropa pada tahun 2004, 36% lebih tinggi daripada tahun 2003, sedangkan chips untuk Timur Jauh meningkat 5%. Harga tepung dan pati, meskipun turun dari periode tahun sebelumnya, masih tetap tumbuh dalam kisaran 6%.

Produksi dan perdagangan pati ubi kayu meningkat secara signifikan beberapa tahun belakang ini. Pati ubi kayu memproduksi berbagai karakteristik produk yang secara teknik lebih unggul dari pada pati jagung (maizena), dan subsektor ini cukup menjanjikan sebagai segmen pasar baru bagi industri ubi

kayu. Pada saat ini, untuk tujuan permintaan pati global, terdapat perusahaan besar yang khusus memproduksi pati dan pati modifikasi yang berinvestasi di Thailand, Brazil dan Indonesia.

Tepung ubi kayu secara luas dikonsumsi di Brazil dan banyak negara Amerika Latin lainnya sebagai *farinha*, dengan level yang bervariasi dalam pengolahannya: mulai dari usaha keluarga yang sederhana sampai dengan penggunaan metodologis yang lebih besar di pabrik. Pasar potensial yang lebih dinamis untuk tepung ubi kayu adalah penggunaannya sebagai High Quality Cassava Flour (HQCF), sebagai substitusi gandum (10%) dalam produk makanan.

16.11 Fasilitas (Insentif) dan Harmonisasi Kebijakan

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan usaha agribisnis yang kondusif dan mampu mendukung pengembangan agribisnis. Lembaga pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, memiliki wewenang regulasi atau kebijakan dalam menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dan adil. Regulasi atau kebijakan pemerintah dapat dikelompokkan dalam beberapa hal sebagai berikut: a) regulasi atau kebijakan untuk menjamin terciptanya lingkungan usaha yang kompetitif dan mencegah monopoli dan kartel; b) regulasi atau kebijakan untuk mengontrol kondisi monopoli yang diizinkan, seperti Bulog yang menangani komoditas strategis; c) regulasi untuk fasilitas perdagangan, termasuk ekspor dan impor; d) kebijakan dalam penyediaan pelayanan publik, terutama untuk fasilitas layanan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan agribisnis; e) kebijakan untuk proteksi, baik terhadap konsumen maupun produsen; f) kebijakan yang terkait langsung dengan harga komoditas agribisnis, input-input agribisnis, dan peralatan pertanian; g) kebijakan terhadap peningkatan ekonomi dan kemajuan sosial; h) kebijakan terhadap sistem pembiayaan agribisnis, seperti permodalan dari perbankan, pasar modal, modal ventura, dan lain-lain; h) kebijakan terhadap sistem penanggulangan resiko agribisnis.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman sebagai dasar perencanaan yang telah dirumuskan dan disetujui untuk dilaksanakan. Bagi Indonesia, ubi kayu merupakan komoditas pangan penting, dan ke depannya komoditas ini akan semakin strategis peranannya bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian negara. Berdasarkan areal panen komoditas pangan, ubi kayu

menduduki urutan ke tiga setelah padi dan jagung, yang ketiganya sebagai sumber karbohidrat utama masyarakat. Pada tahun 2010, luas panen padi (padi sawah + padi gogo), jagung, dan ubi kayu berturut-turut adalah sekitar 13,25 juta hektar, 1,16 juta hektar; dan 1,35 juta hektar.

Fasilitas dan harmonisasi kebijakan ini mencakup berbagai kebijakan antara lain penambahan luas areal panen, pengembangan infrastruktur, adopsi teknologi dan peningkatan SDM petani. Sebagian besar lahan yang masih dapat dimanfaatkan untuk penanaman ubi kayu adalah luar Jawa yang memiliki wilayah yang relatif lebih luas. Mengingat distribusi sebaran wilayahnya, untuk merealisasikannya tentu tidak mudah. Kendala utama tidak hanya terletak pada mahal biaya investasi untuk pengembangan prasarana irigasi, tetapi juga kesiapan infrastruktur fisik pendukung (jalan raya, pasar, listrik, dan sebagainya), teknologi usahatani, kelembagaan pendukung usaha pertanian, dan kesiapan sumberdaya manusia setempat.

Kebijakan yang harus dilakukan selain pengembangan luas panen adalah penegakan peraturan mengenai pemanfaatan lahan untuk mencegah semakin meluasnya konversi lahan produktif dengan disertai adanya insentif dan disinentif bagi pelaksanaannya. Hal ini perlu segera diwujudkan karena konversi lahan merupakan masalah laten yang sulit untuk dipecahkan dan manfaatnya baru akan terasa dalam jangka panjang. Reformasi agraria dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah mengenai larangan fragmentasi lahan produktif dan sistem kepemilikan lahan seampungan untuk menghambat laju konversi. Kebijakan ini harus dilengkapi dengan insentif bagi pemilik seperti pembebasan pajak tanah pertanian. Kebijakan reformasi agraria berpengaruh tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi yang lebih penting akan dirasakan pengaruhnya dalam jangka panjang.

Pengembangan luas areal panen ini harus diikuti dengan pengembangan infrastruktur penunjang, antara lain perluasan cakupan saluran irigasi. Selain itu, perlu adanya penerapan teknologi budidaya, pasca panen, pengolahan. Pemerintah memiliki andil yang besar dalam pengembangan infrastruktur maupun adopsi teknologi karena dana yang dibutuhkan sangat besar. Sebagai pendukung, penambahan jumlah PPL didaerah juga harus ditingkatkan untuk mempercepat adopsi teknologi sekaligus untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani yang ada.

16.12 Rencana Aksi

Salah satu faktor yang sangat penting dalam mensukseskan program keanekaragaman pangan adalah melaksanakan *product development* yang memiliki sifat sangat praktis, tersedia dalam segala ukuran, kalau digunakan tidak ada sisanya dan mudah diperoleh. Bentuk makanan yang siap olah dan siap santap merupakan pilihan yang terbaik (Baharsyah, 1994).

Aneka umbi-umbian seperti ubikayu dan ubi rambat mempunyai prospe yang cukup luas untuk dikembangkan sebagai substitusi beras dan untuk diolah menjadi makanan bergengsi. Kegiatan ini memerlukan dukungan pengembangan teknologi proses dan pengolahan serta strategi pemasaran yang baik untuk mengubah *image* pangan inferior menjadi pangan normal bahkan superior. Upay peningkatan nilai tambah melalui agroindustri, selain meningkatkan pendapata juga berperan dalam penyediaan pangan yang beragam dan bermutu. Aspe keamanan, mutu dan keragaman merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara cukup, merata dan terjangkau (Rachman dan Ariani, 2002).

Selera masyarakat terhadap pangan berubah seiring dengan semakin maraknya jenis pangan olahan yang siap saji dan praktis, serta mudah diperoleh. Secar tradisional pola makan masyarakat Indonesia berbeda-beda. Pola keanekaragaman pangan juga dapat diwujudkan sesuai dengan kekayaan keanekaragaman haya yang dimiliki (Menteri Negara Riset dan Teknologi, 2000). Dalam PP No. 6 tahun 2002 juga disebutkan bahwa pengembangan pangan dilakukan dengan mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan.

Prospek industri pangan di Indonesia cukup cerah karena tersediany sumberdaya alam yang melimpah. Pengembangan industri sebaiknya memanfaatkan bahan baku dalam negeri dan menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi terutama produk siap saji, praktis dan memperhatikan masalah mutu (Lukmito, 2004). Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah harga produk terjangkau, lokasi dekat dengan konsumen, tempat berbelanja yang nyaman dan penyajiannya yang baik (Ibrahim, 1997). Salah satu landasan dalam pengelolaan agribisnis adalah mempertemukan kebutuhan konsumen dengan sumberdaya yang tersedia, dalam hal ini untuk menentukan jenis produk yang harus dihasilkan cara pengelolaan sampai pemasarannya (Nainggolan, 1997).

Kegiatan agroindustri yang merupakan bagian integral dari sektor pertanian

mempunyai kontribusi penting dalam proses industrialisasi terutama di wilayah pedesaan. Efek agroindustri tidak hanya mentransformasikan produk primer ke produk olahan tetapi juga budaya kerja dari agraris tradisional yang menciptakan nilai tambah rendah menjadi budaya kerja industrial modern yang menciptakan nilai tambah tinggi (Suryana, 2004). Kebijakan pembangunan agroindustri antara lain kebijakan investasi, teknologi dan lokasi agroindustri harus mendapat pertimbangan utama (Yusdja dan Iqbal, 2002).

Pada tahun 2002, total industri pangan di Indonesia adalah 843.334 buah. Dari sejumlah tersebut, sebagian besar industri rumah tangga (93,6%), kemudian diikuti dengan industri kecil (5,9%) dan industri skala besar/ menengah (GAPMMI, 2004). Sejauh ini perhatian pengusaha terhadap potensi pangan tradisional masih kurang (Nainggolan, 2004).

Melalui pengembangan agroindustri pangan di pedesaan yang menggunakan bahan baku pangan lokal diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah pangan dan jenis produk pangan yang tersedia di pasar lebih beragam, yang pada gilirannya akan berdampak pada keanekaragaman produksi dan konsumsi pangan. Selain itu, adanya pengembangan agroindustri pangan juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan petani serta berkembangnya perekonomian di pedesaan secara luas dan menghemat devisa negara.

Penelitian ini bertujuan :menganalisis perkembangan produksi dan konsumsi, bentuk-bentuk bahan dan produk pangan olahan ketersediaan dan kebutuhan teknologi pengolahan, sintesis peluang, kendala, dan kebijakan pengembangan agroindustri di pedesaan berbasis ubikayu.

Target

Target program pengolahan dan pemasaran hasil pertanian komoditas ubi kayu terutama ke arah produk makanan dalam hal ini tepung, yakni menargetkan produksi 600.000 ton/tahun pada tahun 2014.

Produksi tepung tersebut diharapkan berasal dari paling tidak 10 industri tepung yang difasilitasi oleh pemerintah

Selain itu juga untuk mencukupi kebutuhan pati olahan (dalam bentuk *starch*) dan biofuel.

Pengembangan industri Ubi Kayu di daerah sentra utama tetap dipertahankan dan menuju intensifikasi dengan penggunaan bibit unggul

(dengan produktivitas diatas 25 ton/ha) dan modernisasi.

16.12.1 Sasaran Pengembangan

Rencana Jangka Menengah (2011-2014)

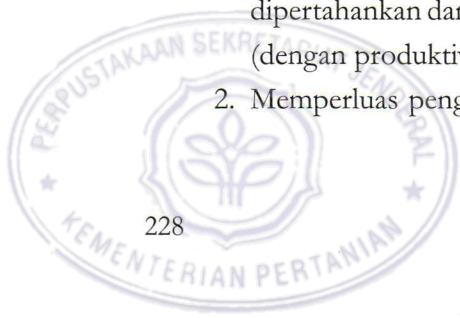
- Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku;
- Pengembangan Industri Tepung Mocaf dan Revitalisasi industri tapioka skala rakyat;
- Mengembangkan diversifikasi produk industri berbasis ubi kayu;
- Pemetaan potensi pengolahan ubi kayu terintegrasi;

Tabel 16.29. Indikator Penumbuhan Industri Tepung Berbasis Ubi Kayu 2012-2014 (Akumulasi)

Aspek Produksi		2012	2013	2014
	Cassava flour (50% ubi kayu panen)	150,000	450,000	600,000
	Ubi Kayu Panen (kg)	300,000	900,000	1,200,000
	Produktivitas (kg/ha)	20	20	20
	Luas Panen (ha)	15,000	45,000	60,000
50%	Jatim (ha) = 2 sentra	7,500	22,500	30,000
20%	Jateng (ha) = 1 sentra	3,000	9,000	12,000
20%	Jabar (ha) = 1 sentra	3,000	9,000	12,000
10%	Banten (ha) = 1 sentra	1,500	4,500	6,000
100%		15,000	45,000	60,000
Aspek Pasar				
70%	INDUSTRI PANGAN MODERN (ton)	105,000	315,000	420,000
30%	INDUSTRI PANGAN TRD (ton)	45,000	135,000	180,000
100%		150,000	450,000	600,000

Rencana Jangka panjang 2015 – 2025

1. Pengembangan industri Ubi Kayu di daerah sentra utama teta dipertahankan dan menuju intensifikasi dengan penggunaan bibit unggul (dengan produktivitas diatas 25 ton/ha) dan modernisasi.
2. Memperluas pengembangan produk akhir ubi kayu untuk mendukung



ketahanan pangan dan sumber energi terbarukan;

3. Terbangunnya pengolahan ubi kayu skala rakyat yang terintegrasi;
4. Fasilitasi kemitraan industri hilir ubi kayu dan industri rakyat;
5. Peningkatan industri berwawasan lingkungan.
6. Fasilitasi Investasi Agroindustri Berbasis Ubi Kayu skala besar di Luar Jawa

Rencana pelaksanaan kegiatan investasi dalam mendukung roadmap tsb;

- Memperkuat industri Mocaf yang telah berkembang di Jawa Timur dan menggandakan di tempat lain agar petani di tingkat *on farm* dapat menjadi pengolah ubi kayu menjadi cassava chip;
- Memfasilitasi penguatan GAPOKTAN, Asosiasi Petani Ubi Kayu, Pengolah Ubi Kayu dan melakukan hubungan saling menguntungkan dengan industri besar (makanan, pakan ternak, biofuel, dan eksportir)

16.12.2. Rekomendasi utk pengembangan investasi

1. Industri tepung MOCAF perlu didukung dengan sosialisasi SNI MOCAF agar tahap komersialisasinya dapat berkembang secara mantap, sebagaimana penetapan SNI bagi tepung tapioka;
2. Jaminan penyerapan dari industri hilir perlu diikat dengan kontrak yang saling mengikat, agar tidak terjadi *market failure* yang merugikan petani atau pengolahan rakyat;
3. Peningkatan kualitas tepung cassava buatan industri rakyat agar kualitasnya sama dengan *tepung cassava* yang diimport oleh industri besar dalam negeri (seperti produsen mie instant);



Tabel 16.30. Kerangka Perencanaan Jangka Menengah dan Panjang Pengembangan Investasi Ubi Kayu

Sektor Inti	Sektor Penunjang	Sektor Terkait
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Ubi Kayu	Penyediaan Bibit Unggul Penyediaan Pupuk Penyediaan Lahan	Industri Besar Tepung Industri Makanan Ringan Industri Berbasis Pati Industri Pakan Ternak
Sasaran		
<p>Jangka Menengah (2011-2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku; • Pengembangan Industri Tepung Mocaf dan Revitalisasi industri tapioka skala rakyat; • Mengembangkan diversifikasi produk industri berbasis ubi kayu; • Pemetaan potensi pengolahan ubi kayu terintegrasi; 		<p>Rencana Jangka panjang (2015 – 2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri Ubi Kayu di daerah sentra utama tetap dipertahankan dan menuju intensifikasi dengan penggunaan bibit unggul (dengan produktivitas diatas 25 ton/ha) dan modernisasi. • Memperluas pengembangan produk akhir ubi kayu untuk mendukung ketahanan pangan dan sumber energi terbarukan; • Terbangunnya pengolahan ubi kayu skala rakyat yang terintegrasi; • Fasilitasi kemitraan industri hilir ubi kayu dan industri rakyat; • Peningkatan industri berwawasan lingkungan. • Fasilitasi Investasi Agroindustri Berbasis Ubi Kayu skala besar di Luar Jawa
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan sentra agroindustri yang telah berkembang dan menggandakan di tempat lain agar petani di tingkat on farm dapat menjadi pengolah ubi kayu menjadi cassava chip; • Mengembangkan kapasitas kelembagaan GAPOKTAN, Asosiasi Petani Ubi Kayu, Pengolah Ubi Kayu dan melakukan hubungan saling menguntungkan dengan industri besar (makanan, pakan ternak , biofuel, dan ekspor); • Memfasilitasi kerjasama investasi dengan dukungan Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta dan Perbankan 		



Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2012 – 2014)

- a. Peningkatan mutu agroidustri mocaf dan tapioka;
- b. Diversifikasi produk berbasis ubi kayu(mocal, tiwul dan cassava chips);
- c. Pengembangan pengolahan ubi kayu terintegrasi;
- d. Meningkatkan kompetensi SDM;
- e. Mendorong pemanfaatan tepung mocaf sebagai substirusi pangan;
- f. Promosi investasi;
- g. Pengembangan industri mesin peralatan;

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2015– 2025)

- a. Peningkatan Pemakaian bibit unggul ubi kayu
- b. Pengembangan Sentra Produksi Tepung berbasis Ubi Kayu
- c. Fasilitasi pendirian pengolahan Mocaf skala 1.000 ton
- d. Pengembangan pasar tepung



Daftar Pustaka

- Triarsono, D.S. 2011. Dari Pertanian ke Industri. Analisis Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Regional. IPB Press. Bogor.
- Wynne, Stuart R. 2003. Economic Development: theory and practice for a divided world. Prentice Hall. New Jersey.
- Yusuf, Bungaran. Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Jakarta: Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, 1998.
- Yodanis, Michael P. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Zuhri, Sa'id dan A. Harizt Intan, 1998. Reorientasi Pembangunan Ekonomi Reorientasi Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Reformasi : Indonesia dalam Era Reformasi : Peranan Sektor Agribisnis dan Peranan Sektor Agribisnis dan Agroindustri. Majalah Usahawan No. 10 Tahun XXVII Oktober 1998.
- Zuhri, Sa'id, 2000. Peluang dan Prospek Usaha di Bidang Agribisnis. Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Zuhri, Al Rasjid, 2003. Materi Kuliah Masalah Khusus Usahatani. Bidang Kajian Umum Ilmu Ekonomi Perusahaan Pertanian Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Zuhri, P. 1995. Industrialisasi Pertanian Sebagai Strategi Agribisnis dan Pembangunan Pertanian dalam Era Globalisasi. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti.
- Zuhri, Amri. 2011. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Berbasis Pedesaan. Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kendari.



BUNGA RAMPAI:

NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN

Buku "Bunga Rampai: Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian" ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai sumber, baik penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen PPHP) maupun tulisan-tulisan lain yang dipublikasikan oleh Ditjen PPHP, seperti sambutan oleh Direktur Jenderal PPHP maupun tulisan-tulisan lepas lainnya. Memangnya tidaklah mudah menggambarkan secara lengkap proses peningkatan nilai tambah dan daya saing serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ditjen PPHP melalui buku kecil

Namun harapan kami, masyarakat umum serta seluruh penggiat pertanian yang berkepentingan dalam pembangunan pertanian dapat memperoleh gambaran, proses yang dilakukan oleh Ditjen PPHP dalam memberikan nilai tambah produk pertanian agar berdaya saing di pasar, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani sebagai pelaku utama proses pertanian

Buku ini berisikan tentang pentingnya peranan Ditjen PPHP dan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PPHP dalam pemberian nilai tambah dan daya saing produk pertanian baik yang menjadi tupoksi langsung Ditjen PPHP maupun kegiatan untuk mendukung Direktorat Jenderal lainnya di lingkup Kementerian Pertanian

